

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

MEMPERKOKOH EKSISTENSI MEMPERLUAS KONTRIBUSI

Antologi Tulisan Para Guru Besar
Menyambut UIN SU



Editor: **Hasan Asari**

iaipress

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

Memperkokoh Eksistensi,
Memperluas Kontribusi

Editor:
Hasan Asari

*Antologi Tulisan Para Guru Besar
Menyambut UIN SU*

ia:inpress

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi

Editor: Hasan Asari

Copyright © 2015, Pada Editor
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

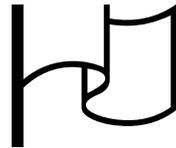
PENERBIT IAIN PRESS
Jalan Willem Iskandar, Pasar V
Medan Estate - Medan, 20371
Telp. (061)6622925 Fax. (061)6615683
E-mail: iainpress@gmail.com

Cetakan pertama: November 2015

ISBN 978-979-3020-33-4

Dicetak oleh:
Perdana Mulya Sarana
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756
E-mail: asrulmedan@gmail.com
Contact person: 08126516306

KATA PENGANTAR



Dalam setiap masa dari sejarah panjang umat Islam, selalu saja ada perkembangan terkait aktivitas pendidikan. Untuk konteks Indonesia kontemporer, di antara perkembangan yang sangat menarik adalah pengenalan satu lembaga baru perguruan tinggi, yakni Universitas Islam Negeri (UIN). Gagasan mengenai UIN mulai diwacanakan pada penghujung abad ke-20 dan terus semakin lantang pada awal abad ke-21. Upaya-upaya merealisasikan gagasan tersebut mendapatkan momentum awal ketika pada 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi beralih status menjadi UIN. Sejak itu beberapa IAIN lain menyusul beralih status menjadi universitas. Jumlah UIN telah mencapai sebelas, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang menetapkan alih status Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sejatinya, proses alih status dari institut menjadi universitas ini adalah kelanjutan dari wacana yang telah lama berkembang tentang islamisasi dan integrasi ilmu pengetahuan. Berdasarkan peraturan kependidikan sebuah institut hanya diberikan hak untuk melakukan pengembangan satu rumpun ilmu pengetahuan saja. Keterbatasan mandat sebuah institut tersebut dipandang tidak dapat mengakomodasi prinsip dasar ajaran Islam tentang kesatuan dan integritas ilmu pengetahuan. Selanjutnya, keterbatasan tersebut bermuara pada sempitnya ruang kontribusi sosial sebuah institut. Karena itulah, universitas diperlukan sebagai wadah yang benar-benar memadai bagi pengupayaan integrasi ilmu pengetahuan dan memperluas ruang kontribusi. Melalui mandat yang tak terbatas, sebuah eksperimen integrasi ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan secara optimal. Sebab dengan integrasi ilmu pengetahuan, kontribusi umat Islam terhadap pengembangan peradaban dan kemanusiaan akan dapat berjalan secara optimal. Hanya dengan cara seperti itu idealisme Islam sebagai agama yang sempurna dan komprehensif dapat terealisasi.

Buku antologi ini diterbitkan sebagai sebuah bentuk apresiasi—atau ‘kado’ dalam bahasa yang lebih santai—atas kelahiran Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara (UIN SU). Para profesor secara khusus diminta untuk menyumbangkan tulisan dalam rangka menyambut lahirnya UIN SU. Peralihan status IAIN SU menjadi UIN SU adalah sebuah perkembangan historis yang sangat penting, dan karenanya layak diabadikan dengan sebuah apresiasi. Karena berasal dari para profesor sebagai sebuah kelompok akademik, tampaknya, buku adalah pilihan kado yang paling tepat. Tepat dari sudut substansi karena yang dirayakan adalah kelahiran sebuah universitas, tempat mengembangkan ilmu pengetahuan. Tepat dari sudut daya tahan, karena buku tak mengenal tanggal kadaluarsa.

Dalam antologi ini, artikel-artikel sumbangan para profesor tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok gagasan. *Pertama*, kelompok artikel yang membahas aneka aspek epistemologis dan metode pengkajian. Di sini dijelaskan dasar-dasar pergeseran epistemologi dan perkembangan metodologi pengkajian yang sepatutnya mengiringi perubahan status menjadi universitas. *Kedua*, kelompok artikel yang berupaya memetakan peranan masa depan UIN SU dibarengi aneka petuah bagaimana memperjuangkan pencapaiannya. *Ketiga*, artikel-artikel yang mengandung tinjauan kesejarahan dan menyajikan konteks bagaimana lembaga pendidikan tinggi Islam telah mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga mencapai kondisi sekarang, yakni lahirnya UIN.

Sesuai dengan keragaman kepakaran para profesor di lingkungan UIN SU, artikel-artikel yang ada dalam antologi ini juga ditulis dengan aneka perspektif. Begitupun, jika disimak dengan teliti, akan tampak bahwa seluruh artikel mempunyai sehelai benang merah yang kuat. Benang merah itu adalah bahwa semua menyiratkan kebahagiaan atas terwujudnya alih status menjadi universitas; bahwa semua memberikan dukungan dan menyiratkan keinginan berkontribusi di dalam pengembangan UIN SU; bahwa semua memiliki harapan dan keyakinan akan masa depan UIN SU yang cerah; bahwa semua meyakini akan meningkatnya kontribusi UIN SU terhadap pengembangan umat, bangsa dan negara di masa mendatang.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dihaturkan kepada para kontributor dan segenap pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan buku ini. Akhirnya antologi ini dihantarkan ke hadapan khalayak pembaca, sembari menunggu tegur sapa dan koreksi untuk penyempurnaan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. *Amin*.

Medan, Februari 2015

Editor

HASAN ASARI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAGIAN PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN: PARADIGMA KEILMUAN & METODE PENGKAJIAN	1
1. Prof. Dr. Nur A. Fadhillubis, MA, “Integration of Knowledge and Learning: The Experience of UIN SU Medan”	3
2. Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, “Integrasi Ilmu dalam Hadis”	16
3. Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, MA, “Paradigma Baru Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam: Aspek Kelembagaan dan Kurikulum”	34
4. Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, “Transformasi ke UIN SU: Upaya Restrukturisasi dan Reorganisasi Bidang Keilmuan” ...	46
5. Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag., “ <i>Inter-Method</i> (Metode Dua Arah): Metode Baru Studi Islam di UIN Sumatera Utara”	57
6. Prof. Dr. H. Lahmuddin, M.Ed., “Perkembangan Bimbingan Konseling dari Masa ke Masa”	71
7. Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, M.Ag., “Prospek Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Suatu Kajian Era Reformasi Dasawarsa Ketiga”	91

BAGIAN KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN: PROYEKSI TENTANG PERANAN MASA DEPAN	109
8. Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA, “Perkembangan Pemikiran dalam Islam: Kiprah UIN SU dalam Upaya Pemberdayaan Nilai”	111

9. Prof. Dr. H. Ilhamuddin, MA, “Prospek dan Potensi Kontribusi Perubahan IAIN SU Medan Menjadi UIN SU bagi Peradaban: Perspektif Ilmu Kalam”	125
10. Prof. Dr. H. Amroeni, M.Ag., “Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Menuju Pusat Peradaban Dunia Islam”	144
11. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA, “Universitas Islam sebagai Pusat Pembaharuan”	158
12. Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA, “ <i>Ummatan Wahidah</i> dalam Perspektif Dakwah”	194
13. Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si., “Arah Pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara”	203

BAGIAN KETIGA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN: REFLEKSI DAN KONTEKSTUALISASI KESEJARAHAN	213
14. Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA, “Dinamika Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: Dari Sekolah Tinggi ke Universitas” .	215
15. Prof. Dr. Hasan Asari, MA, “Lembaga Pendidikan Tinggi Islam: Refleksi Historis Menyambut UIN SU”	232
16. Prof. Dr. Abdul Mukti, MA, “Konstruksi Sistem Pendidikan Tinggi Islam Pada Masa Dinasti Saljuq dan Aktualisasinya di Indonesia”	250
BIBLIOGRAFI	263
INDEKS	280



**BAGIAN
PERTAMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN:
PARADIGMA KEILMUAN &
METODE PENGGKAJIAN**

INTEGRATION OF KNOWLEDGE AND LEARNING: The Experience of UIN SU Medan

Nur Ahmad Fadhil Lubis

Profesor Ilmu Filsafat
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SU

A. Introduction

Among post-colonial countries, the Indonesian education experience is one of the most distinctive. The lengthy Dutch colonial rule, and the brief Japanese occupation, has left many legacies in the current Indonesian education system. One of these legacies is the dichotomic feature of the system, in which educational institutions from the earliest (pre-school) to the latest (post-graduate school), are divided into ‘national’ and ‘religious’¹ categories. From a historical standpoint, the national institutions were usually founded by ‘Western-educated’ or ‘Western-influenced’ indigenous figures, such as the *Taman Siswa* schools founded by Indonesian education ‘father’, Ki Hajar Dewantara.

In the meantime, the religious institutions were usually founded or pioneered by ‘Middle-Eastern-educated’ or ‘Middle-Eastern-influenced’ indigenous figures, such as the *Pesantren*² *Gontor* founded by the *Trimurti*³ Imam Zarkasyi, Ahmad Sahal and Zainuddin Fananie. Straddling between these schools and pesantrens is the *madrrasah*, usually translated as ‘Islamic school’, which as

¹ ‘Religious’ here refers to ‘Islamic’, as ‘Christian’, ‘Buddhist’ or other religious educational institutions are beyond the scope of this paper.

² *Pesantren*, often translated as Islamic boarding school, usually offers secondary education, with a select few offering primary and tertiary education. *Pesantren* Gontor is an exception for being ‘independently’ managed, as most pesantrens are managed by the largest Indonesian mass-organization, Nahdlatul Ulama.

³ *Trimurti* means the three strengths of the God, according to Hindu theology. In this case, the *Trimurti* is the ‘nickname’ given to the three Gontor founders, who are actually blood brothers, raised by their father, Santosa Anom Besari, who was the first founder of Gontor.

the name suggests, is a school⁴ with Islamic characteristic. There are few state-managed madrasahs as most of them are privately-managed including those by the second largest Indonesian mass-organization, Muhammadiyah.⁵ After the *Reformasi* in 1998, a new phenomenon can be discerned in the Indonesian education system. Affecting mostly the rising Indonesian middle class, who wish their children to possess the best of ‘East’ and ‘West’, this phenomenon is usually known as ‘hybrid school’, in which ‘modern’ curriculum is taught under a ‘traditional’ (*pesantren* – boarding school) environment.

The dichotomy above is also reflected in terms of state administration. In general, the national institutions are managed by the Ministry of Education (MOE)⁶ while the religious institutions are managed by the Ministry of Religious Affairs (MORA). However, a detailed observation into the Indonesian education system from the state administration point of view may result in the perception that the system is not only ‘dichotomic’, but ‘trichotomic’. The three categories in which the Indonesian education institutions divided into are: 1) ‘National and general’ education – managed by the MOE; 2) ‘religious’ education – managed by the MORA; 3) ‘National and specialized’ education – managed by the respective ministries. The third category includes polytechnics managed by the Ministry of Health, academies managed by the Ministry of Tourism (now Ministry of Tourism and Creative Economy), and a university managed by the Ministry of Defence.⁷ Generally, educational institutions at the primary and secondary levels are usually managed either by MOE or MORA, while those at the tertiary level are usually managed by either MOE or MORA or

⁴ Thus it is to be noted that for Indonesian Islamic primary and secondary educational institutions, there are at least three types: *sekolah* (school), *madrasah* (school with Islamic characteristic), and *pesantren* (Islamic boarding school).

⁵ There are also madrasahs managed by the third largest Indonesian Islamic mass-organization, the Medan-founded Alwashliyah.

⁶ Under the current government administration headed by President Jokowi, the Ministry of Education has been split into two, in which one ministry manages primary and secondary education as well as culture, named the Ministry of Culture, Primary and Secondary Education (*Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah*), while the other manages higher education, research, and technology, named the Ministry of Research, Technology, and Higher Education (*Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi*). The split, reportedly proposed by the former, and current, Indonesian Vice-President, Jusuf Kalla, has resulted in a polemic among Indonesian intellectuals, as can be seen in the opinion pages of Indonesian newspapers. See for example, Daoed Joesoef, “Misi Perguruan Tinggi Kita”, *Kompas*, 18 February 2014; Azyumardi Azra, “Kontroversi Kemendikti-Ristek”, *Kompas*, 26 February 2014.

⁷ In Indonesian, the ministries mentioned are *Kementerian Kesehatan* (Ministry of Health), *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* (Ministry of Tourism and Creative Economy), and *Kementerian Pertahanan* (Ministry of Defense).

other relevant ministries. However, most education related matters often have to be coordinated with the MOE.⁸

B. Indonesian Islamic University: Past and Present

The Indonesian founding fathers realized just after independence that the most important asset a country can have is an educated citizenry. Before independence, the imperial Dutch were content to allow the native Indonesians to be educated mostly up to secondary level, with the main purpose of producing low-ranking bureaucrats to help manage the colonized, sprawling archipelago. Only a select few were allowed to continue up to tertiary level, and that too only at a few specialized institutions.⁹ Thus it can be imagined the great need that the pioneers of the Indonesian nation saw in creating reliable, ‘excellent’ tertiary institutions. The ‘nationalist’ pioneers thus founded the University of Indonesia (*Universitas Indonesia*) in Jakarta and the University of Gajah Mada (*Universitas Gajah Mada*) in Yogyakarta, which led the ‘Islamist’ pioneers to found their own tertiary institutions: the University Islam of Indonesia (*Universitas Islam Indonesia*) in Yogyakarta and the State Institute for Islamic Studies (*Institut Agama Islam Negeri - IAIN*) in Jakarta.¹⁰ In due course, the ‘national’ and ‘Islamic’ tertiary institutions soon spread to other major Indonesian cities, showing the unique character of Indonesian education system.¹¹

⁸ At the tertiary level for example, academics who wish to be appointed as full professors, no matter their affiliate ministries, must pass through the approval of officials at DIKTI (*Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi*—Directorate General of Higher Education), now a sub-office of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education.

⁹ An example is STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* - school for the training of native physicians) in Batavia (now Jakarta), which trained Sutomo, who found *Boedi Oetomo* (Prime Philosophy), the Javanese ‘nationalist’ organization, along with his fellow school mates. Another example is the *Technische Hogeschool* (Technical College) in Bandung, the precursor to Bandung Institute of Technology (*Institut Teknologi Bandung*—ITB), which trained Soekarno, the first Indonesian President. Some Indonesian natives who can afford it chose to be educated overseas, mainly in Dutch universities, such as the first Indonesian Vice-President, Mohammad Hatta, an alumnus of the Rotterdam School of Commerce (currently Erasmus University Rotterdam).

¹⁰ It must be noted that some ‘nationalist’ pioneers were ‘Islamists’ and vice versa. Indeed, Indonesia would not have gained independence had all pioneers, no matter their ideology, did not manage to put their ideological differences aside and pursued the singular aim of independence.

¹¹ The ‘national’ tertiary institutions can be divided into two groups based on their ‘curriculum’: ‘general’ (*umum*) or ‘educational’ (*pendidikan*). Hence, In many major cities in Indonesia, it is common to find at least three state-sponsored higher education institutions, one for ‘general’ studies, one for ‘education’ studies, and one for ‘religious’ studies. For example in the Greater Jakarta Area, one could find Universitas Indonesia (general studies), Universitas Negeri Jakarta (education studies), and Universitas Islam Negeri Jakarta/

In the beginning, the founding of IAIN was intended to supply officials to work in the fledgling MORA and its related institutions.¹² However, in the 1990s, at a time when the longest-ruling Indonesian president Soeharto had to appease a significant number of middle-class Indonesian Muslim to maintain power,¹³ a number of Indonesian Muslim scholarly elites argued for an Islam that is more in tune with Indonesian characteristics. Gus Dur, for example, the prominent itinerant NU intellectual (formal tertiary education in Egypt and other parts of Middle East, then autodidact education in the European countries of Netherlands, Germany, and France), who later become Indonesia's fourth president, proposed the idea of 'native Islam' (*pribumisasi* Islam), while Cak Nur (Nurcholish Madjid), the Western-educated (Ph.D from the University of Chicago), proposed the idea of 'Indonesian Islam'. Such contextualization of Islam was also evident in the idea of '*fikih mazhab Indonesia*' (Indonesian Islamic legal school of thought) proposed by the prominent Indonesian Muslim ulama Hasbi As-Shiddieqy. At the tertiary education institution level, all these efforts seemed to have culminated in the idea of Islamization or integration of knowledge, which has become well-spread after a few Islamic Education conferences in the 1980s, first held in Mecca and then in other parts of Muslim world. The conferences rode on a strong Islamic revival current resulted from the powerful Muslim economic position after the oil boom of the 1970s.

Later in Indonesia, a concerted effort at the national and regional level was conducted by Muslim scholarly elites to increase the status of IAINs throughout Indonesia. The increase in status first started with the concept of a 'wider mandate', in which IAINs could begin to teach 'general' (*umum*) subjects such as English and Mathematics. However, this wider mandate was deemed insufficient to keep with the changing times, as rapid development in science and technology, as well as the rapid social and environmental changes accompanying it, necessitates more responsive IAINs. Hence, a successful argument was made that these Islamic institutes should be transformed into Islamic universities. In the early 2000s, two IAINs in Jakarta and Yogyakarta respectively were transformed into UINs (*Universitas Islam Negeri*-State

Syarif Hidayatullah (religious studies) respectively. In Yogyakarta, one could find Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, and Universitas Islam Negeri Yogyakarta/Sunan Kalijaga. In Medan, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, and Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.

¹² Other reasons include the rapid development of secondary educational institutions such as *pesantren* and *madrasah*, as well as the urgent need for a large supply of religious teachers in schools,

¹³ Other evidence of this appeasement includes the creation of Association of Indonesian Muslim Intellectuals (*Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia*-ICMI) headed by Soeharto's protégé, B.J. Habibie, and the creation of the first national Islamic bank, *Bank Muamalat*.

Islamic University), namely the UIN Syarif Hidayatullah in Jakarta and UIN Sunan Kalijaga in Yogyakarta.¹⁴ Several more IAINs followed suit in the same decade, such as UIN Sunan Gunung Jati in Bandung and UIN Maulana Malik Ibrahim in Malang. Subsequently, among the latest IAINs to be transformed into UINs in 2014 included IAIN Sumatera Utara (IAIN SU), which then legally changed its name into UIN Sumatera Utara (UIN SU).¹⁵

Two decades earlier, in 1994, a Postgraduate Program was launched in IAIN SU, initially only offering the study program *Dirasah Islamiyah* at the Masters level. The Postgraduate Program experienced a rapid growth, its initial single study program was expanded into 6 more study programs at the Masters level (*Islamic Thought*, *Islamic Education*, *Islamic Law*, *Islamic Communication*, *Islamic Economics*, and *Tafsir Hadis*), and 4 study programs at the Doctoral Level (*Islamic Law*, *Islamic Education*, *Religion and Philosophy*, and *Islamic Economics*). At the administrative side, several technical implementing units were established, such as (1) Research Centre; (2) Societal Service Unit; (3) Library; (4) Computer Centre; (5) Language Centre; and (6) Academic Quality Assurance Unit. In addition, to channel the academic energy and societal activism of IAIN SU lecturers and staff, numerous non-structural centers were established, such as (1) Centre for Women Studies; (2) Centre for Information and Counseling of HIV/AIDS *LatHIVa*; (3) Board for Islamic Propagation and Development of Human Resources; (4) Service Centre for Guidance and Counseling; (5) Centre for Job Information and Independent Work; (6) Centre for Demography and Environment; (7) Forum for Islamic Economics and Banking Research; (8) IAIN Press; (9) Centre for Psychology Service; (10) Centre for Family Counseling.

The change in name from IAIN SU (institute) to UIN SU (university) was necessary as the Indonesian legal and bureaucratic structure recognize these institutional structures differently. A university is as an institution which could administer education in a variety of knowledge clusters, while an institute could only administer education in one knowledge cluster.¹⁶ IAIN SU was previously

¹⁴ Both institutions are also known as UIN Jakarta (UINJ) and UIN Yogyakarta (UINY) respectively.

¹⁵ Hence, IAIN SU has undergone 2 transformations. The first, from being only a branch of IAIN Ar-Raniry Banda Aceh in the form of *Syariah* faculty and a branch of IAIN Imam Bonjol Padang in the form of *Tarbiyah* and *Ushuluddin* faculty to a formal institute in the form of IAIN SU on 19 November 1973. Until the late 80s, IAIN SU in Medan only had four faculties: *Tarbiyah* (Islamic Education), *Syariah* (Islamic Law), *Dakwah* (Islamic Propagation), and *Ushuluddin* (Islamic Thought).. The second transformation was from an institute to a university (IAIN SU to UIN SU) in late 2014.

¹⁶ Another important consequence of the name change is budgetary; a larger budget is allocated to a university compared to an institute.

limited to administer knowledge clusters deemed as religious/Islamic, as evidenced by the name of its 4 faculties then: *Tarbiyah* (Islamic Education), *Syariah* (Islamic Law), *Dakwah* (Islamic Propagation), *Ushuluddin* (Islamic Thought). Upon transformation, IAIN SU, now UIN SU, is allowed to administer ‘integrated’ knowledge clusters, as reflected in the names of its current faculties, including but not limited to: *Tarbiyah dan Ilmu Keguruan* (Islamic Education and Teacher Training), *Dakwah dan Ilmu Komunikasi* (Islamic Propagation and Communication Studies), *Syariah dan Ilmu Hukum* (Islamic Law and Legal Studies), *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Islamic Economics and Business). Other UINs such as UIN Jakarta and UIN Yogyakarta even have faculties administering what is previously considered as ‘general’ knowledge, such as *Kedokteran* (Medicine) and *Sains dan Teknologi* (Science and Technology).

The philosophy behind the above name and structural changes is uniquely Indonesian. Instead of pursuing an ‘Islamization’ of knowledge (*Islamisasi ilmu*) approach done in many other Muslim countries, Indonesia seems to have followed its own policy of ‘knowledgizing Islam’ (*ilmuisasi Islam*).¹⁷ Thus, it seems apt that Indonesian Muslim public intellectuals often use the more neutral term ‘integration of knowledge’ in discourses about these structural changes.¹⁸ A holistic transformation is expected not only on subjects considered as ‘Islamic studies’, but also those considered as ‘general studies’, integrating them in a complementary manner.¹⁹ A way to do this is to introduce the Qur’an and Sunna not only as a separate and compulsory subject in each faculty, but also as part of every subject contained in the faculties.²⁰ An example would be the teaching of Qur’an and Sunna interpretation methodologies in the first university year to every students, and then teaching the values contained in the Qur’an and Sunna relevant to each faculty in subsequent years, as well as highlighting the philosophical and empirical achievements of Muslim

¹⁷ The term *ilmuisasi Islam* (knowledgizing Islam) was first proposed by the Columbia University alumni Kuntowijoyo, in his book *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Islamic Paradigms: Interpretations for Action), published by Mizan in 1991.

¹⁸ See for example the works of Azyumardi Azra and Amin Abdullah, two of the most prominent UIN public intellectuals in Indonesia.

¹⁹ A surface manifestation of this integration can be found in the above faculty names of the newly transformed UINs, which combines previously Arabic terms with Indonesian terms, some of which are derived from English, such as: *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* and *Fakultas Dakwah dan Komunikasi*.

²⁰ See for example the view espoused by Syed Muhammad Naquib Al-Attas in his monograph *Islam and the Philosophy of Science*: “reality is at once both permanence and change, not in the sense that change is permanent, but in this sense that there is something permanent whereby change occurs.” In this sense, the Qur’an and Sunna is the permanent aspect of the curriculum, which change (through selection or other methods) according to the subject being taught or learned.

scholars in theoretical and practical knowledge endeavors during the heights of Islamic civilization,²¹ and current attempts at reviving them by some parties in many parts of the Muslim world.

Today in UIN SU, the above method of integration is indeed a challenge which must be overcome by its *civitas academica*. A majority of its lecturers obtained their postgraduate degrees from Indonesia, with a handful graduating from Middle Eastern and Western Universities. However, it must be noted that those graduating from overseas universities often return to UIN SU and hold important academic and administrative positions, many times becoming leaders in their respective fields. Most, if not almost all these lecturers, did their postgraduate thesis or dissertation in the field of ‘Islamic studies’, no matter whether they graduate from Indonesian or foreign universities. Only a few completed their higher degrees in ‘pure’ scientific fields such as Chemistry and Mathematics. The case is not the same for UIN SU students though, as they come from a variety of educational backgrounds, the number of students from *pesantren* or *madrrasah* (‘Islamic’ educational institutions) being eroded by the number of students who come from *sekolah*²² (‘general’ educational institutions). A rather unfortunate phenomenon is both lecturers and students are only slowly changing their teaching and learning methodologies from rote learning common in post-colonial ‘developing’ countries, including Indonesia, to creative learning²³ used by ‘post-colonializing’ ‘developed’ countries.

C. Indonesian Islamic University: Future

The world today and its inhabitants today faces complex problems such as climate change, financial crisis, natural disasters, political upheavals, ideological violence, and disenfranchised majority or minority, in addition of poverty, violation of human rights, gender inequity, and extremism. A thorough and holistic understanding to solve these problems can only be achieved using an integrative perspective of many scientific disciplines and thought frameworks, especially using lateral or out-of-the box thinking through cooperation among scholars. In addition, other stakeholders, such as the community being impacted by the problems, and the activists helping the community to alleviate them, are involved in the process of solving the problem.

²¹ See the compilation article “*Islam, Knowledge, and Science*”, which can be found on www.islamicweb.com.

²² Literally, *sekolah* means school. UIN students, including UIN SU, now originated from both state (*negeri*) and private (*swasta*) senior high schools.

²³ Creative learning meant here includes critical thinking, historical criticism, and the utilization of varied research methodology.

For current IHEIs, one way to utilize this integrative perspective is through the integration of religious sciences (*‘ulum al-din*) in the traditional sense, Islamic thought (*fikr al-Islami*) produced by Muslim scholars and leaders, and Islamic studies (*dirasat Islamiyah*) in a wider sense, includes the study of Islamic practice reflected in a variety of Islamic cultures subsumed under an Islamic civilization. As such, integration between revealed and acquired knowledge becomes important, especially among the multiple types of rationality which has been developed by Muslim scholars: *bayani*, *burhani*, and *‘irfani*.²⁴ The most current type of integration is between natural sciences, social sciences, and humanities through a transdisciplinary perspective.

Transdisciplinarity is often associated with a perspective, instead of merely an approach. This perspective is used as a research strategy which crosses scientific disciplines for a holistic approach to solve problems involving two or more disciplines, such as research on effective information system for biomedical studies. In Western societies, the use of the perspective can be traced to two different groups. In German-speaking countries, transdisciplinarity refers to the integration of a variety of research and the usage of a special method to relate knowledge and problem solving. When there is no agreement on the main problems of a particular research, the transdisciplinary approach can help discover the most relevant problem and related research question. The first question is about the cause of the current problems and its potential effects in the future (system knowledge). The second is about the values and norms used to formulate the purpose of problem solving (target knowledge). The third is about how a problematic situation can be transformed and improved (transformation knowledge).

That the religion of Islam is not only meant for the Arabs or certain group of people, but is meant for the entire mankind, and even the entire universe and its population, seems to be understood by many. Similarly, that the ideal teaching of Islam practiced by Muslims across time and place seems to vary according to their condition is another acknowledged historical reality. Hence, in addition to its universal and permanent nature, Islam is realized in a variety of environment and culture. In this context, it pays to examine the conceptual foundation and theoretical framework which lately have been connected to the historical Islam: ‘cosmopolitanism’ and ‘cultural hybridity’. Cosmopolitanism means the ideology that the entire humanity is part of the same single community based on a common morality. These

²⁴ *Bayani* rationality is commonly used by the *fiqh* scholars, *burhani* among the philosopher and scientist, while *‘irfani* among the tasawuf practitioners. For further elaboration, see the works of Muhammad ‘Abid al-Jabiri, especially his book *Bunyat al-Aql al-Arabi* (Beirut: Markaz al-Tsaqafi, 1991).

idea seem to be in accordance with the phenomenon of globalization. Thus, what is meant by ‘cosmopolitan Islam’ is an Islam in which all humans are equal following universal principles suitable for all nation, race, and gender. Carol Kersten and several other scholars have concluded that cosmopolitan Islam has existed in the beginning of Islamic civilization, when the Muslim community and culture interact with others such as the Greeks, Persians, and Egyptians.²⁵

Now, such interactions seem to be flourishing again, propelling the emergence of ‘new Muslim intellectuals’ who have inherited the scientific attitude of early Muslim scholars. These intellectuals seem capable to start and continue the struggle for the revival of Islamic civilization in this modern world. Ali Shariati called them ‘*rausyanfikir*’ (enlightened intellectuals), who not only discover findings or present facts but also find truth and measure things as how they are in accordance to the truth. A *rausyanfikir* also does not adhere to the view that science is value-free and neutral, and that theory is separate from practice, but instead becomes actively involved in solving problems of his or her society. A “*fa`il*” (doer) of history, not only its “*maf`ul*” (object or observer), a *rausyanfikir* is close to his or her community to the extent of knowing the community’s struggles and difficulties, needs and wants, devising concepts and tools to alleviate and fulfill them. Shariati’s description or *rausyanfikir* fits intellectuals who engage themselves in transdisciplinary research and practice, facing head-on problems of today’s world with all the available arsenals contained in contemporary knowledge.

The development of knowledge in Western societies after the Renaissance is heavily skewed in favor of positivism. Accepting empirical phenomenon as the main source of truth, Western philosophy of knowledge has been highly sceptical of other sources, such as ‘revelation’ or ‘intuition’. In modern times, oftentimes through colonialism and imperialism, when the Western philosophy of knowledge spread into other societies, such as the ones with Muslim majority population in which revelation or intuition is highly regarded, an imbalance occurs. Muslim societies has never sacrificed the revelatory over the empirical; many of their scholars sophisticatedly divided knowledge into a hierarchy that privileges divine sources of knowledge over non-divine ones. Hence what the transdisciplinary approach elaborated above needs is a utilization of these sources, which in Islamic terms include the *Qur’aniyah* and *kauniyah* manifestations of God’s signs (*ayatullah*).²⁶ These sources can be accessed

²⁵ Carol Kersten, *Cosmopolitans and Heretics: New Muslim Intellectuals and the Study of Islam* (London: Hurst, 2011) and her paper, ‘Islam, Cultural Hybridity and Cosmopolitanism: New Muslim Intellectuals and Globalization,’ *Journal of International and Global Studies*.

²⁶ Asep Usman Ismail, a professor at the Jakarta State Islamic University, stated that

through the following means: reason (*aql*), *bashr*, sense, *fuad*, revelation (*wahy*) and self (*nafs*). The ability to use all these means to access both sources, however, ultimately depends on God, as can be understood in the following verse of the Qur'an: '*fa-alhama-ha fujuura-ha wa-taqwa-ha*' (And inspired it (the soul) what is wrong for it and (what is) right for it).²⁷

The above inspiration is possible because in addition to ontological and epistemological aspects, knowledge has an axiological aspect.²⁸ Viewed from this aspect, all knowledge, and indeed all religion has the purpose of humankind betterment (*limaslahatil ibad*), not merely for humankind pleasure (or hedonism).²⁹ To achieve this purpose, much ink has been spilt to elaborate the theoretical part of knowledge integration, focusing on the three ontological, epistemological, and axiological aspects. However, the practical part of this endeavor has seldom been discussed. To the author's mind, the achievement of the above purpose may only be made possible if not only knowledge is being integrated, but also the people related to knowledge, such as those who teach or study it. In short, scholars or the men or women of knowledge in the fields of science, arts, and the humanities, must work together in harmony.

The integration of knowledge and knowledge practitioners do not mean that scholars or scientists need to embrace Islam as their religion, but means that they need to embrace the values of submission to God.³⁰ Ideally, these values can be manifested in collaboration of knowledge endeavors through a transdisciplinary perspective which seeks to solve particular problems of mankind as has been elaborated previously. In even more practical terms, in the Indonesian context (and most post-colonial developing nations) the graduates of higher education from 'the West' (any American, European, or Australian universities) and 'the East' (any Middle Eastern universities)

ayatullah means the signs that signifies the power or might of God. Popularly classified into two type, the *Qur'aniyah* ayat means the explicit signs of God as can be found in the verses of the Qur'an, while the *kauniyah* ayat means the implicit signs of God as can be found in his creations in the universe (sometimes interpreted as natural law).

²⁷ Quran, Chapter Ash-Shams, verse 8. The South Asian scholar, philosopher, and journalist Sayyid Abul Ala Maududi in his book *Tafhim al-Qur'an (The Meaning of the Qur'an)* interpreted this verse as such: "That Allah after giving the human self powers of the body, sense and mind has not left it uninformed in the world, but has instilled into his unconscious by means of a natural inspiration the distinction between good and evil, right and wrong, and the sense of the good to be good and of the evil to be evil."

²⁸ In Stanford Encyclopedia of Philosophy, axiology "can be thought of as primarily concerned with classifying what things are good, and how good they are."

²⁹ Wikipedia states that hedonism is "a school of thought that argues that pleasure is the primary or most important intrinsic good."

³⁰ The smallcase 'islam' as elaborated by William Chittick in his seminal book 'Vision of Islam' may be relevant here.

need to work together at least in the following three areas: knowledge and culture, research and service, teaching and curriculum. To work in harmony, a hybrid or cosmopolitan culture needs to be developed in the universities.³¹ Such culture will allow the interaction among the universities *civitas academica* who come from a variety of backgrounds: graduates of Western or Middle Eastern universities, graduates of public or religious schools. This interaction again is best fostered through a transdisciplinary perspective in knowledge endeavors.³²

For inspiration, perhaps it is instructive to use two examples of 'hybrid intellectuals' engaging in 'transdisciplinary' knowledge endeavors provided by Carool Kersten.³³ One is the Egyptian scholar, Hassan Hanafi, who "is most renowned for his Heritage and Renewal Project, an ambitious and simultaneous critique of both the Islamic and Western intellectual heritages designed to culminate in what can be regarded as a form of Islamic Liberation Theology". Kersten stated that "Hanafi saw himself as executing what he considered as the third phase of Islamic modernism, initiated by Iqbal's reconstruction of Islamic thinking. The core of this project consisted in what he called a transposition of the traditional Islamic idiom of the Scriptures and Islamic sciences into a vocabulary that was more in tune with the contemporaneous circumstances in which present-day Muslims find themselves." Further, "Hanafi employed a threefold division, distinguishing between the dimensions of historical, eidetic and active consciousness; with historical consciousness

³¹ In her well-received paper, "Cultural Hybridity: New Muslim Intellectuals and the Study of Islam", Carool Kersten elaborated several scholars of the Muslim world who have "solid knowledge of the Islamic heritage with an equally intimate familiarity with developments in the Western human sciences" which "has turned them into cultural hybrids... because they work on the interstices of cultural-religious traditions and academic disciplines, occupying their own distinct third space."

³² Chiara Formichi from the City University of Hong Kong, when reviewing Kersten's book (which expands the arguments of her paper), "Cosmopolitans and heretics: New Muslim intellectuals and the study of Islam", stated that "Thus, Madjid, Hanafi, and Arkoun find themselves in the "liminal cultural hybridity" created by their dedication to applying the knowledge they acquired in Western academe (at the University of Chicago and the Sorbonne) to Islamic methodology, epistemology, and philosophy." In another review, Azyumardi Azra from the Jakarta State Islamic University, stated that "Kersten argues that these three intellectuals have a cosmopolitan point of view as a result of the higher education they achieved, the international relations they had, and the intellectual orientation they demonstrated."

³³ The examples can be found in Kersten's paper and book. However, it is to be noted that these are examples of 'supermen' of knowledge in the Muslim world, a status that few can equal. To circumvent such 'problem of genius', the author is advocating a collaboration between scholars and scientists in the Muslim world who come from varied backgrounds, as mentioned previously, instead of having them transcend their own fields of expertise, something that most times only geniuses can achieve.

referring to the specific cultural-historical setting in which the Islamic teachings were received; while eidetic consciousness establishes generalized principles, which then, by means of the active consciousness, unfold into a liberation or emancipation of mankind”.

The other hybrid intellectual engaging in transdisciplinary endeavor is the French scholar, Mohammed Arkoun, who proposed an alternative research agenda for Islamic Studies under the title Applied Islamology. Kersten stated that “Arkoun introduced his programmatic agenda for Applied Islamology... as a double critique of, on one hand, Islamic thinking or Islamic reason which, in Arkoun’s view, was still locked up in the cultural configuration of Islam’s classical age and for which he coined the term ‘logosphere’... On the other hand, the Western academic specialization he refers to as classical Islamology is a discipline with the same text-based orientation as the classical Islamic legacy it studies.” He followed “a *via negativa*: in order to excavate... Islam’s accumulated exhaustive tradition, researchers would have to address what the text-oriented traditions of Islam’s classical age and the classical Islamology have either ignored, neglected, rejected out of hand, or failed to examine critically... envisaged the investigation of the dialectics between language, history, and thought; a cognitive triangle that had been at work from the revelation of the Qur’an, throughout the earliest Islamic history covering the embryonic Muslim community in Medina, and the formation of the Sunni Caliphate and the Shi’i Imamate”. Arkoun insisted that “Islamology is a practical science, consisting of a variety of levels of analysis: linguistic, historical, psychological, sociological, philosophical, and theological. It will take a team effort of an international collective composed of what Arkoun calls scholars-thinkers (*chercheur-penseurs*) to implement such project.” To this end, he introduced the notion of ‘emerging reason’ which continuously assess critically what he called “the three postures of human thought: (1) the religious posture with its theological, ethical, and in the case of Islam, juridical modes of thinking; (2) the scientific-technological modes of thinking dominating present-day globalization discourse; (3) the rationalist or empiricist philosophical postures still in the grip of the postulates of the modernity of the classical age.”

Currently in UIN SU, a number of endeavors have been undertaken to produce thinkers (and doers) at the level of Hanafi and Arkoun. For the students, there are plans to enable them to live in *mahad* (dormitory) to learn languages, soft skills, and Islamic values. For the lecturers, a significant number of them have been sent to the Netherlands and Germany to participate in Visiting Professor, Doctoral Research, Post-doctoral Program dan Non-Degree Training programs, with the hope of increasing their knowledge, enhance their capacity and skill, enable their access to foreign sources and idea, as well as their participation of international conferences and seminars of the lectures. Special attention

was paid to the improve IAIN SU lecturers' academic research and writing, especially in terms of publication in respected international journals. Memorandums of Understanding (MoU) were also signed with foreign universities to conduct joint research activities, collaborate in joint research and publications, conduct scientific meetings such as seminars, conferences and colloquia, build capacity through exchange programs and short courses, exchange academic data and documentation, as well as use each other's facilities.

D. Conclusion

Universities across South East Asia need to prepare themselves to face the opportunities and challenges brought by today's ever more globalized age, one example being the planned commencement of the ASEAN Economic Community in late 2015. An example of this preparation is the transformation processes experienced by the state Islamic higher education institutions (IHEIS) throughout Indonesia. The State Islamic University of North Sumatra (*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – UIN SU*), being the premier Islamic university in Medan and its surrounding region, have been pursuing its own distinctive approach of 'Islamization of knowledge', in which all knowledge, not just Islamic studies, are being integrated in a transdisciplinary approach. Attempting to make possible the hybrid or cosmopolitan culture necessary to move Indonesian Muslim society forward, UIN SU encourages collaborations between scholars from a variety of backgrounds through cooperation and network building with partner universities and learning institutions all over the world. Its *civitas academica* were sent overseas to participate in seminars, workshops, short-courses, post-doctoral programs, and visiting professorship, to name a few initiatives. Dormitories (*mahad*) are planned to be built for students to learn languages, soft skills, and Islamic values. Through these efforts, UIN SU is aiming to lead the way to a modern Islamic oikumene, in which civilizations can be bridged, justice upheld, and ever-lasting peace attained.

INTEGRASI ILMU DALAM HADIS

Ramli Abdul Wahid

Profesor Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaannya adalah perintah Allah swt. untuk mencari ilmu dan mengangkat derajat kaum yang berilmu. Perintah menuntut ilmu dan mengajarkannya dengan mudah ditemui dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nabi Muhammad saw. menegaskan:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.¹

Artinya: “Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya”.

Lewat hadis ini Nabi saw. menjelaskan aktivitas belajar dan mengajar. Transformasi ilmu dari yang mengetahui kepada yang belum mengetahui membuat pengetahuan tersebar secara luas dan membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Hadis ini menjadi bukti bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. mengajak dan memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkannya demi kebaikan bersama. Sebagaimana hadis lain menegaskan bahwa sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

Dalam Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an, cukup banyak terekam dalam berbagai kitab Hadis yang memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu. Dalam literatur Hadis dijumpai bab khusus mencantumkan hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Dalam *Shahih al-Bukhari* misalnya terdapat 85 bab Hadis mengenai ilmu, 29 bab pada *Shahih Muslim*, 26 bab pada *Sunan Abi Dawud*, 42 bab pada *Sunan at-Tirmizi*, dan 113 bab pada *Sunan Ibnu Majah* berisikan tentang pengobatan, Nabi Muhammad saw. yang memuji ilmu dan penuntut ilmu, mendorong umatnya untuk belajar

¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), jilid 3, h. 108.

dan mengembangkan keilmuan. Dalam penjelasan Hadis tidak dibedakan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nabi saw. bahkan mewajibkan menuntut ilmu sebagaimana hadis Nabi saw. berikut ini:

"لَبُّ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"²

Selanjutnya ditemukan juga sabda Rasulullah saw. yang menjelaskan keutamaan penuntut ilmu yang dijanjikan surga. Nabi Muhammad saw. bersabda:

نَ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أُنْهَاهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الدَّرِّ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ"³

Artinya: Abu ad-Darda' berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah menyediakan baginya jalan-jalan menuju ke surga. Dan sesungguhnya malaikat mengembangkan sayap-sayapnya sebagai tanda rida bagi penuntut ilmu. Sesungguhnya makhluk Allah yang ada di langit dan bumi hingga binatang dan ikan-ikan yang ada di dalam samudera sekalipun memohon ampunan kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Sesungguhnya keutamaan seorang `alim dibandingkan dengan `abid (rajin ibadah) seperti perbandingan bulan purnama dengan bintang di malam hari. Sesungguhnya ulama pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan uang dinar dan dirham. Akan tetapi mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil keberuntungan yang berlimpah."

Selain itu, ditemukan juga secara khusus kemuliaan penuntut ilmu yang meninggalkan tempat tinggalnya. Ketika suatu perbuatan dinisbahkan kepada jalan menuju Allah (*fi sabilillah*), maka perbuatan itu menjadi mulia. Kemuliaan perbuatan menjadikan pelakunya mulia pula. Demikianlah halnya dengan

² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), jilid I, h. 81.

³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jilid II, h. 157.

kemuliaan menuntut ilmu menjadikan kaum berilmu menjadi mulia pula. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ"⁴

Artinya: Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah hingga pulang ke rumahnya"

Dalam hadis lain disebutkan bahwa tanda dekatnya waktu kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan di tengah-tengah umat. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيُظْهَرَ الزُّنَا"⁵

Artinya: dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Di tanda-tanda dekatnya kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, banyaknya minuman keras dan tersebarnya perzinaan."

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa tanda kiamat adalah hilangnya ilmu. Ini kiamat dalam arti umum. Sesungguhnya kiamat dalam arti khusus adalah kehancuran diri seseorang jika ia tidak memiliki ilmu. Ketiadaan ilmu juga membawa kehancuran bagi kehidupan dunia secara umum. Kehancuran ini diperparah dengan semakin langkanya kaum yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Padahal kehadiran ulama menjadi pelita di tengah-tengah umatnya. Dalam sabda Nabi juga dijelaskan bahwa Allah swt. tidak mencabut ilmu secara keseluruhan sekaligus, akan tetapi mencabutnya dengan kepergian ulama. Nabi saw. bersabda:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ

⁴ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid V, h. 29.

⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I, h. 28.

لَعَلَّم بَقْبُضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا
فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا⁶

Artinya: Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari (pikiran) manusia dengan mencabutnya langsung. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga tidak tersisa satupun orang alim. Manusia pun akan mengambil pemimpin-pemimpin jahil. Mereka ditanya, mereka pun menjawab tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.”

Hadis di atas menegaskan urgensi kehadiran ulama sebagai pembawa obor ilmu yang menerangi umat sehingga kepergian ulama adalah musibah terbesar. Sebab, untuk melahirkan ulama membutuhkan waktu yang panjang. Biasanya tidak mudah untuk mendapatkan pengganti ulama. Oleh karena itu, hadis Nabi saw. yang lain secara tegas mewajibkan menuntut ilmu agar ketersediaan ulama di tengah-tengah umat dapat terus terjaga. Dalam pada itu dibutuhkan kaderisasi secara serius untuk memunculkan generasi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmuan yang mumpuni untuk menjawab berbagai problematika kehidupan umat. Justru karena itu pula Nabi saw. mewajibkan menuntut ilmu atas umatnya, sebagaimana pada hadis Ibnu Majah terdahulu.

Kemudian menuntut ilmu sangat tegas pada hadis-hadis di atas. Permisalan yang disebutkan Nabi saw. mengangkat derajat kaum berilmu di atas kaum yang rajin beribadah. Bahkan Nabi saw. menjadikan kaum yang berilmu sebagai pewarisnya. Perintah menuntut ilmu sangat jelas dalam hadis ini sebagai landasan pengembangan keilmuan. Perlu pula dipahami bahwa, tidak ada dikotomisasi keilmuan dan tidak ada pembedaan antara ilmu agama dan ilmu umum.

B. Klasifikasi Ilmu dan Keilmuan Menurut Ulama Klasik

Tidak ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis dikotomisasi ilmu. Keduanya tidak membedakan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Sebab, semua ilmu berasal dari Zat yang Maha Mengetahui Allah swt. Ketika mencermati ayat suci Al-Qur'an, ditemukan redaksi ilmu dengan menggunakan “*alif lam*” (العلم) yang menunjukkan keseluruhan ilmu (المُطْلَقِ الْجَمْعِ) tanpa dikotomisasi. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt.:

“... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”⁷

⁶ *Ibid.*, h. 34.

⁷ QS. al-Mujadalah [58]: 11.

Artinya: “...Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti tentang apa yang kamu kerjakan.”

Keumuman lafaz ilmu pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada setiap umat-Nya untuk menimba ilmu pengetahuan dari mana pun asal ilmu tersebut. Ilmu (hikmah) yang hilang dari umat Islam tersebut merupakan barang berharga yang tercecer dari umat Islam. Sebagaimana hadis Nabi saw. menegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ لَةِ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Perkataan hikmah (ilmu) adalah barang yang hilang (tercecer) dari seorang mukmin, maka di manapun ia menemukannya ia lebih berhak atasnya”

Tidak dipungkiri bahwa sebagian ulama mengklasifikasikan ilmu kepada beberapa bagian. Imam al-Gazali (w. 505/1111) melihat bahwa pembagian ilmu didasari atas urgensi ilmu itu sendiri. Imam al-Gazali mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu fardu kifayah dan fardu ain. Adapun ilmu fardu ain adalah ilmu-ilmu yang wajib setiap individu mengetahuinya untuk menyempurnakan pengamalan agamanya. Ilmu fardu kifayah gugur kewajibannya jika telah ada sekelompok (dalam jumlah yang memadai) yang mewakilinya seperti ilmu teknik dan kedokteran. Pengelompokan ilmu kepada ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini bergulir sampai saat ini sehingga muncul istilah sekolah Arab, yakni sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama saja dan sekolah orang putih, yaitu sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu dunia. Sekarang umum disebut sekolah agama dan sekolah umum. Bahkan ada yang memahami bahwa sekolah umum tidak penting, sekolah agamalah yang penting sebagaimana yang pernah digambarkan Prof. Muchtar Lintang dalam bukunya, *Hikmat al-Fatihah*.

Perlu dipahami bahwa konsep fardu ain dan *fardu kifayah* dalam perspektif Imam al-Gazali tersebut sesungguhnya tidaklah dimaksudkan untuk mendikotomikan ilmu, akan tetapi lebih untuk membangkitkan kesadaran umat Islam yang begitu larutnya dengan kajian ilmu-ilmu eksakta. Di sisi lain, pengembangan tujuan ilmu dan hirarkinya menjadi lebih kuat dengan pendekatan yang dilakukan Imam al-Gazali tersebut, sehingga kombinasi antara keduanya wajib diwujudkan untuk menciptakan pembaharuan pendidikan yang lebih

⁸ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, h. 49.

beradab. Dalam perspektif Imam al-Gazali, pengajaran yang baik itu bukan bersifat *juz'i* (parsial) tapi *kulli* (komprehensif). *Kulli* maksudnya, kurikulum yang membentuk kerangka utuh yang menggabungkan seluruh ilmu agama seperti tauhid, tasawuf, dan fikih. Menggabungkan antara ilmu agama dengan keterampilan duniawi. Tujuan kurikulum ini adalah membentuk mental ilmuwan yang holistik – pakar di bidang ilmu 'aqli sekaligus tidak buta ilmu syar'i. Kekeliruan dalam pendidikan, menurut Al-Attas disebabkan oleh ketimpangan dalam memahami ilmu fardu ain dan fardu kifayah, sehingga menyebabkan kekacauan intelektual.⁹

Menurut Al-Attas, klasifikasi ilmu fardu ain bukanlah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang kaku tertutup. Cakupan fardu ain sangat luas sesuai dengan perkembangan dan tanggung jawab spiritual, sosial dan profesional seseorang. Hal ini berarti bahwa Muslim diwajibkan menguasai ilmu-ilmu yang membantu memperoleh ilmu-ilmu yang lebih tinggi seperti ilmu dan ketrampilan membaca, menulis dan menghitung. Ilmu fardu kifayah dibagi Al-Attas menjadi delapan disiplin ilmu; ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan agama, ilmu kebudayaan Barat, ilmu linguistik dan ilmu sejarah.¹⁰

Tradisi keilmuan yang berkembang pada era Al-Gazali memperlihatkan bahwa umat Islam sangat disibukkan dengan disiplin ilmu eksakta seperti kedokteran, fisika dan filsafat. Kondisi ini menarik perhatian imam Al-Gazali untuk mengembalikan umat Islam kepada ilmu-ilmu dasar keIslaman. Hal ini pula yang mendorongnya untuk menuliskan karyanya *Ihya' 'Ulumiddin*. Kritik terhadap kondisi umat Islam merupakan bentuk kegelisahannya terhadap kecenderungan umat Islam kepada satu bidang keilmuan saja, sehingga kenyataan itu mengesampingkan kajian dan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu dasar agama yang populer kajiannya pada abad-abad pertama Hijriyah.

Dengan melihat secara seksama sejarah peradaban Islam dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan pada antara abad 8-12M, akan ditemukan sejumlah figur intelektual muslim yang menguasai dua disiplin ilmu secara bersamaan atau lebih. Tidak dikenal dikotomi ilmu seperti belakangan yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Sebab, pada hakikatnya dalam pandangan Islam ilmu itu juga merupakan ilmu Agama yang berasal dari Allah swt. merupakan kalam Tuhan yang *kauniyah*/ tersirat. Di antara ulama yang berkontribusi dalam pengembangan keilmuan antara lain Ibn Miskawaih (320-412 H/ 932-1032 M), Ibn Sina (370-428 H/ 980-1037 M), Al-Gazali (450-505 H/ 1059-1111 M), Ibn Rusyd

⁹ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas* (Bandung: Mizan, 2003), h. 270.

¹⁰ *Ibid.*

(520-592 H/ 1126-1198M), Ibn Thufail (1105-1185 M) dan seterusnya. Mereka adalah para figur intelektual muslim yang memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan-kemajuan dunia Barat modern sekarang ini. Pada abad-abad pertama perkembangan peradaban umat Islam, terfokus pada kajian-kajian sumber keislaman seperti kajian Al-Qur'an, Hadis, kalam, fikih dan bahasa. Namun, pada periode berikutnya, kajian dan studi umat Islam berkembang dalam berbagai disiplin ilmu eksakta seperti fisika, kimia, kedokteran, astronomi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kenyataan ini bisa dibuktikan pada masa keemasan antara abad 8-15 M, dari Dinasti Abbasiyyah (750-1258 M) hingga jatuhnya Granada tahun 1492 M. Pada masa itu umat Islam menjadi tumpuan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹

C. Integrasi Ilmu dalam Hadis

Al-Qur'an dan Hadis memerintahkan umat Islam agar menuntut ilmu secara mutlak. Baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak membedakan ilmu. Akan tetapi, melihat urgensi dan keterkaitannya dengan amal manusia yang sebagian harus dilakukan oleh setiap pribadi yang disebut fardu ain dan sebagian cukup dilaksanakan oleh beberapa orang saja mewakili yang lainnya yang ini disebut fardu kifayah, maka hukum menuntut ilmunya juga sama dengan hukum amal tersebut. Karena salat, puasa, zakat, haji, hukum menutup aurat, dan jual beli merupakan amal yang wajib dilakukan setiap pribadi (fardu ain), maka kewajiban menuntut ilmunya pun menjadi fardu ain. Sementara itu, cara pengobatan orang sakit, pengadaan pangan, pembuatan pengaturan interaksi masyarakat, persiapan perang tidak wajib dilakukan setiap pribadi, tapi cukup dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat (fardu kifayah), maka menuntut ilmunya juga menjadi fardu kifayah.

Karena itu, pembagian Imam Al-Gazali terhadap ilmu kepada dua kelompok, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, dapat dipahami sebagai akibat urgensitasnya diketahui kaum Muslim dalam beramal. Amal yang bangsa fardu ain otomatis ilmunya pun menjadi fardu ain. Amal yang bangsa fardu kifayah, ilmunya menjadi fardu kifayah. Hal ini menunjukkan bahwa pengklasifikasian ini bukan *azimah* (hukum asal), tetapi hukum *'aridh* (hukum yang mendatang sebagai akibat).

Dapat pula digarisbawahi bahwa ilmu tentang Hadis bukan ilmu hadis adalah ilmu pertama dalam sejarah ilmu dalam Islam. Ketika hendak mengkodifikasi Hadis, Khalifah Umar ibn Abd. Aziz (berkuasa tahun 99-101 H) mengirim

¹¹ Raghieb as-Sirjani, *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia; jejak kejayaan peradaban Islam di Spanyol*, terj. M. Ihsan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 251.

surat kepada para gubernur dan ulama di wilayahnya, menginstruksikan agar mengumpulkan Hadis dan mengirimnya kepada Khalifah dengan alasan,

فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء¹²

Artinya: “Karena saya khawatir hilangnya ilmu dan habisnya para ulama...”

Kalimat ini menunjukkan bahwa kata *al-‘ilm* digunakan Khalifah untuk Hadis. Sebab, yang dikatakan ilmu pada saat itu hanya ilmu tentang Hadis, sedang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu lainnya belum dikenal dalam sejarah Islam sebagai ilmu. Kemudian ilmu berkembang dan bercabang-cabang. Namun, ilmu-ilmu itu kesemuanya sama dalam pandangan Hadis.

Menurut Mukhtar Lintang bahwa sekarang banyak sumber dosa umat Islam karena tidak memperlajari ilmu pengobatan, bertenun, dan membuat senjata. Ia berangkat dari keterangan Imam Al-Gazali yang menjelaskan bahwa ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Segala sesuatunya yang apabila tidak ditunaikan, maka lemahlah kaum Muslim, maka sesuatu itu ialah fardu kifayah, seperti ilmu obat-obatan, ilmu mengobati orang sakit, menjadi dokter, menjadi juru rawat dan menjadi ahli obat-obatan adalah fardu kifayah. Dia menegaskan bahwa dari sinilah dosa kita yang paling banyak, yaitu fardu kifayah yang tidak kita tunaikan dalam masyarakat kita dan tidak pula kita hiraukan. Sebenarnya – tandasnya – karena kita mengabaikan fardu kifayah ini maka terjadi kemunduran dalam kehidupan kita, masih banyak orang yang menganggap *enteng* persoalan fardu kifayah ini. Saya—katanya— pernah mendengar khatib yang menyatakan kita harus menuntut ilmu yang fardu ain jangan menuntut ilmu alam, sebab dia cuma fardu kifayah. Komentar Mukhtar Lintang, “Ini adalah ujung dari pengertian yang salah, dari zaman dahulu ketika kita dijajah, fardu kifayah tidak kurang pentingnya dari fardu ain walaupun jenisnya lain.”¹³

Isyarat Nabi Muhammad saw. kepada umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan cukup kuat dirasakan khususnya oleh generasi awal. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kajian-kajian keislaman pada masa itu. Kegigihan sahabat untuk belajar dan memberantas buta aksara di tengah-tengah umat Islam saat itu menjadi bukti nyata. Bahkan salah satu tebusan atas tawanan adalah dengan mengajar anak-anak kaum muslimin. Nabi saw. sendiri banyak mengungkap permasalahan kedokteran seperti khasiat air putih dan air zam-zam. Kenyataan pada masa kini air putih menjadi minuman

¹² Ibn Hajar, *Fath al-Bari* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1959), jilid I, h. 204.

¹³ Mukhtar Lintang, *Hikmat Alfatihah* (Kuala Lumpur: Pancaran Ilmu, 1978), h. 106-108.

utama bagi penduduk bumi ini. Demikian juga dengan keutamaan madu sebagai obat. Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* misalnya ditemukan bab khusus berkaitan dengan *al-Thibb* (pengobatan). Dalam bab ini dikumpulkan sejumlah hadis-hadis sahih berkenaan dengan keutamaan zat tertentu untuk menyembuhkan penyakit seperti madu, *habbatussauda'* (jintan hitam), inai, dan kencing unta. Selain itu, disebutkan juga tentang sistem pengobatan dengan cara berbekam (*hijamah*), menggunting rambut, berpuasa, dan bercecelak untuk menjaga kesehatan mata. Secara singkat, dari hadis-hadis ini mengilustrasikan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah sosok yang peka dan peduli dengan kebutuhan kesehatan masyarakat pada masa itu. Selain itu, dalam kitab ini juga disinggung tentang awal penciptaan manusia (*bad' al-khalq*). Dalam beberapa Hadis dijelaskan tentang proses awal penciptaan manusia, tentang sifat matahari, bulan, dan lapisan bumi. Demikian juga pada kitab hadis lain ditemukan penjelasan hadis seputar ilmu pengetahuan dan pengobatan seperti dalam *Shahih Muslim*, *Sunan al-Tirmizi*, dan *Sunan Abi Dawud*.

Perkembangan dunia medis modern mengakui keutamaan madu dan jintan hitam sebagai obat herbal yang mampu mencegah penyakit. Metode pengobatan dengan cara bekam juga banyak dilakukan untuk menghilangkan racun dari dalam tubuh. Demikian pula khasiat kurma dan air zam-zam sebagai makanan dan minuman sehat. Hal ini menjadi bukti akan kebenaran dari tradisi yang telah dilakukan Nabi saw. dalam kehidupannya sehari-hari.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ يِرْفَقِي شَرْطَةَ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةَ عَسَلٍ أَوْ لَدَعَةَ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتُوِي"¹⁴

Artinya: dari Jabir bin Abdillah ra. berkata: aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Jika ada sesuatu yang baik dari pengobatan kalian, maka itu terdapat dalam jarum bekam, minum madu, atau bara api yang cocok dengan penyakit, tetapi aku tidak menyukai pengobatan dengan besi panas"

Hadis berfungsi sebagai *bayan* (penjelasan) kepada Al-Qur'an untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Dalam memahami makna perintah maupun larangan di dalamnya, pertama-tama mestilah merujuk kepada praktik Nabi saw. Perbuatan, perkataan dan persetujuannya

¹⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid VII, h. 12.

menjadi dasar utama dalam mengimplementasikan ajara-ajaran Islam. Oleh karena itu, mustahil dapat mengamalkan ajaran Islam apalagi memahaminya tanpa Hadis. Bahkan Al-Imam al-Awza'i (w. 157 H) pernah menyatakan bahwa “*Jika diperhatikan dengan seksama, maka Al-Qur'an lebih memerlukan Sunnah dibandingkan Sunnah terhadap Al-Qur'an*”.¹⁵ Maksudnya, bahwa Al-Qur'an lebih banyak dijelaskan lewat hadis sehingga seakan-akan Al-Qur'an membutuhkan Sunnah untuk menjelaskan ayat-ayatnya yang bersifat umum.

Penjelasan hadis-hadis di atas sesungguhnya telah menjadi rujukan awal dalam pengobatan pada masanya. Kemajuan ilmu medis dan pengembangannya pada masa berikutnya tidak terlepas dari peran umat Islam yang menjadikan Hadis sebagai sumber ajaran agamanya. Tokoh utama dalam ilmu kedokteran misalnya Ibnu Sina (Avicenna) yang merupakan bapak ilmu kedokteran. Bahkan karya Ibnu Sina Abu 'Ali al-Husain bin Abdillah bin Sina (w. 1037M), *Al-Qanun fi al-Thibb* menjadi rujukan kedokteran universitas-universitas di Barat hingga awal abad ke-18M. Demikian pula dengan nama ulama kedokteran lain seperti Abu Bakar Muhammad bin Zakariya ar-Razi (w. 313 H) dan Ibnu Nafis Alauddin Abul 'Ali bin Abil Haram al-Khurasi ad-Dimasyqi ibnu Nafis (1213-1288 M). Ibnu Nafis adalah seorang dokter yang terkemuka dan seorang penulis serba bisa pada abad ke-7H/13M.

Demikian pula halnya dengan memahami ilmu sebagai hakikat sesuatu. Mestilah merujuk kepada petunjuk Nabi saw. Ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) merupakan motor penggerak pemikiran dan aktivitas manusia. Tinggi rendahnya martabat manusia banyak ditentukan oleh faktor ilmu itu sendiri. Kemudian suatu kaum sangat ditentukan dengan tinggi dan rendahnya pencapaian mereka dalam bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu mendapat perhatian penting dalam tradisi Islam. Hal tersebut misalnya, dapat dilihat, Nabi Muhammad saw. dan generasi emas setelahnya, dalam setiap episode historisnya selalu memberi titik berat kepada pengembangan tradisi keilmuan. Sebabnya, epistemologi – yang menjadi kerangka ilmu – adalah seantero aktivitas manusia. Ilmu dan ulama menjadi satu kesatuan yang penting dalam membangun peradaban Islam pada masa awal perkembangan Islam.

Hasil pemikiran manusia yang berasas epistemologi kokoh tentu tidaklah sama dengan produk pemikiran manusia yang kerangka keilmuannya tidak jelas, atau bahkan salah. Oleh karena itulah, sejak zaman Nabi Muhammad, tradisi ilmiah tumbuh dan berkembang. Salah satunya yang terkenal adalah,

¹⁵ Asy-Syathibi Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, (1991), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, tahqiq* Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t.), jilid IV, h. 19. Lihat juga Al-Syawkani Muhammad bin 'Ali, *Irsyad al-Fuhul* (Beirut: Maktabah Mushthafa al-Halabi, t.t.), h. 33.

komunitas Ilmiah *Ashhab al-Shuffah*, orang-orang yang tinggal di beranda Masjid Nabi. Tradisi intelektual zaman Nabi Muhammad tersebut dapat dibuktikan dengan wujudnya madrasah *Ashhab al-Shuffah* yang diikuti oleh sekitar 70 orang sahabat Nabi saw. Sekolah Rasulullah yang pertama tersebut terbentuk sekitar kurang lebih 17 bulan sesudah Hijrah telah melahirkan generasi sahabat yang memiliki tingkat intelektualitas yang baik, seperti Abu Hurairah (w. 49H), Abu Zar al-Giffari (w. 652M), Salman al-Farisi (w. 34H), dan Abdullah bin Mas'ud (w. 32H). Peran madrasah ini begitu sentral. Sebab, dari komunitas kajian ilmu inilah pandangan hidup Islam (*Islamic Worldview*) tersistemasi dan berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada sesuatu yang berbeda di madrasah itu ketika bulan suci datang. Kajian-kajian ilmu itu, memberi tekanan khusus pada pendalaman Al-Qur'an setiap bulan suci Ramadan. Memasuki bulan Ramadhan, kajian-kajian tentang Al-Qur'an menjadi semakin meningkat dan diikuti oleh para sahabat lain. Tradisi ini turun-temurun dicontoh oleh kaum Muslim di penjuru dunia hingga generasi sekarang.¹⁶

D. Integrasi Ilmu dan Amal dalam Pemahaman Hadis

Memahami matan hadis, kemudian merupakan disiplin ilmu tersendiri yang terus berkembang dengan nama "*fiqh al-hadits* atau *fiqh al-sunnah*". Teks hadis mestilah dikaji dengan cara yang benar menurut ilmu hadis untuk mencapai kepada pemahaman yang benar pula. Tujuan hadis sebagai dasar dalam kehidupan secara luas dapat tercapai. Oleh karena itu, para ulama telah menetapkan beberapa tahapan untuk memahami hadis dengan baik sebagai berikut:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.
2. Menggabungkan hadis yang terjalin dalam satu tema.
3. Kompromi atau pen-*tarjih*-an beberapa hadis yang zahirnya kontradiktif.
4. Memahami hadis dengan memperhatikan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuan hadis itu disampaikan Nabi saw.
5. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dalam setiap hadis.
6. Membedakan antara fakta dan metafora, antara gaib dan nyata.
7. Memastikan makna kata dalam hadis.¹⁷

¹⁶ Kholili Hasib, *Integrasi Ilmu dan Kebangkitan Tradisi Keilmuan Islam*, dalam <http://inpasonline.com>, Senin, 08 Desember 2014.

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Mesir: Dar al-Wafa', 1994), h. 41; lihat juga Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), h. 185.

Untuk mengamalkan suatu hadis dan menjadikannya landasan dalam beramal haruslah memperhatikan tahapan di atas. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hadis. Oleh karena itu, dituntut ketekunan dan ketelitian dalam merujuk setiap hadis guna mencapai makna yang dimaksud.

Di antara tujuan ilmu adalah membahagiakan dan mensejahterakan umat manusia. Oleh karena itu, aspek yang sangat ditekankan dalam hadis-hadis Nabi saw. adalah menghargai lingkungan. Manusia adalah khalifah yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi Allah ini bukan merusaknya. Justru karena itu, ajaran Islam sangat peduli kepada pemeliharaan lingkungan dan kebersihan. Dalam Al-Qur'an terdapat penyebutan istilah *thaharah* sebanyak 31 kata dan *tazkiyah* 59 kata. Dalam hadis ditemukan istilah *an-nazhafah*. Term-term ini menarik untuk dipahami secara seksama dalam membangun wawasan pelestarian lingkungan hidup. Perintah Nabi saw. kepada umatnya untuk berperilaku ramah lingkungan bukan hanya di kala salat menghadap kepada Allah swt. akan tetapi setiap saat. Sikap tersebut menjadi karakter yang melekat di setiap umat Islam. Hal ini menegaskan betapa ilmu tentang pelestarian lingkungan hadir dalam keseharian Nabi saw. yang merupakan sumber hadis itu sendiri. Firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُؤْبَدُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.¹⁸

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”

Kebersihan merupakan dasar ajaran Islam. Sewajarnya sikap itu hadir dalam kebiasaan hidup setiap Muslim. Sebab Allah swt. itu baik dan mencintai yang baik dan bersih. Sebagaimana yang ditegaskan dalam *atsar* dari Sa'id bin al-Musayyab (642-715M) berkata: “*Sesungguhnya Allah itu baik mencintai kebaikan, Allah bersih mencintai kebersihan, Allah Mahamulia menyukai kedermawanan. Oleh karena itu bersihkanlah halaman rumahmu*”.¹⁹ Demikian juga dengan hadis Nabi saw. berikut ini:

¹⁸ QS. al-Maidah [5]: 33.

¹⁹ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jilid V, h. 104.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ"²⁰

Artinya: *Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Kesucian itu sebagian dari iman"*.

Jika kata *ath-thuhur* dalam hadis di atas diterjemahkan dengan kebersihan, maka arti hadis itu menjadi "kebersihan itu sebagian dari iman". Dikaitkannya iman dengan kesucian jiwa dan raga merupakan bentuk penegasan urgensinya dalam kehidupan. Selain itu, sebenarnya orang yang menjaga kebersihan dan kesucian dirinya berarti ia telah bersyukur kepada Allah swt. atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya.

Dalam implementasi dari kedua istilah di atas, maka istilah *thaharah* dan *nazafah* ternyata kebersihan yang bersifat lahiriyah dan maknawiyah. Kedua istilah ini dipergunakan dalam kajian fikih. Dalam kitab-kitab klasik dikhususkan bab *ath-thaharah* (bersuci) yang biasanya disandingkan dengan pembahasan bab *an-najasah* (najis) yang dikupas secara panjang lebar. Pembahasan *thaharah* dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Syekh 'Abd ar-Rahman al-Jaziri memakan 171 halaman.²¹ Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili (kontemporer) menghabiskan 409 halaman.²² Allah dan Rasulnya selalu berbicara tentang kewajiban suci dalam kondisi tertentu. Misalnya wajib bersuci setelah istinja, sesudah haid dan nipas, sesudah bersentuh dengan lawan jenis, ketika hendak mengangkat atau menyentuh Al-Qur'an dan bagi mayat. Akan tetapi Allah juga memerintahkan bersuci secara umum. Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ²³

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*

بَكَ فَطَهَّرْ²⁴

Artinya: *Dan pakaianmu bersihkanlah,*

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, jilid I, h. 114.

²¹ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.t.), jilid I, h. 1-171.

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid I, h. 82-491.

²³ QS. al-Baqarah[2]: 222.

²⁴ QS. al-Mudatssir [74]: 4.

Makna kebersihan yang digunakan dalam Islam ternyata ada yang dilihat dari aspek kebersihan harta dan jiwa dengan menggunakan istilah *tazkiyah*. Umpamanya, ungkapan Allah dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan bahwa zakat yang seakar dengan *tazkiyah*, memang maksudnya untuk membersihkan harta, sehingga harta yang dizakati adalah bersih dan yang tidak dizakati dinilai kotor. Kebersihan dan pengotoran harta sebenarnya memiliki korelasi kuat dengan ketenangan jiwa. Sebab, dengan mengeluarkan sebagian harta yang juga merupakan hak dari fakir miskin, maka ketenangan di dalam hati dapat diraih. Dari aspek hubungan sosial pun dengan zakat akan terbangun baik antar sesama sehingga menciptakan kebersamaan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, maka konsep kebersihan dan kesucian yang berdasarkan keyakinan dan kebudayaan masing-masing ada nuansa perbedaan. Dalam bahasa Indonesia terdapat kosa kata kotor dan jijik serta kebalikannya, bersih dan suci. Namun semua itu baru pada tingkat lahiriyah. Lalu bagaimana Islam memberi makna kebersihan tersebut. Justru yang menarik lagi dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar dan bahkan dilakukan sendiri. Misalnya membersihkan badan, pakaian, rumah, halaman dan kendaraan kita dengan menggunakan istilah mencuci pakaian dan kendaraan. Mencuci diambil dari kata "menyucikan", membikin suci yang diidentikkan dengan bersih. Ini berarti segala sesuatu harus dibersihkan atau disucikan.

Dari paparan beberapa hadis di atas dapatlah ditegaskan bahwa sikap bersih jiwa raga mendapat perhatian serius dari Baginda Nabi saw. Jadi, sikap bersih dalam Islam bukan sekedar teori, akan tetapi telah menjadi praktik keseharian seorang Muslim. Hal ini terlihat bahwa dalam kajian fikih kita menemukan pembahasan tentang pembagian air, mandi, wudu, istinja dan lainnya. Kajian fikih tentang hal tersebut bahkan menempati bab pertama. Ini sekaligus menegaskan pentingnya kebersihan dalam Islam.

Integrasi ilmu dalam hadis secara implementatif juga dapat dilihat dari perintah Nabi saw. agar setiap Muslim menjadi pelopor kebajikan kapan dan di mana pun ia berada. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Demikian pula halnya ilmu yang tinggi namun tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya kelak ilmu itu akan menjadi hujah yang merugikan atas dirinya. Oleh karena itu, Nabi saw. menggantungkan kebaikan yang tertinggi pada diri seorang Muslim itu di kala ia banyak memberi manfaat bagi orang lain.

خير الناس انفعهم للناس.²⁵

²⁵ Ismail bin Muhammad al-Ajluni, *Kasyf al-Khafa wa Muzilu al-Albas* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1351/1930), jilid II, h. 393.

Membangkitkan kesadaran di tengah-tengah umat saat sekarang ini untuk berpartisipasi dalam menegakkan kebaikan adalah puncak dari kebaikan itu sendiri. Justru karena itu pula ditemukan hadis Nabi yang mengajak umatnya untuk menjaga fasilitas umum dan tidak merusaknya. Ciri orang yang berilmu, sekali lagi, untuk memakmurkan bumi Allah. Orang yang suka merusak menunjukkan bahwa walaupun dia orang yang berilmu, maka ilmunya itu tidak bermanfaat. Dalam hadis Nabi saw. banyak menjelaskan tentang larangan merusak. Kepedulian Nabi Muhammad saw. terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan tidak bersifat parsial apalagi insidental. Akan tetapi dalam berbagai kesempatan Nabi saw. berpesan kepada sahabatnya agar peduli kepada alam sekitar. Konsep sayang lingkungan menjadi pemikiran beliau sejak lama, sekalipun tinggal di padang pasir yang tandus. Hal ini menjadi menarik karena Rasulullah saw. sampai-sampai memerintahkan umatnya untuk menanam pohon dan menghidupkan tanah yang diterlantarkan atau tidak bertuan. Ketika manusia belum mengerti tentang potensi alam dan urgensi pemeliharannya, Nabi saw. bahkan telah memerintahkan umatnya untuk sayang kepada lingkungan sekitar dan melarang mengotorinya.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. melarang untuk melakukan pencemaran terhadap air yang tidak mengalir dengan kotoran. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤَلَّنُ أَحَدُكُمْ فِي نَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ"²⁶

Artinya: "Janganlah salah seseorang kalian kencing di air yang diam (semacam bak atau kolam) yang tidak mengalir, terus kamu mandi padanya."

Kedua larangan Nabi saw. di atas sangat mendasar dan terkait erat dengan pelestarian lingkungan khususnya yang berkenaan dengan sarana umum. Pada masa lampau, pohon rindang adalah layaknya halte tempat berteduh saat ini. Ketika tempat itu dikotori, maka akan mengganggu kenyamanan serta kebersihan lingkungan. Dewasa ini, kita banyak menemukan halte dan fasilitas umum lainnya yang tidak nyaman karena bau pesing dan aroma busuk yang menyengat. Nabi saw. telah memberikan peringatan kepada umatnya lebih dari empat belas abad yang lalu agar senantiasa menjaga kebersihan fasilitas umum.

Demikian pula halnya dengan sungai. Sekalipun airnya mengalir, namun ketika ia dijadikan tong sampah dan tempat membuang kotoran, maka

²⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, jilid I, h. 24.

perbuatan tidak terpuji itu dapat mencemarkan air sungai tersebut. Kotoran yang disebutkan dalam hadis di atas tidaklah semata-mata kotoran manusia atau hewan. Akan tetapi haruslah dipahami dengan seluruh kotoran dan sampah yang sengaja dibuang ke sungai. Prilaku membuang sampah ke sungai dan mengalirkan kotoran rumah tangga ke sungai tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, akan tetapi ironisnya dilakukan oleh kalangan berpendidikan di kota-kota besar. Oleh karena itu, kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan suatu keniscayaan. Tentu kita sepakat untuk tidak menunggu bencana baru menyadari kesalahan prilaku kita terhadap alam.

Sehubungan dengan kewajiban menjaga lingkungan hidup dan larangan merusaknya, Allah berfirman,

إِمَّا جَزَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
وَأَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ²⁷

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

Dalam memahami kata *al-fasad*, Mujahid menafsirkannya sebagai perbuatan zina, mencuri, membunuh manusia, dan perusakan terhadap tanam-tanaman. Semua perbuatan-perbuatan ini termasuk dalam kategori melakukan kerusakan di bumi, sementara Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan bahwa kata *al-fasad* adalah lawan kata *as-shalah* (perbuatan baik). Maka segala hal yang keluar dari keadaannya baik dan bermanfaat disebut fasad. Siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi sebab kerusakan sesuatu disebut merusaknya. Menghilangkan keamanan bagi diri, harta dan kehormatan, dan menentang syariat yang adil dan menegakkannya, semua itu adalah perusakan di bumi.²⁸

Dalam tafsir yang lahir abad belakangan dari *Tafsir al-Manar*, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat yang sama dalam *at-Tafsir al-Munir*-nya dengan

²⁷ QS. al-Maidah [5]: 33.

²⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Marifah, 1993), jilid VI, h. 357.

penjelasan bahwa ayat ini berarti perlawanan dan penantangan yang meliputi kejahatan kufur, merampok di jalan, mempertakutkan orang yang musafir, dan perusakan di bumi. Oleh karena kejahatan-kejahatan ini menyentuh keamanan masyarakat seluruhnya, menggoyangkan pondasinya dan menyebarkan kecemasan, kegentaran, dan kekhawatiran di tengah-tengah umat manusia yang aman, Allah memberatkan hukuman pelakunya sehingga membuat hukuman atas mereka secara tartib berdasarkan besarnya kejahatan yang mereka lakukan. Orang yang melakukan pembunuhan dan mengambil harta di bunuh dan di salib. Orang yang mengambil harta saja dipotong tangan dan kakinya secara silang. Orang yang mempertakutkan musafir, tidak membunuh dan tidak mengambil harta diasingkan. Inilah pendapat kebanyakan ulama dan para imam mazhab.²⁹

Dalam kitab-kitab tafsir ini dan kitab-kitab tafsir sebelumnya tidak disebutkan secara eksplisit kejahatan merusak lingkungan sebagai bentuk perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, *sharih* ayat menjelaskan bahwa melakukan kerusakan di muka bumi masuk dalam ruang lingkup yang mendapat hukuman tersebut. Lebih jelas dapat dipahami lagi dari kalimat Wahbah al-Zuhaili bahwa perbuatan melakukan kerusakan di bumi itu menyentuh keamanan masyarakat, menggoyangkan pondasinya dan menyebarkan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran di tengah-tengah umat manusia. Demikian juga, penjelasan Mujahid yang memasukkan tindakan merusak tanaman kepada kerusakan di bumi. Keterangan-keterangan ini mengisyaratkan bahwa perusakan lingkungan dan tindakan-tindakan yang menyebabkan pemanasan global masuk dalam kategori perusakan di bumi. Bahkan, bahaya tindakan-tindakan yang membawa kepada perusakan lingkungan dan pemanasan global lebih besar daripada contoh-contoh yang tersebut sebelumnya. Dalam kaitannya dengan ilmu, maka kaum Muslim wajib menguasai ilmu tentang pelestarian lingkungan sebagai kewajiban fardu kifayah.

Zaghlul al-Najjar telah menulis buku dengan judul *Pembuktian Sains dalam Sunnah* dalam tiga jilid. Keterangan-keterangan Nabi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sains ini menunjukkan bahwa ia mengajak umatnya untuk memperhatikan sains dan mempelajarinya. Demikian juga Yusuf al-Qardhawi (Kontemporer) menulis buku dengan judul *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah* yang berarti *Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, memuat kisah Islami tentang ilmu pengetahuan, teknik, dan peradaban. Ini juga mengisyaratkan bahwa Nabi menyuruh umatnya mempelajari semua ilmu secara integral.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991), jilid VI, h. 163.

Secara khusus tentang lingkungan hidup Rasulullah bersabda:

أَتَّقُوا اللَّعَانِينَ قَالَ: الَّذِي يَتَّخِذُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ³⁰

Artinya: “Takutlah kalian pada tempat-tempat yang di laknat dan orang-orang yang dilaknat, yaitu orang-orang yang buang air kecil dan air besar di jalan dan di tempat orang-orang berteduh”.

Dalam hadis sahih Nabi saw. bersabda:

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ³¹

Artinya: “Janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang diam (tenang), sementara ia dalam keadaan junub”.

E. Penutup

Sebagai suatu disiplin keilmuan, hadis merupakan sumber ajaran yang menjelaskan prinsip kehidupan Nabi Muhammad saw. Beliau memerintahkan kepada umatnya untuk mengembara dalam menuntut ilmu. Perjalanan suci itu bahkan sama nilainya dengan jihad di jalan Allah. Motivasi ini bukan sekedar basa-basi. Akan tetapi menjadi kekuatan umat Islam pada masa awal perkembangan sejarah Islam. Berlandaskan kepada perintah Al-Qur'an dan Hadis, umat Islam tampil sebagai masyarakat cinta ilmu. Kecintaan mereka terhadap ilmu menjadikan generasi tersebut sebagai *khaira ummah* yang sesungguhnya. Betapa tidak, masyarakat dunia dari penjuru bumi yang jauh datang belajar dan menuntut ilmu kepada mereka. Penemuan demi penemuan untuk kemaslahatan umat manusia dihasilkan oleh umat Islam. Tidak ada dikotomi ilmu pada masa itu, semua ilmu wajib dipelajari dan untuk diamalkan. Umat Islam tidak gagap menghadapi kajian ilmu-ilmu eksak dan handal dalam pengembangan ilmu-ilmu agama seperti tauhid, fikih hingga filsafat ilmu. Tokoh dan ulama bermunculan berkat integrasi ilmu, iman dan amal dalam kajian-kajian mereka. Hal inilah yang seharusnya dilakukan umat Islam, agar Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seru sekalian alam.

³⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, h. 127, lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, h. 14.

³¹ Muslim, *Shahih Muslim*, h. 133.

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM: Aspek Kelembagaan dan Kurikulum

Sai'ful Akhyar Lubis

Profesor Bimbingan dan Konseling Islam
pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Pendidikan akan senantiasa dilihat dalam kaitannya dengan masyarakat dan negara, dengan pengertian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai upaya atau bantuan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi nyata, melainkan ditinjau pula tentang kaitannya antara individu dengan masyarakat dan negara.

Indonesia dengan dasar negara pancasila berpenduduk mayoritas muslim, tak urung dihadapkan kepada masalah pendidikan tinggi, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat muslim Indonesia menyadari betapa seyogyanya reformasi tidak seharusnya lagi hanya dilakukan secara *ad hoc* dan parsial, tetapi harus bersifat komprehensif, baik pada tataran konsep maupun penyelenggaraannya; bukan lagi *ad hoc* dan *incremental* seperti pada masa silam. Yang terpenting perlu dikembangkan kebijaksanaan makro dan mikro yang menekankan penyiapan anak bangsa dengan seperangkat kemampuan, kecakapan dan motivasi dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani Indonesia. Karakteristiknya, masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang menempatkan pendidikan sebagai proses sepanjang hayat (*min al-mahdi ila al-lahd* atau *long life education*) dan menjadikan *nation and character building* inti dan salah satu tujuan pokoknya.

B. Pendidikan Dalam Masyarakat Muslim Indonesia

Sikap Islam mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia sangat jelas. Islam mengakui bahwa belajar dan menuntut ilmu adalah

hak asasi setiap manusia. Demokrasi pendidikan yang ditumbuhkan oleh Islam merupakan revolusi terbesar dalam sejarah umat manusia. Eksperimen, teori, observasi, deduksi, dan sistemasi sebagai unsur-unsur dalam metode ilmiah didorong sangat kuat oleh Al-Qur'an. (lihat Al-Baqarah/2: 164)

Masyarakat Islam dan masyarakat Barat tidak berbeda pandangan dalam memahami pendidikan sebagai pengalihan pengalaman dari suatu generasi ke generasi berikutnya.¹ Pada dasarnya pengalihan pengalaman tersebut bagi seorang muslim dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, pengalaman dalam bentuk ilmu, pengetahuan teknis atau teknologi, dan keterampilan-keterampilan yang sifatnya senantiasa berubah dari abad ke-abad. *Kedua*, pengalaman yang didasarkan pada nilai etik permanen yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung kebenaran abadi dan tidak berubah. Justru itu, dipandang bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa pengetahuan tidak bisa membawa manusia kepada kehidupan yang cerah, sedangkan pengetahuan tanpa iman akan menjerumuskan manusia ke suatu kebobohan baru. Dalam persepsi muslim, agama dan pengetahuan atau sains harus saling melengkapi.

Namun, hampir di semua negeri muslim (termasuk Indonesia) terlihat adanya dua sistem pendidikan, yakni sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan sekular. Untuk pendidikan agama, yang menjadi bentengnya adalah pesantren. Pesantren selalu diasosiasikan dengan organisasi Nahdatul Ulama, yang didirikan oleh ulama Jawa Timur pada tahun 1926.² Pada sisi lain, Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912,³ memusatkan kegiatan pendidikannya pada sekolah-sekolah sekular, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pemberian porsi pelajaran agama yang lebih besar membedakannya dengan sekolah-sekolah pemerintah, Muhammadiyah berupaya menanggulangi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem pesantren dengan meniru sebagian besar kandungan sistem pendidikan Eropa. Muhammadiyah ingin menghasilkan apa yang disebut "intelektual kyai" atau "kyai intelektual".

Organisasi-organisasi lain yang juga berkecimpung dalam kegiatan pendidikan adalah: Al-Jam'iyatul Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (Persis), Darul Dakwah wal-Irsyad (DDI), Al-Islam, Matla'ul Anwar, Al-Rabitah dan lain-lain, tetapi jumlah sekolah mereka jauh lebih kecil.

¹ S.S. Husain and S.A. Ashraf, *Crisis in Muslim Education* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 2003), h. 36.

² M. Amien Rais, Yahya A. Muhaimin, dalam Sharom Ahmat and Sharon Siddique (ed.), *Muslim Society, Higher Education and Development in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2002), h. 13 dan 32; bandingkan dengan Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 69-95.

³ Rais dan Muhaimin dalam Ahmad dan Siddique (ed.), *muslim Society*, h. 41 dan 32.

Khususnya lembaga pendidikan Al-Jam'iyatul Washliyah, telah mulai berdiri sejak tahun 1918—sebelum resmi menjadi organisasi Al-Jam'iyatul Washliyah pada tahun 1930—ketika itu didirikan Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT), dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam formal pertama di Medan. Kegiatan pendidikannya mencoba menggabungkan sistem tradisional dan modern. Dari segi isi, apa yang diajarkan di MIT tidak jauh berbeda dari pesantren-pesantren tradisional, tetapi pengajaran sudah dilakukan secara klasikal dengan menggunakan media-media modern seperti bangku, papan tulis dan sebagainya. Pendidikan di maktab ini sudah di bagi ke dalam tiga tingkatan: persiapan (*tajhizi*), awal (*ibtida'i*), dan menengah (*tsanawi*). Lembaga pendidikan Islam ini berkembang cukup baik, dan pada tahun 1930-an MIT telah mempunyai sekitar 1.000 orang siswa dari berbagai daerah sekitar Medan.⁴

Di luar itu, tidak sedikit umat muslim yang berkiprah di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Justru itu, persepsi masyarakat muslim Indonesia terbagi pada tiga orientasi, yakni:

1. Yang yakin bahwa sistem pendidikan pesantren paling ideal dan jalan yang paling tepat untuk memperoleh keridaan Allah.
2. Yang lebih menyukai sekolah Muhammadiyah, karena mencakup pelajaran sekolah negeri dan pelajaran agama.
3. Yang lebih memilih sekolah negeri, karena biayanya murah, kualitasnya lebih baik dan lebih memberikan harapan bagi alumnusnya untuk memperoleh pekerjaan secara lebih mudah.

C. Kondisi Pendidikan Tinggi Pascakemerdekaan

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia, antara lain:

Pertama, pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi yang ada (baik negeri maupun swasta). Menurut catatan LIPI, pada tahun 1950 jumlah mahasiswa hanya sekitar 1.000 orang.⁵ Pada tahun 1978/1979 meningkat menjadi 385.000 orang, dan pada tahun 1983/1984 jumlah total mahasiswa di universitas negeri dan swasta sebesar 805.000 orang.⁶ Tentu pada tahun-tahun terakhir

⁴ Chalidjah Hasanuddin, *Al-Jam'iyatul Washliyah: Api Dalam Sekam* (Bandung: Pustaka, 2008), h. 17-19.

⁵ Koentjaraningrat and Harsya W. Bachtiar, "Higher Education and the Sosial Science in Indonesia", dalam Koentjara-ningrat (ed.), *The Social Sciences in Indonesia* (Jakarta: LIPI, 2005), h. 48.

⁶ *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), h. 927.

ini telah pula meningkat beberapa kali lipat. Meningkatnya jumlah tersebut adalah refleksi ledakan penduduk sejak tahun 1950-an, dan sulitnya lulusan sekolah menengah memperoleh pekerjaan. Pada gilirannya menciptakan masalah yang sulit di atasi terutama kaitannya dengan kualitas outputnya.

Kedua, rendahnya produktivitas. Dari separuh lulusan sekolah menengah yang dapat berstudi di perguruan tinggi, hanya sekitar 20% yang berhasil lulus. Meskipun data tentang drop-out sukar diperoleh, tetapi dapat diasumsikan bahwa tingkat drop-out sangat tinggi. Menurut sumber terpercaya, dari 250.000 mahasiswa di perguruan tinggi negeri, diduga hanya 40.000 orang yang berhasil lulus,⁷ di antara mereka yang mengikuti suatu program studi hanya seperlima yang mencapai sarjana, jadi tiap 10 mahasiswa ada 8 orang yang drop-out.⁸ Penyebab drop-out pada umumnya adalah besarnya biaya pendidikan, hanya golongan menengah ke atas yang dapat menikmatinya, bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, tentunya tak mungkin terjangkau. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran berpendidikan, dan berbahaya jika mereka mengalami proses radikalisis akibat kekecewaan,

Ketiga, berkaitan dengan kualitas dosen dan mahasiswa. Hal ini menyangkut masalah kemampuan berbahasa asing (terutama Inggris dan Arab) yang masih rendah, efektivitas metode pengajaran dosen yang belum tercapai dengan baik, dan kebiasaan membaca yang belum menjadi sikap pribadi mahasiswa, sehingga pemikiran inisiatif dan kreatif mahasiswa tidak terangsang, dan sang dosen dianggap “selalu benar”.

Pada sisi lain, kondisi perguruan tinggi swasta kelihatan lebih buruk dibanding perguruan tinggi negeri. Masalah yang mereka hadapi terutama adalah masalah keuangan, Mereka harus berdiri di atas kaki sendiri, justru itu sumber keuangan mereka yang terbesar adalah dari mahasiswa, bahkan ada yang sepenuhnya mengandalkan mahasiswa. Sebagai satu-satunya sumber keuangan. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang drop-out dari perguruan tinggi swasta merasakan trauma yang lebih parah dibanding mereka yang drop-out dari perguruan tinggi negeri, karena besarnya biaya yang telah mereka keluarkan. Di samping itu, pengawasan KOPERTIS/KOPERTAIS yang kelewat ketat sampai hal-hal yang kecil menyebabkan mereka kehilangan kemandiriannya dan terpaksa menyesuaikan diri dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mentaati syarat-syarat formal dan tertulis, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah kualitas.

⁷ Lihat Doddy T. Amidjaja and Sapi'ie, *Higher Education in Indonesia: From Random Growth towards a National System* (Jakarta: Mimeographed, 2007).

⁸ Lihat Wolfgang Karcher, *Higher Education in Indonesia: Challenges and Perspectives* (Berlin: Mimeographed, 2001).

Masalah penting lainnya adalah sikap apatis mahasiswa, sebagai dampak dibubarkannya Dewan Mahasiswa pada tahun 1978 dan diserukannya mahasiswa “kembali ke kampus”. Peraturan ini mengakibatkan mahasiswa menjadi lumpuh secara politik, dan bersikap apatis serta acuh tak acuh terhadap problem-problem masyarakat. Di samping itu, pengarahannya dan kontrol politik pemerintah yang ketat mengakibatkan perguruan tinggi tidak lagi memiliki kebebasan untuk berkembang secara independen dari kepentingan pragmatis serta kepentingan politik sesaat.

Khusus masalah Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (meminjam istilah Husain dan Ashraf, 2003), pada umumnya pendidikan Islam terjepit dalam konflik antara tradisi dan modernitas. Dalam hal ini, terlihat adanya dua sistem pendidikan yang dominan: (a) pendidikan tradisional yang membatasi diri pada ilmu-ilmu klasik Islam, tanpa minat serius mengadopsi/mengembangkan metode baru untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dampaknya, sistem ini tidak memiliki alat memadai untuk menjawab tantangan modernitas, baik secara substansi maupun metodologi; (b) sistem pendidikan yang pada dasarnya dipinjam dari Barat, pada puncaknya lahir perguruan tinggi yang secara total atau sebagiannya sekular. Dampaknya, alumninya cenderung terserabut dari warisan keagamaan dan intelektual Islam.

Dikotomi kedua sistem pendidikan dimaksud memperbesar dikotomi keilmuan antara “ilmu-ilmu agama” dengan “ilmu-ilmu umum”. Pada gilirannya ada upaya untuk membangun “sistem ketiga”, bertujuan untuk “mereintegrasi” keduanya. Setidaknya telah berkembang tiga model. Model *pertama*, kedua sistem dan substansi keilmuan ditempatkan di bawah satu atap. “Ilmu-ilmu umum” dilembagakan pada fakultas-fakultas umum dan “ilmu-ilmu agama” pada satu fakultas agama (contoh: UII Yogyakarta, UNISBA Bandung). Ternyata masih juga terjadi dikotomi antar fakultas, bahkan ada kecenderungan fakultas agama menjadi marjinal yang diminati oleh mahasiswa dalam jumlah minim. Model *kedua*, dilandasi konsep gagasan tentang “Islamisasi ilmu pengetahuan” (Ismail al-Faruqi dan Naquib Alatas), bahwa ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum bersatu dalam satu ranah (*integrated domain*). Model ini menawarkan kelembagaan keilmuan menjadi: fakultas ilmu-ilmu wahyu (*faculties of revealed knowledge*) dan fakultas ilmu-ilmu non-wahyu (*faculties of non-revealed knowledge*). Ternyata gagasan ini masih mengandung sejumlah masalah dan pertanyaan antara lain: menyangkut epistemologi ilmu sebagai satu kesatuan, batas-batas “islamisasi ilmu” tersebut, bidang-bidang ilmu yang akan “diislamisasikan”. Model *ketiga*, menempatkan “ilmu-ilmu agama” menjadi titik tolak yang merupakan inti seluruh wacana serta proses keilmuan dan akademis, “ilmu-ilmu umum” menjadi suplemen dan pelengkap yang terintegrasi sepenuhnya dalam kurikulum dan menjadi ilmu bantu untuk memahami/menjelaskan kerangka normatif agama (contoh: IAIN dan STAIN). Ternyata IAIN dan STAIN

dipandang dan diperlakukan sebagai perguruan tinggi “murni agama”, dan alumninya dikategorikan sebagai “sarjana agama” padahal mereka memiliki keterampilan profesional bukan pada bidang agama saja, tetapi juga bidang umum (seperti Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan Iain-lain).

D. Pengembangan Pendidikan Tinggi di Era Pembangunan Nasional

Pengembangan pendidikan tinggi dalam era pembangunan nasional beranjak dari permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi itu sendiri, yakni:

1. Ledakan jumlah mahasiswa yang menuntut perluasan kesempatan pendidikan.
2. Perbaikan kualitas pengajaran.
3. Upaya pembaharuan kurikulum yang relevan dengan masalah-masalah pembangunan nasional.

Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka beralasanlah jika dikatakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia merupakan masalah masyarakat muslim Indonesia.⁹ Tidak pula dapat disangkal karena peranan organisasi-organisasi Islam berdirilah berbagai perguruan tinggi swasta, antara lain: Universitas Muhammadiyah di Solo, Jakarta dan Yogyakarta, Universitas Ibn Khaldun di Jakarta dan Bogor, Universitas Islam Bandung (UNISBA) di Bandung, Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) di Semarang, Universitas Islam Bogor (UIB) di Bogor, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan, Universitas Alwashliyah (UNIVA) di Medan, Universitas Muslimin Indonesia (UMI) di Makasar.¹⁰ Namun, karena suatu perguruan tinggi swasta hanya akan diakui jika kurikulumnya sama persis dengan kurikulum perguruan tinggi negeri (meskipun pemberian mata kuliah tambahan dibolehkan), pada dasarnya toleransi ini tidak dapat mengubah kenyataan yang menggambarkan bahwa universitas swasta hanya merupakan duplikat universitas negeri.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan pelaksanaan Pelita, secara eksplisit dan implisit dinyatakan bahwa, pendidikan tinggi harus dikembangkan untuk kepentingan perekonomian modern, dengan berlandaskan trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Analisa Soedjatmoko

⁹ Shafruddin Hashim, dalam Sharom Ahmat and Sharon Siddique, *Muslim Society, Higher Education and Development in South-east Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2002), h. 48.

¹⁰ Amien Rais, dalam Sharom Ahmat, *Muslim Society*, h. 22.

menunjukkan bahwa perluasan pendidikan tinggi yang pesat pada tahun 1960-an, 1970-an, dan terutama pada pertengahan tahun 1980-an, ternyata telah menghasilkan *man power* secara jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan perekonomian Indonesia untuk menyerapnya, sehingga terjadilah ledakan pengangguran berpendidikan.¹¹ Ketika itu para lulusan sekolah menengah yang tidak memperoleh pekerjaan memandang bahwa jalan untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor perekonomian modern adalah dengan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Namun, setelah lulus ternyata yang mereka idamkan tidak sesuai dengan kenyataan, seandainya pun ada lowongan, imbalan yang akan mereka terima tidak memadai.

Harus diakui bahwa masalah pengangguran di Indonesia bukan merupakan tanggung jawab sektor pendidikan sepenuhnya dan secara langsung. Penanggulangannya dapat diupayakan dengan mengalihkan sumber-sumber dana pemerintah yang selama ini dialokasikan ke sektor-sektor pendidikan yang tidak produktif kepada pembiayaan proyek-proyek penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif, khususnya proyek-proyek yang padat tenaga kerja. Dengan demikian, tentunya penggunaan dana-dana tersebut dapat lebih efisien dan lebih bermanfaat.

Sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini bertolak dari ideologi pembangunan yang berlaku di dunia ketiga tahun 1970-an, yang meyakini bahwa sektor modern akan berperan menentukan dalam proses pembangunan, dan keuntungan yang dipetik dari pembangunan semacam itu akan menetes ke sektor tradisional. Justru itu, yang diperlukan saat ini adalah menciptakan ideologi dan strategi pembangunan yang baru. Hal ini pada dasarnya akan memerlukan pemusatan sumber daya pembangunan secara besar-besaran, demi memperbaiki kondisi hidup mereka yang berada di sektor tradisional. Aspek lain dari strategi pembangunan yang baru ini adalah pemberian perhatian yang bukan hanya terhadap “pembangunan sumber daya manusia”, tetapi juga terhadap “pemanfaatan sumber daya manusia”.

Ternyata bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam transisi era pasar bebas semakin mendesak. Pada tahun 1993 Presiden Suharto (ketika itu) bersama beberapa kepala negara di Seattle Amerika Serikat bersepakat untuk: (a) mencari penyelesaian berbagai masalah dan tantangan pembangunan ekonomi regional dan global, (b) meningkatkan kerjasama ekonomi melalui sistem perdagangan multilateral, (c) memperkecil kendala dalam menjalin kerjasama perdagangan dan investasi agar barang, jasa dan modal dapat berjalan secara bebas di kawasan Asia dan Pasifik, (d) meyakinkan

¹¹ Soedjatmoko, *Manusia dan Pergolakan Dunia: Tantangan Terhadap Universitas* (Jakarta: Kelompok Kompas Gramedia, 2009), h. 11.

setiap warga negara akan memperoleh keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, kerjasama ekonomi melalui sarana telekomunikasi dan transportasi, serta pendayagunaan sumber daya yang ada secara berkesinambungan.

Tekanan global terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksud memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi ketika era transisi memasuki abad ke-21 pada saat pasar bebas dinyatakan wujud pada tahun 2003 di kawasan ASEAN dan akan wujud pada tahun 2020 di kawasan Asia dan Pasifik.¹² Tanpa langkah inovatif dan strategis dalam memacu peningkatan sumber daya manusia, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi korban dalam era percaturan global tersebut.

Justru itu, reformasi pendidikan secara menyeluruh (termasuk pendidikan Islam) di semua jenjang (tidak terkecuali perguruan tinggi) perlu dilakukan. Paling tidak ada dua alasan utama: (a) masyarakat muslim memerlukan layanan pendidikan berkualitas berkarakteristik Islam di semua jenjang; demi menumbuhkan nilai-nilai keislaman secara akademik, kritis dan rasional sesuai dengan pola Al-Qur'an dan Sunnah, berpandangan luas, sigap serta tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga keimanan dan ketakwaan mereka terinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, (b) adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum (landasannya diletakkan dan dikukuhkan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1989 dan nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional). Berdasarkan data statistik Departemen Agama terlihat peningkatan angka partisipasi siswa Madrasah Tsanawiyah sekitar 8% sebelum tahun 2000 dan sekitar 10-11% sesudah tahun 2000. Kecenderungan ini kelihatan juga pada jenjang yang lebih tinggi yakni Madrasah Aliyah dan perguruan tinggi (IAIN dan STAIN).

E. Pendidikan Tinggi di Era Reformasi: Merintis Paradigma Baru

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan tinggi di Indonesia merupakan warisan zaman kolonial yang kemudian dimodifikasi di bawah pengaruh sistem Amerika dan Eropa, yang ternyata mengabaikan masalah-masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat muslim. Justru itu, kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah kembar yang tidak

¹² Hafid Abbas, "Reformasi Pendidikan Agama Islam di PTU: Visi, Misi, dan Strategi" dalam Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (ed.) *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi, Wacana Tentang Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), h. 110.

bisa ditanggulangi dengan pendidikan tinggi yang hanya berorientasi Barat, yang dirancang untuk memenuhi keperluan sektor perekonomian modern.

Dengan demikian, diperlukan adanya perubahan strategi dan sistem pendidikan, termasuk juga kurikulumnya. Untuk itu, upaya yang dilakukan harus didasarkan kepada tradisi agama dan tradisi kultural yang dipelihara dan ditafsirkan kembali secara kreatif. Kembali ke tradisi agama berarti melakukan seleksi progresif dan membuat interpretasi baru. Harus disadari bahwa hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia. Yang jelas, pembaharuan dan pengembangan pendidikan tinggi sangat bergantung pada cara-cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut di atas.

Justru itu, konsep “paradigma baru” merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta (termasuk UIN, IAIN dan STAIN). Dalam hal ini, disepakati analisa Azra yang memandang relevan melandaskannya pada prinsip “*World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action, UNESCO, 1998*” yang dideklarasikan pada “*World Conference on Higher Education*” (Paris, 5-9 Oktober 1998). Dalam deklarasi dimaksud perguruan tinggi berikut segenap civitas akademiknya harus mampu menjaga dan mengembangkan fungsi krusial mereka dengan pelaksanaan etika serta kelugasan ilmiah dan akademis dalam berbagai kegiatan; mampu berbicara lantang tentang masalah etika, budaya dan sosial secara independen; sadar dan bertanggungjawab melaksanakan kapasitas intelektual serta prestise moral; aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebebasan, kesetaraan, solidaritas yang telah diterima secara universal. Dalam praktiknya perguruan tinggi dituntut mengembangkan secara simultan lima bentuk kecerdasan: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan praktikal, kecerdasan sosial, serta kecerdasan spritual dan moral. Berikut merealisasi bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik/mahasiswa (*student centered education*).¹³

Paradigma baru dimaksud dijadikan kerangka dan landasan pengembangan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam merumuskan program pokok: (a) peningkatan kualitas yang berkesinambungan melalui peningkatan kualitas manajemen yang diperbaiki, di mana otonomi, akuntabilitas dan akreditasi menjadi komponen terpenting; (b) peningkatan produktivitas; (c) peningkatan relevansi; (d) peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan; (e) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (f) peningkatan bidang keilmuan eksakta atau iptek; (g) peningkatan kemampuan berkembang.

¹³ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), h. 23-24.

Paradigma ini bertujuan memberikan panduan bagi pengembangan mekanisme guna memperkuat perguruan tinggi dalam hal perencanaan atas dasar prinsip desentralisasi dan evaluasi berkelanjutan. Di samping itu, mengatur peran negara/pemerintah yang secara konseptual dan praktikal tidak lagi menjadi lembaga sentral yang menetapkan ketentuan dan mengontrol perguruan tinggi secara rinci, tetapi lebih sebagai pemberi insentif agar sumber daya manusia serta keuangan dialokasikan kepada prioritas terpenting dan pendorong untuk meningkatkan standar kualitasnya.

Berkenaan dengan reformasi pendidikan, dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aspek pendidikan: filosofi dan kebijakan pendidikan, sistem pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*), pemberdayaan tenaga pengajar/tenaga kependidikan, sistem manajemen berbasis sekolah (*school based management*), implementasi paradigma baru, sistem pembiayaan pendidikan. Dalam hubungan ini, direkomendasikan perlunya mengadopsi dua strategi: *defensive strategy* dan *recovery strategy*, dengan inti tujuannya mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada masa lalu dan sekaligus berupaya meningkatkan segala sesuatu yang dinilai baik.

Selanjutnya, dalam paradigma ini misi dan fungsi perguruan tinggi dirumuskan secara spesifik:

Pertama, mendidik mahasiswa dan warga negara untuk memenuhi keperluan semua sektor aktivitas manusia dengan penawaran kualifikasi yang relevan, termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang mengkombinasi ilmu pengetahuan dan keahlian tingkat tinggi melalui mata kuliah yang terus dirancang serta dievaluasi secara kontinu, dan terus dikembangkan untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat dewasa ini dan masa datang,

Kedua, memberikan kesempatan kepada para peminat untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat, memberikan sejumlah pilihan yang optimal dan fleksibel untuk masuk dan keluar ke dan dari sistem yang ada, memberikan kesempatan bagi pengembangan individu dan mobilitas sosial agar berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan memiliki visi yang mendunia dan kapasitas membangun yang mempribumi.

Ketiga, memajukan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penelitian serta memberikan keahlian (*expertise*) yang relevan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan pengembangan penelitian sains, teknologi, ilmu sosial, humaniora, seni kreatif.

Keempat, membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan, serta menyebarkan budaya historis nasional, regional, internasional dalam pluralisme dan keragaman budaya,

Kelima, membantu untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial

dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai yang membentuk dasar kewargaan yang demokratis (*democratic citizenship*).

Keenam, memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan pendidikan di setiap jenjang, termasuk pelatihan tenaga pengajar.

Mengenai konsep pengembangan perguruan tinggi, paradigma yang dirintis bertumpu pada tiga pilar utama, yang saling berkaitan dan harus diaktualisasikan secara simultan, yakni:

1. *Greater autonomy*, kemandirian lebih besar dalam pengelolaan atau “otonomi lebih luas” bukan saja dalam hal pengelolaan manajerial, tetapi juga dalam penentuan/pemilihan kurikulum dalam upaya penyesuaian dengan dunia atau pasar kerja. Perguruan tinggi tidak saja berfungsi meningkatkan kualitas SDM dengan penguasaan sains dan teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tetapi harus mengembangkannya melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*).
2. *Greater accountability*, akuntabilitas yang bukan hanya terkait dengan pemerintah sebagai pembina pendidikan dan pemberi sumber dana/sumber daya, tetapi juga dengan dunia profesi dan masyarakat luas. Bukan hanya bertanggungjawab dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan, tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan, dan program yang dilaksanakan.
3. *Greater quality assurance*, jaminan bagi kualitas melalui evaluasi internal (*internal evaluation*) yang berkesinambungan dan evaluasi eksternal (*external evaluation*) yang dilakukan oleh BAN-PT, agar perguruan tinggi dapat lebih meningkatkan fungsinya dengan menentukan standar yang lebih fleksibel demi kemungkinannya melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan dunia kerja.

Khusus pada perguruan tinggi Islam, rintisan paradigma ini memperoleh landasan pijak yang kukuh karena perkembangan studi Islam dewasa ini memperlihatkan gejala baru yang ditandai sebagai berikut:

1. Beragam pendekatan dilakukan dalam memahami keislaman (penggabungan pendekatan normatif dan analisis sosio-historis), berdampak positif bagi perluasan topik kajian dan kedalaman analisis. Kajian masalah kontemporer yang dipadukan dengan basis teks klasik menjadi kecenderungan utama kajian di UIN, IAIN dan STAIN khususnya.
2. Berkembang pengenalan terhadap berbagai pandangan dan argumen yang berdampak pada pemahaman yang plural *polyphonic understanding* bagi kekayaan dan keragaman tradisi intelektual Islam. Pemahaman plural ini berakibat pula munculnya *an Islam based on tolerance and inclusiveness* di Indonesia.

3. UIN, IAIN dan STAIN memantapkan diri menjadi institusi akademik (tanpa mengesampingkan peran dakwah) dengan upaya melakukan kajian keagamaan yang berbasis penelitian akademis. Program studi yang dikembangkan tidak saja mengenai kajian ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ilmu-ilmu yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan keagamaan.
4. UIN, IAIN dan STAIN menjadi *center of excellence* bagi pendidikan dan penelitian Islam di Indonesia dengan mengembangkan *local context* dan *local content* dari Islam di Indonesia. Dalam hal ini, ia menjadi pusat bagi pengembangan Islam kultural yang berakar di Indonesia.

F. Penutup

Perlu disadari bahwa jumlah masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia belum menjamin bahwa upaya pengembangan pendidikan tinggi (terutama Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) tanpa kendala sama sekali. Jika tidak ingin dikatakan “mayoritas dalam jumlah, minoritas dalam kualitas pendidikan”, sudah saatnya berupaya memanfaatkan potensi mayoritas tersebut secara lebih bermakna, sehingga dapat berperan lebih penting dalam meletakkan dasar dan memberi arah terhadap strategi pengembangan pendidikan tinggi dalam era pembangunan nasional dan era reformasi yang sedang berlangsung serta era global di masa depan.

TRANSFORMASI IAIN KE UIN SUMATERA UTARA (Upaya Restrukturisasi dan Reorganisasi Bidang Keilmuan)

Amiur Nuruddin

Profesor Ilmu Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Telah lama keinginan untuk melakukan transformasi IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Setidaknya dalam ingatan saya keinginan itu bermula dari periode kedua rektor IAIN Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution. Kalau dihitung dari priodesasi jabatan rektor, penantian ini telah melewati tiga kali pemilihan rektor. Alhamdulillah pada priode kedua jabatan rektor Prof. Nur Ahmad Fadhil Lubis, PhD., MA., IAIN Sumatera Utara telah diizinkan berubah mejadi UIN Sumatera Utara melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014.

Perubahan dari IAIN menjadi UIN tentu saja bukanlah hanya sekedar mengikuti “budaya” latakisme, tetapi tujuan mendasar adalah untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi pada bidang keilmuan maupun tata laksana keorganisasian. Upaya restrukturisasi bidang keilmuan ini sejatinya telah diperankan sejak dimulai berbagai aktivitas dan kegiatan, yang ditandai antara lain dengan lahirnya program studi ekonomi Islam. Sesuai dengan struktur keilmuannya program studi ekonomi Islam yang semula berada pada Fakultas Syariah dewasa ini telah ditempatkan pada fakultas yang baru yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Adanya perubahan struktur bidang keilmuan dan tata laksana keorganisasian ini dengan semua kepentingan yang melekat pada dirinya, secara tidak langsung menjadi alasan perlunya transformasi IAIN menjadi UIN.

B. Kajian Ekonomi Islam dan Redefinisi Kajian Islam

Sewaktu diluncurkan gagasan untuk membuka program studi ekonomi Islam di IAIN Sumatera Utara ada sementara pihak yang keberatan dan mempertanyakan tentang keabsahan bidang kajian Ekonomi Islam dikembangkan di lingkungan IAIN. Pertanyaan berkisar antara lain tentang visi IAIN; apakah studi ekonomi Islam termasuk dalam bidang tanggung jawab keilmuan IAIN (?), dan juga sederet pertimbangan lainnya yang mengindikasikan bahwa pendidikan IAIN dipahami hanyalah sebatas studi ilmu-ilmu keagamaan dalam arti sempit.

Untuk kasus IAIN Sumatera Utara, jauh sebelumnya, sewaktu IAIN Sumatera Utara dipimpin oleh Rektor IAIN Sumatera Drs. H.A. Nazri Adlani yang menjabat sekitar tahun 80-an/90-an telah memperkenalkan IAIN Sumatera Utara ke “dunia luar”. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memupus kesenjangan dan anggapan bahwa IAIN hanya dipersiapkan untuk mendidik mahasiswa memahami ilmu-ilmu keagamaan (*al-ulum al-diniyyah*). Ilmu Syariah, ilmu Ushuluddin, ilmu Dakwah, ilmu Tarbiyah sepertinya dipahami dalam arti sempit dan terbatas, dan kebanyakan alumninya dalam kegiatan publik disertai pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. “Tukang Doa” umpamanya, untuk mengakhiri kegiatan dalam sebuah pertemuan dianggap sebagai kekhususan “profesi” dan “kompetensi” alumni IAIN. Padahal berdo’a itu adalah pekerjaan yang mulia setelah bekerja.

Rektor IAIN Sumatera Utara Drs. H.A. Nazri Adlani ternyata tidak mau terkurung dan terperangkap dalam kotak semacam itu. IAIN waktu itu dibawa berpikir di luar kotak. Berpikir “di luar kotak” (*out of the box*) adalah sebuah metafora bagi orang-orang yang berani dan bersedia berpikir secara berbeda, tidak biasa, atau tampil dengan perspektif baru, yang pada gilirannya mendapatkan model perubahan dan pembaharuan sebagai solusi dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Pemikir “di luar kotak” biasanya terbuka akan cara-cara baru dalam memandang sesuatu. Mereka berani mengambil resiko (*high risk taking*) dan melihat sesuatu dalam perspektif yang berbeda. Dalam suasana demikianlah, IAIN Sumatera Utara melakukan semacam restrukturisasi bidang keilmuan dengan melahirkan berbagai kegiatan, dan memasukkan ilmu ekonomi Islam dalam bidang kajian yang dikelola Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.

Sebuah perubahan memang tidak boleh dilakukan secara sporadis. Harus ada persiapan dan langkah-langkah yang dilakukan. Harus ada perencanaan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Setiap langkah yang dibuat harus jelas target dan tujuannya. Upaya melibatkan berbagai pihak di luar kotak mutlak perlu dilakukan. Bukan hanya sekedar perbandingan, dan memuaskan emosional, tetapi mengeksekusi keinginan dalam bentuk kegiatan.

Apa yang dilakukan dewasa ini di IAIN Sumatera Utara, meluncurkan dan menggunakan anggaran yang tidak kecil, melalui kunjungan dosen dan tenaga kependidikan ke luar negeri, dan ke tempat-tempat penting lainnya di dalam negeri, semestinya harus dibayar dengan melahirkan terobosan dan perubahan yang berarti bagi IAIN.

Merujuk kepada pengalaman dan pengembangan keilmuan yang dilakukan International Islamic University Malaysia (IIUM) atau yang dikenal juga dalam bahasa Melayu dengan nama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) adalah pilihan cerdas yang pertama dilakukan oleh IAIN Sumatera Utara dalam menentukan arah perubahannya. IIUM dengan kampus yang menempati lahan seluas 700 hektar, mendidik mahasiswa yang berasal dari 100 negara di dunia ini mengelola 8 Fakultas dan 3 Institut, yaitu: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas sains, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Ilmu Manajemen, Fakultas Teknik, Fakultas Arsitektur dan Rancang Bangun, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Wahyu dan Ilmu Sosial, Insitut kependidikan, (INSTED), Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam (INSTAC) dan Insitut Internasional Perbankan dan Keuangan Islam (IiBF). Walaupun Universitas ini berasaskan kepada ajaran Islam, namun mahasiswa non-muslim juga diterima sebagai mahasiswa.

Bermula dari kunjungan yang dilakukan ke IIUM dengan segala keunggulannya, oleh Rektor IAIN Sumatera Utara bersama Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution (Dekan Fakultas Syariah) dan didukung oleh pihak luar Prof. Bahauddin Darus (alm.) dari Universitas Sumatera Utara (USU), terniatlah membentuk sebuah forum kajian yang kemudiannya disepakati dengan nama Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI) di IAIN Sumatera Utara.

Menyangkut kepemimpinan dan lokasi FKEBI, semula ditawarkan ke USU dan UISU, namun kedua universitas tersebut tidak bersedia. Boleh jadi karena isu ekonomi Islam masih dihinggapi stigma negatif, berhadapan dengan ekonomi Pancasila. Kehadiran kajian ekonomi Islam, baca ekonomi syariah, pada saat itu masih ada yang memahami akan bertentangan dengan ekonomi Pancasila yang sedang gencar-gencarnya dikembangkan secara Nasional. Lalu atas kesepakatan bersama USU yang diwakili oleh Prof. Bahauddin Darus dan Prof. Hadibroto, UISU diwakili oleh Prof. Mustafa Majnu, IKIP diwakili oleh Prof Djanius Djamin, UMSU diwakili oleh Dr. Dalmi Iskandar diserahkanlah kepemimpinan forum kepada IAIN Sumatera Utara, melalui surat keputusan Rektor Drs. H. A. Nazri Adlani yang menetapkan Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution sebagai ketua Umum FKEBI yang posisinya sebagai lembaga non struktural di IAIN Sumatera Utara pada tahun 1990.

Pucuk dicita ulam tiba. Pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1412 H bertepatan dengan 1 November 1991, diprakarsailah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dan Pemerintah Republik Indonesia pendirian PT Bank Muamalat Indonesia yang operasinya dimulai pada 27 Syawal 1412 H/1 Mei 1992. Dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikawan Muslim (ICMI) se-Indonesia dan beberapa pengusaha Muslim serta masyarakat secara umum melalui komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp.84 Milyar pada saat penandatanganan akta pendirian. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian PT Bank Muamalat di Istana Bogor diperoleh penambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat dengan menanamkan modal senilai 106 Milyar. Kelahiran PT Bank Muamalat ini besar sekali pengaruhnya dalam rangka mendorong IAIN Sumatera Utara melalui FKEBI dalam melakukan kajian ekonomi Islam. Bahkan atas “keberanian” Rektor IAIN Sumatera Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution pada masa jabatannya, pengelolaan keuangan IAIN, gaji dosen dan pegawai, semuanya menggunakan jasa PT Bank Muamalat. Sebuah terobosan yang berlaku paling awal, di lingkungan IAIN se-Indonesia.

C. Langkah-langkah Awal yang Lebih Kongkrit

Kegiatan perdana yang membangun kepercayaan diri paling awal bagi FKEBI IAIN Sumatera Utara adalah menyelenggarakan Seminar Internasional dan Workshop Ekonomi Islam. Untuk mempermudah keluarnya izin kehadiran nara sumber dan pemakalah dari IIUM dan IKIM (Institut Kepahaman Islam Malaysia) yang untuk kegiatan ini dua lembaga dari Negara tetangga itu bekerjasama dengan IAIN Sumatera Utara, serta untuk menghilangkan kekhawatiran kemungkinan adanya “hambatan” bagi panitia pelaksana, maka Tema Seminar itu diperhalus menjadi “Seminar Internasional dan Workshop Ekonomi Islam Dalam Rangka Memperkaya Ekonomi Pancasila” (Kerjasama FKEBI IAIN Sumatera Utara, UIAM dan IKIM) dalam kegiatan yang berdurasi selama empat hari ini, 25-28 Oktober 1993 di kampus IAIN Sumatera Utara Jl. Sutumo Medan, diamanahi sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana adalah Ketua Jurusan Muamalat (M) Fakultas Syariah, saya sendiri, dengan Sekretaris Umum Drs. Palit Muda Harahap. Sebuah pengalaman kerjasama dengan pihak asing yang tidak membebani keperluan nara sumber dari anggaran IAIN Sumatera Utara. Keperluan transportasi dan akomodasi sepenuhnya disumbang mereka sendiri baik dari IIUM maupun IKIM.

Seminar Internasional dan Workshop Ekonomi Islam yang menghadirkan nara sumber di bawah kepemimpinan Dr. M. Kamal Hasan (Wakil Presiden IIUM) membawa sederetan pakar pemakalah dari Kulliyah Ekonomi dan Pengurusan IIUM dan dari IKIM yaitu:

1. Dr. Zakariya Man: *“Isu-Isu Ekonomi Dalam Masyarakat: Konsep Manusia, Nilai, Tujuan Hidup dan Perinsip-Perinsip Muamalah”*.

2. Dr. Syed Omar Bin Syed Agil: “*Sistem Ekonomi Dalam Orde Kemasyarakatan (Sosial) Islam*”.
3. Dr. Aidit Bin Haji Ghazali: “*Peranan Ekonomi Dalam Kebudayaan Umat Islam: Pemikiran dan Pelaksanaan Dasar Ekonomi Islam*”.
4. Dr. Syed Abdul Hamid Al-Junaid: “*Etika dan Ekonomi Dari Perspektif Islam*”.
5. Datuk Dr. Syed Othman Alhabsi: “*Relevansi dan Fungsi Lembaga Ekonomi Islam dan Syarat-syarat Untuk Mewujudkan Dinamisme Dalam Peranannya*”.
6. Dr. Dziauddin Bin Haji Ahmad: “*Perbezaan Diantara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Feqah dan Kesannya Terhadap Pengajian dan Pengubalan Dasar*”.
7. Dr. Zakaria Man (Makalah Tambahan): “*Cadangan kepada Kursus Ekonomi Islam Sebagai Salah Satu Disiplin di Peringkat Pengajaran*”.
8. M. Syafii Antonio (Pemakalah Dari Indonesia Alumni S2 IIUM). “*Prinsip dan Etika Bisnis Dalam Islam*”.

Empat malam tamu dan undangan seminar berada di kota Medan. Hampir dari seluruh IAIN se Indonesia dan PTAIS serta sejumlah PT Umum ada utusan yang ikut menghadirinya sebagai peserta aktif. Empat malam pula makan malam peserta berpindah-pindah tempat; atas undangan Rektor UISU, Ketua MUI Sumatera Utara, Ketua ICMI Sumatera Utara dan terakhir, hari keempat, dalam acara penutupan di Istana Maimun yang dihibur dengan Tarian Melayu, memenuhi undangan ketua Perbanas Medan, Hj. Djanius Djamin, SH., MS. Demikian antusiasnya isu ekonomi Islam ini mengeliat sehingga diliput tidak kurang dari 20 kali terbitan, baik oleh koran nasional, seperti dimuat berita Antara dan Republika, maupun oleh semua koran lokal kota Medan.

Dalam seminar ini ditetapkan Tim Perumus yang meliputi tiga bidang:

A. Bidang Kurikulum:

1. Dr. Abdul Hamid Al-Junaid (Ketua)
2. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution (Sekretaris)
3. Dr. Amrin Fauzi
4. Prof. Drs. H. Abdullah Yakub Hasibuan
5. Drs. H. M. Sayuti Hasibuan

B. Bidang Lembaga-Lembaga Ekonomi Islam

1. Drs. H.S. Pulungan (Ketua)
2. Drs. Jhon Tafbu Ritonga (Sekretaris)
3. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec.
4. Syahrul Muda Siregar

5. Hj. Djanius Djamin SH., MS.
6. Drs. Asraruddin ZA
7. H. Rosdin bin Abdul Wahid
8. H. Mohd. Din Bin Yusof

C. Bidang Kerjasama

1. Drs. H. A. Nazri Adlani (Ketua)
2. Prof. Dr. M. Ridwan Lubis (Sekretaris)
3. Prof. Bahauddin Darus
4. Dr. Syed Othman Alhabsi
5. Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.

Rumusan tiga bidang itu telah melahirkan tiga kesimpulan strategis yang secara bertahap ditindak lanjuti oleh IAIN Sumatera Utara dengan berbagai program dan kegiatan. Ada tekad yang kuat dari IAIN Sumatera Utara waktu itu bahwa hasil seminar ini bukanlah hanya sekedar dokumen tertulis untuk sekedar melengkapi laporan pertanggungjawaban, tetapi yang paling penting mengeksekusi keputusan itu secara bertahap.

Eksekusi pertama, menyangkut rumusan kurikulum sekaligus memperkenalkan ekonomi Islam melalui berbagai jenjang pendidikan. Rumusan kurikulum ini dipergunakan sebagai bahan awal melahirkan Program D2 Perbankan dan Keuangan Syariah yang dibuka setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Senat IAIN Sumatera tahun 1998 di bawah pengelolaan Drs. Syuaibun, M.Hum. sebagai ketua program, dan Drs. Agustianto sebagai Sekretaris. Kemudiannya setelah berselang satu tahun tepatnya tahun 1999, karena berbagai pertimbangan dan tuntutan pasar kerja Program D2 diubah menjadi Program D3 Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah (MPKS) di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.

Bertepatan adanya mandat yang diperluas (*wider mandate*) yang ditetapkan atas kebijakan Departemen Agama RI., IAIN Sumatera Utara mengembangkan program sarjana (S1) Ekonomi Islam di Fakultas Syariah. Bermodal dengan kurikulum yang telah ada serta disempurnakan melalui kerjasama dengan Karim Bussines Consulting, dibuat kontrak antara Dekan Fakultas Syariah dan Ir. Adiwarman Karim mempersiapkan Program Sarjana (S1) Ekonomi Islam di Fakultas Syariah. Kontrak kerjasama ini dibuat untuk menyempurnakan kurikulum yang lengkap dengan silabus dan daftar referensi setiap mata kuliah. Dalam kontrak diperjanjikan bahwa 2 orang dosen ekonomi Islam, yaitu Dr. Faisar Ananda dan Irwin, SE. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Islam diadakan pelatihan khusus dalam pengelolaan program studi. Program Studi S1 Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dibuka dan disahkan melalui rapat senat IAIN Sumatera Utara pada tahun 2002.

Eksekusi kedua melahirkan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah di IAIN Sumatera Utara, yang dalam realisasinya membentuk PT BPRS Puduarta Insani IAIN Sumatera Utara tahun 1996, yang sesungguhnya mendahului lahirnya program studi Ekonomi Islam. Adanya lembaga keuangan syariah dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di IAIN Sumatera Utara, turut memperkuat lahirnya program studi ekonomi Islam sebagai upaya menyiapkan sumber daya insani yang handal dan profesional. Di lingkungan PTAIN dan PTAIS yang dikelola oleh Kementerian Agama sampai dewasa ini barulah IAIN Sumatera Utara yang memiliki lembaga keuangan syariah dalam bentuk perbankan syariah.

Sebelum lahirnya PT BPRS Puduarta Insani, sejatinya FKEBI telah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengelola BPRS di kampus IAIN Jl. Sutomo pada tahun 1994. Kegiatan ini bersamaan dilakukan dengan terbentuknya BPRS Kafalatul Ummah di Kampung Lalang Deli Serdang, BPRS Amanah Bangsa di Pematang Siantar dan BPRS Al-Washliyyah di Tanjung Morawa Deli Serdang. Pada tahun 1996 bersamaan dengan terbentuknya BPRS Puduarta Insani lahir pula PT BPRS Gebu Prima yang bertempat di Mandala Deli Serdang. Semua BPRS ini adalah tempat magang mahasiswa Fakultas Syariah program studi Ekonomi Islam, di samping juga dilakukan praktik kerja di beberapa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah yang ada di kota Medan.

Dalam mengeksekusi kesimpulan ketiga Seminar Internasional dan Workshop ekonomi Islam terkait dengan membangun kerjasama (*net working*), IAIN Sumatera Utara terlibat melahirkan “Konvensi Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia” yang dideklarasikan di Istana Wakil Presiden pada 2 Maret 2004. Unsur yang mewakili IAIN Sumatera dalam konvensi itu adalah Dekan Fakultas Syariah, sekaligus dalam jabatannya sebagai ketua umum FKEBI IAIN Sumatera Utara melanjutkan kepemimpinan Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, bersama staf dosen Drs. Agustianto M.Ag., dan beberapa dosen ekonomi Islam lainnya. Satu tahun setelah terbentuknya organisasi yang berbasis di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia ini dilaksanakan Mukhtamar Nasional I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) pada tgl 18-19 September 2005 di Hotel Garuda Plaza Medan, dengan agenda utama pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang pelaksanaannya mendapat topangan pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Utara.

D. Ekonomi Islam: Antara Kajian Kampus dan Praktik Masyarakat

Tumbuhnya kepercayaan berbagai pihak kepada IAIN Sumatera Utara dalam membina dan mengelola pendidikan ekonomi Islam dalam semua

jenjang pendidikan (program diploma, program S1, program S2 dan program S3) dewasa ini sudah barang tentu tidak terlepas dari penilaian terhadap sederatan kegiatan yang telah dilakukan dalam sejumlah jalinan kerja sama baik regional, nasional maupun internasional. Pada tahun 2003, persis satu tahun setelah dibukanya oleh IAIN Sumatera Utara program studi S1 Ekonomi Islam di Fakultas Syariah, Gubernur Sumatera Utara H.T. Rizal Nurdin (alm) bekerja sama dengan FKEBI dan semua komponen penggiat ekonomi Islam dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram melaksanakan “Pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah” pada tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pencanangan ini sesungguhnya mendahului Pencanangan “Gerakan Ekonomi Syariah” (GRES!) yang dilakukan secara Nasional oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 November 2013 di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Banyak kegiatan kerjasama yang telah dilakukan IAIN Sumatera Utara. Melalui Lembaga Non Struktural FKEBI dengan moto kerjanya “Merajut Potensi Ekonomi Membangun Kekuatan Umat”, IAIN Sumatera Utara bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Medan dan didukung oleh Pemprov Sumut, Pemkot Medan, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbindo) Sumut, dan BMPD Sumut menyelenggarakan kegiatan spektakuler “Syariah Fair dan Bazar UMK” bulan Januari 2007 selama satu bulan penuh. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh wakil Presiden RI., H.M. Yusuf Kalla, pada tanggal 14 Januari 2007 di Kampus IAIN Sumatera Utara Jln Sutomo Medan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh Nasional. Dalam sambutannya Wapres mengatakan bahwa “kejujuran adalah syarat mutlak dalam mengembangkan dan mendukung gerakan dan geliat ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi Syariah dan jasa perbankan yang dibangun berdasarkan konsep hukum ekonomi Islam (*fiqh al-mu`amalah al-maliyah*) meniscayakan adanya landasan moral yang lebih kuat, yaitu “Super Jujur” (*al-Shiddiq*)”.

Dalam Statistik Perbankan Syariah per Juli 2013, Bank Umum Syariah (BUS) atau yang disebut dengan *Islamic Comercial Bank*, berjumlah 12 Bank terdiri atas:

1. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Syariah Mandiri
3. PT. Bank Syariah Mega Indonesia
4. PT. Bank Syariah BRI
5. PT. Bank Syariah Bukopin
6. PT. Bank Panin Syariah
7. PT. Bank Victoria Syariah
8. PT. BCA Syariah
9. PT. Bank Jabar dan Banten

10. PT. Bank Syariah BNI
11. PT. Maybank Indonesia Syariah.
12. PT. BTPN Syariah (khusus yang terakhir ini baru diresmikan pada 2014)

Dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), yang disebut juga dengan *Islamic Business Unit of Conventional Bank* adalah:

1. PT. Bank Danamon
2. PT. Bank Permata
3. PT. Bank Internasional Indonesia (BII)
4. PT. CIMB Niaga
5. HCBC Ltd.
6. PT. Bank DKI
7. BPD DIY
8. BPD Jawa Tengah (Jateng)
9. BPD Jawa Timur (Jatim)
10. BPD Banda Aceh
11. BPD Sumatera Utara (Sumut)
12. BPD Sumatera Barat (Sumbar)
13. BPD Riau
14. BPD Sumatera Selatan (Sumsel)
15. BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)
16. BPD Kalimantan Barat (Kalbar)
17. BPD Kalimantan Timur (Kaltim)
18. BPD Sulawesi Selatan (Sulses)
19. BPD Nusa Tenggara Barat (NTT)
20. PT. BTN
21. PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN)
22. PT. OCBC NISP
23. PT. Bank Sinarmas
24. BPD Jambi.

Perkembangan ekonomi Islam atau disebut juga ekonomi syariah di Indonesia di samping ditandai melalui banyaknya jumlah entitas bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bank, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang jumlahnya semakin bertambah, juga bertumbuh dalam LKS non Bank, seperti Baitulmal wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, Lembaga Wakaf, dan sebagainya. Pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tercatat dalam 24 unit itu mempunyai jaringan sebanyak 550 kantor, sementara

itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 160 unit dengan jaringan 398 kantor yang tersebar di sebahagian besar wilayah Nusantara. Pertumbuhan Perbankan Syariah dan perluasan jaringan kantor telah berkontribusi meningkatkan pengguna bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah total rekening Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha syariah (UUS) yang dewasa ini telah mencapai 14.726.798 rekening, dan jumlah dana yang bergerak di BPRS sebesar 1.100.058 rekening. Dengan berjalannya waktu sudah barang tentu angka ini bergerak terus menuju jumlah yang lebih besar lagi.

Penyediaan Sumber Daya Insani (SDI yang handal dan profesional baik kualitas maupun kuantitas dalam merespons pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah secara nasional memang masih merupakan tantangan yang tidak ringan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah secara kuantitas membutuhkan SDI sekurang-kurangnya 11.000 per tahun. Sementara Lembaga Pendidikan Tinggi saat ini hanya menutupi kebutuhan SDI sekitar 3.750 per tahun. Dari segi kualitas, SDI Lembaga Keuangan Syariah memikul tanggung jawab lebih berat, dan dituntut menguasai dua disiplin ilmu sekaligus, di samping paham dengan ilmu ekonomi secara umum juga harus memiliki pengetahuan tentang ilmu syariah. Kedua disiplin ini dalam studi ekonomi Islam diintegrasikan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.

Peran lembaga Pendidikan Tinggi Islam dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dan industri keuangan syariah sejatinya sangat besar sekali. Hampir semua Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama, baik negeri maupun swasta telah membuka program studi ekonomi syariah. Saya sebagai salah seorang Asesor BAN PT Kementerian Riset dan DIKTI sering mendapat tugas mengakreditasi program studi ekonomi syariah yang ada di Indonesia dan menemukan kualitasnya sangat rendah dan jauh dari yang diharapkan

Pada tahun 2014 ini telah diresmikan 8 (delapan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di lingkungan Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, salah satunya di UIN Sumatera Utara. Program studi Ekonomi Islam yang semula berada di Fakultas Syariah sekarang sudah dipisahkan dan dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di lingkungan IAIN dan UIN. Di samping itu ada sejumlah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) baik negeri maupun swasta yang juga berperan menyiapkan SDI Lembaga Keuangan Syariah.

Di lingkungan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Riset dan Dikti, program studi ekonomi Islam dan keuangan syariah berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Boleh dikatakan dewasa ini program studi ekonomi Islam di Indonesia sedang *booming*. Bahkan jumlah pendidikan tinggi yang mengelola Program Studi Ekonomi Islam yang berada dalam negeri jumlahnya melebihi apa yang ada di luar negeri. Namun kelemahan

yang masih dirasakan adalah menyangkut kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang secara riil, dapat menyahuti kebutuhan pasar keuangan syariah. Penyiapan tenaga kependidikan dan dosen yang mempunyai kompetensi yang dapat memadukan ilmu ekonomi dan ilmu syariah secara baik masih merupakan tantangan. Untuk itu lembaga pendidikan perlu melakukan langkah percepatan penguasaan ilmu ekonomi Islam melalui pendidikan dan pelatihan baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama lembaga pendidikan dengan lembaga keuangan mutlak perlu dilakukan, agar kebutuhan terhadap tenaga kerja trampil (*skilled labour*) dapat dihasilkan.

Keberadaan UIN Sumatera Utara dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) harus dapat dipastikan menjadi jawaban bagi mempersiapkan dosen dengan kualifikasi dan kompetensi yang dapat menghasilkan lulusan menjadi Sumber Daya Insani (SDI) yang handal dan profesional. Kesiapan pembiayaan, sarana dan prasarana yang berkualitas serta sistem informasi yang dapat mengakses pengelolaan data dan penyelenggaraan program akademik dipastikan tersedia pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara. Adanya kepercayaan dewasa ini yang diberikan untuk mendidik mahasiswa yang memperoleh beasiswa Kementerian Agama Program Doktor (S3) Ekonomi Islam pada Program Pasca Saarljana UIN Sumatera Utara adalah tanggung jawab yang tidak ringan. Untuk lebih efektifnya pengelolaan program studi Ekonomi Islam pada waktunya nanti diagendakan bahwa jenjang pendidikan tinggi, program sarjana (S1) program Magister (S2) dan program Doktor (S3) ekonomi Islam harus berada di bawah pengelolaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

E. Penutup

Adanya perubahan struktur bidang keilmuan dan tata laksana keorganisasian di UIN Sumatera Utara sebagai dampak dari perubahan IAIN menjadi UIN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 ini adalah sebuah keniscayaan. Kilas balik dari proses lahirnya program studi ekonomi Islam di IAIN Sumatera Utara seperti yang telah dipaparkan dalam antologi ini, diharapkan menjadi inspirasi bagi lahirnya program studi-program studi yang lain di UIN Sumatera Utara.

Kelahiran sebuah program studi, lebih-lebih untuk kemudian merubahnya menjadi Fakultas, sudah barang tentu terkait dengan kebutuhan pengembangan akademik dan keilmuan yang sekaligus mendapat dukungan *stakeholder* dan semua pihak yang berkepentingan. Keberadaan sebuah fakultas diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan tuntutan riil kehidupan, sekaligus juga memberi arti yang besar bagi kehadiran Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

INTER-METHOD (METODE DUA ARAH) **Metode Baru Studi Islam di UIN SU**

Hasan Bakti Nasution

Profesor Metode Studi Islam pada Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Ibarat sumber mata air, pencarian tentang metode baru terhadap studi Islam merupakan upaya yang tiada berakhir, baik yang dilakukan oleh ilmuwan Muslim maupun bukan Muslim.¹ Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti kuatnya keinginan bagaimana agar ajaran Islam bisa dipahami untuk diamalkan dalam kehidupan keseharian, karena sehebat apapun Islam tidak akan memiliki makna jika tidak diaplikasikan, dan ini merupakan tuntutan keimanan.² Faktor lainnya ialah karena kebutuhan manusia akan pegangan hidup yang memberinya jaminan bagi keselamatan dunia dan akhirat, dan nampaknya harapan itu ada pada agama Islam³ serta faktor-faktor lainnya.

Itulah sebabnya terus bermunculannya model-model studi dan pendekatan dalam studi Islam. Jika dikaitkan dengan keilmuan, paling tidak ada tiga

¹ Dari kalangan Muslim dapat dilihat pada beberapa karya, seperti Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975); M. Amin Abdullah, *Studi Islam, Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), dan sebagainya. Sedangkan karya dari bukan Muslim dihimpun oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis (ed.) *Introductory Reading Islamic Studies* (Medan: IAIN Press, 1998).

² Sejalan dengan unsur iman yang tidak hanya sebagai keyakinan dalam hati (*tashdiq*) yang diucapkan dengan lidah (*iqrar*) tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan keseharian (*a'mal*). Walau menjadi perdebatan di kalangan teolog tentang a'mal di antara unsur dan kesempurnaan iman, namun semuanya sepakat bahwa a'mal adalah hal penting dan merupakan perwujudan dari iman dan kesempurnaan iman. Mengenai perdebatan ini lihat antara lain: Harun Nasution, *Teologi Islam, Sejarah, Aliran, Analisa Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), khususnya bagian perbandingan.

³ Islam memberi jaminan dengan mengamalkan ajaran Islam seperti tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis akan diperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Sejarah panjang Islam juga membuktikan bahwa dengan mengamalkan Islam umatnya memperoleh kejayaan sebagaimana pernah terjadi pada era klasik.

metode, yaitu profesionalisasi, inter-disipliner, dan multi disipliner. Profesionalisasi adalah suatu metode yang mengkaji Islam dengan satu pendekatan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Adapun interdisipliner ialah mengkaji Islam dengan cara menggunakan dua disiplin ilmu, Sedangkan multidipliner banyak disiplin ilmu.

Bagaimanapun ketiga metode di atas masih dihadapkan pada tantangan baru yang belum terjawab, seperti kenyataan bahwa keilmuan yang ada cenderung berserakan dan dikotomis. Metode ini berupaya memberikan jawaban dari titik yang belum terjawab itu. *Inter-method*, yaitu metode dua arah studi Islam akan berupaya tampil sebagai jawabannya, dan itulah yang menjadi bidang kajian makalah ini. Uraianya dibagi kepada tujuh bagian, yaitu pendahuluan, pengertian, cara kerja pertama, cara kerja kedua, keunggulan, kualifikasi, penutup.

B. Pengertian

Kata *inter-method* terdiri dari dua suku kata, yaitu *inter* dan *method*. *Inter* mengandung arti antara,⁴ seperti internasional berarti antar bangsa-bangsa. Kata metode berasal dari bahasa Greek (Yunani) yang terdiri dari kata “*meta*” yang berarti melalui, dan kata “*hodos*” yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Secara operasional, metode memiliki banyak pengertian, seperti (1) Suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan; (2) Suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu; (3) Suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur; dan (d) cara kerja yang sistematis yang digunakan untuk memahami suatu obyek yang dipermasalahkan atau realitas yang diteliti.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disederhanakan bahwa *method* ialah cara untuk sampai pada satu tujuan atau cara meraih sesuatu.⁶ Kata ini diindonesiakan dengan kata metode. *Inter-method* dengan demikian adalah metode dua cara atau dua arah dalam kajian Islam. Kedua cara atau dua arah itu ialah:

- a. Bergerak ke luar, yaitu eksternalisasi atau institusionalisasi nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis ke dalam wujud ilmu-ilmu baru. Disebut keluar karena Al-Qur’an dan hadis menjadi titik awal (*starting point*), dari keduanya lah muncul dan dimunculkan ilmu-ilmu baru.

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 98.

⁵ http://profilaminkutbi.blogspot.com/2010/01/makalah-metode-penelitian-pondidikan_19.html - [ftn2](#)

⁶ *Ibid.*, h. 101.

- b. Bergerak ke dalam, yaitu upaya merumuskan akar teologis dari ilmu-ilmu yang berkembang sehingga memiliki tautan dengan Al-Qur'an dan hadis. Disebut masuk ke dalam karena ilmu-ilmu luar dimasukkan ke dalam zona Al-Qur'an dan hadis, sesuai dengan misinya yang mencakup seluruh aspek kehidupan (Q.S. an-Nahl/16: 89).⁷

C. Cara Kerja Pertama

Cara kerja metode pertama atau bergerak keluar ialah sebuah cara yang eksternalisasi dan institusionalisasi nilai dan kandungan Al-Qur'an dan hadis dalam wujud ilmu-ilmu baru. Adapun langkah-langkahnya ialah:

1. Pembuatan lapisan-lapisan ilmu-ilmu keislaman

Dalam kaitan ini dirumuskan adanya empat lapisan, yaitu:

- a. Lapisan pertama ialah Al-Qur'an dan hadis. Pada lapisan ini Islam dipandang sebagai dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang bisa disebut sebagai Islam tekstual. Lapisan ini sekaligus sebagai inti, karena darinya semua keilmuan Islam dikeluarkan/dikembangkan. Dengan kata lain, ilmu-ilmu dalam Islam haruslah memiliki akar dari sumber Al-Qur'an dan hadis.
- b. Lapisan kedua 'Ulum Al-Qur'an dan 'Ulum al-Hadis. Untuk memahami kedua sumber ini (Al-Qur'an dan hadis) dibutuhkan metode tersendiri; untuk memahami Al-Qur'an dibutuhkan 'Ulum Al-Qur'an dan tafsir. Yang dimaksud dengan 'Ulum Al-Qur'an ialah "pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an segi-segi nuzulnya, tertibnya, pengumpulannya, penulisannya, *qira'atnya*, tafsirnya, kemukjizatannya, *nasikh* dan *mansukh*, dan bantahan terhadap *syubhat* yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Qur'an dan seumpama itu".⁸ Sedangkan tafsir ialah ilmu yang menjelaskan dan menerangkan (*al-idhah wa al-bayan*) kandungan Al-Qur'an sesuai dengan petunjuk (*dilalah*) yang zahir sebatas kemampuan manusia. Atau penjelasan makna ayat dengan lafaz yang menunjukkan dalil secara terang.⁹ Berdasar pengertian ini, tafsir berfungsi menjelaskan segala yang disyariatkan Allah swt. kepada manusia untuk ditaati dan dilaksanakan.¹⁰

⁷ Artinya: "Dan Kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat serta pemberi kabar gembira bagi orang-orang beriman".

⁸ Abdul Azhim al-Zarqani, *Manahil Al-Qur'an fi 'ulum Al-Qur'an* (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, t.t.), jilid I, h. 79.

⁹ Asmuni Abdurrahman, *Memahami Al-Qur'an*, pada: "Suara Muhammadiyah", edisi 15 tahun 1995, h. 27.

¹⁰ Abdul Hayyi al-Farmawi, *'ulum al-Tafsir* (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, 1977), h. 17-20.

Kemudian untuk memahami hadis dibutuhkan ‘Ulum al-Hadis yaitu ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis, seperti makna hadis dan sunnah, fungsi hadis, sejarah penulisan hadis, perkembangan studi hadis, *asbab al-wurud*, dan sebagainya. Selanjutnya dibutuhkan ilmu yang terkait dengannya, yaitu *Mushthalahat al-hadis*, sebagai ilmu yang mengkaji makna hadis, sunnah, matan, dan pendekatan memahaminya, seperti pendekatan ilmu hadis *dirayah*, *rijalu al-hadis*, *jarh wa at-ta’dil*, *gharib al-hadis*, *‘ilal al-hadis*, dan sebagainya.¹¹

Pada lapisan ini Islam hadir dalam empat bentuk keilmuan, yaitu (1) ‘ulum Al-Qur’an (2) ‘ulum at-tafsir, (3) ‘ulum al-hadis, dan (4) *mushthalahat al-hadis*.

- c. Lapisan ketiga ‘ulum al-din, yaitu ilmu-ilmu agama. Dengan penguasaan dan penerapan keempat ilmu di atas (‘ulum Al-Qur’an, ‘ulum at-tafsir, ‘ulum al-hadis, dan *mushthalahat al-hadis*) akan lahirlah ilmu-ilmu agama (‘ulum al-din), yaitu:

- 1) Fikih, sebagai ilmu tentang hukum syariat yang praktis yang digali dari dalil secara terperinci (*al-‘ilm bi-ahkam al-syar‘iyyah al-‘amaliyyah al-muktasabah min adillat al-tafshiliyyah*).¹² Ilmu ini muncul setelah memahami Al-Qur’an melalui ‘Ulumul Qur’an/tafsir dan juga setelah memahami hadis melalui ‘Ulumul Hadis. Misalnya shalat ditetapkan hukumnya wajib setelah membaca ayat Al-Qur’an: “*wa aqimu al-shalata*” (Q.S. an-Nisa’/4: 76) dan hadis Nabi dalam bentuk pengamalan (*hadis fi’liyy*) dan dalam bentuk ucapan (*hadis qawliyy*), yang berbunyi: “*shallu kama ra’aytumuni ushalli* (shalatlah kamu sebagaimana cara saya melaksanakan shalat).
- 2) Ushul fikih,¹³ yaitu suatu ilmu yang mengkaji teori-teori atau metode-metode yang digunakan dalam merumuskan hukum Islam berdasarkan dalil secara terperinci (*al-‘ilm bi al-manhaj li istibath al-ahkam al-syar‘iyyah al-‘amaliyyah min adillatiha al-tafshiliyyah*).¹⁴ Dalam arti sederhana bisa disebut sebagai ilmu tentang dalil, yaitu dalil dari suatu

¹¹ Kajian tentang kedua ilmu ini dapat dilihat pada literatur tentang ‘ulum al-hadis dan *mushthalahat al-hadis*, seperti: Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975); Shubhi ash-Shalih, *Ushul al-Hadis wa Mushthalahuh* (Beirut: Dar al-‘Ilm, 1977); dan lain-lain.

¹² Muhammad Salam Madkur, *Madkhuul al-Fiqh al-Islamiyy* (Kairo: Dar al-Qawmiyyah, 1964), h. 11; Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Mesir: Isa Baby al-Halaby, t.t.), h. 11.

¹³ Dari kata *ushul* yang berarti dasar dan *fiqh* yang berarti fikih. Ushul Fiqh ialah dasar-dasar dari fiqh.

¹⁴ Lihat Abdul Wahab Khallaf, *‘ilm Ushul al-Fiqh* (Mesir: Mushatafa Baby al-Halaby, t.t.), h. 12; dan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Kaedah-Kaedah Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Almaarif, 1986), h. 17.

ketetapan hukum. Misalnya, shalat hukumnya wajib karena (dalilnya) ayat Al-Qur'an "*aqimu ash-shalata*" (Q.S. an-Nisa'/4: 77). Ushul Fikih berperan merumuskan dalil dari kewajiban shalat.

- 3) Tauhid,¹⁵ yaitu ilmu yang membicarakan keesaan Allah, baik zat maupun sifat dan *af'al*-Nya.¹⁶ Seperti dua ilmu sebelumnya, ilmu ini juga lahir sebagai respon terhadap Al-Qur'an dan hadis yang dipahami melalui keilmuannya, seperti surat al-Ikhlash yang artinya: "*Katakan, Dialah Yang Maha Esa. Allah ialah yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu; Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia*" (Q.S. al-Ikhlash/112: 1-5). Juga dipahami dari beberapa hadis Nabi Muhammad saw. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, misalnya, menjadikan poin tidak menyekutukan Allah sebagai poin pertama. Keenam poin itu ialah (1) Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun (2) tidak mencuri (3) tidak berzina (4) tidak membunuh anak-anak (5) tidak membuat fitnah antara sesama, dan (6) tidak durhaka kepada perintah kebaikan...".¹⁷
- 4) Kalam,¹⁸ adalah keilmuan yang pada awalnya membicarakan apakah kalam Allah (Al-Qur'an) *qadim* atau *hadis* (baharu). Dalam perkembangannya kalam membicarakan tiga aspek terkait, yaitu (a) *ma'rifat al-mabda'*, pengenalan terhadap sumber yaitu Allah; (b) *ma'rifat al-ma'ad*, pengenalan terhadap yang dijanjikan, yaitu surga, neraka, *mizan*, *shirat*, dan lain-lain; dan (c) *ma'rifat al-wasithah*, pengenalan terhadap perantara Tuhan dan manusia, yaitu malaikat, Nabi/Rasul, dan kitab suci.
- 5) Falsafah,¹⁹ yaitu ilmu tentang hakekat segala sesuatu sesuai dengan

¹⁵ Dari kata dasar *wahhada-yuwahhidu-tawhidan*, yang berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah.

¹⁶ Bandingkan Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid* (Mesir: Mushatafa Baby al-Halaby, 1960).

¹⁷ Lihat Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid I, hadis ke 13.

¹⁸ Diambil dari kata *kalam*, yaitu *Kalamullah* (Al-Qur'an). Disebut *kalam* karena perdebatan awal yang menyebabkan lahirnya ilmu ini ialah tentang kalam Allah, apakah *qadim* atau *huduts* (baru). Perdebatan ini dituangkan dalam bentuk kata-kata (*kalam* = berkata-kata) dengan menggunakan argumentasi rasional yang diselaraskan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis.

¹⁹ Kata falsafah atau filsafat memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, yang ada hanya kata yang semakna dengannya, yaitu kata hikmah yang disebut sebanyak 20 kali di dalam Al-Qur'an yang tampil dalam tiga bentuk; hikmah secara umum, hikmah yang dikaitkan dengan kekuasaan, dan hikmah yang diakitkan dengan kitab suci. Kata hikmah dalam arti umum sebagai padanan kata filsafat terdapat dalam surat al-Baqarah: 269, yang artinya: "*Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang diberikan hikmah akan memperoleh kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal*". Bandingkan:

keberadaannya (*al-'ilm bi al-mawjud bima huwa mawjud*).²⁰ Bisa juga diartikan sesuai fungsinya, yaitu mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.²¹ Ilmu ini mengadakan kajian terhadap tiga bidang, yaitu tentang Tuhan (teologi), tentang alam (kosmologi), dan tentang manusia (antropologi). Kajian tersebut dilakukan secara logis, sistematis, radikal dan universal, sehingga memiliki pengetahuan yang menyeluruh (*kulli*) terhadap tiga bidang tersebut. Dalam konteks filsafat Islam kajian tersebut diselaraskan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

- 6) Tasawuf,²² yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ila Allah*). Manusia dekat dengan Tuhan sehingga ia merasa bahwa dirinya berada dalam pengawasan Allah swt. (*muraqabah*). Agar manusia bisa dekat dengan Tuhan, manusia harus membersihkan dirinya karena Tuhan Maha Suci. Caranya ialah dengan meninggalkan segala perbuatan buruk yang dilarang Allah (*takhalliy*) sekaligus mengisi dengan perbuatan kebaikan (*tahalliy*). Penyucian diri adalah kunci dari kajian tasawuf sehingga disebut dengan ilmu penyucian diri (*tashawuf*).²³
- 7) Tarekat²⁴ adalah kelanjutan dari tasawuf. Jika tasawuf bersifat personal seiring dengan perkembangannya muncul kecenderungan penyucian diri secara berkelompok, maka disusunlah metode-metode pendekatan diri. Jika zikir sebagai salah satu media penyucian maka disusunlah metode zikir yang menenangkan hati. Dalam perkembangan selanjutnya tasawuf menjadi kegiatan kelompok sehingga lahirlah tarekat. Dari

Hasan Bakti Nasution, *Hikmah Muta'aliyah, Pengantar Filsafat Islam Kontemporer* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 37-38.

²⁰ Hasan Bakti Nasution, *Filsafat Umum* (Bandung: Citapustaka Media, 2005), h. 18.

²¹ Omar Muhamamd ath-Thoumy al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 25.

²² Dari kata *shafa* yang berarti bersih atau suci, tasawuf ialah disiplin ilmu yang menguraikan cara menyucikan diri. Pelakunya disebut sufi, yaitu orang sufi. Mengenai pengertian tasawuf ini dapat dilihat antara lain: Harun Nasution, *Filsafat dan Misitisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), khususnya yang membicarakan tasawuf.

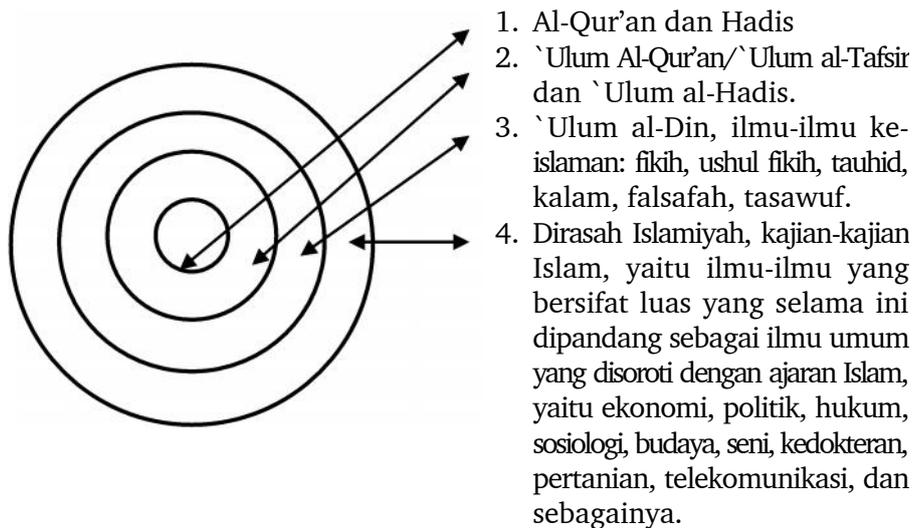
²³ Bahasan terhadap tasawuf banyak ditemukan dalam berbagai karya, termasuk karya orientalis, seperti: Abu Nashr al-Sarraj al-Thusi, *Al-Luma'* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1980); Abd. Razaq al-Kassani, *Ishthilihat al-Shufiyyah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1995), A.J. Arberry, *Sufism* (London: Goerge Allen & Unwin Ltd, 1963); dan lain-lain.

²⁴ Kata tarekat berasal dari kata bahasa Arab *thariqah* yang berarti jalan, yaitu jalan menuju kebenaran. Sinonim dari kata ini ialah *sabil*, *sirath*, *manhaj* atau *minhaj*, *suluk* atau *maslak* atau *mansak*. Loius Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), h. 465.

kata *thariq* yang berarti jalan, tarekat adalah jalan yang ditempuh dalam upaya mendekati diri kepada Allah swt. Rumusan jalan itu bervariasi sesuai dengan pengalaman spiritual (*khibrat*) pengamalnya maka lahirlah beberapa aliran tarekat yang dikaitkan kepada pendirinya, seperti Naqsyabandiyah, Rifa'iyah, Saziliyah, Sammaniyah, Qadiriyyah, dan sebagainya.²⁵

- d. Lapisan keempat *dirasah al-Islamiyah*. Pada lapisan ini Islam sudah tampil dalam bentuk keilmuan yang lebih luas karena ia berhadapan dengan ilmu-ilmu yang bersifat umum yang sudah eksis, yaitu ekonomi, politik, hukum, sosiologi, budaya, seni, kedokteran, pertanian, telekomunikasi, dan sebagainya. Secara sumber dan metodologi, ilmu-ilmu ini muncul dari ajaran dasar Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Keempat lapisan itu dapat disederhanakan pada gambar berikut:



2. Hubungan lapisan-lapisan

Dengan demikian terdapat hubungan yang linear dan progresif (keluar) antara lapisan-lapisan (lapisan satu sampai empat), sebagai berikut:

- a. Lapisan pertama merupakan dasar pijakan bagi lapisan kedua, dan lapisan kedua merupakan pengembangan dan pemunculan baru dari lapisan pertama. Sebagai dasar pijakan, maka lapisan kedua harus selalu menjadi

²⁵ Tentang aliran-aliran tarekat ini dapat dilihat antara lain: J. Spencer Trimingham, *The Sufi Orders in Islam* (London: Oxford University Press, 2000); Khalili al-Bamar Hanafi, *Ajaran Tareqat* (Surabaya: Bintang Remaja, 1990), dan lain-lain.

bagian dari lapisan pertama serta memiliki akar pada lapisan pertama, sehingga tetap memiliki kaitan yang koheren. Begitu juga lapisan kedua, sebagai pengembangan dan pemunculan baru dari lapisan pertama, nilai lapisan pertama harus tetap inheren di dalamnya.

- b. Lapisan kedua merupakan dasar pijakan bagi lapisan ketiga, dan lapisan ketiga merupakan pengembangan dan pemunculan baru dari lapisan kedua. Sebagai dasar pijakan, maka lapisan ketiga harus selalu menjadi bagian dari lapisan kedua serta memiliki akar pada lapisan kedua, sehingga tetap memiliki kaitan yang koheren. Begitu juga lapisan ketiga, sebagai pengembangan dan pemunculan baru dari lapisan kedua, nilai lapisan kedua harus tetap inheren di dalamnya.
- c. Lapisan ketiga merupakan dasar pijakan bagi lapisan keempat dan lapisan keempat merupakan pengembangan dan pemunculan baru dari lapisan ketiga. Sebagai dasar bagi lapisan keempat, maka ia harus menjadi bagian komponen dan sekaligus sebagai nilai bagi lapisan keempat.
- d. Lapisan keempat merupakan pengembangan dan pemunculan baru dari lapisan ketiga. Sebagai pengembangan dari lapisan ketiga, seperti disebut di atas, maka lapisan ketiga haruslah sebagai pemberi nilai bagi lapisan keempat ini. Dengan kata lain, semua ilmu-ilmu yang termasuk dalam lapisan keempat (dirasah Islamiyah) haruslah menjadi bagian komponennya.

D. Cara Kerja Metode Kedua

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa cara kerja dan tugas cara pertama ialah bagaimana agar Al-Qur'an dan hadis dimanifestasikan atau bermetamorfosis dalam bentuk ilmu-ilmu baru sehingga maknanya lebih dipahami dan kandungannya bisa diamalkan, yang berujung pada ilmu-ilmu yang lebih umum yang disebut dengan dirasah Islamiyah. Disebut dirasah Islamiyah karena menjadi ajang kajian Islam yang sesuai dengan keluasan kandungannya tidak melepaskan diri dari kajian ilmu-ilmu tersebut. Bahkan, ilmu-ilmu yang belum muncul, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, sains teknologi, dan sebagainya.

Adapun tugas dari cara kerja kedua ialah bagaimana agar kesemua kajian ilmu-ilmu tersebut (dirasah Islamiyah) memiliki landasan normatif-teologis pada Al-Qur'an dan hadis. Inilah yang dimaksud dengan "masuk ke dalam" atau "mencari dasar ke dalam", di mana dirasah Islamiyah dipandang sebagai luar dan Al-Qur'an hadis dipandang sebagai dalam. Cara kerja metode ini memiliki kesamaan dengan upaya islamisasi ilmu pengetahuan dengan dua pengertiannya, yaitu:

1. Naturalisasi

Naturalisasi, yaitu mengembalikan ilmu-ilmu kepada karakter (natur-tabiati)nya yang utuh, yang tidak dikotomis. Islam tidak mengenal dikotomi ilmu (umum dan agama), karena semua ilmu bersumber dari yang satu. Bahwa ada alat/media perolehan yang berbeda yang seringkali melahirkan hasil yang berbeda tidak bisa dijadikan sebagai alasan pijakan dikotomi. Sesuai dengan semangat ayat di atas, bahwa Allah memberikan dua pintu masuk di dalam rangka mengenal dirinya, yaitu ayat Qur’aniyah, yaitu Al-Qur’an dan hadis sebagai penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an. Pintu masuk kedua ialah ayat-ayat *kauniyah (cosmologi)* yang juga diberi sinyal oleh beberapa ayat Al-Qur’an.

Sebab itulah di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang mendorong manusia agar mengadakan kajian terhadap Tuhan, alam, dan manusia, seperti surat al-A’raf/7: 183,²⁶ al-An’am/6: 99, Thaha/20: 97, al-Ankabut/29: 20, al-Thalaq/65: 5, dan lain-lain. Kajian-kajian tersebut tidak lepas konteks dari Al-Qur’an, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu pengenalan Tuhan (Allah) sebagai summa genera, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah: 164, yang artinya: *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”*.²⁷

2. Islamisasi

Islamisasi, yaitu upaya yang menselaraskan teori dan temuan ilmiah dengan ajaran Islam. Upaya ke arah ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, mencari dukungan nash Al-Qur’an dan hadis terhadap temuan-temuan ilmiah. Misalnya, teori “Big Bang” (ledakan besar) sebagai proses awal penciptaan bumi dikaitkan dengan ayat Al-Qur’an surat al-Anbiya’/21: 30, yang artinya: *“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman”*.²⁸

Upaya ini juga diperankan oleh filsuf Muslim ketika berupaya memadukan

²⁶ Yang artinya: *“Mengapa mereka tidak memperhatikan kekuasaan langit dan bumi dan segala yang diciptakan Allah dari segala sesuatu...”*.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta, 2000), h. 40.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 500.

pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Al-Kindi, seperti dikomentari oleh Ahmad Fuad al-Ahwani, ketika mensinkronkan konsep gerak Aristoteles (*al-harkah*) dengan ajaran Islam, memaknai gerak dengan penciptaan. Katanya: “*Allahu `inda Aristu Muharrik al-`alam wa `inda al-Kindi badi` as-samawat wa al-ardh*” (Tuhan menurut Aristoteles ialah Penggerak alam namun menurut Al-Kindi Pencipta langit dan bumi).²⁹

Melalui upaya ini para ilmuwan dan filsuf seperti Al-Kindi selain mencari paduan antara ilmu/filsafat dengan agama, juga merumuskan dasar pijakan dari teori-teori ilmu dan filsafat tersebut.

Kedua, Merumuskan teori-teori ilmiah yang baru setelah menggali ayat-ayat suci Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. Cara ini tentu dilakukan oleh para saintis dan filsuf Muslim era kejayaan Islam zaman klasik. Upaya ini dilakukan berbarengan dengan metode pertama, sehingga menambah khazanah keilmuan di dunia Islam. Melalui teori kedua ini akan nampak teoritasi baru yang dilakukan oleh saintis dan filsuf Muslim, sehingga dapat menolak kesan bahwa para saintis dan filsuf Muslim hanyalah meniru dan mencontoh saintis dan filsuf Yunani saja.³⁰

Dengan demikian, tugas metode ini ialah:

1. Sebagai suatu upaya mencari titik temu ilmu-ilmu (yang diklaim sebagai ilmu umum, sebetulnya dirasah Islamiyah) dengan ilmu-ilmu agama (*‘ulum al-din*). Titik temu dilakukan terhadap tiga aspek ilmiah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebagai pencarian titik temu, maka posisi kedua ilmu bersifat egaliter atau seimbang. Bukan atas bawah apalagi bertentangan.
2. Sebagai upaya mencari landasan teologis (dukungan Al-Qur’an dan hadis) bagi ilmu-ilmu (yang dikelompokkan sebagai ilmu umum), ekonomi, politik, sosial, budaya, sains, teknologi, pertanian, kedokteran, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa titik awal bermula dari dari ilmu-ilmu umum kemudian dicari dukungan Al-Qur’an dan hadis. Lahirnya filsafat Islam dapat dijadikan sebagai model upaya ini. Para filsuf Muslim adalah para pemikir yang telah menerima kebenaran dan teori filsafat, lalu tugas mereka adalah mencari dukungan nash terhadap teori-teori tersebut. Al-Kindi, seperti disebut di atas, ketiga menerima konsep Tuhan dalam tradisi Yunani, khususnya Aristoteles, sebagai “Penggerak Yang Tidak Bergerak” mencari

²⁹ Ahmad Fuad al-Ahwani, *Al-Falsafah al-Islamiyyah* (Mesir: Maktabah Qahirah: t.t.), h. 68.

³⁰ Kajian tentang islamisasi ilmu pengetahuan ini dapat dilihat pada: Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan* (Washington DC: International Institute of Islamic Thought, 1402H/1982M).

padanan kata penggerak dengan pencipta,³¹ sehingga kata penggerak dimaknakan dengan “Pencipta Alam” sebagaimana tertuang dalam ayat Al-Qur’an di atas.

3. Sebagai upaya mengembalikan ilmu pengetahuan kepada wujud aslinya (naturalisasi) yang bersifat holistik komprehensif, yang tercederai oleh temuan sebagian ilmu-ilmu pengetahuan modern, baik menyangkut ontologi dan episteologi, maupun aksiologi.

E. Keunggulan

Sebagai metode baru sudah barang tentu metode ini memiliki keunggulan dibanding tiga metode sebelumnya, yaitu metode profesionalisasi, metode interdidipliner, dan metode multididipliner. Di antara keunggulannya ialah:

1. Mampu mereposisi dan reformulasi ilmu-ilmu yang berserakan dengan bermunculannya ilmu-ilmu baru. Melalui metode dua arah, ilmu-ilmu lama akan terposisikan dalam kotaknya masing-masing, dan dijadikan sebagai *core* (inti) keilmuan sekaligus sebagai “rumah” persinggahan bagi ilmu-ilmu baru yang muncul kemudian. Hal ini menjadi penting bagi ilmu-ilmu baru sehingga tidak berserakan walau terformulasi dalam bentuknya yang eksklusif. Kegunaan lainnya, dengan demikian, ialah menjadi pendorong bagi lahirnya ilmu-ilmu baru dari setiap rumahnya masing-masing.
2. Mampu menghindari dikotomi ilmu yang dikelompokkan kepada umum dan agama. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari kurang mampuan mencari titik singgung di antara dua keilmuan yang terlanjur dipandang bersebelahan. Kesan ini akan tertolakkan dengan sendirinya, karena ternyata ilmu-ilmu yang berkembang memiliki akar ontologis dari Al-Qur’an dan hadis, sekaligus sebagai manifestasi dari kedua sumber tersebut.
3. Mampu meredakan kegelisahan ilmuwan Muslim yang seringkali mengalami dilema intelektual di antara menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis yang terlanjur dikesankan mengalami masa ketertinggalan dengan lajunya ilmu-ilmu modern. Kesan lamban dan laju ini membuat tesa baru bahwa nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis hanya sekedar ensiklopedia masalah yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern, di tengah lajunya keilmuan modern yang superior. Kegelisahan akan sirna, karena melalui penerapan “antar dua metode” dapat ditampilkan dua pembuktian, yaitu nilai dan kandungan Al-Qur’an dan hadis inheren dalam keilmuan

³¹ al-Ahwani, *Al-Falsafah al-Islamiyyah*.

modern. Dengan pembuktian ini akan jelas bahwa ilmu-ilmu modern memiliki akar ontologis dan epistemologis dalam nilai dan kandungan Al-Qur'an dan hadis.

F. Kualifikasi

Sebagai metode baru, dalam penerapan metode ini dibutuhkan beberapa kualifikasi para pengkaji, di antaranya:

1. Pengetahuan yang memadai tentang ilmu-ilmu sumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ini penting agar seorang pemikir memiliki basis keilmuan yang kuat dan berakar pada sumber utama ajaran Islam. Hal ini antara lain diukur dengan kemampuan mengetahui setiap kandungan dari kedua sumber tersebut. Di sini dibutuhkan kemampuan ilmu-ilmu yang terkait kedua sumber. Tentang Al-Qur'an dibutuhkan penguasaan dua ilmu, yaitu:
 - a. *'Ulum Al-Qur'an* dengan segala kajiannya, yaitu pengertian, pembagian dan kandungannya, cara turunnya wahyu, penulisan Al-Qur'an,
 - b. *'Ulum al-Tafsir* dengan segala kajiannya, yaitu: pengertian tafsir, hubungan tafsir dengan bayan, pembagian tafsir, yang mencakup Sebagai alat penguasaan kedua sumber di atas dibutuhkan kemampuan ilmu kebahasaan seperti nahwu, sharaf, ma'ani, dan lain-lain.

Menyangkut hadis juga dibutuhkan dua jenis ilmu, yaitu:

- a. *'Ulumul hadis* dengan segala kajiannya, yaitu pengertian, pembagian dan kandungan, kegunaan, cara penulisan hadis, hadis-hadis ternama (*mu'tabarah*), dan sebagainya.
- b. *Mushthalahah al-hadis* dengan segala kajiannya, yaitu pengertian, pembagian dan kandungan, kegunaan, metode penetapan hadis shahih, dan sebagainya.

Kemudian harus menguasai ilmu sejarah agar mampu melihat makna kedua sumber sesuai teks dan konteks. Ini penting agar tidak terjebak pada generalisasi makna yang berujung pada pendangkalan makna dan kandungan Al-Qur'an dan hadis.

2. Pengetahuan yang memadai tentang ilmu-ilmu keislaman (*'ulum al-din*), yaitu fikih, ushul fikih, kalam, falsafah, tasawuf, tarekat, dan sebagainya. Pengetahuan ini penting karena ilmu inilah yang secara langsung muncul dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga menjadi pintu masuk bagi kajian-kajian keislaman selanjutnya (Dirasah Islamiyah).
3. Pengetahuan yang memadai tentang ilmu-ilmu yang selama ini dikelompokkan kepada ilmu-ilmu umum, seperti ekonomi, politik, sosiologi, psikologi,

seni, budaya, dan sebagainya. Beberapa keilmuan ini muncul melalui *'ulum al-diniyah*, sehingga bisa disebut sebagai kajian keislaman (dirasah Islamiyah). Kemampuan ini penting untuk mencari titik awal (*mazhar*) dalam mengkaji ilmu, sehingga bisa dikoneksikan dengan ilmu-ilmu keislaman. Di sisi lain, dengan kemampuan yang mumpuni dalam bidang-bidang ilmu ini dikotomi ilmu-ilmu atau ilmu umum-ilmu agama dapat dielakkan.

4. Komitmen. Selain kemampuan penguasaan terhadap berbagai ilmu di atas, kualifikasi lain yang tidak kalah pentingnya ialah komitmen, yaitu untuk selalu berupaya agar ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis teraktual dalam keilmuan modern, dengan sebuah semangat bahwa di antara keunggulan Al-Qur'an dan hadis ialah terumuskannya ia dalam pengetahuan yang lebih holistik dan generalistik dalam bentuk ilmu-ilmu modern. Komitmen berikutnya ialah semangat bahwa bagaimanapun kecanggihan ilmu-ilmu modern saat ini, ia tetap memiliki basis ontologis dan epistemologis dengan Al-Qur'an dan hadis.

Semangat ini tentu tidak hanya sebatas apologetis, untuk itu, harus dibuktikan secara ilmiah bahwa memang nilai dan kandungan Al-Qur'an dan hadis teraktual dalam keilmuan hari ini, dan sebaliknya, keilmuan hari ini memiliki basis Al-Qur'an dan hadis.

G. Kekuatan Metode Dua Arah

Sebagai sebuah metode sudah barang tentu memiliki kelebihan dan kelemahan, karena memang itulah karakter ilmu. Di antara kelemahannya ialah muncul kesan yang ahistoris, seolah melepaskan diri dari proses lahirnya ilmu, namun metode ini penting dalam upaya meyatukan ilmu yang berserakan, sekaligus menepis kesan ilmu yang dikotomis, karena perbedaan ruang dan waktu. Dan itulah sisi kekuatannya. Kekhawatiran UIN akan menghilangkan jati diri kajian keislaman yang selama ini menjadi medannya IAIN bisa dihindari, dan di sisi lain, sekularisasi keilmuan (umum agama) seperti adanya di universitas umum bisa ditepis adanya. Akhirnya keutuhan ilmu dapat terwujud adanya.

H. Kaitannya dengan UIN SU

Ulasan di atas diharapkan akan membuka tabir peralihan IAIN-SU menjadi UIN SU, atau dari institut menjadi universitas. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam konteks institut, Islam yang dikaji ialah dalam konteks Dirasah Islamiyah, yang hanya mengkonsentrasikan diri hanya pada bidang-bidang tersebut sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasi itu, sebagaimana diatur pada KMA Nomor 1 Tahun 1982, terdapat tujuh kajian *'ulum ad-diniyyah*,

yaitu Al-Qur'an dan hadis (2) Pemikiran Islam (3) Gerakan Modern dalam Islam (4) hukum dan pranata sosial Islam (5) Bahasa dan sastra Arab (6) tarbiyah Islamiyah, dan (7) dakwah Islamiyah.

Seiring dengan mandat yang diperluas (*wider mandate*), kajian di IAIN-SU diperluas kepada kajian-kajian keislaman (dirasah Islamiyah), seperti ekonomi, sehingga lahirkan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini menjadi start awal menuju universitas yang mengadakan kajian yang lebih luas. Konsekuensinya akan muncul fakultas-fakultas baru. Sesuai dengan Renstra UIN SU, sampai tahun 2019 akan lahir 3 (tiga) fakultas baru, yaitu (a) Fakultas Sains dan Teknologi (2) Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan (3) Fakultas Ilmu Sosial.

Dengan demikian, ketika UIN SU mengelola 8 (delapan) fakultas, yaitu tiga fakultas baru yang disebutkan di atas ditambah 5 (lima) fakultas lama (*existing*), yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Syariah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pengelolaan kajian yang semakin meluas ini sudah barang tentu membutuhkan metode kajian baru, dan tawaran metode kajian itu ialah “Metode Studi Dua Arah” seperti judul tulisan di atas. Oleh karena itu, tawaran ini, selain menjadi model diharapkan sebagai standar studi Islam, sehingga kekhawatiran UIN akan menghilangkan jatidiri kajian keislaman dalam IAIN bisa dihindari, dan di sisi lain, skularisasi keilmuan (umum agama) seperti adanya di universitas umum bisa ditepis adanya.

I. Penutup

Inter-metode adalah metode dua arah dalam pengkajian Islam, yaitu berangkat ke luar (arah keluar) dan masuk ke dalam (arah ke dalam). Dengan penerapan metode dua arah ini dikotomi ilmu dapat dielakkan, sehingga wajah utuh ilmu dapat diwujudkan seperti pernah tampil dalam era kejayaan Islam. Dikotomi dilakukan dengan dua cara, yaitu naturalisasi mengembalikan ilmu pada naturnya, dan kedua melalui gerakan islamisasi, yaitu mencari dukungan nash Al-Qur'an terhadap berbagai teori dan temuan ilmiah, dan menggali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sehingga dapat dirumuskan teori dan temuan baru.

Penerapan metode ini sudah barang tentu bisa dilakukan jika mendapat dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dengan berbagai kualifikasi, seperti kemampuan bahasa Arab, pengetahuan tentang Al-Qur'an dengan berbagai persoalannya, hadis dengan berbagai persoalannya, pengetahuan terhadap perkembangan sains dan filsafat, dan sebagainya. Intinya, metode dua arah akan membantu peralihan IAIN (institut) menjadi universitas (UIN) yang sudah terjadi.

PERKEMBANGAN BIMBINGAN KONSELING DARI MASA KEMASA

Lahmuddin

Profesor Bimbingan dan Konseling
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bimbingan dan konseling dari masa kemasa, tentunya diperlukan telaahan historis dimana dan kapan bimbingan konseling mulai dibicarakan oleh para pakar sehingga pada akhirnya bidang ini dapat dijadikan sebagai salah satu disiplin ilmu dan profesi yang patut diperhitungkan keberadaannya.

Kehadiran bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan memberikan makna tersendiri, karena disiplin bidang ini bukan hanya berfungsi sebagai pemberian bimbingan dan arahan yang bersifat preventif kepada seseorang/klien, tetapi juga suatu upaya untuk memberikan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan (*problem solving*) yang dihadapi oleh seseorang/klien.

Dalam menguraikan perkembangan bimbingan konseling dari masa-kemasa, penulis memfokuskan kepada dua aspek, yaitu sejarah lahir dan berkembangnya bimbingan dan konseling di Amerika Serikat yang merupakan tempat lahirnya bimbingan konseling secara ilmiah, dan masuknya bimbingan konseling ke sekolah-sekolah formal di Indonesia. Di samping itu, keberadaan bimbingan konseling di negara lain seperti Malaysia juga dijelaskan walaupun sekilas pandang.

B. Bimbingan Konseling di Amerika

Bimbingan dan konseling mulai dikenal pada awalnya di Amerika Serikat, sejarah perkembangan bimbingan di Amerika Serikat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, spesialisasi dalam pekerjaan, sistem pemerintahan yang semakin demokratis dan meningkatnya tuntutan dalam pendidikan pekerjaan. Berbagai perkembangan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Pertumbuhan awal bimbingan konseling di Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial pada awal tahun 1900, khususnya pada saat dunia industri berkembang sangat pesat. Bahkan menurut Gladding¹ sebelum tahun 1900 konseling telah ada, walaupun dalam bentuk layanan (*advice*) informasi.

Perkembangan bidang industri tersebut berdampak negatif terhadap kehidupan sosial para remaja, terutama terhadap mereka yang tinggal di kota-kota industri seperti di Detroit, Boston, New York dan Chicago. Mathewson menyebutkan bahwa Jesse B. Davis pada sekitar tahun 1897-1907 menggunakan banyak waktunya untuk memberikan konseling pada anak-anak di sekolah, dan ketika ia menjadi kepala sekolah di *Rapids Michigan High School* (1907) ia juga menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan pekerjaan dan moral kepada para remaja (*vocational and moral guidance*). Pada tahun 1908 Frank Parsons mendirikan *vocational Bureau* (biro pekerjaan) untuk membantu para remaja memilih pekerjaan yang cocok bagi mereka. Parsons sering disebut sebagai “Bapak Bimbingan”, dan ia beranggapan bahwa bimbingan dapat diberikan kepada kaum muda agar mereka mengerti kemampuan dan kelemahannya, dan menggunakan pengetahuan ini untuk memilih lapangan pekerjaan yang tersedia.²

Pada waktu yang hampir bersamaan, para ahli lainnya juga mengembangkan program bimbingan sebagai berikut:

- a. Eli Weaper, pada tahun 1906 menerbitkan booklet tentang “Memilih Suatu Karier”. Beliau telah berhasil membentuk suatu Komite Guru Pembimbing di setiap sekolah menengah di New York. Komite-komite ini aktif bekerja untuk membantu para pemuda (remaja) dalam menemukan kemampuan-kemampuannya dan belajar tentang bagaimana menggunakan atau mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut dalam rangka menjadi seorang pekerja atau pegawai yang produktif.
- b. Frank Parson, yang dikenal sebagai “*Father of the Guidance Movement in American Education*” mendirikan Biro Pekerjaan (*Vocational Bureau*) pada tahun 1908 di Boston, tujuannya adalah membantu para pemuda untuk memilih karier yang didasarkan atas proses seleksi secara ilmiah dan melatih para guru untuk memberikan pelayanan sebagai konselor vocational. Pada tahun 1909 dia menerbitkan buku “*Choosing a Vocation*” yang membahas tentang (a). peranan konselor, dan (b) teknik-teknik konseling vocational. Di dalam buku tersebut juga dibahas tentang investigasi pribadi (*self*

¹ Samuel T. Gladding, *Counseling A Comprehensive profession* (Englewood Cliffs, New Jersey, Columbus, Ohio: Prentice Hall, 1996), h. 8.

² Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 17.

study), investigasi industri (dunia kerja), dan organisasi. Menurut Parsons ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam memilih pekerjaan, yaitu (a) pemahaman yang jelas tentang diri sendiri, yang menyangkut bakat, kemampuan minat, ambisi, keterbatasan, dan hal lainnya, (b) pemahaman yang jelas tentang dunia kerja, yang menyangkut persyaratan, kondisi kerja, kompensasi, peluang, prospek kerja dan sebagainya; dan (c) *true reasoning*, penalaran yang benar berdasarkan hubungan antara karakteristik pribadi dengan dunia kerja tersebut. Menurut Parsons, konselor profesional harus memiliki (a) pemahaman kerja praktis dan prinsip-prinsip pokok psikologi modern; (b) pengalaman bergaul dengan orang lain, pemahaman tentang motif, minat, dan ambisi yang mengontrol kehidupan manusia, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi karakter; (c) kemampuan untuk berinteraksi dengan para remaja (kaum muda) dengan cara yang menarik, bersifat menolong, simpatik, serius, dan terbuka; (d) pemahaman tentang persyaratan dan kondisi berbagai dunia kerja (industri); (e) informasi tentang pendidikan yang cocok untuk mempersiapkan suatu pekerjaan; dan (f) pemahaman tentang metode ilmiah dan prinsip-prinsip penelitian dalam upaya memperoleh konklusi, kesimpulan dan keputusan yang benar.

- c. E.G. Williamson, pada akhir tahun 1930 dan awal tahun 1940 menulis buku *How to Counsel Students: A Manual of Techniques for Clinical Counselors*. Model bimbingan sekolah yang dikembangkan oleh Williamson terkenal dengan nama *Trait and Factor (Directive) Guidance*. Dalam model ini, para konselor menggunakan informasi untuk membantu siswa dalam memecahkan masalahnya, khususnya dalam bidang pekerjaan dan penyesuaian interpersonal. Perana konselor bersifat direktif dengan menekankan kepada (a) mengajar ketrampilan, dan (b) membentuk (mengubah) sikap dan tingkah laku.
- d. Carl Rogers, mengembangkan teori konseling *client centered*, yang tidak terfokus kepada masalah, tetapi sangat mementingkan hubungan antara konselor dengan kliennya. Pendekatan konseling merupakan respon terhadap pendekatan konseling yang direktif bersifat sempit dan terfokus kepada masalah. Pendekatan atau teori konseling Rogers ini terangkum dalam dua bukunya, yaitu *Counseling and Psychotherapy* yang terbit tahun 1942, dan *Client Centered Therapy* yang terbit pada tahun 1951. Pada buku pertama, Rogers memperkenalkan pendekatan konseling nondirektif sebagai alternatif layanan di samping pendekatan direktif. Rogers berpenapat bahwa klien mempunyai tanggungjawab dalam memecahkan masalah dan mengembangkan dirinya sendiri. Sementara pada buku kedua, terjadi perubahan semantik dari konseling non direktif menjadi konseling *client centered*. Sejak tahun 1960-1970, teori ini menjadi model utama bagi banyak konselor, baik

di sekolah maupun di biro-biro kesehatan mental. Namun begitu, teori ini juga dipandang agak kaku untuk diterapkan di sekolah. Ketidakpuasan terhadap pendekatan ini akhirnya memunculkan evolusi lebih lanjut dalam gerakan bimbingan dan konseling sekolah.³

Orang yang dianggap berpengaruh dalam gerakan guidance ialah Jesse B. Davis, Frank Parsons dan Clifford Beers. Davis adalah orang pertama yang membuat program guidance yang tersistematisasi di sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan mencegah masalah. Oleh karena itulah, Frank Parsons, sering disebut sebagai “Bapak Bimbingan” (*Father of Guidance*).

Frank Parsons dikatakan sebagai pelopor bimbingan, karena beliau mulai mengelola sebuah Biro Konsultasi Jabatan di Boston pada tahun 1908 dan dipandang sebagai pelopor dalam hal bimbingan jabatan secara sistematis dan terencana.

Selain nama Frank Parsons, juga dikenal nama Enoch dan William Wheatly yang menerbitkan buku tentang bimbingan di sekolah pada tahun 1916, Edmund G. Williamson menerbitkan buku yang berjudul *How to Council Student* pada tahun 1939, dan Carl Rogers menerbitkan buku *Counseling and Psychotherapy* pada tahun 1942.⁴ Bahkan menurut Nurihsan,⁵ layanan bimbingan di Amerika Serikat mulai diberikan oleh Jesse B. Davis pada akhir tahun 1898-1907, ketika itu beliau sebagai konselor sekolah menengah di Detroit. Tahun 1910, William Healy mendirikan *Juvenile Psychopathic Institute of Chicago*.

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, para pionir bimbingan beroperasi dengan giat di Salt Lake City, Utah, Lincoln, Nebraska, Oakland dan California. Pendirian *National Vocational Guidance Association* (NVGA) memberikan sumbangan yang berarti terhadap perluasan program bimbingan di sekolah. Pada tahun 1910 NVGA mengadakan konferensi untuk menyempurnakan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan bimbingan di sekolah. Tahun 1913 merupakan tahun peresmian organisasi nasional bimbingan yang permanen di Grand Rapids, Michigan. Tahun 1915 organisasi ini menerbitkan buletin *The Vocational Guidance Bulletin*.

Pada tahun 1951 perkembangan keanggotaan NVGA dan penyebaran minat para anggotanya menuntut NVGA untuk bekerja sama dengan organisasi

³ Syamsu Yusuf & A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 88-89.

⁴ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1997), h. 86.

⁵ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 4. Baca Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 28-29.

profesi lainnya. Pada tahun 1952 muncul *The American Personal and Guidance Association*. Organisasi ini berkembang pesat. Pada tahun 1980 anggotanya berjumlah 40.000 orang dengan berbagai bagian sesuai dengan spesialisasinya masing-masing

Model bimbingan yang tampil pada awal bimbingan adalah model Parsons, yaitu pemilihan karier seseorang harus sesuai dengan ciri-ciri dan tuntutan pekerjaan. Pengikut Parsons antara lain Meyer Bloomfield yang pada tahun 1911 untuk pertama kalinya mengajarkan bimbingan karier di Universiti Harvard. Buku karangan Brewer yang diterbitkan tahun 1932 memandang bimbingan identik dengan pendidikan.

Istilah *Educational guidance* dipakai pertama kali oleh Truman L. Kelly dalam disertasinya pada tahun 1914. Bagi Brewer, bimbingan dilukiskan sebagai bantuan yang diberikan kepada anak untuk mengerti, mengorganisasi, memperluas dan mengembangkan individualitasnya serta aktivitas kerja sama. Dalam masa peralihan dari periode awal ke periode lanjutan di kenal nama William M. Proctor dan teman-temannya yang menekankan fungsi distribusi dan penyesuaian dalam bimbingan.

Pada tahun 1930-an, E.G. Williamson dkk., mengembangkan teori konseling yang pertama. Ia berasal dari University of Minnesota. Pendekatannya lebih bersifat *directive, counselor centered*, pendekatan ini mendominasi konseling untuk dua dekade berikutnya. Kalaupun pada awalnya lebih terpusat pada *Vocational Guidance*, maka pada masa ini konseling menjadi meluas ke sekolah-sekolah. John Brewer mengatakan bahwa setiap guru harus menjadi konselor dan bahwa *Guidance* harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Pada era 1940-an, terdapat beberapa kejadian yang menyebabkan perubahan radikal dalam praktik konseling: yang pertama adalah teori Carl Rogers, kemudian Perang Dunia II, dan keterlibatan pemerintah dalam konseling setelah perang. Buku Carl Rogers yang terbit pada tahun 1942 berjudul *Counseling and Psychotherapy* mengajukan pendekatan yang disebut sebagai *nondirective*, buku ini sangat bertentangan dengan pendekatan Williamson dan Psikoanalisis Freud.

Rogers menempatkan tanggungjawab pertumbuhan seseorang di dalam diri orang itu sendiri. Pendapat Rogers ini banyak diterima, tetapi banyak pula yang mendapat tantangan. Peran konselor adalah *nonjudgmental, accepting* dan menjadi cermin yang merefleksikan manifestasi aspek verbal dan emosional yang disampaikan oleh klien. Dengan Rogers ada penekanan baru pada teknik dan metode konseling. Rogers mempunyai pengaruh besar dalam konseling dan psikologi, dan merupakan figur sentral dalam keduanya.⁶

⁶ Jeanette Murad Lesmana, *Dasar-dasar Konseling* (Jakarta: UI Press, 2005), h. 8-9.

Periode lanjutan merupakan periode sangat berpengaruh terhadap perkembangan konsep bimbingan dan perluasan program bimbingan di sekolah. Sekitar tahun 1960 pemerintah federal memberikan dukungan keuangan bagi pelaksanaan program bimbingan di sekolah dan dukungan ini memperluas pelaksanaan bimbingan di sekolah.

Dalam dekade tahun 1970-an program bimbingan disempurnakan dalam Organisasi Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Perang Vietnam mengundang keperluan akan bimbingan konseling dan masyarakat semakin merasakan perlunya bimbingan di sekolah. Pada waktu itu (awal tahun 1970) bimbingan dipandang sebagai pendidikan psikologis atau *affective education*. Konsep ini sebagai lanjutan konsep Kehas yang memandang bimbingan sebagai pekembangan pribadi. Tetapi bimbingan sebagai *psychological education* semula telah diusulkan oleh William James pada tahun 1899, oleh H.E. Bullis dalam tahun 1941, dan oleh R.H. Ojemann dalam tahun 1953. Model ini merupakan jawaban terhadap tuntutan sekolah yang ingin lebih terlibat dalam pendidikan afektif, termasuk pendidikan nilai-nilai hidup. Orang yang pertama kali memperkenalkan model ini adalah Mosher dan Sprinthall (1971) dan keduanya memandang pendidikan psikologi sebagai pengalaman pendidikan yang bertujuan memengaruhi perkembangan pribadi, niali etis, estetis dan pandangan hidup anak, khususnya pada diri anak-anak muda.⁷

Perkembangan model bimbingan terakhir dapat terlihat pada bimbingan aktivitas yang dikembangkan oleh Menacker (1976). Model ini merupakan jawaban terhadap situasi di kota-kota yang miskin dan akibat akhir perang Vietnam. Model ini menitikberatkan manipulasi dan intervensi lingkungan, partisipasi konselor-konselor. Lingkungan dapat diubah atau digunakan untuk kepentingan siswa agar perilaku mereka dapat berubah.

Pada tahun 1980-an, Shertzser dan stone (1981) yang dikutip oleh Gibson & Mitchell bahwa elemen-elemen yang dibutuhkan bagi program-program bimbingan di sekolah-sekolah meliputi:

1. komponen penafsiran
2. komponen informasi
3. komponen konseling
4. komponen konsultasi
5. komponen perencanaan, penempatan dan tindak lanjut
6. komponen evaluasi⁸

⁷ Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 18-21.

⁸ Robert L. Gibson & Mariane Mitchell, *Intraduction to Counseling and Guidance* (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008), h. 27.

Dengan demikian, pelayanan bimbingan sebagai usaha profesional lahir di Amerika Serikat dan berkembang dengan pesat pada pertengahan abad 20 hingga saat ini. Menurut Winkel,⁹ ada tujuh hal yang mendorong perkembangan bimbingan dan konseling sehingga mendapat tempat di instansi pendidikan di Amerika ketika itu, yaitu:

Pertama, perhatian terhadap para imigran yang datang ke Amerika Serikat dari kawasan Eropa pada awal abad-20 dan membutuhkan pekerjaan yang layak supaya dapat maju. Mereka dalam keadaan ekonomi yang serba sulit mulai dilayani pada biro vokasional yang membantu dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai. Dengan terbukanya lapangan dan kesempatan kerja bagi mereka yang sudah mengikuti pelatihan, maka pengangguran semakin kecil dan para pendatang tidak lagi menjadi sandungan bagi Amerika untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia.

Kedua, pengaruh dari agama Kristen yang memandang bumi ini sebagai medan pertempuran antara berbagai kekuatan jahat dan beraneka dorongan yang baik. Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan pendidikan moral kepada generasi muda, supaya kelak menjadi warga masyarakat yang bermoral baik.

Ketiga, pengaruh dari gerakan Kesehatan Mental, yang pada awalnya memperjuangkan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap mereka yang ditampung dalam rumah sakit jiwa, dan kemudian memperluas aktivitasnya dengan menciptakan jalur dan saluran untuk membantu warga masyarakat lain yang mengalami gangguan mental dan menggerogoti kebahagiaan hidup. Dengan kata lain, para pakar kesehatan mental berupaya secara maksimal untuk membebaskan manusia dari penyakit-penyakit mental, dengan terbebasnya para pemuda dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gejala-gejala gangguan jiwa, maka pembangunan apapun yang direncanakan semakin mudah memperoleh hasilnya.

Keempat, perubahan sosial dalam masyarakat, akibat dari perang dunia, resesi ekonomi, pengangguran, undang-undang wajib belajar, tumbuhnya kota-kota besar dan kemajuan teknologi. Semua ini menjadikan anak-anak tidak mandiri dan harus didampingi dalam menetapkan suatu program studi yang sesuai dalam memperjuangkan nasib hidupnya di suatu masyarakat yang semakin kompleks.

Kelima, Dampak dari gerakan testing psikologis yang semakin mengembangkan test-test sebagai alat yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam keperibadian seseorang. Kalau layanan bimbingan

⁹ Winkel, *Bimbingan dan Konseling*, h. 85.

ingin menaruh perhatian terhadap perkembangan individu, maka sangat ditekankan perlunya mengenal individu itu dengan mengumpulkan data secara sistematis serta mengolahnya dengan cara yang tepat. Untuk itu test-test psikologi mutlak diperlukan, khususnya selama anak didik masih duduk di sekolah.

Keenam, subsidi finansial dari Pemerintah Federal yang memungkinkan sekolah-sekolah untuk mengangkat beberapa konselor sekolah yang mengarah kepada program pendidikan karier, penanggulangan kenakalan remaja, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prevensi terhadap menularnya berbagai penyakit kelamin.

Ketujuh, pengaruh dari terapi non direktif (*client centered therapy*), yang dikembangkan oleh Carl Rogers yang menggantikan pendekatan otoriter serta paternalistik. Para konselor sekolah banyak memanfaatkan sumbangan pemikiran Carl Rogers mengenai proses konseling dan penggunaan teknik-teknik konseling.

Dari beberapa bagian inilah yang pada akhirnya memberi sumbangan terhadap berkembangnya bimbingan konseling, mulai dari pelayanan bimbingan jabatan di luar lingkup lembaga pendidikan sampai layanan bimbingan di sekolah meliputi bimbingan jabatan, bimbingan belajar, bimbingan karier dan bimbingan yang berkaitan dengan personaliti serta pergaulan dengan orang lain.

Disisi lain, kebutuhan bimbingan dan penyuluhan (sekarang menjadi Bimbingan Konseling) pertama sekali disadari oleh dosen-dosen di Fakultas-fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan pejabat-pejabat dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir tahun 1950-an dan pada awal tahun 1960-an, setelah mereka menyaksikan pelaksanaan berbagai program bimbingan di sejumlah sekolah di Amerika Serikat. Merekalah yang mulai mendorong, supaya sekolah-sekolah di Indonesia melaksanakan pula sejenis program bimbingan demi penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Dengan demikian, gerakan bimbingan dan konseling pada mulanya merupakan barang impor, ibarat tunas tumbuhan yang dibawa dari tempat lain untuk ditanamkan di Indonesia, dan tidak lahir dari dalam lingkup lembaga pendidikan di lapangan. Dengan kata lain, ide tentang pelayanan bimbingan di sekolah dicanangkan oleh para ahli pendidikan, yang kemudian memikirkan cara-cara mengintegrasikan bimbingan dan konseling dalam struktur berbagai lembaga pendidikan, terutama yang terdapat pada pada jenjang pendidikan menengah.

Jika dianalisa lebih jauh, sebenarnya proses dan prinsip bimbingan konseling sudah dipraktikkan oleh para Nabi, Rasul dan sahabat jauh sebelum

lahirnya bimbingan konseling di Barat khususnya di Amerika Serikat, hanya saja ketika itu istilah bimbingan konseling belum dipakai, namun prinsip-prinsip dialog, penasihat dan bimbingan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. misalnya, tidak berbeda dengan konsep Barat pada abad 20 bahkan terapi yang diberikan Rasul kepada para sahabat ketika itu jauh lebih bernas dan lebih baik dibandingkan dengan teori dan konsep yang dibuat di Barat.

Andaikan orang Barat berlaku jujur menelaah eksistensi bimbingan dan konseling yang ada di zaman Rasul, penulis berkeyakinan bahwa mereka akan mengakui bahwa proses, prinsip layanan serta teknik-teknik konseling lebih awal dikenal di dunia Islam dibanding di Barat (Amerika), hanya saja istilah bimbingan konseling belum banyak dikenal ketika itu, dan istilah yang dikenal dalam Islam adalah *al-Istisyfa bi al-Qur'an wa al-Du'a*, yaitu proses penyembuhan terhadap penyakit-penyakit dan gangguan psikis yang didasarkan kepada tuntunan nilai-nilai Al-Qur'an dan doa, dan *thibb al-rahmani* (penyembuhan ilahi).¹⁰

Fakta ini didukung dengan munculnya berbagai tulisan dari para pemikir muslim, baik yang berprofesi sebagai dokter (*thabib*) maupun dari kalangan sufi yang spesifik tergolong sebagai rujukan bagi psikoterapi religius, khususnya psikoterapi Islam. Tokoh-tokoh besar seperti Imam al-Ghazali dengan konsep *Tazkiyat al-Nafs*-nya dalam buku beliau yang berjudul *Ihya Ulum al-Din*, Ibn Qayyim al-Jawzi yang terkenal dengan beberapa buku tentang kesehatan jiwa, seperti: *al-Syifa fi Maw'izh al-Mulk wa al-Khulafa'*, *al-Dawa wa al-Dawa*, *Mawarid al-Aman al-Muntaqa min Ighatsat al-Lahfan fi Masyahid al-Syathin*. Izzet Muhammad Arif dengan bukunya *'Allij Nafsaka bi al-Qur'an*.

Melalui konsep *thibb al-rahmani* (penyembuhan ilahi) inilah sebenarnya yang memberikan inspirasi kepada dunia Barat termasuk Amerika untuk melaksanakan bimbingan dan konseling, sehingga mereka memasukkan elemen spiritual (agama) sebagai salah satu ciri dari kesehatan mental. Hal ini lebih terlihat lagi ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 1984) seperti yang dikutip oleh Hawari¹¹ bahwa sehat jiwa atau sehat mental itu harus terlihat sehat spiritual, atau dengan kata lain sehat mental itu harus terlihat pada beberapa aspek, yaitu; sehat fisik, sehat psikologis (*psychis*), sehat sosial dan sehat spiritual (sehat bio-psiko-sosio-spiritual).

Lebih jauh Hawari mengatakan bahwa kriteria jiwa atau mental yang sehat adalah sebagai berikut:

¹⁰ Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 23-25.

¹¹ Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 12.

1. Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan itu buruk baginya.
2. Memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya.
3. Merasa lebih puas memberi daripada menerima.
4. Secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas.
5. Berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan saling memuaskan.
6. Menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk di kemudian hari.
7. Menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.
8. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar.

Hal ini membuktikan bahwa perhatian para ilmuwan terhadap aspek spiritual (agama) semakin terlihat, bukan hanya para ilmuwan Islam, tetapi juga ilmuwan Barat.

Namun demikian, disebabkan Amerika yang pertama kali memasukkan ide-ide bimbingan dan konseling ke dalam dunia pendidikan dan karier secara resmi, dan menjadikan bimbingan konseling sebagai sebuah profesi yang harus diimplementasikan, maka negara itulah yang dianggap sebagai peletak batu pertama.

Dengan demikian, gerakan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat ditandai dengan munculnya bimbingan pekerjaan oleh Frank Parsons, ide dan semangat yang dilakukan oleh Parsons sangat berpengaruh terhadap lahir dan berkembangnya bimbingan dan konseling di beberapa negara, baik di Filipina, Malaysia, India dan di Indonesia.¹²

C. Perkembangan Bimbingan Konseling di Indonesia

Pada awal kemerdekaan RI, masalah bimbingan pekerjaan mulai diperhatikan oleh Departemen Tenaga Kerja. Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan banyak kursus keterampilan bagi kaum muda. Hal ini hampir sama dengan keberadaan dan munculnya bimbingan konseling di Amerika.

¹² Gunawan, *Pengantar Bimbingan*, h. 21. Baca, Lahmuddin. Kesan Latihan Pemodelan dan Bimbingan Ibu Bapa Ke Atas Pelajar Lelaki Agresif di Medan-Indonesia. *Tesis*. (P. Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2002), h. 41-44.

Pembangunan dan pembaruan dibidang pendidikan tidak hanya berlangsung pada tingkat pendidikan dasar, tetapi juga pada tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pada pendidikan tingkat menengah dikenal adanya sekolah menengah kejuruan (STM, SMEA dan sebagainya) dan sekolah menengah umum (SMU). Masing-masing sekolah itu meliputi beberapa jurusan. Untuk menyalurkan siswa ke jurusan-jurusan yang sesuai dengan bakat, kemauan dan minat murid, maka pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 20-24 Agustus 1960 diadakanlah konferensi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (disingkat dengan FKIP atau IKIP) di Malang, melalui disiplin ilmu bimbingan konseling inilah yang dijadikan ukuran untuk menentukan jurusan manakah yang paling layak siswa ditempatkan. Inilah langkah awal perkembangan bimbingan konseling di Indonesia.¹³

Pada awal tahun 1960-an, di beberapa sekolah dilaksanakan program bimbingan yang terbatas pada bimbingan akademis. Pada tahun 1962 SMA gaya baru memperkenalkan program bimbingan. Tetapi program ini tidak bertahan lama karena kurang persiapan prasyarat untuk pelaksanaan program bimbingan secara profesional.¹⁴

Di samping itu, pada tahun 1964, Kementerian pendidikan Malaysia telah mengirim surat ke sekolah-sekolah menengah di Malaysia yang isinya menekankan pentingnya bimbingan konseling, dan setiap sekolah harus mempunyai seorang guru bimbingan karier.¹⁵

Perkembangan berikutnya tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Tahun 1971 beridiri Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu; IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado.

Pada dasawarsa 70-an, di lembaga pasyarakatatan telah dilaksanakan bimbingan. Banyak layanan bimbingan telah diberikan oleh lembaga agama, rumah sakit dan organisasi remaja kepada orang-orang yang mempunyai masalah, lembaga inilah yang senantiasa memberikan layanan atau perawatan, walaupun hasilnya belum maksiamal. Sejak dasawarsa ini jugalah lahirnya biro konsultasi pendidikan dan psikologi yang memberikan pelayanan bimbingan dan kerja sama dengan lembaga bimbingan di sekolah.

Untuk memberi gambaran yang lebih rinci tentang sejarah perkembangan

¹³ Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 351-355.

¹⁴ Winkel, *Bimbingan dan Konseling*, h. 86-88.

¹⁵ Muhammad Salleh Lebar, *Bimbingan dan Konseling Tugas Guru dan Kemahiran Asas* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1993), h. 5.

Bimbingan Konseling di Indonesia, berikut ini dimuat beberapa peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia, yaitu:

a. Tahun 1971

Berdirinya Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP di Indonesia, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, IKIP Surabaya, IKIP Semarang dan IKIP Manado.

b. Tahun 1975

Lahir dan berlakunya kurikulum sekolah menengah Umum yang disebut Kurikulum SMA 1975 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya (kurikulum 1968). Kurikulum 1975 memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, salah satu di antaranya adalah buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan.

Pada tahun 1975 ini juga diadakannya Konvensi Nasional Bimbingan I di Malang. Konvensi ini berhasil menelurkan beberapa keputusan penting, yaitu: 1) Terbukanya organisasi profesi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI); 2) Tersusunnya AD/ART IPBI, kode etik jabatan konselor, dan program kerja IPBI periode 1976-1978. Selanjutnya konvensi ini diikuti oleh beberapa kali konvensi dan kongres, yang diadakan secara berturut-turut di Salatiga, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar dan Padang.

c. Tahun 1978

Diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan sebagai suatu upaya pengangkatan tamatan jurusan BP yang telah dihasilkan oleh IKP, tetapi belum ada jatah jabatannya, di samping untuk mengisi kekosongan jabatan guru bimbingan di sekolah, tamatan program-program itulah yang pertama kali diangkat sebagai konselor atau guru bimbingan di sekolah.

d. Tahun 1989

Lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Di samping itu disinggung pula adanya pengaturan kenaikan pangkat jabatan guru pembimbing, kendatipun waktu itu belum begitu tegas.

Pada tahun 1989 juga lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 dan 29 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan

bimbingan dan konseling pada satuan-satuan pendidikan (masing-masing Bab X Pasal 25, Bab X Pasal 27).

e. Tahun 1991 s.d 1993

- 1) Dibentuk divisi-divisi dalam IPBI, yaitu: a) Ikatan Pendidikan Koseor Indonesia (IPKON); b) Ikatan Guru Pembimbing Indonesia (IGPI); c) Ikatan Sarjana Konseling Indonesia (ISKIN).
- 2) Diperjuangkan oleh IPBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah. Diyakini apabila jabatan fungsional tersendiri itu terwujud, maka upaya profesionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling akan lebih terjamin untuk dapat terlaksana dengan baik.¹⁶

Menurut Gunawan,¹⁷ secara formal bimbingan konseling diprogramkan di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975, yang menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian yang integral dalam pendidikan di sekolah. Pada tahun 1975 berdiri Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) di Malang. IPBI ini memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap perluasan program bimbingan di sekolah. Kemudian dalam penyempurnaan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984 telah dimasukkan bimbingan karier di dalamnya.¹⁸

Pada awal 1980-an di IKIP Bandung dan IKIP Malang mulai dibuka Program Pascasarjana bimbingan dan konseling.¹⁹ Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia menjadi semakin kuat dan strategis dengan terjadinya perubahan nama organisasi dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) pada tahun 2001.²⁰

Untuk lebih memantapkan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi, dewasa ini telah banyak kegiatan yang dilakukan, baik seminar, lokakarya maupun penerbitan buku-buku bimbingan dan konseling. Pada bulan Desember 2003, ABKIN telah menyelenggarakan Konvensi Nasional XIII yang diisi dengan kegiatan seminar dan lokakarya (Semiloka) yang bertema “Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia Menuju ke Arah Standar Internasional. Para pembicara pada seminar tersebut di samping berasal dari para pengurus ABKIN dan para pakar Bimbingan dan konseling baik dari dalam maupun dari luar negeri, yaitu dari Jepang (Prof. Toshinori Ishikuma) dan Prof. Dr. Wan Kader Wan Ahmad dari Malaysia. Selain itu, pada setiap kota/kabupaten

¹⁶ Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan*, h. 352-353.

¹⁷ Gunawan, *Pengantar Bimbingan*, h. 23.

¹⁸ Yusuf & Nurihsan, *Landasan Bimbingan*, h. 96.

¹⁹ Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan*, h. 352.

²⁰ Yusuf & Nurihsan, *Landasan Bimbingan*, h. 97.

yang ada guru pembimbingnya telah dibentuk organisasi ABKIN dan organisasi MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling), baik di tingkat SLTP maupun SLTA.

Namun demikian, keberadaan bimbingan dan konseling dalam kancan pendidikan masih terdapat beberapa persoalan seperti yang diungkapkan oleh Yusuf dan Nurihsan,²¹ di antaranya:

- a. Masih terdapat kesenjangan rasio antara konselor atau guru BK. Idealnya perbandingan antara konselor atau guru BK dengan peserta didik adalah 1: 150 orang. Kenyataannya saat ini sekitar 1: 500, bahkan masih banyak sekolah yang belum mempunyai konselor atau guru BK sama sekali, terlebih-lebih lagi pada Sekolah Dasar (SD) atau madrasah Ibtidaiyah (MI) yang belum ada sama sekali guru BK nya.
- b. Yang menjadi konselor atau guru BK di berbagai sekolah tidak berlatar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling atau Psikologi Pendidikan.
- c. Pangangkatan guru mata pelajaran menjadi guru pembimbing, di satu sisi memberikan penghargaan bagi penyelenggaraan program BK di sekolah, karena ada kepedulian kepala sekolah terhadap program BK. Namun di sisi lain kebijakan tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi profesi bimbingan dan konseling itu sendiri, karena program bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak punya keahlian tentang BK. Program BK dianggap sebagai kegiatan pelengkap di sekolah yang tidak perlu dilakukan secara profesional.
- d. Bimbingan dan konseling masih belum familier di kalangan masyarakat. Popularitasnya masih terbatas dalam komunitas tertentu, dan di lingkungan sekolah seyogianya sudah akrab dan apresiatif terhadap BK, masih ada yang belum memahaminya secara tepat dan bahkan menaruh citra negatif terhadap BK.
- e. Masih ada kepala sekolah yang belum memahami secara tepat program bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga akhirnya kepala sekolah sering memberikan tugas kepada guru BK yang *mismatch* atau tidak sesuai dengan peran yang sebenarnya. Tugas yang tidak sesuai tersebut seperti menghukum siswa yang terlambat, meminta uang sekolah bagi peserta didik yang belum membayar uang sekolah, dan atau menangani para peserta didik yang melanggar aturan/ tata tertib sekolah. Kondisi seperti ini sangat tidak kondusif bagi profesi konselor, karena dapat meruntuhkan citra atau martabat konselor di mata peserta didik.

²¹ *Ibid.*, h. 99-101.

- f. Citra bimbingan dan konseling semakin diperburuk dengan masih adanya guru pembimbing yang kinerjanya tidak profesional. Mereka masih lemah dalam (a) memahami konsep-konsep bimbingan secara komprehensif, (b) menyusun program bimbingan dan konseling, (c) mengimplementasikan teknik-teknik bimbingan dan konseling, (d) kemampuan berkolaborasi dengan pimpinan sekolah atau guru mata pelajaran, (e) mengelola bimbingan dan konseling, (f) mengevaluasi program, (g) penampilan kualitas pribadi, yaitu mereka dinilai masih kurang percaya diri, kurang ramah, kurang kreatif, kurang kooperatif dan kolaboratif.
- g. LPTK yang menyelenggarakan pendidikan bagi calon guru pembimbing (konselor) masih belum memiliki kurikulum yang mantap untuk melahirkan konselor-konselor profesional.

Layanan bimbingan dan konseling seharusnya tampil sebagai profesi yang mendapat pengakuan dan kepercayaan publik, dan dalam kenyataannya bimbingan konseling semakin diperlukan kehadirannya dari masa kemasa, karena dalam kenyataannya bimbingan konseling bukan hanya berfungsi dalam tatanan akademik, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lubis,²² bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada seseorang (klien) sehingga seseorang itu dapat memahami dirinya (*self understanding*), menerima dirinya (*self acceptance*), mengarahkan dirinya (*self direction*) dan memiliki kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Dengan demikian, sejak dimulainya Bimbingan Penyuluhan (BP) di Indonesia pada awal tahun 1960, disiplin ilmu ini telah melalui lima tahapan besar, yaitu: *Pertama*, sebagai rintisan sampai dihasilkannya lulusan jurusan Bimbingan Penyuluhan yang pertama di IKIP Bandung tahun 1965. *Kedua*, ditandai dengan masuknya gerakan Bimbingan Penyuluhan di sekolah sampai dengan diberlakukannya kurikulum 1975 di sekolah-sekolah di seluruh tanah air yang di dalamnya memuat BP disatu sisi, dan disisi lain terbentuknya organisasi profesi dalam bidang BP dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). *Ketiga*, berlangsung selama lebih dari satu dekade, yaitu sejak diberlakukannya Kurikulum 1975 sampai dengan awal tahun 1990. Pada periode ketiga ini, istilah BP (Bimbingan Penyuluhan, disempitkan artinya menjadi bimbingan karier). *Keempat*, berawal dari tahun 1990-an sampai dengan akhir abad ke-20. Pada periode ini berkembang teori, praksis

²² Lahmuddin Lubis, *Konsep-konsep Dasar Bimbingan Konseling* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 4.

dan praktik pelayanan konseling dengan konsep-konsep yang lebih terarah, yaitu dengan diubahnya secara resmi istilah Bimbingan dan Penyuluhan menjadi Bimbingan dan Konseling, dan diaplikasikannya konsep BK Pola-17 Plus. Priode keempat ini seiring dengan berakhirnya abad ke-20 dan dibukanya Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) di Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 1999. Priode *kelima*, berawal dari abad ke-21 dengan berkembangnya terus program PPK. Program PPK ke-2, setelah di UNP dibuat di Universitas Semarang (UNNES). Program-program lainnya didorong pembukaan dan pengembangannya di seluruh tanah air demi terciptanya Profesi Konseling Bermartabat untuk menghadapi bergulirnya era globalisasi tanpa henti.²³

D. Lahirnya BK Pola-17

Lahirnya BK Pola-17 berdasarkan SK Mendikbud No. 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Pada SK tersebut terdapat hal-hal yang substansial, khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling adalah:

1. Istilah “bimbingan dan penyuluhan” secara resmi diganti menjadi “bimbingan dan konseling.”
2. Pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru BK, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian bimbingan dan konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru.
3. Guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling adalah mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut; minimal pernah mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam.
4. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas:
a. Pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas-asasnya. b. Bidang bimbingan: bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karier c. Jenis layanan: layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok.d. Kegiatan pendukung: instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus.

Unsur-unsur di atas (nomor 4) membentuk apa yang kemudian disebut “BK Pola-17”. Setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui

²³ Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2012), h. i-ii

tahap: a. Perencanaan kegiatan, b. Pelaksanaan kegiatan, c. Penilaian hasil kegiatan, d. Analisis hasil penilaian, e. Tindak lanjut.

Kegiatan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar jam kerja sekolah. Hal-hal yang substansial di atas diharapkan dapat mengubah kondisi tidak jelas yang sudah lama berlangsung sebelumnya. Langkah konkret diupayakan seperti:

1. Pengangkatan guru pembimbing yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.
2. Penataran guru-guru pembimbing tingkat nasional, regional dan lokal mulai dilaksanakan.
3. Penyusunan pedoman kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, seperti: a. Buku teks bimbingan dan konseling, b. Buku panduan pelaksanaan menyeluruh bimbingan dan konseling di sekolah, c. Panduan penyusunan program bimbingan dan konseling, d. Panduan penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling, e. Panduan pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah.
4. Pengembangan instrumen bimbingan dan konseling.
5. Penyusunan Pedoman Musyawarah Guru Pembimbing (MGP). Dengan SK Mendikbud No 025/1995 khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling sekarang menjadi jelas: istilah yang digunakan bimbingan dan konseling, pelaksanaannya guru pembimbing atau guru yang sudah mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam, kegiatannya dengan BK Pola-17, pelaksanaan kegiatan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, analisis penilaian dan tindak lanjut. Pelaksanaan kegiatan bisa di dalam dan luar jam kerja. Peningkatan profesionalisme guru pembimbing melalui Musyawarah Guru Pembimbing, dan guru pembimbing juga bisa mendapatkan buku teks dan buku panduan.

Demikian juga halnya dengan pertemuan-pertemuan nasional bahkan internasional organisasi profesi bimbingan sering dilaksanakan, seperti APECA di Salatiga pada tahun 1980 dan ARAVEG di Jakarta pada tahun 1983 memperluas wawasan para ahli bimbingan dan para petugas bimbingan, khususnya mengenai pelaksanaan bimbingan di sekolah.²⁴

Secara umum, butir-butir pokok BK Pola-17 Plus itu adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas, serta landasan BK.

²⁴ Gunawan, *Pengantar Bimbingan*, h. 23.

2. Bidang pelayanan BK, meliputi:
 - a. Bidang Pengembangan Pribadi
 - b. Bidang Pengembangan Sosial
 - c. Bidang Pengembangan Kegiatan Belajar
 - d. Bidang Pengembangan Pilihan Karier
 - e. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkeluarga
 - f. Bidang Pengembangan Kehidupan Berpekerjaan
 - g. Bidang Pengembangan Kehidupan Keberagamaan
 - h. Bidang Pengembangan Kehidupan Bermasyarakat
3. Jenis Layanan BK, meliputi:
 - a. Layanan Orientasi
 - b. Layanan Informasi
 - c. Layanan Penempatan dan Penyaluran
 - d. Layanan Penguasaan Konten
 - e. Layanan Konseling Perorangan
 - f. Layanan Bimbingan Kelompok
 - g. Layanan Konseling Kelompok
 - h. Layanan Konsultasi
 - i. Layanan Mediasi
 - j. Layanan Advokasi
4. Kegiatan Pendukung Konseling, meliputi:
 - a. Aplikasi Instrumentasi
 - b. Himpunan Data
 - c. Konferensi Kasus
 - d. Kunjungan Rumah
 - e. Tampilan Kepustakaan
 - f. Alih Tangan Kasus
5. Format Pelayanan Konseling, meliputi:
 - a. Format Individual
 - b. Format Kelompok
 - c. Format Klasikal
 - d. Format Lapangan
 - e. Format Kolaborasi
 - g. Format Jarak Jauh²⁵

²⁵ Prayitno, *Jenis Layanan*, h. 2-3.

Sementara itu, jika dilihat dari masalah peserta didik/klien, ada empat jenis bimbingan yang harus diberikan konselor atau guru BK kepada pelajar/klien, yaitu: bimbingan belajar, bimbingan sosial-pribadi, bimbingan karier dan bimbingan keluarga.²⁶

Demikian juga halnya dengan metode atau pendekatan dalam konseling, dimana setiap konselor atau guru BK harus mengetahui dan menguasai beberapa metode atau pendekatan, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih baik dan mengenai sasaran. Metode atau pendekatan yang dimaksudkan adalah:

1. Psikoanalitik
2. Eksistensial-Humanistik
3. Client Centered
4. Terapi Gestalt
5. Analisis Transaksional
6. Terapi Tingkah laku
7. Rational Emotif
8. Terapi Realitas.²⁷

Perkembangan bimbingan konseling dan profesi ini menurut hemat penulis semakin hari semakin dirasakan kegunaannya oleh masyarakat, terlebih lagi pada abad 21 ini, yang ditandai dengan semakin banyaknya persaingan dan tantangan dari berbagai pihak, lapangan pekerjaan yang semakin hari semakin terbatas, persaingan ekonomi semakin tajam, apalagi lagi memasuki pasar bebas, keadaan politik yang tidak stabil, harga bahan pokok yang tidak terkendali, harga BBM yang bergerak maju dan lain-lain sebagainya, semua itu dapat memengaruhi pikiran, fisik, mental dan emosional seseorang.

Dari berbagai fenomena itulah, tidak mustahil kecemasan dan kegelisahan semakin hari semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu pulalah agaknya pada milenium ke tiga ini kehadiran konselor profesional sangat diperlukan sehingga masyarakat dan para peserta didik/klien dapat menempatkan sesuatu itu pada tempat yang sebenarnya, yang pada akhirnya gejala-gejala penyakit mental seperti cemas, was-was, khawatir, takut, sedih dan gejala gangguan dan penyakit jiwa lainnya dapat dihindari, dan pada sisi lain semua ini membuktikan bahwa kehadiran bimbingan konseling di semua negara tidak terkecuali di Indonesia mutlak diperlukan.

²⁶ Achmad J. Nurihsan & Akur S. *Manajemen Bimbingan Konseling di SMP* (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 12.

²⁷ Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 53.

E. Penutup

Perkembangan bimbingan konseling dari masa kemasa mengalami kemajuan yang menggembirakan, baik di Amerika Serikat sebagai tempat lahir dan berkembangnya bimbingan konseling, maupun diberbagai negara termasuk di Indonsia. Disiplin ilmu ini bukan hanya diperlukan untuk mengatasi masalah (*problem solving*) yang dihadapi oleh seseorang/klien, tetapi juga diperlukan dalam pemberian orientasi dan informasi (*preventif*) kepada seseorang/kelompok.

PROSPEK PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Suatu Kajian Era Reformasi Dasawarsa Ketiga

Pagar Hasibuan

Profesor Peradilan Islam di Indonesia pada Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Ada dua hal yang tidak bisa ditawar-tawar bagi bangsa Indonesia karena hal ini sudah menjadi harga mati. Pertama, perkembangan dan kesinambungan hukum Islam di Indonesia. Kedua, Eksistensi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keduanya adalah fatner kembar yang selamanya harus dipertahankan, karena keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan sama sekali.

Untuk yang pertama, Indonesia menempatkan diri sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia. Berdasar data resmi sensus tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa. Berangkat dari asumsi jumlah penduduk tadi, maka jika kita menggunakan data pertumbuhan penduduk indonesia yang dikeluarkan oleh bank dunia, yakni 1.49% per tahun, maka *jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 adalah 252.124.458 jiwa*.¹ Sejalan dengan itu, Id.wikipedia mengatakan, Islam di Indonesia merupakan umat muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 85,2% atau 199.959.285 jiwa dari total 234.693.997 jiwa penduduk Muslim.² Muslim Indonesia tidak meminta untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam (*Dar al-Islam*), tetapi cukup menjadikannya sebagai negara yang mengakomodasi dan memberi kesempatan bagi pemeluknya untuk mengamalkan

¹ Sementara data lain yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri menyebutkan terhitung 31 Desember 2010 mencapai 259.940.857. Jumlah ini terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan 127.700.802 perempuan., <http://ariwahyudi.web.id/jumlah-penduduk-indonesia>

² Masih berdasar data tahun 2010, Islam di Indonesia merupakan umat Islam dunia. Ada sekitar 85,2% atau 199.959.285 jiwa dari total 234.693.997 jiwa penduduk. Walau Islam menjadi mayoritas, namun Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam, http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia

Islam (*Dar al-Salam*). Karenanya perkembangan dan kesinambungan hukum Islam di Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar sama sekali.

Untuk yang kedua, NU misalnya telah memperlihatkan tekad dan perjuangannya mempertahankan NKRI meski ada rongrongan pihak yang tidak bertanggung jawab. Sejarah kekecewaan Kartosuwirjo terhadap pihak Pemerintah pada masa silam menjadi pemicu munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yang pada akhirnya memperkokoh berdirinya Negara Islam Indonesia (NII), kemudian diikuti dengan gerakan yang muncul di Sulawesi selatan, dan yang lainnya, maka NU mengancam pedas akan hal itu, dan menstigma mereka dengan *bughat* (pemberontak) yang harus ditumpas, dan untuk hal ini ada hukumnya sendiri, karenanya mereka harus mengurungkan niatnya atau berlakulah hukum *bughat* bagi mereka.³ Demikian juga dengan sejarah semakin gencarnya gerakan radikalisme pada masa Orde Baru, tepatnya tahun 1984, yaitu saat muktamar NU di Situbondo maka NU mempublikasikan salah satu keputusan muktamarnya adalah “Menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk final dari perjuangan umat Islam, dan tidak bisa diganti dengan negara Islam”. Sebagai kelanjutannya NU menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya. Terbukti sampai saat ini meskipun dengan kendala yang tidak berarti NKRI masih eksis dengan ketangguhannya.⁴

Masa boleh berubah, situasi boleh berbeda, pemimpin boleh berganti, tapi Islam/agama dan NKRI harus tetap eksis. Sejak pendirian bangsa Indonesia pada tahun 1945 tekad ini sudah ada dan secara blak-balakan disepakati. Misalnya terlihat dalam perbincangan dasar negara, bagaimanapun diskusi yang muncul maka Pancasila tetap mengakomodasi agama, format terakhirnya menempatkan sila pertama dan yang paling utama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian juga dengan pasal 29 UUD 1945 yang mengatakan; 1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁵ Karenanya, NKRI dipahami sebagai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah final. Artinya mempertahankan NKRI adalah bentuk final perjuangan bangsa Indonesia, sebab hal itu adalah barang termahal yang kita miliki saat ini. Negara kita boleh jadi masih terbelakang dan bodoh, semua itu kita sadari, dan itu adalah bagian dari kelemahan dan keterbatasan kita untuk melakukan pembangunan selama ini. Silakan berpikir dan berjuang untuk

³ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam politik ORBA* (Jakarta: Gema Insani Press, 1976), h. 175-177, 118

⁴ Ahmad Baso, *NU Studies* (Surabaya: Erlangga, 2006), h. 389.

⁵ *Undang Undang Dasar Republik Indonesia UUD 1945 dan Amandemennya Dilengkapi Susunan Kabinet Indonesia Bersatu* (Solo: Sendang Ilmu, t.t.), h. 2, 29.

memperbaiki setiap persoalan bangsa ini, tapi jangan sampai mencederai, atau menggadaikan, apalagi menjual NKRI.

B. Hukum Islam Indonesia

M. Din Syamsuddin mengatakan tentang adanya tiga bentuk penampakan hukum Islam di Indonesia, terutama setelah era Orde Baru sampai sekarang ini. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Formalistik

Istilah ini dimaksudkan untuk mengacu kepada bentuk pemikiran mereka yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam yang formal. Dalam konteks politik ia menunjukkan orientasi yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra konsepsi politik Islam, misalnya pentingnya partai politik Islam secara formil (langsung menggunakan nama Islam), ungkapan, idiom-idiom, dan simbol-simbol politik Islam, dan terutama landasan organisasinya secara konstitusional harus menggunakan simbol Islam.

Formalisme Islam dalam politik dapat dilihat misalnya di antara kelompok Islam yang pada masa awal Orde Baru secara vokal menyerukan dihidupkannya kembali Piagam Jakarta. Kelompok ini, yakni faksi umat Islam di MPRS merasa bahwa ketika itu tepat waktunya untuk mengusulkan keinginan tersebut, karena menurut hemat mereka kelompok Islam telah memainkan peran penting dalam mendirikan Orde Baru, sesungguhnya hal ini tidak lain adalah bentuk reinkarnasi dari gerakan yang menggema sejak Indonesia baru satu hari di merdekakan, bahkan selama masa Orde lama.

Bagi pemikir-pemikir formalis yang berpendapat tentang mendesaknya menghidupkan kembali Piagam Jakarta bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena Piagam tersebut mencakup Pancasila itu sendiri yang menyatu dalam pembukaan dalam konstitusi tersebut.

Di samping itu, Dekrit Presiden Sukarno juli 1959 mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara menyusul kegagalan Majelis Konstituante, dan menentukan diktum bahwa Piagam Jakarta merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945. Dengan mengabaikan argumen historis tadi, desakan untuk memasukkan frasa “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya*” di dalam Pancasila menunjukkan suatu tendensi formalistik. Bagi kelompok ini, lepas dari nilai-nilai Islam yang intrinsik di dalam Pancasila, pencabutan tujuh kata tersebut mengandung arti bahwa tidak ada jaminan untuk mewujudkan syariat Islam di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Perwujudan syariah mensyaratkan pembentukan lembaga politik formal.

Arus formalistik juga dapat dicermati dalam orientasi politik para aktivis partai dari kalangan umat Islam yang secara historis telah meyakini bahwa partai politik dengan nama Islam sebagai satu-satunya sarana yang mungkin bagi artikulasi kepentingan politik orang-orang Islam sesudahnya. Sikap mendukung ini dialami sepanjang masa Orde Lama, dan dalam beberapa hal juga dialami pada masa Orde Baru oleh banyak kelompok Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah walaupun dengan bentuk adaptasi yang berbeda, yakni dalam bentuk organisasi formal oleh NU, dan non-organisasional atau individual oleh Muhammadiyah.

Gerakan semacam ini masih terasa juga geliatnya, bahkan melekat di kalangan banyak orang sampai sekarang ini. Buktinya, munculnya partai-partai Islam yang cukup banyak jumlahnya, dari 34 partai politik peserta pemilu 2009 ternyata partai-partai bernuansa Islam, berbasis Islam, dan berideologi Islam masih cukup banyak jumlahnya. Demikian juga dengan obral isu yang sering digelar para politikus dan kandidat eksekutif untuk melariskan nilai jual diri dan partainya sehingga bisa mendapatkan kedudukan sebagaimana yang diharapkan. Termasuk isu politik dagang yang sering mengumbar aspek agama dengan formalitasnya meskipun substansi perdagangan yang ditawarkan tetap sama, bahkan kadang-kadang justru lebih nihil dari yang biasa, misalnya dengan membawa-bawa istilah ekonomi syariah (swalayan syariah, rumah makan syariah, pangkas syariah, dan yang lainnya). Demikian juga pengemis, sewaktu hendak memperdaya mangsanya justru menjadikan aspek formalitas agama sebagai umpannya, misalnya dengan penampilan islami semisal berjilbab/berpeci lebai, membaca doa dengan berbahasa Arab, dan lainnya. Semua ini adalah kegiatan yang menjadikan agama dalam aspek formalisnya sebagai sarana untuk sampai kepada tujuan.

Ironisnya, pikiran masyarakat kita ternyata masih sangat sensitif dengan hal ini. Masyarakat yang senantiasa dijadikan objek sekaligus subjek pembangunan ternyata masih sangat doyan dengan hal ini, buktinya isu-isu tersebut masih saja laku terjual, sehingga para penjaja isu ini tetap saja yakin dengan barang obralannya. Tidak heran kalau aspek agama dalam bentuk formalis ini senantiasa saja menjadi media politik yang diusung sekaligus digemari oleh kalangan tertentu.

2. Substantivistik

Istilah ini dimaksudkan untuk menunjukkan orientasi politik mereka yang menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan mengedepankan manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun dalam kelembagaannya. Bagi pendukung orientasi ini, yang lebih penting adalah eksistensi instrinsik ajaran-ajaran Islam dalam

arena politik Indonesia itu harus nyata dan jelas, dan untuk mendorong islamisasi seperti ini perlu dilakukan kegiatan dan tradisi kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia modern.

Ini memberikan alasan mendasar bagi kaum substantif bahwa dalam perspektif sejarah, bahwa proses kulturalisasi ini telah memasuki persaingan antara kekuatan-kekuatan budaya yang beragam, dan Islam hanya salah satu di antaranya. Agar Islam memenangkan kompetisi ini, Islamisasi menurut kaum substantivis harus mengambil bentuk kulturalisasi yang serius, bukan politisasi, gerakan-gerakan Islam yang dibangun di atas pilar budaya jelas memiliki ketangguhan yang luar biasa dibanding dengan hasil gerakan politik yang labil dan seporadik.

Di era kemerdekaan, kelompok ini dengan mudah dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dengan sila pertamanya tidak kurang islamisnya dengan apa yang diharapkan, kebebasan menjalankan ajaran Islam dijamin sepenuhnya, bahkan Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, dan memfasilitasi umat Islam untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, sama halnya dengan pemeluk agama lain dengan prinsip saling menghormati. Tidak kurang nilai keislaman seseorang jika sikap akomodasi berdampingan dengan pemeluk agama lain, bahkan hal ini bisa dijadikan pemicu lahan ibadah kepada Allah dengan pandangan adanya sikap konsistensi beribadah dalam keislaman di tengah pengaruh agama lain adalah lebih memperoleh apresiasi di sisi Allah ketimbang dengan tanpa godaan sama sekali.⁶ Dasar negara dengan segala kebebasan melaksanakan ajaran Islam di dalamnya tentu telah dapat diterima oleh Islam.

Islam itu tidak perlu ditampilkan secara eksklusif. Islam sebagai agama yang terakhir tentu memiliki kesempurnaan, jadi memiliki keunggulan di tengah kebersamaan, Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam tentu memiliki nilai-nilai adaptasi, Islam sebagai agama kedamaian juga punya nilai-nilai yang mengatur kemitraan. Semua ini ada pada Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Buktinya, di tengah banyaknya akidah keagamaan pada masa rasul, justru Islam menjadi agama favorit, bahkan berkembang pesat di masa-masa berikutnya, pemeluk agama lain turut memperoleh nikmat di atas kehadiran Muhammad saw., bahkan pemeluk agama lain bisa hidup tenang dan damai berbarengan dengan kekuasaan Islam.

Kelompok substantif ini belakangan muncul dalam gerakan aliran eksistensialisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang penting itu adalah bagaimana

⁶ Jalaluddin al-Syuyuthi, *Jami' al-Ahadis* (Mesir: t.p., t.t.), juz. 8, h. 224; Ibn al-Asir, *Jami' al-Ahadis min Ahadis al-Rasul* (Mesir: t.p., t.t.), juz 6, h. 4639, dan lain-lain.

caranya supaya Islam itu eksis di Indonesia ini, bukan simbolnya belaka, mengenai dasar negara, apa pun bentuknya tidak menjadi masalah, asal dasar negara itu memberi kesempatan bagi Islam untuk eksis (tumbuh dan berkembang), hal seperti ini sejalan dengan pikiran Munawir Syadzali yang pada akhirnya menulis buku *Islam dan Tata Negara*. Dalam satu pendapat, bahwa aliran ini berpikiran; kita tidak perlu mendirikan partai Islam, karena Islam tidak perlu diperjuangkan secara politik, untuk hal ini telah muncul ungkapan yang populer “Islam yes, partai Islam No”, bahkan tidak perlu membawa-bawa simbol keislaman, karena simbol keislaman itu tidak berguna sama sekali, tetapi yang terlebih penting itu adalah Islam itu harus eksis di Indonesia ini.

Belakangan terasa pandangan ini lebih membawa kesejukan berbangsa di satu sisi, serta keluwesan Islam untuk berkembang pada sisi yang lain. Betapa tidak, Islam sebagai penganut warga negara mayoritas benar-benar akan memberikan jaminan kesinambungan bangsa ini jika umat Islam itu telah mendukung keberadaannya, dan juga, di saat Islam tidak dalam posisi dicurigai, maka pada saat itulah Islam dengan mudah dan leluasa untuk berkembang. Kenyataan seperti ini lebih dirasakan dengan pengembangan Islam substantif ini yang banyak dikembangkan pasca Orde Baru.

Biarlah fakta yang cerita, bukan slogan. Fakta adalah bukti konkret dimana Islam diharapkan benar-benar ada secara substansi di Indonesia ini. Slogan hanyalah cerita omong kosong bila tidak dibarengi dengan fakta, dan Islam dalam bentuk ini hanyalah kepura-puraan, dan tidak diharapkan sama sekali.

3. Fundamentalis

Ini cenderung kembali mengangkat sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Pandangan ini disebut juga dengan “fundamentalis”, pada titik pangkalnya berkeyakinan bahwa kedua bentuk penampakan Islam Indonesia seperti digambarkan di atas tadi telah gagal menjadikan Islam sebagai media keseimbangan politik Indonesia dalam mengisi sistem politik yang sedang berkembang.

Kemunculan fundamentalisme Islam di Indonesia sebagian dipengaruhi oleh faktor internasional, yakni perkembangan fundamentalisme Islam di dunia Internasional, dan juga nasional, yaitu oleh dinamika dialektis internal dalam politik Islam Indonesia itu sendiri.

Ketidak mampuan dan ketidakefektifan gerakan-gerakan Islam yang mapan di hadapan rezim yang melakukan depolitisasi atas Islam melahirkan kelompok penentang dalam masyarakat Islam Indonesia. Mereka memandang revolusi sebagai pembenaran atas optimisme masa depan. Banyak dari kelompok-kelompok ini ditransformasikan ke dalam kelompok sempalan yang lewat

sikap reaksioner politik menentang penguasa, dan beberapa di antara mereka juga menentang keamanan Islam dengan menawarkan semacam alternatif.⁷

Belakangan, gerakan ini terkadang terasa semakin menampakkan diri. Sebagai tindak lanjut dari semakin banyaknya persoalan bangsa ini, sekaligus semakin banyak kegagalan yang dialami, berakibat pada semakin menumpuk kekecewaan kelompok ini. Mungkin saja suatu ketika, rasa ketidak-sabaran mereka semakin tak terkendali, akhirnya gerakan ini semakin solid dan gencar menyikapi persoalan yang ada, bahkan mungkin juga bersifat proaktif untuk menuntut keadilan atas kebijakan yang tidak pantas dilakukan dan berakibat terhadap pengabaian keislaman. Dengan hal ini mereka mencari momen-momen yang pas untuk memperlihatkan ketidakpuasannya.

Terkadang terasa aneh, di saat ada logika terbalik dalam pandangan umum, justru diusung dengan gigih, bahkan militan di tangan kelompok fundamentalis belakangan ini. Di saat banyak orang alergi dengan kekerasan karena, justru mereka gemar dengan hal itu, alasannya adalah merubah kemungkaran dengan kekuatan (tangan) itu secara langsung adalah hal yang paling utama ketimbang dengan kata-kata semata atau hati belaka yang hanya tampil sebagai pengecut. Di saat orang takut mati, justru ada orang senyum menyambut pesan kematian, sehingga ada orang dengan tidak pikir panjang untuk membawa bom bunuh diri dalam rangka menghancurkan kedurjanaaan biarlah dirinya ikut dalam kehancuran itu, atau senyum menyambut ponis kematian karena di pikirannya bukan kematiannya dengan segala kekonyolan yang terbanyang, tetapi mati syahidnya. Logika-logika semacam ini terlihat jelas dipropagandakan di mata kita sekarang ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa selama ini telah lahir dan berkembang hukum Islam yang ramah di Indonesia ini. Terdapat hubungan yang harmonis antara Islam dan negara, hal ini sejalan dengan firman Allah swt. pada Al-Qur'an yang berarti; "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam,*"⁸ jelas akan secara simultan dan langsung menyinari segala apa yang ada di sekelilingnya, dalam hal ini termasuk Indonesia.

C. Hukum Islam di Era Reformasi

Munculnya era reformasi serasa menyentak kita tentang lahirnya sesuatu

⁷ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 152-159.

⁸ Hal ini dijumpai dalam QS. Al-Anbiya'/21: 107 yang berbunyi; وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 508.

yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ternyata kondisi Indonesia sudah demam demokratisasi. Bukan hanya sekedar menguatnya hak publik, tapi juga masyarakat semakin menyadari akan hak-hak dasar mereka sehingga mereka bangkit, maka tidak heran kalau terkadang dalam menuntut hak tersebut mereka telah berlebihan sehingga reformasi dikatakan telah kebablasan, padahal saat ini adalah masih dalam masa transisi dan boleh jadi oleh pihak tertentu masih belum siap menerimanya sehingga mereka masih bermain drama dan mencoba beretorika. Kondisi sosial politik Indonesia masa ini memang masih belum stabil, jalan panjang cita-cita reformasi yang sedang diperjuangkan belum sampai diujung jalan.

Sekedar indikasi penampakan hukum Islam di era reformasi ini memperlihatkan tentang adanya peningkatan. Di antaranya: posisi dan jabatan penting semakin tersedia bagi orang yang beragama Islam. Penerapan syariat Islam semakin terasakan, kepentingan umat Islam semakin terakomodir, misalnya UU Zakat dan Haji telah lahir, bahkan telah diperbaharui, demikian juga dengan UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, penerapan syariat Islam di Aceh telah berlaku, bahkan telah diberi kesempatan untuk menerapkan syariat Islam yang seluas-luasnya (*kaffah*). Ekonomi Islam telah berlaku, bahkan telah dinyatakan sebagai hukum Islam Indonesia karena telah masuk dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pembaharuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian juga lahirnya UU Perbankan Syariah. Perda-perda syariat yang lahir dengan penampakannya yang netral telah merata di seluruh Indonesia. Semua ini menjadi indikasi tentang betapa akomodatifnya Indonesia terhadap perkembangan hukum Islam di era reformasi ini.

Tidak heran kalau simbol-simbol Islam pun semakin jelas dan kedengaran selama ini. Adanya tempat shalat pada setiap instansi pemerintah, semakin meluasnya penggunaan salam, bahkan kalimat takbirlipun terkadang bergema pada evan-ewan penting. Indonesia tetap diakui bukan negara Islam tapi paling tidak terlihat indikasi tentang semakin meluasnya penerapan ajaran Islam.

Sebagai dampak dari hal itu, sering juga para politisi mulai memanfaatkannya. Tidak heran saat pemilihan kepala daerah (pemilu kada) telah di ambang pintu, atau saat pemilihan anggota legislatif, para kandidat bersosialisasi dengan sikap kamuflase. Jika sebelumnya mereka jarang masuk rumah ibadah sekarang hari-harinya dihabiskan lebih banyak di tempat itu. Kalau sebelumnya mereka biasa pakai jas, safari, atau kemeja biasa, tetapi sekarang sudah mulai bawa sorban dan pakai baju teluk belanga. Ternyata mereka sadar bahwa dengan penampilan seperti inilah mereka akan disenangi, bahkan akan dapat meraih yang dicita-citakan.

Pada sisi lain, mungkin juga seorang pejabat akan terjungkal di saat dia tersandung dengan krikil tajam yang bernuansa agama. Misalnya perselingkuhan pejabat yang dibungkus dengan pelecehan seksual boleh jadi akan diturunkan

oleh rakyatnya sendiri dari tahta kekuasaannya. Meskipun dalam hukum pidana hal ini akan susah dicari pasal-pasal yang dapat mengancamnya, tapi desakan massa dengan power agama yang dimiliki membuat sang pejabat tersebut tak berdaya.

D. Prospek Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini

1. Aspek Islamis Pada Saat Pemilihan Presiden

Ada tiga cerita yang dapat dikemukakan untuk bahasan ini, sebagai berikut:

Cerita Pertama

“Dalam demokrasi, seharusnya mayoritaslah yang memimpin”. Ungkapan ini dilontarkan menjelang pilpres 2014 oleh Jonru Ginting, seorang mantan wartawan kompas yang kini aktif menulis berbagai buku, dan aktif membela PKS (kadang secara membabi buta), entah beliau salah satu kadernya atau bukan.

Kesimpulannya adalah karena bangsa ini terdiri dari mayoritas muslim maka yang jadi presiden itu harusnya juga adalah seorang muslim. Saat menghadapi pilpres tersebut hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara islamnya pasangan yang pertama yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak dipertanyakan lagi kerana sudah nyata dan jelas, tapi yang menjadi sasaran tembak adalah Joko Widodo yang sudah beredar isu bahwa beliau tidak seorang muslim, lalu kesimpulannya beliau tidak layak dipilih karena non muslim adalah minoritas di Indonesia ini, karena di negara demokrasi kelompok minoritas tidak boleh menjadi presiden bagi kelompok mayoritas. Tak pelak lagi bahwa ini adalah logika retorika yang dibangun untuk menyingkirkan Joko Widodo sebagai calon presiden.

Sejalan dengan hal itu muncul tanggapan dari pemilik website ini⁹ yang mengatakan; Ungkapan ini konyol dan memiliki kesalahan besar, maka saya merasa wajib untuk memberikan sanggahan terhadap tulisan tersebut. Kesalahannya adalah; Kalau dipedomani ungkapan “*Dalam demokrasi, seharusnya mayoritaslah yang memimpin*” maka logika mantik atau analoginya adalah “untuk masyarakat yang mayoritas penduduknya bodoh, maka pemimpinnya juga harus bodoh, untuk masyarakat yang mayoritas penduduknya perempuan, maka perempuan lah yang harus memimpin, untuk masyarakat yang mayoritas miskin maka pemimpinnya harus miskin. Artinya kita selama ini telah salah memilih pemimpin”.

⁹ <http://candrawiguna.com/presiden-indonesia-harus-seorang-muslim>

Cerita Kedua

Pada sidang Sinode yang digelar awal Maret 2013 lalu, Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia diundang dalam acara tersebut. Acara yang dihadiri oleh 700 pendeta dari seluruh Indonesia ini meminta JK untuk memberikan nasehat dan pandangannya mengenai keharmonisan dan damai dalam perbedaan. Dalam sesi tanya jawab, Pendeta Stefanus Marinjo bertanya pada JK “Apakah Bapak Jusuf Kalla secara pribadi mau dipimpin oleh presiden yang non-Islam?”

Bukan JK namanya kalau tidak dapat menjawab secara rasional dan tegas. JK pun menjawab:

“Kalau bicara tentang Presiden non-Islam, bahwa kita semua harus taat pada UUD 45, disitu tidak mencantumkan syarat agama. Tapi yang terjadi adalah pilihan rakyat; tentu umumnya orang memilih sesuai dengan kesamaan agamanya. Tapi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika pun yang merupakan kiblat demokrasi, butuh waktu 171 tahun untuk orang Katolik bisa jadi Presiden di Amerika (karena di Amerika mayoritas menganut Kristen Protestan). John F. Kennedy yang merupakan orang Katolik adalah orang pertama yang menjadi presiden di Amerika. Kemudian di Amerika juga butuh waktu 220 tahun untuk orang kulit hitam, Barrack Obama untuk menjadi presiden di Amerika.”

JK pun melanjutkan argumennya dengan mempertegas posisinya tentang keberagaman di Indonesia dan pilihan politik. “Jadi, kita tidak bisa bicara bahwa kita tidak demokratis, karena minoritas tidak bisa jadi presiden, di Amerika pun butuh waktu 220 tahun untuk kulit hitam bisa jadi presiden. Nah, kalau kembali ke konteks Indonesia, tidak usah bicara masalah agama dulu, orang luar Jawa saja susah jadi Presiden di Indonesia ini. Jadi bukan soal agama, ini karena berdasarkan suara terbanyak, demokrasi yang membawa seperti itu, bahwa pilihan orang jatuh pada hal yang identik pada dirinya sendiri.”¹⁰

Cerita Ketiga

Rhoma Irama si Raja Dangdut itu sempat beberapa kali membuat geger dalam pernyataannya tentang memilih pemimpin yang diliput berita secara Nasional sehingga menjadi *headline* pada beberapa media. Di antaranya, ketika banyak pihak mempersoalkan ceramah Pak Rhoma Irama di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, dia menjawab sebagai berikut: Saya menyampaikan firman Allah di rumah Allah. Apakah hal itu salah?

¹⁰ <http://jusufkalla.info/archives/2013/06/18>

Saya hanya menyampaikan kebenaran. Jika umat Islam memilih pemimpin yang kafir, maka mereka akan menjadi musuh Allah. Jika memilih pemimpin non-Muslim, hukumannya akan menjadi musuh Allah dan mendapat azab di akhirat nanti. Allah melarang dengan tegas untuk memilih yang non-Muslim dan ini perlu saya sampaikan karena sanksinya berat. Saya wajib menyampaikan kebenaran. Bagaimana jika banyak umat Islam menjadi musuh Allah? (Berbagai sumber media).¹¹

Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita tentang betapa pentingnya aspek agama dalam membangun sebuah bangsa Indonesia, dalam hal ini Islam. Sosok calon pemimpin itu dipahami sebagai pihak pengambil kebijakan yang akan memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa ini, islamisnya presiden akan melahirkan pembangunan bangsa yang bernuansa Islam, demikian juga sebaliknya. Dengan hal itu maka pertarungan menggolkan calon presiden yang Islam dan islamis menjadi bagian dari pertarungan hidup mati bagi pemeluk agama itu sendiridengan melakukan cara dan strategi masing-masing, di mana terkadang sampai terjerumus dalam langkah yang keliru saat mengimplementasikan semangat perjuangan tersebut.

Terbuktikan bahwa presiden Indonesia dari dulu sampai sekarang semuanya beragama Islam. Mereka adalah: 1) Soekarno, 2) Soeharto, 3) B. J. Habibie, 4) Abdur Rahman Wahid, 5) Megawati Sukarnoputri, 6) Susilo Bambang Yudhoyono, dan 7) Joko Widodo. Diperkirakan sampai beberapa dekade ke depan pihak yang memimpin bangsa ini masih tetap yang beragama Islam. Ini membuktikan betapa Islam sangat memengaruhi pilihan bangsa Indonesia secara umum.

Islam sebagai agama dipahami ideologi paling kental dalam diri bangsa Indonesia. Demikian banyak ideologi yang memengaruhi seseorang, mulai dari pilihan hukum, pasangan suami atau istri, mitra kerja sampai kepada calon presiden sebagai orang yang akan menjadi pemimpin bangsa ternyata harus lewat filterisasi keislaman. Batas minimal adalah aspek keislaman, yang lebih dari itu adalah aspek ketaatan.

2. Prediksi perkembangan Islam

Sujiatmi (ibu kandung Joko Widodo) sempat berucap: Saya dan suami saya adalah Muslim dan sudah haji, begitu pula semua anak-anak saya juga sudah haji, kedua orang tua (kakek-nenek Jokowi) juga Muslim. Para ustaz

¹¹ <http://jokowipresiden2014.blogspot.com/2013/04>

yang memfitnah Jokowi dan keluarganya sebagai kafir mudah-mudahan sadar. Sujatmi juga mengaku jika setiap pagi selalu rutin mengikuti pengajian di masjid dekat rumah.¹² Bahkan untuk membuktikan bahwa dia benar benar seorang muslim yang taat, maka buku nikah Jokowi pun terpaksa dipindai untuk publikasi yang menunjukkan bahwa dia beragama Islam saat menikah, dia mengatakan bahwa dia juga sudah haji, dan ada paling tidak empat kali umroh setelah itu, di samping sarana untuk bermunajat kepada Allah lalu memperlihatkan juga bahwa umroh tambahan saat masa tenang pilpres 2014 tersebut adalah bagian dari pembuktian bahwa dia adalah seorang muslim. Hal ini dikemukakan sejalan dengan berkembangnya isu miring tentang keberagamaannya, selain dianggap keturunan Tionghoa, Jokowi juga difitnah sebagai orang Kristen. Dia dikatakan tidak bisa berwudhu, shalat maupun mengaji. Lalu hal tersebut dibantah dengan berbagai cara.¹³

Paling tidak, kutipan tersebut memperlihatkan kepada kita tentang tiga hal, yaitu;

- 1) Semangat keberagaman (Islam) anak bangsa yang cukup kuat.
- 2) Persoalan agama isu empuk di tengah masyarakat.
- 3) Pembuktian keislaman menjadi terapi mujarab dalam penyelesaian persoalan.

Semangat keberagaman (Islam) anak bangsa sekarang ini terlihat cukup kuat. Persoalan agama dijadikan sebagai indikator utama dalam menentukan pilihan pada saat pilpres, ada kesadaran yang tinggi tentang aspek keislaman akan dapat menentukan perjalanan karier seseorang untuk menjadi presiden atau tidak selain dari kualitas pribadi seseorang. Bahkan muncul apresiasi tentang kualitas pribadi capres tersebut ditempatkan pada nomor dua setelah keislaman. Diperkirakan bahwa seandainya Joko Widodo tidak bisa menangkis isu negatif keislaman dirinya tersebut maka hal tersebut menjadi bumerang baginya, bahkan ia akan mengalami kegagalan. Ternyata kaunter itu berjalan secara efektif, mulai dari pernyataan ibu kandungnya, para ustaz, bahkan pembuktian pribadi oleh Joko Widodo sendiri bahwa dia bukan hanya seorang muslim semata tetapi juga seorang muslim yang taat. Ini menjadi isyarat tentang betapa aspek ke-Islam telah menjadi kesadaran masyarakat dewasa ini dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa.

Persoalan agama adalah isu empuk di tengah masyarakat. Di lahan yang subur pastilah tanaman yang sesuai dengannya akan tumbuh subur. Munculnya isu agama secara deras, merata, dan berkesinambungan adalah karena para

¹² <http://infoindonesiakita.com/2012/08/09>

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=rOLFtqngsPQ>

peneliti telah yakin benar bahwa Indonesia adalah tanah yang subur dan sesuai dengan keislaman, maka cara empuk untuk meraih sukses dalam pilpres dengan kandidat hanya ada dua orang, yaitu Prabowo Subianto dengan Joko Widodo adalah memperlihatkan keislaman yang baik pada yang satu dan tidak pada yang lain, akhirnya ditaburlah isu agama tentang kedua kandidat presiden tersebut. Ini erat kaitannya dengan berkembangnya Islam Indonesia dengan ciri bahwa iman yang kokoh dalam hati yang diperoleh lewat pendahuluan ketaatan, bukan pengujian rasionalitas.

Pembuktian keislaman menjadi terapi mujarab dalam penyelesaian persoalan. Boleh jadi telah banyak masalah reda, bahkan selesai hanya karena orang bermasalah tersebut adalah seorang muslim. Sejalan dengan hal tersebut, muncul dugaan bahwa Joko Widodo telah dapat memperlihatkan keislamannya dengan baik, dan sebagai kilas baliknya telah muncul keyakinan masyarakat umum bahwa benar dianya adalah seorang muslim yang taat, dan hal itulah yang mengantarkannya bisa meraih pilihan rakyat, dan akhirnya dia memenangkan pilpres tersebut. Hal yang lebih menarik lagi memperlihatkan bahwa meskipun partai Islam tidak memilih Jokowi tapi umat Islam tetap memilihnya, besarnya arus kesadaran keislaman ini membuat masyarakat mengindahkan orang yang menempatkan dirinya sebagai *leader* untuk tidak mengikutinya di saat berbeda dalam penilaian. Karenanya aspek keislaman terlihat sebagai hal yang dominan dalam menentukan kemenangan Jokowi.

Alwi Shihab, ulama Nahdlatul Ulama memberi apresiasi tentang perkembangan Islam yang damai di era Jokowi–JK. Dia mengatakan, Islamnya Jokowi adalah Islam yang menghormati kelompok lain. Dalam pemerintahannya nanti, “Jokowi dan Jusuf Kalla mempunyai tekad untuk menciptakan Islam yang *rahmatan lil alamin*. Artinya, Islam yang ramah, Islam yang sejuk, Islam yang memayungi semuanya, jika Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, keduanya tidak menginginkan adanya kelompok garis keras. Pasangan capres-cawapres ini akan merangkul semua kelompok”.¹⁴

Memperhatikan kutipan tersebut terpahami bagi kita bahwa indikasi perkembangan Islam pada era Jokowi masih tetap dengan koridor yang berjalan kokoh saat ini yaitu sesuai dengan teori eksistensialisme. Islam bukanlah dimaknai dengan simbol-simbol belaka tetapi yang terpenting adalah Islam secara substansi harus eksis di Indonesia ini.¹⁵ Sejalan dengan hal tersebut, maka

¹⁴ Hal ini disampaikan oleh Alwi Shihab dalam acara Sekretariat Nasional Jokowi “Pembekalan Relawan Penggerak Pemilih Berbasis TPS Se-DKI Jakarta”, di Istora Senayan, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2014).

¹⁵ Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, juga bersumber dari bahasa Inggris, yaitu *existence*. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “adanya dan kehidupan,” misalnya, partai-partai yang memang eksistensinya tidak bisa dipertahankan lagi dipersilakan

Ichtijanto, S.A. mengatakan bahwa yang dimaksud dengan teori eksistensialisme dalam kajian hukum di Indonesia adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia.¹⁶

Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional itu ada dalam empat bentuk, sebagai berikut:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya, kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status dengan hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁷

Jokowi dipahami sebagai Presiden *low profile*. Dia tidaklah orang yang menempatkan penampilan sebagai suatu hal yang terpenting, tetapi tampil dengan apa adanya seperti orang kebanyakan. Jabatan presiden yang diembannya tidaklah secara serta merta membuatnya dengan simbol orang nomor satu di negara ini, tapi dia cenderung ikut berbaur dengan rakyatnya.

Sejalan dengan uraian di atas terlihat bahwa perkembangan Islam ke depan (era Jokowi) akan tampil dengan Islam yang tidak norak, artinya Islam dengan tidak mengusung simbol-simbol belaka, tetapi Islam secara substansi tetap ada bahkan akan semakin berkembang dengan pesat. Perhatian Jokowi terhadap Islam tidak diragukan, bahkan dianya banyak dikelilingi oleh ulama, tetapi beliau tidak akan menampilkan Islam secara eksklusif, apalagi keinginan untuk mengubah Indonesia sebagai negara Islam, maka diperkirakan bahwa hal itu akan jauh api dari panggang.

Hal ini sejalan dengan pemahaman yang mengatakan bahwa meskipun Islam sebagai sebuah agama mempunyai ajaran sosial politik, tetapi Islam tidak memberikan tawaran tentang bentuk negara. Demikian pula dengan negara Islam, tidak ada bukti yang jelas bahwa Al-Qur'an dan Sunnah mengharuskan mendirikan negara Islam, oleh sebab itulah tidak ada alasan untuk menerima konstruk negara bangsa dengan Pancasila sebagai dasar ideologi.

mundur dari percaturan politik. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 1054.

¹⁶ Rachmat Djatnika, dkk., *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 137.

¹⁷ *Ibid.*

Sejak dari awal, gerakan pemikiran Islam seperti ini telah dikemukakan oleh: 1) Nurcholis Madjid (1993) dengan konsep desakralisasinya, yakni membebaskan diri dari kecenderungan mentransendenkan hal-hal yang bersifat profan. Baginya persoalan negara, partai, dan ideologi tidaklah sakral, dan Al-Qur'an tidak memberikan panduan kehidupan secara detail. Dengan konteks inilah dia menyerukan jargon terkenalnya "*Islam yes partai Islam no*"; 2) Abdurrahman Wahid dengan konsep pribumisasi Islam.¹⁸ Dalam pandangannya Islam adalah sebagai faktor komplementer kehidupan sosial, budaya dan politik bangsa Indonesia. Berhubung heterogenitasnya penduduk Nusantara ini maka usaha untuk menempatkan Islam sebagai pemberi warna tunggal hanya akan mengantarkan Islam sebagai faktor *devisif*. Ini tidak berarti umat Islam tidak berhak mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai ajaran agamanya. Mereka berhak melakukannya sebagaimana kelompok agama lainnya. Ia mengajak mempertimbangkan situasi lokal dalam memahami ajaran Islam agar tidak tercerabut dari akar budayanya, tetapi dengan tetap mempertahankan ciri Islam dalam bentuknya yang asli. 3). Munawir Sjadzali dengan konsep reaktualisasi ajaran Islam,¹⁹ sebagaimana Umar ibn al-Khattab dengan metodologi *istislahnya*. Tujuannya adalah agar ajaran Islam itu terartikulasi sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.

Pandangan ini lebih mementingkan terbentuknya tatanan masyarakat yang lebih baik, yaitu yang merefleksikan substansi ajaran Islam seperti prinsip keadilan, egalitarianisme, partisipasi, dan sebagainya, ketimbang mengedepankan lambang-lambang keislaman belaka. Sejalan dengan hal itu, sangat tidak masuk akal akan ada cita-cita politik untuk mendirikan negara Islam sebagaimana kalangan Islam sebelumnya, tetapi lebih mementingkan terciptanya mekanisme politik yang egaliter dan demokratis, juga berlakunya proses-proses ekonomi yang lebih merata, dan ini dilakukan adalah dalam rangka sistem politik yang ada. Karenanya Islam secara substansi akan masuk dalam sistem negara dengan cara meninggalkan identitas simboleknnya yang membuatnya menjadi eksklusif.

Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum kita yang mengatakan bahwa secara teori mestinya hukum Islam ada (eksis) dalam hukum nasional, karenanya hukum Islam adalah merupakan bahagian dari hukum nasional tersebut. Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar negara yang bermuatan religi. Hal ini dapat terlihat dari: 1) Pemahaman tentang tidak berlakunya lagi teori *reseptie* Snouck Hurgronje oleh pasal 37 aturan peralihan ayat 2 UUD 1945 setelah Indonesia diproklamkan, maka berlakulah teori *receptie exit*²⁰ Hazairin

¹⁸ Abdurrahman wahid, "Pribumisasi Islam," dalam Muntaha Ashari, Abd. Mun`im Saleh (ed.) *Islam Menatap Masa Depan* (Jakarta: P3M, 1989), h. 81-96.

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), h. 1-11.

²⁰ Maksudnya adalah bahwa teori *reseptie* harus keluar dari teori hukum nasional

yang memahami bahwa adanya pembatasan tentang berlakunya hukum Islam hanya sepanjang telah dapat diterima oleh hukum adat adalah dikeluarkan dari tata hukum Indonesia, dan *receptie acontrario*²¹ Sayuti Thalib yang memahami bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ini adalah merupakan kebalikan dari teori *receptie*, yaitu berlaku sepenuhnya; 2) Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menempatkan Piagam Jakarta dalam preambule (pendahuluan) UUD 1945 yang berbunyi; “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 adalah menjiwai²² UUD 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut.” Dengan demikian kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional tidak dapat dilepaskan.

Selanjutnya, ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) atau Masyarakat Ekonomi Asean yang menjadi lokomotif penggerak era ini menjadi sangat penting kaitannya dengan prospek perkembangan hukum Islam. Di samping sebagai aspek yang dapat mengekang dinamika hukum Islam karena persaingan kekuatan negara ASEAN dalam memainkan peranannya dalam pasar yang semakin meluas dan menyatu di satu sisi, dipahami juga sebagai peluang atas motivasi kebersamaan untuk membangun norma kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan yang juga hal ini menjadi bagian yang integral dari norma yang sangat kental dengan ajaran Islam itu yang pada akhirnya menjadi stimulus dalam pengembangannya. Intinya dari mana kita bisa melihat ini sebagai tantangan atau peluang, bahkan memainkan peranan sehingga dapat diimplementasikan.

Pandangan yang optimistis dari Mohammad Sandia mengatakan bahwa menjelang dasawarsa ketiga era reformasi di Indonesia ini secara umum diperkirakan memiliki perkembangan hukum Islam yang cerah dalam pembangunan

Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Djatnika dkk., *Hukum Islam di Indonesia*, h. 102.

²¹ Maksudnya adalah bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. *Ibid*.

²² Ismail Suny mengatakan, pengertian kata menjiwai dalam kalimat ini mempunyai dua pengertian, yaitu; 1). Pengertian secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI. yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya., 2). Pengertian secara positif berarti bahwa para pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memperlakukan hukum Islam dalam hukum nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Juanda pada tahun 1959, “Pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai dokumen historis, bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945. Jadi pengakuan tersebut tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, selanjutnya ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.” Amrullah Ahmad, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 135. Juga, tulisan Ismail Suny dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. DR. Hazairin* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1977), h. 16.

hukum nasional, karena secara sosioantropologis dan emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, selain itu secara historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum adanya sistem Hukum lain di masyarakat Indonesia. Peluang masa depan Hukum Islam di Indonesia semakin terbuka, karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional, hal ini memperlihatkan bagaimana *political will* pemerintah yang memberikan respon besar serta peluang bagi hukum Islam. Ke depan peran ulama para ustaz para dai, para akademisi dengan pengembangan dan penelitian yang konstruktif dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia.²³

Sejalan dengan hal tersebut muncul juga pandangan yang dikemukakan oleh Wawan Kurniawan yang mengatakan bahwa memang kesadaran umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya, khususnya dalam kaitannya dengan hukum Islam sangat berbeda-beda, tergantung penerimaan dan penghayatan terhadap ajaran Islam. Di Indonesia terdapat golongan yang dikenal kelompok abangan yaitu golongan umat Islam yang penghayatan dan pengamalannya serta kesadarannya terhadap hukum Islam sangat mengambang.

Di sisi lain ada kelompok taat, yaitu kelompok yang sadar sebagai pengikut suatu agama, mereka berusaha untuk mengetahui dan mendalami ajaran agamanya, dan berusaha pula semaksimal mungkin mengamalkannya. Dengan kata lain kesadaran beragama kelompok ini sangat baik. Bahkan akhir-akhir ini terdapat fenomena yang sangat menggembirakan yaitu semakin kentarnya antusiasme umat Islam termasuk para cendekiawan, pengusaha, para artis, dan para birokrat untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Melihat beberapa aspek yang telah dikemukakan di atas, cukup beralasanlah kalau dikatakan bahwa umat Islam akan berpeluang semakin besar dalam menyukseskan berbagai cita-cita hukum yang diyakininya. Apalagi di era reformasi saat ini, dalam kerangka kebebasan dan demokratisasi, perjuangan membumikan hukum Islam di Indonesia adalah suatu usaha yang sah. Bahkan optimisme akan prospek penerapan hukum Islam di Indonesia akan semakin tinggi, bila mencermati faktor-faktor berikut:

- a. Umat Islam adalah penduduk mayoritas.
- b. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan umat Islam, dengan indikasinya banyak anak muslim yang telah menyelesaikan studi S1, S2, dan bahkan S3 dan tidak sedikit dari mereka memiliki concern yang tinggi terhadap Islam.
- c. Sudah semakin menurunnya sikap fobia Islam dari orang-orang non-muslim.

²³ <http://staiabogor.ac.id/berita-146-prospek-masa-depan-hukum-islam-di-indonesia.html>

- d. Secara yuridis, upaya penerapan hukum Islam di Indonesia dijamin oleh konstitusi.²⁴

E. Kesimpulan

Lewat data dan informasi yang ada dipahami bahwa hukum Islam di era dasawarsa ketiga reformasi di Indonesia ini akan tetap berkembang dengan pesat. Hal ini dipahami dari kesadaran masyarakat, karakter Jokowi sebagai presiden, dan *stakeholders* pemerintahan secara umum. Hukum Islam yang berkembang tersebut tetap dengan bentuknya yang ada sekarang ini, yaitu mengedepankan teori eksistensialisme, namun perkembangannya akan semakin intens.

²⁴ <https://aweygaul.wordpress.com/2012/06/10/hukum-islam>



**BAGIAN
KEDUA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN:
PROYEKSI TENTANG
PERANAN MASA DEPAN**

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM ISLAM: Kiprah UIN SU Dalam Upaya Pemberdayaan Nilai

Hasyimsyah Nasution

Profesor Ilmu Pemikiran dalam Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Agama (baca: Islam) adalah sesuatu yang baku dalam wujud teks sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Tetapi, manusia sebagai pengamal agama mengalami perkembangan. Perkembangan manusia dimaksud terangkum dalam apa yang disebut budaya. Budaya merupakan akumulasi dari totalitas kreativitas yang muatan utamanya adalah iptek dan terintegrasi dalam kehidupan bersama.

Dalam kenyataan, intensitas interaksi manusia cenderung berlangsung sangat cepat yang ditandai oleh 3T (transportasi, telekomunikasi dan tourisme), dan dalam bahasa populer disebut dengan globalisasi. Dengan demikian, agama berhadapan dengan globalisasi dalam wujud saling memengaruhi.

Semua agama yang berasal dari Allah swt. (*revealed religions*) adalah Islam, penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta (QS. Ali 'Imran/3: 19). Agama (*al-din*) yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. (QS. al-Maidah/5: 3) sebagai *khatam al-nabiyyin* tidak pernah dinyatakan sebagai agama baru, tetapi lanjutan dan penyempurnaan (*muhaiminan*, QS. al-Maidah/5: 48) bagi agama-agama yang dibawa oleh para Rasul Allah sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa substansi agama adalah keterikatan manusia terhadap Tuhan dalam bentuk penyembahan. Dengan kata lain, Tuhan menjadi sentra utama perbincangan seputar agama.

Pada bagian lain, agama menempati posisi strategis, selain memproduksi nilai lewat refleksi penalaran oleh akal, penghayatan oleh hati nurani (*zauq*), dan pengalaman empiris yang dapat digolongkan sebagai inspirator. Tak kalah pentingnya agama juga merupakan motivator sekaligus kontrol terhadap segala bentuk aktivitas manusia secara pribadi dan tak terkecuali secara kolektif.

Inilah posisi sesungguhnya agama dalam kehidupan. Posisi strategis ini tidak selalu berada dalam kondisi stabil, mengalami pluktuasi yang dalam bahasa Hadis disebut “berkecenderungan bertambah atau berkurang” (*yazid wa yanqush*). Untuk itu diperlukan upaya yang dapat memelihara agama pada manusia supaya relatif dalam kondisi stabil guna membawa maslahat yang lebih besar. Hal inilah yang menjadi fokus sorotan uraian berikut ini.

B. Wacana Pemikiran Islam

Terkait dengan pemikiran dalam Islam, dalam memperbincangkannya perlu ditilik ke awal kehadiran Islam untuk mendapatkan gambaran orisinalitas ortodoksi atau dalam ungkapan lain keadaan masa *salaf al-shalih*. Pada masa Rasulullah dapat disebutkan bahwa Islam dan umat Islam berada dalam satu aliran. Hal ini dimungkinkan karena figur Rasulullah yang menempati posisi sentralistik dalam persoalan agama dan kepemimpinan umat, juga kemampuannya yang sangat piawai dalam menyelesaikan masalah.¹ Tetapi 25 tahun setelah wafatnya Rasulullah, satu demi satu mulai muncul ke permukaan persoalan agama yang kelak menjadi intrik umat, yang diawali dengan kematin Usman ibn Affan ra. secara “tragis”, menyusul keabsahan kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib ra., dan perubahan sistem pemerintahan dari *khilafah* kepada *mulkiyah* atau *sulthaniyah* menjadi pemicu munculnya pemikiran-pemikiran keislaman dengan jalan melakukan interpretasi atau *ta’wil* terhadap dalil-dalil *naql* (argumen Al-Qur’an dan Hadis) untuk menjustifikasi keberadaan dan tindakan suatu kelompok.²

Pada bagian lain, secara normatif bahwa Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran Islam membuka peluang interpretatif. Hal ini dimungkinkan selain karena sifat bahasa Arab yang menampung ajaran Islam, juga karena kerasulan Muhammad saw. adalah *khatam al-abiya’* (Nabi terakhir), sementara peradaban manusia masih akan terus berkembang, bahkan disebut bahwa abad 21 merupakan perkembangan raksasa ilmu dan peradaban manusia. Tentu saja, penemuan dan teori-teori ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi akan banyak mengkaji ulang terhadap pemahaman keislaman baik secara internal oleh pemeluk Islam, maupun secara eksternal oleh para peminat dan pencari alternatif solusi nestafa manusia modern. Kenyataan inilah yang mengkristal dalam wujud lahirnya berbagai macam versi pendekatan

¹ Ali Mustafa al-Ghurabi. *Tarikh al-Firaq al-Islamiyah wa Nasy’at ‘ilm al-Kalam ‘Inda al-Muslimin* (Kairo: Dar al-Ma’arif), h. 11-12.

² Perhatikan Al-Qur’an surah Al-Rum/30: 32, terjemahnya “Orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka”.

dalam memahami Islam sebagai objek telaahan ilmiah, dan lazim disebut sebagai aliran atau *firqah/ mazhab* yang meramaikan aliran yang sudah ada dalam sejarah umat Islam.

Secara historis, kejayaan Islam sebagai digambarkan Philip K. Hitti dalam *History of the Arabs*,³ terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah (750-1258M) membuka pintu masuk selebar-lebarnya bagi semua peradaban, baik yang berada di Timur maupun di Barat. Seperti masa al-Ma'mun (813M) yang memfasilitasi secara istimewa lembaga ilmu pengetahuan *Bait al-Hikmah* yang bertugas untuk menerjemahkan dan mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Penghargaan negara, kebebasan ilmiah, dan atmosfer keilmuan yang kondusif telah mendorong munculnya berbagai karya ilmiah monumental dalam berbagai disiplin keilmuan, baik dalam bidang kealaman atau sains, seperti astronomi, matematika, fisika, dan kimia, maupun dalam bidang keagamaan, seperti kalam, falsafat, tasawuf, dan fikih. Di semua disiplin ilmu keislaman ini dikenal ulama-ulama besar dengan karya-karya yang mengagumkan.

Mencermati karya-karya ulama dimaksud, sangat jelas tampak pengaruh keilmuan dan budaya yang berkembang pada saat itu. Sepertinya tidak terdapat batas-batas yang menyekat karena perbedaan wilayah, kultur, bahasa, bahkan agama. Ilmu menjadi milik semua umat dan bersifat universal. Kenyataan ini terjadi di semua kajian keislaman. Tentu saja, pemikiran filosofis lebih besar pengaruhnya dalam kajian Islam mengingat sifat Islam sebagai agama dan filsafat berada dalam rumpun ilmu humaniora. issues filsafat dimaksud, seperti persoalan esensi-eksistensi (*jauhar-'arad*), emanasi (*al-faidh*), silogisme, dan universal-parsial. Perlu dicatat bahwa wacana pemikiran keislaman itu, secara normatif mendapat porsi dukungan yang signifikan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an.

Sebagai contoh dapat dikemukakan: Dalam persoalan Ilmu Kalam muncul diskursus esensi-eksistensi Allah, atau yang lebih populer zat-sifat Allah antara Aliran Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Mu'tazilah memandang *nafyu al-sifat* atau *mu'attil* (meniadakan sifat Allah) karena dapat menjurus pada *ta'addad al-qudama'* (banyak yang *qadim*). Yang *qadim* mestilah Esa, *mustahil* jumlah yang *qadim* lebih dari satu. Jadi, pada zat (esensi) Allah sudah terkandung segala kesempurnaan. Dalam hal ini dikenal ungkapan: *Inna Bari Ta'ala 'alimun bi-'ilmih, wa 'ilmuhu zatu* (Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mengetahui dengan ilmu-Nya, dan ilmu-Nya adalah zat-Nya). Adapun Asy'ariyah menganggap bahwa sifat merupakan keniscayaan pada Allah untuk menggambarkan kesempurnaan-Nya. Sifat-sifat itu adalah *azali* dan *qadim* yang berdiri di atas

³ Philip K. Hitti. *History of the Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd., 1979), h. 371-407.

zat-Nya, tetapi bukan zat-Nya, bukan pula lain dari zat-Nya. Contoh lain dapat disebutkan betapa besarnya pengaruh sillogisme Aristoteles (*mantiqi Aristhy*) terhadap metode *istinbat qiyas* (analogi) di kalangan fuqaha dalam hukum Islam.

Dengan demikian, walaupun telah terbangun asumsi dasar keilmuan Islam dalam kategorisasi yang jelas dan rumusan-rumusan karakteristiknya. Namun, sesuai dengan tujuan kehadiran Islam yang menabur *rahmat* sepanjang zaman, maka terus akan terjadi wacana pemahaman yang kondisional, boleh jadi bersifat korektif terhadap aliran pemikiran yang ada, atau sesuatu yang bernuansa baru.

C. Dampak Globalisasi

Globalisasi telah mejadi kata yang populer karena banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi yang menjadi karakter *genuine* dari proses globalisasi menyebabkan munculnya berbagai perubahan yang bersifat holistik. Perubahan-perubahan pada skala global memicu timbulnya transformasi struktural yang kemudian dapat berimplikasi pada proses pergeseran nilai, sikap, cara hidup, perilaku manusia, sistem, kelembagaan, dan lain-lain.

Manusia diberi kemampuan untuk mengetahui ciri dan hukum-hukum yang berkaitan dengan alam raya, seperti yang tertuang dalam firman Allah surat al-Baqarah/2: 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ayat ini sekaligus merupakan *statement* bahwa SDM yang berkualitas sangat memegang peranan dalam aktivitas. Dalam bidang ekonomi misalnya, Peneliti Denison mengatakan bahwa 73 persen pertumbuhan ekonomi USA ditentukan oleh sumber daya manusia. Bahkan ia menambahkan, bahwa hanya sekitar 17 persen keberhasilan perekonomian ditentukan oleh faktor fisik, modal materi.⁴

Fenomena yang terjadi belakangan ini juga telah menarik perhatian sejumlah ahli manajemen internasional. Sebagai contoh, dalam artikel pengantarnya pada salah satu terbitan *the Academy of Management Review*, Tung & Glinow memberi ilustrasi *the World has begun to resemble a global village. The People of different nations are interconnected more closely than they have ever been...*⁵ Memang benar, dunia kini seolah-olah sebuah desa

⁴ E.F. Denison, *Trends in American Growth* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1997), h. 75.

⁵ R. Tunq & Von Glinow, "Incorporating International Dimensions in management Theory Building," dalam *Academy of Management Review*, Vol. 16.2, h. 259-261.

global, di mana manusia dari berbagai bangsa dapat berhubungan satu sama lain secara lebih dekat dari pada sebelumnya.

Dalam pada itu, teknologi merupakan kekuatan penentu bagi peningkatan integrasi seluruh belahan bumi, dimana teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan pengetahuan kita tentang manusia dari bangsa-bangsa lain, serta memungkinkan adanya interaksi dan saling memengaruhi satu sama lain secara lebih intensif.

Demikian pula, dalam waktu relatif singkat, kita dapat mengikuti perkembangan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya melalui sarana komunikasi teknologi, seperti internet,⁶ telepon, televisi, dan sejenisnya. Dengan teknologi, lanjut Tung, ekonomi telah menjadi kekuatan utama yang terjadi dalam fenomena global itu. Perusahaan-perusahaan multinasional telah mampu, dengan teknologinya, menaikkan efisiensi ekonomi dengan belajar tentang dan mendapatkan masukan berupa SDM dan modal dari sumber-sumber yang paling efektif diseluruh dunia. Teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi memungkinkan perusahaan-perusahaan itu memasarkan produknya secara internasional, memperluas ruang lingkup dan meningkatkan efisiensi ekonomi mereka.

Jadi, globalisasi telah menjadikan kehidupan manusia menjadi begitu terbuka dan menyebabkan semakin tajamnya persaingan antar negara dan perusahaan dalam merebut pasar serta usaha menghasilkan kinerja dan kualitas produk yang prima. Dengan demikian pada saatnya organisasi bisnis-bisnis yang terlibat dalam persaingan itu akan menuntut kualitas SDM yang tinggi dan kompetitif, kualitas manusia menjadi titik kunci, dan karenanya peranan organisasi atau lembaga pendidikan yang menghasilkan SDM yang berkualitas menjadi semakin urgen.

Erat kaitannya dengan gejala globalisasi yang diuraikan di atas adalah era perdagangan bebas serta tingginya mobilitas tenaga kerja. Dampak lebih lanjut dari situasi ini, kelak, selain dari masalah ekonomi dan bisnis, tentunya

⁶ Akseptabilitas dan popularitas penggunaan internet ini, baik *websites*, *e-mail*, *chatting*, dan lainnya, telah dengan cepat mengubah gaya hidup (*life style*) manusia-manusia modern. Bahkan hidup keseharian seakan tidak boleh terlepas dari internet. Kenyataan seperti ini dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan orang Amerika yang mulai memomorduakan televisi dan memomorsatukan internet sebagai media pencari informasi. Contoh lain adalah keseriusan pemerintah Cina dan Hongkong untuk mengembangkan internet bahkan untuk menjadi pelopor *e-business* yang dilakukannya melalui internet. Pada Pemilihan Umum di Malaysia tahun 2007, media massa telah dikuasai oleh partai berkuasa, maka internet menjadi pilihan partai oposisi sebagai media kampanye. Karena itu, Perkembangan internet tak terbendung dan terus berekspansi ke seluruh bidang kehidupan, tak terkecuali dunia perdagangan yang saat ini banyak menggunakan internet sebagai media utamanya.

sudah dapat diduga, antara lain; munculnya masalah-masalah baru di bidang sosial budaya, dan boleh jadi juga di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi, bila demikian halnya, jelas ini akan menjadi tantangan yang serius bagi, pemimpin umat dan dunia pendidikan tinggi untuk mempersiapkan regenerasi kader dalam menghadapi masa yang penuh dengan persaingan itu. Dengan demikian, globalisasi pada dasarnya mengisyaratkan dua hal sekaligus, tantangan dan peluang.

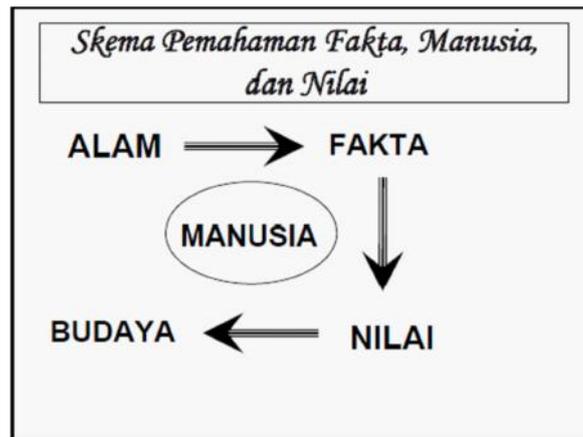
Sebagai disebutkan di atas bahwa globalisasi adalah buah dari intensitas komunikasi, dan komunikasi itu sendiri adalah hasil sains dan teknologi. Karena itu, dalam kaitannya dengan pemikiran Islam, muatan informasi, atau pesan menjadi sangat penting. Pada bagian lain, sikap yang ditimbulkan oleh luasnya informasi menimbulkan kompetisi dan keinginan untuk menguasai. Kecenderungan ini tampak dengan jelas dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Tentu saja dorongan ini diperkuat karakter manusia dengan potensi yang dimilikinya.

Pada awal perkembangan pemikiran Islam bahwa kemunculan aliran lebih pada respon dalam upaya melakukan *tanzih*. Hal ini dapat dimaklumi karena masa klasik Islam dimaksud, secara dominan dikuasai oleh Islam. Tentu tidak demikian halnya dengan kondisi global saat ini, di mana posisi umat Islam berada pada pinggir kekuasaan, baik dalam bidang ekonomi, demikian juga dalam bidang politik, dan budaya. Maka reaksi umat Islam terhadap persoalan tersebut tidak selalu proporsional, bahkan tidak jarang bersifat *ad hoc* (*arranged or happening when necessary and not planned in advanced*). Karena itu muncul kecenderungan corak berpikir ekstrim pada sejumlah individu yang pada gilirannya menjadi aliran yang disebut “radikalisme” atau “fundamentalisme”, yaitu kelompok yang secara kaku dalam memahami *nash* syariat dan realitas kehidupan, pada satu sisi dan pada sisi lain, lahir kecenderungan pemahaman yang tidak kalah ekstrimnya dalam bentuk liberalisme karena didorong rasionalisasi yang longgar terhadap norma klasik keagamaan dan sifat netralitas ilmu. Bandingkan QS. al-Ala’/96: 1-5. Selain itu masih dijumpai pemahaman yang bercorak moderat, sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an “*wa kazalika ja`alnakum ummat wasatha*” (dan sedemikianlah Kami jadikan kamu sebagai umat moderat).

Selain itu, muncul gejala yang tidak kalah menariknya, terutama di kalangan berpendidikan sekuler dalam bentuk kepribadian yang terbelah (*split personality*). Pada pemahaman mereka, Islam adalah agama sebagai dipahami oleh orang-orang Barat, yakni mengatur hubungan Tuhan dengan manusia, terutama dalam peribadatan. Dalam hal-hal yang terkait dengan dunia, sepenuhnya dalam kerangka keilmuan manusia *un-sich*.

D. Kehidupan dan Nilai

Tidak terbantahkan bahwa nilai telah berada dalam kehidupan manusia sepanjang peradaban manusia, karena nilai dimaksud menyatu dan tak terpisahkan dengan kehadiran budaya, sebagai tampak pada skema berikut:



Skema di atas memperlihatkan bahwa alam tidak hanya sebatas menjadi sumber kehidupan manusia secara fisik, tetapi juga merupakan fakta mengajari manusia dalam banyak hal. Perulangan fakta-fakta yang diperlihatkan oleh alam memberi inspirasi bagi hidup manusia. Dalam bahasa sederhana hal ini disebut "alam takambang jadi guru". Banjir, gempa, perubahan musim dan fenomena alam lainnya yang terjadi secara berulang-ulang bahkan dalam siklus yang teratur secara natural dalam hukum kausalitas (baca: *sunnah Allah*), relatif hanya sementara mengganggu kehidupan manusia, lebih daripada itu telah terbukti mendorong manusia untuk mencari solusi dari tekanan alam dimaksud. Karena itu ada sejumlah bangsa yang mampu merekayasa gejala alam dimaksud sebagai peluang memperbesar eksistensi dirinya, sebut saja umpamanya negara Jepang yang sering dilanda gempa menjadi terkenal sebagai bangsa yang ahli dalam konstruksi bangunan tahan gempa. Demikian juga negeri Belanda, khususnya Nederland telah mengajari mereka menjadi ahli tentang pengelolaan air karena kondisi negerinya di bawah permukaan laut. Jadi hubungan manusia dengan alamnya sangat ditentukan seberapa kuat manusia mengambil manfaat dari keberadaan alam, dan sebagai ciri dari kemodernan ditandai seberapa besar manusia mampu merekayasa alamnya, sebaliknya kesederhanaan suatu umat ditentukan tingkat ketergantungannya pada alam di mana mereka berada.

Selain keberadaan alam yang bersifat fisik dalam memenuhi kebutuhan fisik manusia, alam juga memberi kepada manusia hal-hal yang bersifat

non-fisik, bahkan bersifat spiritual. Hal ini dimungkinkan, pada satu sisi karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami peristiwa-peristiwa alam, sepertinya ada kekuatan tersembunyi atau “*impossible hand*”. Tetapi pada sisi lain bahwa peristiwa atau yang dihadapi oleh manusia tersebut sangat erat bahkan tergantung dengan kehidupan mereka. Dalam kondisi semacam inilah manusia memerlukan jawaban untuk memberi kepuasan pada rohani.

Kehadiran agama baik yang berifat anugerah Allah (*revealed religion*) maupun yang diciptakan manusia (*rational religion*) mengandung seperangkat nilai-nilai yang dianggap secara subjektif oleh penganutnya memberi jawaban memuaskan terhadap fenomena alam dimaksud.

Kedua unsur yang dijelaskan di atas merupakan substansi dari kebudayaan, atau dengan kata lain, kebudayaan dapat diartikan segala sesuatu yang menggambarkan dalam pikiran manusia atau perasaan manusia yang dengannya ia merespon segala sesuatu yang dihadapinya dalam hidup. Dengan makna kebudayaan tersebut berarti kebudayaan sarat dengan nilai-nilai yang disumbang oleh alam dan agama dalam meneruskan kehidupan. Dengan kata lain, kemajuan kehidupan manusia sangat ditentukan oleh kebudayaannya, dan inti dari kebudayaan dimaksud bermuatan nilai-nilai. Dengan demikian mengajarkan nilai adalah suatu keniscayaan. Dalam bahasa Islam, disebutkan bahwa buah dari suatu aqidah dapat diamati pada akhlak seseorang, sedangkan syariah adalah upaya untuk memelihara akhlak dimaksud.

Tetapi sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi yang menjadi *core* dari kebudayaan, secara terus menerus terjadi pertarungan antara dua kutub dari sisi peradaban dimaksud, yang bersifat material dan bersifat spiritual. Walaupun kedua unsur itu selalu hadir bersamaan dalam setiap kurun waktu eksistensi masyarakat, namun ada saat-saat hegemoni peradaban material atas spritual, dan sebaliknya. Untuk saat ini, kecenderungan ke arah materialis, sebagaimana digambarkan oleh Daniel Bell dalam bukunya *The Cultural Contradictions of Capitalism* telah sirnanya pengendalian diri. Dia menempatkan dua penjahat utama: pertama budaya romantisme, yang berusaha menghancurkan tatanan, konvensi dan tradisi demi sensasi, liberasi dan eksplorasi diri; dan kedua kebutuhan kapitalisme untuk terus menerus menggenjot tingkat konsumsi yang lebih besar. Hedonisme akan terus mengalahkan penghematan, dan pameran akan menggantikan kesederhanaan. “Budaya tidak lagi berkenaan dengan bagaimana bekerja dan meraih sesuatu, tapi bagaimana membelanjakan dan menikmati”.⁷

Sebagaimana dimaklumi dari perspektif ekonomi, saat ini dunia bisnis dimenangkan oleh aliran neo-liberalisme yang merupakan lanjutan kapitalisme.

⁷ Bandingkan: Hikmat Budiman, *Pembunuhan yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Dalam konteks ini, masyarakat digiring konsumernya lewat penggiatan advertensi untuk menyuburkan pasar yang pada gilirannya membawa ke arah pola hidup hedonisme dan saat ini dengan mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat, terutama di perkotaan, tak terkecuali di kota Medan. Derasnya gelombang sosialisasi dan periklanan telah memerangkap sebagian masyarakat ke dalam pola hidup “alim di siang hari dan teler di malam hari” (*straight by day swinger by night*) atau dalam bahasa populer “*dugem*” (dunia gemerlapan).⁸

Islam mengajarkan bahwa keberadaan manusia secara individual harus memberi manfaat kepada orang lain “*khayr al-nas, anfa`u al-nas*”. Pengertian bermanfaat adalah dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata, karena itu Islam sangat menekankan amal saleh, bahkan hal inilah yang akan *dihisab* (dihitung) nantinya di akhirat. Sementara kecenderungan beramal saleh dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang semangat bekerja dan penguasaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Untuk itu, adalah keniscayaan pembentukan karakter yang berketuhanan yang memotivasi untuk beramal saleh. Mengingat pembentukan karakter menjadi tujuan utama, maka materi kuliah “tauhid” harus diikuti oleh mahasiswa setiap harinya, secara terpadu atau terintegrasi dengan mata kuliah lainnya sebagai fondasi pembentukan dan pemahaman nilai yang bernuansa *ilahiyyah* (religius).

E. Tanggung Jawab UIN SU terhadap Nilai

Sebagai dimaklumi, perubahan status kelembagaan dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 131 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tanggal 16 Oktober 2014. Perubahan ini membawa implikasi sebagai dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres dimaksud bahwa UIN SU sebagai lembaga ilmiah diberi kewenangan selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam, juga dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain. Hal ini berarti UIN SU ke depan memiliki peranan besar dalam pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni sebagai halnya sifat universitas. Tentu saja hal itu, selain sebagai peluang sekaligus menjadi tantangan mengingat usianya yang masih relatif muda dan baru lahir yang menuntut pembenahan dalam banyak hal untuk dapat sejajar dengan universitas-universitas yang telah lebih dahulu berkiprah dalam memajukan harkat kemanusiaan, khususnya bagi bangsa Indonesia.

⁸ Hatib Abd Kadir Olong Sangaji, “Gelat Dugem Sebagai Ritual Baru Pada Tubuh Kaum Urban (Studi Kasus para Clubbers Di Hugo’s Café)” dalam *Jurnal Balairung*, ed. 40/XX Tahun 2006. Dalam kajiannya tersebut telah kemunculan kelas tertentu (*special class*) dalam masyarakat sebagai suatu simbol kehidupan baru yang dianggap “bergengsi” oleh pendukungnya dari kelas menengah ke atas.

Sebagai UIN yang baru lahir, tentu memiliki beberapa kemudahan dalam menumbuhkembangkannya baik dalam aspek kelembagaan maupun aspek akademis. Umpamanya adalah dengan mudah mengambil contoh atau perbandingan terhadap UIN yang telah eksis lebih dahulu, seperti UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kedua UIN ini sebelumnya ketika bersatus IAIN telah dijadikan sebagai model bagi seluruh Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, baik karena alumninya yang menduduki posisi atau jabatan eselon I dan II sebagai pengambil kebijakan pada Departemen Agama RI di mana perguruan tinggi agama bernaung dan di bawah pengawasannya, juga sebagai kementerian pengucur dana dari pemerintahan. Pada bagian lain, kedua UIN tersebut adalah tertua yang alumninya tersebar di seluruh Indonesia, tak terkecuali pada IAIN Sumatera Utara baik berstatus sebagai dosen, maupun sebagai pegawai administratif terutama pada saat berdirinya 19 November 1973 dan awal pembenahannya. Sekedar contoh dapat disebutkan beberapa nama, Ismail Muhammad Syah (Ismuha), Abdul Halim, Fachrurrazy Dalimunthe, Siti Awan Lubis, Ahmad Rivay Siregar, dan Muhammad Zuhri. Tanpa bermaksud mengecilkan peranan alumni Timur Tengah dan lainnya, seperti Mahmud Aziz Siregar, Abdullah Syah, dan T.A. Latief Rousdiy.

Kemudahan lainnya dapat disebut bahwa pembenahan suatu universitas telah dimulai oleh universitas-universitas negeri. Baik yang sudah mendapat nama secara internasional, sebut saja umpamanya Universitas Indonesia di Jakarta (walau masih berada pada ranking di bawah 50-an) dan Universitas Gajah Mada (UGM), di Yogyakarta, atau universitas di luar negeri. Langkah yang ditempuh dengan mengambil upaya kerjasama. Tetapi harus diakui bahwa UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Sunan Kalijaga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tak terlepas dari peranan universitas negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di dua Kota yang sama. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian dan pertimbangan dalam pengembangan UIN Sumatera Utara saat ini dan seterusnya untuk menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED), baik karena kualitasnya maupun unsur ketenagaan staf pengajar dan kependidikan serta sarana dan fasilitas akademis yang dimiliki kedua universitas ini yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan ekselarasi UIN SU saat ini dan ke depan.

Namun dengan mengadopsi keunggulan universitas negeri terutama dalam pengembangan program studi umum yang termasuk dalam kategori semua jenis keilmuan yang lazim dikenal, yaitu ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*), dan humaniora (*humanities*), atau dari segi sifatnya yang bersifat ilmu-ilmu murni (*pure sciences*) dan ilmu-ilmu terapan (*applied sciences*), maka hampir dapat dipastikan tidak akan ada perbedaan yang signifikan dengan kehadiran UIN SU dari lainnya yang sudah lebih dahulu berkiprah dalam dunia akademisi sebagai universitas.

Hal itu harus menjadi pertimbangan serius untuk memberi nilai tambah, terutama pada aksiologi keilmuan yang dikembangkan oleh UIN SU berupa penggalian dan sinergitas nilai-nilai ilahiyah dengan ragam kehidupan yang profan.

Sebagai dimaklumi, pada saat umat Islam berhasil menggali kembali khazanah keilmuan yang berserakan pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya saat berkuasa Harun al-Rasyid dan dilanjutkan oleh anaknya al-Ma'mun dengan memberdayakan lembaga ilmiah "*Bait al-Hikmah*" untuk menggalikembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat yang sudah terpendam yang dibawa 400 tahun sebelumnya oleh Alexander the Great dari Mecedonia ke kawasan Asia dan Afrika Utara. "Keinginan Alexander untuk menguasai sekaligus menyatukan kebudayaan yang ditaklukkannya, baik di Barat maupun di Timur, maka dibukalah pusat-pusat pengkajian kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan Yunani sebagai inti kebudayaannya, hal ini terkenal dengan Hellenisme. Dikenallah pusat kebudayaan di Athena dan Roma untuk bagian Barat, sedangkan untuk Timur dikenal Alexandria (Iskandariyah) di Mesir, Antioch di Suriah, Jundisyapur di Mesopotamia (Irak), dan Bactra di Persia.⁹

Salah satu kontribusi Islam yang kuat terhadap usaha penggalian dan pengembangan ilmu pengetahuan saat itu adalah memberi warna keislaman dengan nilai-nilai ilahiyah, bahkan menjadi ciri utama yang dikenal dengan "*theocentrisme*" dengan merubah secara fundamental prinsip keilmuan yang dibawa oleh Alexander yang bercorak "*anthropocentrisme*". Hal itu dapat dipahami karena di Yunani dan Dunia Barat tidak kenal kedatangan Nabi sebagaimana di Dunia Timur pada umumnya. Dorongan ke arah theocentrisme dimaksud dimungkinkan karena para ilmuwan dan filsuf ketika itu memiliki corak keilmuan generalis, di mana para "*khadim*" ilmu berhimpun pada diri masing-masing berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bersifat profan dan eskatologis. Tanpa mengurangi ilmuwan lainnya, dapat disebut sebagai contoh Ibn Hayyan sebagai seorang fisikawan sekaligus pengamal sufis terkenal. Demikian juga halnya Ibn Sina yang terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang kedokteran, seperti *al-Qanun fi al-Thibb (Ensiklopedia Kedokteran)* dan *al-Syifa`*, dalam bahasa Latin, *Sanatio* (Penyembuhan) ensiklopedia yang terdiri dari 18 jilid mengenai fisika, matematika, dan metafisika. Kitab ini ditulis pada waktu menjadi menteri Syams al-Daulah dan selesai masa `Ala' al-Daulah di Isfahan; Ia juga seorang pelaku sufis yang sangat peduli dengan aktualisasi potensi jiwa, bahkan menulis karya khusus tentang jiwa berjudul *Risalah al-Nafs*. Kedua ilmuwan/filsuf ini terdapat di dunia timur Islam.

⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, 1986), jilid II, h. 46.

Untuk Dunia Barat Islam dapat dicontohkan Ibn Rusyd yang lahir di Cordova (Spanyol) yang menulis buku fikih, berjudul *Bidayah al-Mujtahid*, buku Kalam berjudul *Fashl al-Maqal fima Baina al-Syari`ah wa al-Hikmah min al-Ittishal*. Pada bagian lain, Ibn Rusyd dikenal sebagai fisikawan dan dokter.

Selain faktor manusianya, faktor ajaran Islam sangat menentukan ke arah menyatunya pandangan tentang kebenaran yang diyakini bersumber dari “Zat Yang Esa” (Perhatikan Al-Qur’an surat al-Baqarah/2: 147). Tetapi kondisi ini berubah secara fundamental ketika umat Islam mengalami disintegrasi kekuasaan yang berujung dengan melemahnya kekuatan umat Islam dalam berbagai aspek, sebaliknya masyarakat non-Muslim di Dunia Barat mulai sadar dan bergerak bangkit menggantikan dominasi umat Islam¹⁰, terutama dalam hal penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Namun posisi ajaran agamanya tidak sama dengan Islam dalam merespon temuan ilmu pengetahuan, seperti *heliocentris* yang bertentangan dengan *credo* geosentris, demikian juga dengan kehadiran manusia di bumi sebagai *visitor mundi*, bukan sebagai *creator mundi*. Dengan demikian tak terhindarkan terjadinya benturan antara temuan ilmuwan dengan dakwaan para pendeta, dan pada gilirannya terbelah dalam memandang substansi sesuatu sesuai perspektif masing-masing, akhirnya kebenaran memiliki dua wujud yang diklaim masing-masing pihak sebagai miliknya. Kebenaran yang bersifat ganda ini terus berlanjut tanpa saling kontrol, bahkan dianggap bertentangan yang tidak mungkin dipersatukan. Inilah awal sekularisme di Barat.

Jika saat ini, ilmu pengetahuan bersinar di Dunia Barat sebagai kiblat peradaban modern, maka harus disadari bahwa jenis ilmu yang berkembang tersebut sesungguhnya telah tercabut akarnya dari unsur-unsur ilahiyah/ketuhanan, karena itu ilmu-ilmu yang diserap atau ditransfer dari Dunia Barat dimungkinkan hanya sebatas membangun sumber daya manusia pada aspek-aspek penalaran semata dan sangat jauh dari unsur kerohanian bahkan diduga keras dapat membawa kepada persoalan baru yang menjauhkan manusia dari Tuhan mereka.

Tentu tidak serta-merta UIN SU sebagai lembaga pendidikan Islam yang dipercaya untuk menggalikembangkan ilmu-ilmu sebagai tertuang dalam Perpres Nomor 131 Tahun 2014 hanya sebatas imitasi dari universitas negeri. Tetapi UIN SU harus mampu memberdayakan nilai-nilai yang bersumber dari alam dan agama sehingga menjadi karakter dari produk/ lulusan yang dihasilkannya. Dalam hal ini patut diperhatikan simpulan Prof. Muhammad Athiyah Abrasyi¹¹

¹⁰ Bandingkan: Muhammad Abduh. *al-Islam wa al-Nashraniyyin Ma’a al-’Ilm wa al-Madaniyah* (Kairo: Dar al-Manar).

¹¹ <http://udhiexz.wordpress.com/2007/12/30/10>.

tentang tujuan asasi pendidikan Islam yang diuraikan dalam *At Tarbiyah Al Islamiyah Wa Falsafatuha* yaitu: (1) untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam; (2) persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan saja dan tidak hanya dari segi keduniaan saja, tetapi dia menaruh perhatian kepada keduanya sekaligus; (3) Menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan sekedar sebagai ilmu, dan juga agar menumbuhkan minat pada sains, sastra, kesenian, dalam berbagai jenisnya; (4) menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, teknis tertentu dan perusahaan tertentu, supaya dapat ia mencari rezeki dalam hidup dengan mulia di samping memelihara dari segi kerohanian dan keagamaan; (5) persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semuanya bersifat agama atau akhlak, atau spritual semata-mata, tetapi menaruh perhatian pada segi-segi kemanfaatan pada tujuan-tujuan, kurikulum, dan aktivitasnya. Tidaklah tercapai kesempurnaan manusia tanpa memadukan antara agama dan ilmu pengetahuan.

Pada bagian lain, beberapa akar masalah yang selama ini merupakan faktor yang dapat menghambat kiprah IAIN sebagai lembaga ilmiah dalam studi keislaman dapat dikemukakan, antara lain (1) pradigma masyarakat yang semakin pragmatis; (2) trend pengkajian Islam didominasi oleh kajian konvensional; (3) kurikulum yang kurang menyentuh kebutuhan/ perkembangan masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi; (4) pendekatan pengkajian yang cenderung normatif, doktriner, masih sedikit yang bersifat historis-empirik; dan (5) penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris relatif masih rendah.

Permasalahan tersebut tidak boleh berkelanjutan dan harus terselesaikan dengan kehadiran UIN SU sehingga masyarakat merasakan bahwa perubahan kelembagaan tersebut merupakan “peningkatan” tidak hanya bagi warga kampus, tetapi yang paling utama adalah bagi masyarakat sebagai “rahmat” dalam banyak aspek. Karena itu perubahan menyeluruh adalah komitmen bersama warga kampus UIN SU. Secara teknis, harus terus dilanjutkan peningkatan kualitas dosen sebagai *hidden curriculum*, demikian juga tenaga kependidikan. Pada bagian lain terus dilakukan penguatan jejaring kerjasama dan peningkatan sarana dan prasarana akademis yang mencerminkan *academic atmosphere* yang berkelayakan sebagai universitas alternatif.

D. Penutup

Perubahan IAIN-SU menjadi UIN SU adalah keniscayaan sejarah sejalan dengan perjalanan waktu dan tuntutan perubahan umat, karena itu berbagai

hal yang terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi Islam ini perlu ekselarisasi yang relevan dan sejalan dengan perkembangan dunia universitas.

Selain pembenahan sarana infra struktur dan fasilitas pendukung akademis serta kualitas tenaga kependidikan, yang tak kalah utamanya adalah komitmen seluruh insan kampus untuk bermental siap maju melalui kerja keras secara bersama-sama yang terencana dengan baik.

Sebagaimana dimaklumi, kehadiran Islam dalam kehidupan pribadi telah memberi kesejukan hidup, namun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat masih memerlukan polesan yang serius sehingga keberadaan Islam membawa rahmat, setidaknya berfungsi inspirator, motivator, dan kontrol. Hal itu, harus dibaca dalam konteks pemikiran sebagai suatu perubahan yang tak dapat ditawar-tawar. Keabsolutan Al-Qur'an ada pada teks, pemahaman terhadapnya, adalah penyesuaian secara fungsional dan humanis. Untuk itu harus dihindari pola pikir dikotomis, didasarkan pada kemutlakan benar dan sebaliknya kemutlakan salah yang menjurus kepada sikap eksklusif dan *rigid*.

Islam sebagai sumber nilai, menjadi tugas utama UIN SU untuk meng-elaborasinya dalam bentuk kurikulum yang integratif dengan semua bidang ilmu yang dikembangkan melalui program-program studi dengan harapan semua produknya yang tampak pada cara berpikir dan bertindak para alumninya tercermin karakter berpikir cerdas yang berimbang dengan berbudi luhur. Hal inilah yang menjadi ciri khas abituren dari Universitas ini.

PROSPEK DAN POTENSI KONTRIBUSI PERUBAHAN IAIN SU MEDAN MENJADI UIN SU MEDAN BAGI PERADABAN: Perspektif Ilmu Kalam

Ilhamuddin

Profesor Ilmu Kalam
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Sejarah sains dan teknologi dalam Islam menunjukkan betapa Islam sebagai agama sangat terbuka menerima perkembangan sains dan teknologi. Meskipun umumnya agamawan tradisional cenderung kurang respon terhadap metode dan penemuan sains. Namun, dalam sejarah dikemukakan bahwa para teolog ortodoks Eropa abad pertengahanlah yang pernah melaksanakan perlawanan sengit menentang sains dan teknologi. Selama seribu tahun sebelum renaissance, mereka memerintah Eropa dengan tangan besi. Ketidaktoleranan, prasangka buruk, kecurigaan dan takhayul telah membuat terhambatnya dinamika sains dan teknologi dikala itu. Karena curiga pada setiap usaha pemikiran bebas, mereka dengan kejamnya menekan semua ajaran yang tidak memiliki kesesuaian langsung dengan teologi yang mereka pahami. Pengadilan agama menghukum mati sekitar sepuluhribu orang yang dicurigai. Mereka dianiaya lalu digantung atau dibakar. Bahkan yang telah matipun tidak dapat dimaafkan.¹

¹ Berdasarkan argumen teologis, agamawan abad pertengahan di Eropa menyimpulkan bahwa dunia lahir pada jam 9 pagi hari Minggu 23 Oktober 4004 SM. Pendapat ini berbeda dengan fakta ilmiah yang pernah dikemukakan oleh seorang ilmuwan, Wycliffe, yang membuktikan berdasarkan fosil dan geologi, bumi paling sedikit telah berusia beberapa ratus ribu tahun. Para teolog memandang pendapat ini suatu penghinaan terhadap agama. Karena tidak dapat menerima penghinaan ini mereka menggali kembali tulang belulang Wycliffe untuk dipatah-patahkan dan dibuang ke laut. Dengan tindakan tersebut mereka memandang penolakan terhadap agama menjadi hilang. Lihat Pervez Hoodbhoy, *Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas Antara Sains dan Ortodoksi Islam*, terj. Sari Meutia (Bandung: Mizan, 1996), h. 56-59.

Berbeda dengan agamawan muslim, ulama dalam Islam tidak pernah tercatat menentang sains dan teknologi. Keinginan kuat terhadap peralihan status IAIN SU Medan menjadi UIN SU Medan adalah contoh konsistensi sikap dan sejarah penerimaan umat Islam terhadap sains dan teknologi sebagaimana dikemukakan di atas. Peralihan menjadi UIN SU juga merupakan momen penting yang memberikan peluang bagi perguruan tinggi Islam negeri ini untuk berkembang lebih baik. Peralihan status ini tentu mengandung konsekuensi. Konsekuensi peralihan status dimaksud di antaranya adalah tak dapat tidak terjadinya perubahan penyelenggaraan pendidikan yang selama ini hanya berbasis keilmuan Islam saja kepada penyelenggaraan pendidikan yang lebih luas. Dengan kata lain, di samping lima fakultas ilmu-ilmu keislaman yang telah ada ketika masih berstatus IAIN SU, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syariah (FS), Fakultas Ushuluddin (FU) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terbuka peluang untuk melakukan pengembangan dengan pembukaan fakultas-fakultas berbasis keilmuan umum yang relevan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini spirit dan pola pengembangan keilmuan yang diusung dapat berbentuk ekspansi atau integrasi dan atau kedua-duanya sekaligus.

Apabila pola ekspansi yang ditempuh maka prospek dan potensi kontribusinya dapat berupa penambahan bagi tersedianya berbagai fakultas, jurusan dan program studi yang belum pernah ada selama ini ketika masih berstatus IAIN. Umpamanya, Fakultas Kedokteran, teknik, fisika, kimia, seni, humaniora dengan berbagai jurusan dan program studinya. Namun, ada kekhawatiran jika hanya fokus pada pola ekspansi semata pada gilirannya berpotensi mematikan lima fakultas yang ada sebelumnya karena sepi peminat.

Kemudian, jika pola integrasi yang ditempuh maka prospek dan potensi kontribusinya diperkirakan dapat mengembangkan dan membesarkan berbagai fakultas keilmuan Islam yang telah ada. Dalam konteks ini, kekhawatiran matinya lima fakultas yang ada sebelumnya karena sepi peminat besar kemungkinan dapat teratasi. Namun demikian dapat diprediksi jika semata-mata pola integrasi saja yang dilaksanakan perkembangan yang diperoleh dari peralihan IAIN SU menjadi UIN SU Medan manfaatnya tidak terlalu maksimal karena integrasi yang dapat dilakukan jika tanpa penambahan fakultas umum hanya berkisar pada pemberian label “Islam” saja terhadap keilmuan umum. Sebagai contoh yang sudah ada, label “Islam” yang diletakkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga menjadi FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam). Pemberian label “Islam” seperti ini tidak dapat dikategorikan integrasi karena hanya merupakan labelisasi.

Tentu saja labelisasi dan integrasi merupakan dua hal yang berbeda. Labelisasi sekedar pemberian nama lalu dapat dianggap selesai. Beda halnya

dengan integrasi yang membutuhkan kajian lebih mendasar terhadap aspek-aspek keilmuan baik ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dalam pada itu, tidak semua cabang ilmu dapat diintegrasikan karena perbedaan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Oleh karena itu, integrasi ilmu itu tidak mudah dilakukan kecuali terhadap beberapa cabang yang memiliki kedekatan atau persamaan ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Sebagai contoh integrasi antara Ilmu Dakwah dengan Ilmu Komunikasi sehingga muncullah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ilmu Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Pendidikan Umum sehingga muncullah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Di samping ada integrasi ilmu ada juga integrasi keilmuan, umpamanya integrasi antara keilmuan Islam dan keilmuan umum dengan cara memberi muatan ilmu keislaman di dalam ilmu-ilmu umum atau sebaliknya memberi muatan ilmu umum di dalam ilmu-ilmu keislaman. Lebih lanjut dapat juga dilakukan dengan cara memasukkan mata-mata kuliah keislaman pada kurikulum di fakultas-fakultas umum begitu juga sebaliknya memasukkan mata-mata kuliah umum di fakultas-fakultas agama Islam. *Output*-nya adalah untuk menghasilkan sarjana Ilmu Agama Islam yang terampil dalam sains dan teknologi atau sebaliknya sarjana umum yang terampil dalam Ilmu Agama Islam.

Dalam konteks seperti tersebut di atas, beberapa mata kuliah keislaman maupun umum dapat dijadikan mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan yang disesuaikan dengan relevansinya terhadap visi dan misi fakultas. Dapat dikemukakan disini bahwa mata kuliah Ilmu Kalam sesungguhnya mata kuliah yang favorit untuk dikuliahkan pada semua fakultas baik keislaman maupun umum karena pola dialogis yang terdapat di dalamnya. Cirinya yang filosofis semakin dapat dijadikan alasan bahwa ilmu ini dapat menjadi menu istimewa bagi mahasiswa yang sudah saatnya diajak berpikir filosofis. Paradigma seperti inilah yang tampaknya menjadikan UIN tak dapat tidak sekaligus menggunakan pola ekspansi dan integrasi.

Perlu dicermati bahwa berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara di luar IAIN SU sudah lama mengelola berbagai fakultas keilmuan umum dengan pola integrasi dengan cara memasukkan mata kuliah agama dalam kurikulumnya, seperti di Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED). Sementara di kalangan swasta, seperti universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Universitas Dharmawangsa menggunakan pola ekspansi dengan cara membuka Fakultas Agama Islam (FAI). Di UMSU, FAI merupakan fusi dari dua fakultas sebelumnya, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah. Sedangkan di Universitas Dharmawangsa FAI berasal dari pergantian nama dari Fakultas Tarbiyah berdasarkan kebijakan Prof. Malik Fajar ketika masih menjabat sebagai Menteri Agama RI.

Berdasarkan pertimbangan di atas, agar UIN SU Medan memiliki daya saing yang kuat di kalangan Perguruan Tinggi ke depan tak dapat tidak dalam pengembangan keilmuannya harus menempuh pola ekspansi dan integrasi sekaligus karena jika pola ekspansi saja diprediksi kehadirannya tidak membawa nuansa baru dan penting bagi peningkatan dan pengayaan keilmuan Islam di Sumatera Utara. Bahkan berpotensi mematikan fakultas-fakultas berbasis keilmuan Islam yang telah dulu ada karena sepi peminat dan kalah daya tarik. Demikian pula, jika UIN SU Medan hanya menggunakan pola integrasi keilmuan saja diprediksi akan banyak menemukan kesulitan dalam pengembangannya karena keilmuan berbasis keagamaan pada dasarnya cenderung bersifat teoretis-dogmatis berikutnya dalam konteks lapangan kerja hanya akan melahirkan alumni dengan daya saing yang lemah.²

Bertitik tolak dari uraian di atas, paling tidak dalam konteks pengembangan keilmuan pilihan yang tersedia ada dua macam, yaitu ekspansi dan integrasi keilmuan dan keduanya patut digunakan secara bersama-sama pada UIN SU mendatang karena di samping sebagai bentuk nyata Islamisasi ilmu adalah juga dapat melahirkan wajah baru bagi masa depan perguruan tinggi Islam.

B. Prospek dan Potensi Kontribusi Ilmu Kalam bagi Pengembangan Keilmuan di Lingkungan UIN SU Medan

1. Prospek

Sesungguhnya ada beberapa cabang sains Islam yang dipandang berprospek bagi pengembangan keilmuan di UIN SU Medan ke depan. Di antaranya adalah ilmu kalam, filsafat Islam, fikih dan ushul fikih. Ilmu Kalam dan filsafat Islam prospek menjadikan mahasiswa UIN SU mampu berpikir radikal dan universal. Oleh karena itu, kedua ilmu ini prospek dimasukkan dalam kurikulum dan dijadikan mata kuliah pada semua fakultas baik umum maupun keagamaan. Sedangkan fikih dan ushul fikih relevan dimasukkan dalam kurikulum fakultas-fakultas berbasis ilmu hukum, baik pidana, perdata maupun hubungan internasional.

Khusus Ilmu Kalam, sebagaimana juga telah disinggung di atas bahwa pada tingkat pendidikan tinggi ilmu ini dapat menjadi menu istimewa bagi mahasiswa karena pada usia setingkat mahasiswa seseorang sudah pada saatnya diajak berpikir filosofis dan tidak kaku. Apalagi mayoritas materi kuliah ilmu kalam adalah perbandingan pemikiran antar aliran sehingga prospek menjadikan mahasiswa dapat berpikir kritis, analitis dan toleran.

² Diperlukan diskusi serius dan mendalam di dalam menentukan kebijakan pola pengembangan keilmuan pada UIN SU Medan. Kekeliruan dalam mengambil kebijakan akan berdampak besar bagi kemajuan daya saing lembaga maupun alumni.

Sebagai contoh, bahwa pada kuliah Ilmu Kalam tradisi dialogis sangat dikedepankan sehingga kebiasaan berargumentasi praktis menjadi latihan bagi mahasiswa untuk berpikir cepat, rasional dan luas. Prinsip setuju dalam perbedaan diusung kuat dalam dialog-dialog Ilmu Kalam. Carilah jalan dimana bisa bertemu jangan cari jalan dimana bisa berpisah adalah slogan di dalam berbagai perdebatan masalah-masalah kalam.

Dalam kaitan itu, umpamanya, bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada UIN SU Medan (jika suatu saat kelak ada) yang pada gilirannya setelah menjadi sarjana, terampil memberikan argumentasi tatkala menjadi hakim maupun pengacara di persidangan, baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Begitu pula tatkala menjadi anggota dewan di lembaga legislatif tentulah perdebatan-perdebatan pada kuliah Ilmu Kalam merupakan training yang sangat berharga untuk menjadikan mereka piawai dalam membela klien atau memvonis terdakwa di pengadilan.

Begitu juga bagi para politikus lulusan FISIPOL UIN SU (jika suatu saat kelak ada), tatkala menjadi anggota DPR, umpamanya, mempunyai nilai plus dibandingkan politikus alumni dari luar UIN SU karena telah dibekali nilai tambah ilmu-ilmu keislaman sehingga tidak mudah menyalahgunakan wewenang untuk melakukan penyimpangan dalam menghasilkan perundang-undangan. Demikian pula jika suatu saat ada Fakultas Kedokteran di UIN SU, maka dokter alumni UIN SU memiliki nilai tambah di banding dokter dari alumni universitas selain UIN SU.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas, maka Ilmu Kalam berprospek dikuliahkan di berbagai fakultas dalam rangka memperkuat pemahaman teologi para calon dokter yang jasanya sangat diharapkan untuk dapat membantu pasien bagi kesembuhan penyakitnya. Dalam konteks inilah mereka dibekali pemahaman tentang sunnatullah dan taqdir agar dalam praktiknya kelak dapat memberikan spirit bagi para penderita penyakit untuk selalu optimis atas dasar keyakinan akan kemahakuasaan Allah swt.

Sejak masa klasik, tercatat bahwa ilmu kalam berperan penting di dalam terciptanya suasana dialogis dalam berbagai wacana teologi yang dikembangkannya. Hal ini merupakan potensi kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban. Pemahaman yang berkembang pada berbagai aliran sekaligus mendorong bagi munculnya spirit keilmuan dan kreativitas umat. Itulah yang membuat perkembangan pemikiran keagamaan berjalan beriringan dengan kemajuan sains dan teknologi dalam Islam, puncaknya pada masa kejayaan Abbasiyah. Hal ini dapat diproyeksikan bagi percepatan kebangkitan Islam sekarang dan masa akan datang. Dalam paradigma baru ilmu pengetahuan, sains Islam seharusnya tidak lagi bertahan pada posisi klasiknya yang teoretis-elitis, tetapi harus menjadi praktis dan integratif sehingga mudah dipahami.

Demikian juga dengan berbagai keilmuan Islam lainnya, seperti fikih-ushul fikih, tafsir, hadis dan tasawuf. Dengan demikian, berbagai cabang keilmuan Islam, khususnya Ilmu Kalam dapat diprediksi mampu membangun relasi dan berkontribusi dalam kehidupan umat yang semakin dinamis.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa sesungguhnya konsekuensi peralihan status IAIN SU menjadi UIN SU di antaranya adalah terjadinya perubahan diberbagai lini, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan dari semula yang berbasis keilmuan agama Islam saja menjadi lebih luas melalui pola ekspansi dan integrasi keilmuan.

Pro-kontra sekitar peralihan status dari IAIN ke UIN selalu ada, termasuk pada masa-masa awal pengusulan peralihan tersebut. Dapat dipahami betapa pada sebagian warga IAIN kekhawatiran akan terjadinya ekspansi keilmuan yang pada gilirannya dapat mematikan fakultas-fakultas agama yang telah dulu ada cukup besar, karena sepi peminat. Kekhawatiran ini masih turut membayangi wajah UIN SU ke depan. Agaknya inilah salah satu alasan untuk tidak menempuh pola ekspansi saja bagi pengembangan keilmuan di UIN SU Medan ke depan.

Dengan demikian penggunaan pola ekspansi dan integrasi merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Tentu saja peralihan menjadi UIN tak dapat tidak juga mendorong bagi terjadinya berbagai perubahan di berbagai bidang, baik administrasi, keuangan, akademik maupun hubungan kerjasama nasional dan internasional.

Bagi UIN SU Medan yang masih berusia muda sekarang ini tentu pencarian bentuk adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Integrasi keilmuan bukanlah perkara mudah. Hal ini melibatkan banyak hal, terutama sumberdaya manusianya. Para dosen di UIN SU ini adalah warisan IAIN SU yang keterampilannya tentu sesuai dengan kebutuhan pada masa IAIN SU sebelumnya. Menghadirkan tenaga dosen baru dengan keilmuan yang sudah terintekrasi antara keilmuan Islam dan keilmuan umum juga tidak mudah, karena hal ini membutuhkan proses. Bahkan dapat dikatakan belum ada produk perguruan tinggi di dunia ini yang telah secara massif melahirkan sarjana dengan keilmuan integratif sebagaimana dimaksud. Alhasil, haruslah ada proses untuk menunggu lahirnya alumni dengan keilmuan yang integratif seperti yang diharapkan. Boleh jadi dari alumni sendiri atau dari alumni perguruan tinggi lain.

Meskipun dengan berbagai persoalan demikian, perubahan IAIN SU ke UIN SU sepatutnya dipahami sebagai anugerah yang harus disyukuri, betapa tidak arus perubahan di lingkungan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) belakangan ini sangatlah deras dan jika perubahan status yang sudah dimiliki ini dapat dikelola dengan baik sangatlah bermanfaat bagi generasi muda ke depan. Salah satu kontribusi penting UIN SU ke depan

adalah penciptaan harmoni relasi agama, sains dan teknologi. Jika peralihan status ini dapat terlaksana dengan baik diprediksi pada saatnya nanti UIN SU akan berkontribusi nyata melahirkan ilmuwan yang memahami agama Islam dengan baik sekaligus mampu menguasai perkembangan sains dan teknologi.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan keilmuan dalam Islam menjelaskan bahwa lahirnya berbagai aliran dalam Islam termotivasi oleh berbagai pertentangan, seperti pertentangan penafsiran dan pemahaman keagamaan juga peretantangan kepentingan politik. Tampaknya kedua pertentangan itulah yang mewarnai hampir semua gelombang pemikiran dalam Islam, baik hukum, politik maupun teologi di masa lalu maupun sekarang. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa aspek positif dari pertentangan pemikiran dalam Islam itu masih dapat dilihat dari semangat pengembangan keilmuan yang tidak pernah surut dari zaman ke zaman.³

Sesungguhnya, kalau hanya sebatas pertentangan penafsiran akan sesuatu, hasilnya masih bersifat positif karena dapat mengundang bagi lahirnya pengembangan epistemologi keilmuan. Arus rasionalisme dan pertumbuhan berbagai cabang keilmuan juga dapat muncul di kalangan umat Islam sebagaimana yang pernah terjadi di masa pemerintahan Abbasiyah. Ketika itu para teolog muslim berperan di dalam memberi dorongan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dengan cara mengembangkan semangat rasionalisme. Pada masa itulah kaum muslimin berhasil memberikan warna indah bagi sejarah peradaban manusia ditandai dengan berdirinya universitas dan pusat kajian keilmuan.

Tetapi jika suatu perbedaan dilatarbelakangi oleh pertentangan kepentingan politik, berpotensi negatif bagi kelangsungan kehidupan sosial umat Islam. Dalam kaitan itulah kemajuan keilmuan yang pesat pada masa Abbasiyah menjadi cacat karena munculnya kecenderungan pemaksaan kehendak dalam kasus *Mihnat Al-Qur'an*. Peristiwa itu menunjukkan betapa politik dapat mengubah seseorang atau sekelompok orang yang rasional menjadi emosional. Berkaitan dengan itu, tentu lembaga ilmiah seperti universitas di zaman sekarangpun bisa menjadi tidak kondusif jika motivasi politik mewarnai atmosfer akademiknya.

Itulah agaknya mengapa sebagian kaum ulama pada masa-masa kejayaan Islam yang lalu lebih cenderung menghindarkan diri dari persoalan politik

³ Pada tahun 830M Khalifah al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah, yaitu sebuah akademi yang dilengkapi dengan perpustakaan. Pada masa kekhalifahan al-Aziz (975-996 M) dari Dinasti Fatimiyah didirikan pula universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Lihat Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The MacMillan Press, Ltd., 1974), h. 410.

meskipun mereka harus menerima sanksi yang berat atas sikap mereka itu. Kenyataan menunjukkan bahwa politik dapat merubah keharmonisan menjadi kekacauan. Umat Islam yang kaya dengan berbagai aliran dan mazhab sebagaimana di kemukakan tadi dapat dipecah belah jika tidak cepat mengambil sikap bahwa perbedaan pemahaman dan aliran itu hanyalah sebagai perbedaan metodologis saja. Aliran-aliran dan mazhab yang banyak dalam Islam harus dipandang sebagai instrument bukan sebagai tujuan, yaitu instrument untuk menjadikan tindakan dan pikiran umat Islam demokratis. Semakin kaya pemikiran seseorang maka semakin demokratis tindakan dan cara berpikirnya. Dalam konteks seperti itu kehidupan sosial dapat terjalin dengan baik. Oleh karena itu, dalam membangun kehidupan sosial umat Islam hendaknya keragaman pemikiran harus mampu disikapi sebagai kekayaan bukan sebagai pertentangan.

Dengan kata lain kehidupan sosial yang harmonis di kalangan umat Islam dapat terjalin jika paradigma “perbedaan” dan “pertentangan” di antara berbagai kelompok dan aliran dalam Islam diubah menjadi paradigma baru menyongsong kebangkitan kehidupan sosial umat Islam yang didasarkan kepada beberapa prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip saling berhubungan, yaitu mazhab yang banyak dalam Islam bukanlah sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Antar aliran memiliki hubungan simbiotik (keniscayaan) sehingga dalam tingkat tertentu satu dengan lainnya mempunyai keterkaitan. *Kedua*, perbedaan yang tampak antar berbagai aliran tidak merupakan pertentangan abadi tetapi hanya sebagai konsekuensi logis dari perbedaan penggunaan metodologi berpikir. *Ketiga*, di dalam aliran-aliran dan mazhab-mazhab sering terjadi inkonsistensi pemikiran sehingga seseorang tidak mutlak seratus persen harus menjadi pengikut dari suatu aliran. Kenyataan menunjukkan pada tingkat individu-individu selalu saja ditemukan perbedaan-perbedaan. Dalam hubungan itulah adakalanya seorang Sunni juga dapat berpikir seperti Syi'i atau seorang Asy'ariyah berpikir seperti Mu'tazilah.

Dalam membangun keharmonisan kehidupan umat Islam, pemikiran teologi mesti diarahkan kepada upaya mencari titik-titik persamaan. Sementara perbedaan-perbedaan yang ada harus disikapi dengan prinsip setuju di dalam perbedaan itu. Jika pada masa lalu kelahiran mazhab atau aliran pemikiran membawa umat Islam terfragmentasi dan saling bermusuhan dalam konteks kekinian semestinya perbedaan aliran harus disikapi sebagai kekayaan intelektual.

Tak dapat disangkal bahwa pemikiran Islam seperti Ilmu Kalam secara nyata telah banyak berperan di dalam mengembangkan kehidupan umat Islam. Berbagai ajaran dalam teologi menjadi spirit bagi daya juang kaum muslimin. Ajaran tentang tauhid umpamanya, prospek dalam memajukan sistim keyakinan manusia dari yang primitif menjadi modern. Ajaran tauhid mampu merubah pemahaman irrasional menjadi rasional. Dengan ajaran tauhid manusia

dapat menerima dan meyakini sesuatu yang gaib, meskipun di luar jangkauan empiris. Ilmu tauhid dapat membentuk individu-individu mandiri karena ajarannya menyuruh orang melepaskan diri dari kemusyrikan. Tegasnya, ajaran tauhid mendorong orang untuk percaya diri dan melepas ketergantungan. Dalam kehidupan sosial masyarakat modern ketangguhan individual sangat dibutuhkan. Ketangguhan dan keyakinan yang kuat akan keesaan Allah dapat menjadi motivasi di dalam berkreasi. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa Ilmu Kalam prospek untuk dijadikan mata kuliah diberbagai fakultas baik yang berbasis keislaman maupun berbasis ilmu-ilmu umum.

Konsep mengenai perbuatan manusia (افعال العباد) prospektif dalam meningkatkan kreativitas manusia. Melalui ajaran ini manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas di dalam menentukan perbuatannya. Ajaran ini prospek mendorong orang untuk giat beraktivitas baik sebagai mahasiswa maupun masyarakat secara umum sehingga terbentuk kehidupan sosial yang dinamis dan kreatif.

Rasa percaya diri dan motivasi yang kuat dalam berkeaktivitas merupakan daya dorong bagi terciptanya dinamika sosial dalam masyarakat. Kesan yang ada selama ini umumnya, memandang masyarakat muslim, terutama di Indonesia, sebagai masyarakat pemalas, *jumud*, fatalis dan statis. Seringkali hal itu dikaitkan dengan paham takdir yang terdapat di dalam teologi Asy'ariyah yang banyak dianut umat Islam Indonesia. Namun dengan berkembangnya informasi dan semakin meningkatnya kecerdasan golongan terpelajar di Indonesia, kesan negatif tersebut semakin berkurang. Dalam konteks ini lagi-lagi ilmu kalam prospektif dijadikan bagian dari kurikulum di perguruan tinggi.

Perkembangan di dalam kehidupan sosial masyarakat belakangan ini menunjukkan adanya peningkatan penghargaan umat Islam terhadap masalah "kebebasan". Hal ini paling tidak secara simbiosis dapat dikatakan terkait erat dengan semakin rasional dan tumbuhnya rasa percaya diri pada manusia. Paham tentang kebebasan manusia, rasa percaya diri dan pola berpikir rasional yang banyak dikemukakan dalam Ilmu Kalam prospek untuk diwariskan kepada mahasiswa agar fatalisme semakin ditinggalkan

Aspek lain dari materi Ilmu Kalam yang dipandang prospek bagi pengayaan intelektual mahasiswa UIN SU Medan ke depan adalah konsep tentang keadilan Tuhan. Konsep ini prospek dalam meningkatkan dinamika dan semangat hidup. Kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa Tuhan dikatakan adil karena semua perbuatannya baik. Ia wajib berbuat yang baik dan tidak berbuat yang buruk serta tidak mengambil hak seseorang.⁴ Kaum Asy'ariyah mengatakan semua

⁴ Al-Qadhi 'Abd al-Jabbar, *Syarh al-Ushul al-Khamsah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1960), h. 132, 301.

perbuatan Tuhan adalah adil. Ia menciptakan manusia beriman adalah adil. Juga Ia menciptakan manusia kafir adalah adil. Dalam konteks ini keadilan Tuhan dipahami berdasarkan konsep kehendak dan kekuasaan mutlakNya. Al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah adil meskipun menyiksa orang kafir yang kekafiran itu diciptakan Allah sendiri.⁵ Bahkan Allah adil jika menyiksa orang mukmin dan memasukkan orang kafir ke surga. Meskipun Allah tidak akan berbuat demikian karena Ia sendiri mengatakan akan menyiksa orang kafir. Allah tidak berbohong atas apa yang disampaikanNya.⁶

Perbedaan pandangan di atas menunjukkan adanya dua pendekatan yang digunakan masing-masing aliran. Jika Mu'tazilah berangkat dari konsep bahwa Allah berbuat yang baik dan terbaik saja, kaum Asy'ariyah berangkat dari konsep bahwa Allah pemilik yang berkuasa mutlak terhadap yang dimilikiNya. Dalam konteks ini, penekanan Mu'tazilah pada keadilan Tuhan sedangkan Asy'ariyah penekanannya pada kemahakuasaan mutlak Tuhan. Wacana seperti ini prospek untuk menciptakan suasana dialogis di kalangan mahasiswa.

Pandangan bahwa hanya Allah yang berbuat baik dan terbaik (الصالح والاصح) bagi makhlukNya dapat menimbulkan optimisme di kalangan mahasiswa. Sebagai dimaklumi bahwa optimisme sangat penting di dalam menumbuhkembangkan dinamika mahasiswa. Optimisme merupakan spirit dan penggerak pada seseorang untuk berbuat maksimal karena selalu dilandasi oleh keyakinan akan hal-hal terbaik yang diberikan Tuhan.

Sejalan dengan pandangan bahwa manusialah yang menentukan dan melakukan perbuatannya sendiri, sudah barang tentu manusia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Lalu atas dasar itu pula Tuhan memberi pahala dan siksa kepada manusia sesuai dengan keadilannya. Pemahaman seperti ini prospek untuk membantu mahasiswa di dalam mewujudkan obsesinya.

Dengan pemahaman seperti tersebut di atas, tentu tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk hidup malas dan statis. Setiap orang berpotensi mencari peluang untuk mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Peluang itu sendiri merupakan sesuatu yang mesti diusahakan. Tidak datang begitu saja sebagai sesuatu yang otomatis diberikan Tuhan. Peluang sukses adalah sesuatu yang *muqayyad* atau *mu'allaq* (terkait) dengan berbagai faktor, seperti faktor kecerdasan. Kecerdasan juga terkait dengan faktor lain yaitu pendidikan dan pengalaman. Begitu juga pendidikan terkait dengan faktor lain seperti ekonomi. Ekonomi juga terkait dengan berbagai faktor lainnya. Berkaitan dengan itu maka setiap orang perlu untuk terampil di dalam mengatur kesalinghubungan

⁵ Al-Asy'ari, *al-Ibanah*, h. 114.

⁶ Abu Hasan al-Asy'ari, *al-Luma' fi Radd 'ala Ahl al-Ziagh wa al-Bida'* (Mesir: Matba'ah Munir, 1955), h. 116-117; *idem*, *Maqalat*, h. 319, 336.

antara berbagai faktor. Peluang sukses sangat berhubungan dengan kemampuan. Semakin sukses manusia mengatur kesalinghubungan itu maka semakin terbuka peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya kesuksesan semakin sulit dipeoleh jika seseorang tidak berperan mengatur kesalinghubungan itu.

Pandangan seperti di atas adalah kata kunci di dalam meningkatkan dinamika hidup, baik dalam politik, ekonomi budaya, dan ilmu pengetahuan. Semenjak berakhirnya masa keemasan dunia Islam pada masa Rasulullah, Umayyah dan Abbasiyah, dalam politik masyarakat muslim tampaknya sering terpinggirkan, baik secara nasional pada masing-masing negeri muslim maupun internasional. Hal itu tentu berhubungan dengan rendahnya keterampilan politikus muslim di dalam memainkan strategi. Dalam ekonomi, masyarakat muslim jauh tertinggal di banding masyarakat non muslim. Hal itu dapat dilihat dari ketergantungan beberapa negara dan negeri muslim kepada mata uang negara asing. Demikian pula dengan budaya dan ilmu pengetahuan. Semuanya itu bersumber dari ketidak mandirian umat Islam di dalam kehidupan sosialnya.

Kemandirian pada diri seseorang dapat dibangun dengan penanaman konsep kalam sebagaimana disinggung di atas. Ajaran tentang perbuatan manusia prospek dapat melahirkan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang bebas menentukan sendiri perbuatannya. Paham ini dapat berdampak positif bagi munculnya etos kerja yang tinggi di kalangan mahasiswa. Ajaran tentang keadilan Tuhan melahirkan optimisme dan rasa percaya diri yang mantap sehingga mampu mendorong bagi percepatan dinamika belajar mahasiswa.

Selanjutnya Konsep kalam yang prospek bagi dinamika intelektual mahasiswa adalah konsep الوعد والوعيد (janji dan ancaman) Allah. Kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa janji dan ancaman Allah pasti terjadi. Sebagaimana paham keadilan Tuhan yang dipandang mampu melahirkan optimisme di kalangan mahasiswa, paham tentang janji dan ancaman Allah juga dapat dipandang mampu melahirkan ketenteraman psikologis.

Dikemukakan oleh kaum Mu'tazilah bahwa Tuhan wajib memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan wajib menyiksa orang yang berbuat dosa besar di akhirat jika tidak bertaubat.⁷ Jika bertaubat pelaku dosa besar berhak mendapat pahala.⁸ Berbeda dengan itu, kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak wajib diberi pahala atau hukuman karena perbuatannya. Bahkan jika Allah menyiksa semua penduduk bumi ini bukan

⁷ Abd al-Jabbar, *Syarh al-Ushul al-Khamsah*, h. 619; Lihat juga pada catatan kaki Al-Qadhi al-Baqillani, *Kitab Tamhid al-Awa'il wa Talkhis al-Dala'il* (Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1987), h. 398.

⁸ Zuhdi Jar Allah, *al-Mu'tazilah* (Beirut: al-Ahliyah al-Nasyr wa al-Tauzi, 1974), h. 51.

sesuatu yang zalim terhadap manusia.⁹ Dengan demikian terdapat dua pandangan yang bertentangan di dalam memahami masalah janji dan ancaman Tuhan.

Sebagaimana analisis terhadap pemahaman tentang perbuatan manusia dan keadilan Tuhan, tampaknya perbedaan pandangan mengenai masalah janji dan ancaman Tuhan ini juga dapat dikatakan membawa implikasi yang berbeda kepada umat Islam. Pemahaman kaum Mu'tazilah cenderung dapat dipandang berimplikasi positif bagi ketenteraman psikologis sebab mengandung kepastian. Sedangkan pemahaman kaum Asy'ariyah bersifat spekulatif, sehingga cenderung tidak memberi ketenteraman psikologis karena serba tidak pasti, bahkan irrasional dan subjektif.

Dikatakan demikian karena dalam pemahaman mereka pertimbangan-pertimbangan logis tidak diperhatikan. Sebagai contoh menurut al-Baqillani (tokoh kedua di kalangan Asy'ariyah), Allah tetap baik meskipun tidak menyiksa orang yang berbuat jahat. Bukan suatu yang buruk jika Allah tidak melaksanakan ancamannya.¹⁰ Argumentasi yang dikemukakan di sini adalah firman Allah *يا ايها الذين امنوا ان من ازوجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا ان الله يغفر* (QS. Al-Tagabun/64: 14). *ان الله يغفر ان الله يغفر ان الله يغفر ان الله يغفر* (QS. Al-Zumar/39: 53).

Menurut al-Baqillani ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah boleh mengampuni semua atau sebagian orang yang berdosa dan menyiksa sebagian yang lain. Namun sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad saw. dan ijma' kaum muslimin, ia berpendapat bahwa Allah tidak mengampuni orang kafir dan musyrik. Hal ini dikaitkan dengan ayat *ان الله لا يغفر وانا يشرك به ويغفر* (QS. Al-Nisa'/4: 116); *ان تجتنبوا كبار ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما* (QS. Al-Nisa'/4: 31).¹¹ Menurut al-Baqillani lafaz *al-kabair* (dosa-dosa besar) pada ayat tersebut maksudnya adalah *al-kufr*. Oleh karena itu, dalam pandangannya tentu dosa yang dapat diampuni Allah adalah selain musyrik dan kafir.

Berdasarkan uraian di atas tampaknya pemahaman yang diketengahkan Asy'ariyah mengandung kesan yang kurang tegas. Apalagi dikaitkan dengan pandangan al-Asy'ari sendiri bahwa pelaku dosa besar yang tidak bertaubat hukumannya terserah kepada Allah. Ia boleh mengampuninya berdasarkan rahmatNya, atau karena syafaat Nabi Muhammad saw. Juga ia boleh menghukumnya kemudian memasukkannya ke surga. Selanjutnya pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka bersama orang kafir.¹²

⁹ Al-Syahrastani, *al-Milal*, jilid 1, h. 88.

¹⁰ Al-Baqillani, *Kitab Tamhid al-Awa'il*, h. 401.

¹¹ *Ibid.*, h. 402-404.

¹² Al-Syahrastani, *al-Milal*, jilid 1, h. 88.

Dalam konteks dinamisasi intelektual, ketegasan pemikiran yang diketengahkan di kalangan kaum teologi sebagai dikemukakan di atas kembali dapat dinilai prospek bagi lahirnya dinamika intelektual di kalangan mahasiswa. Ketegasan dan kelogisan di dalam pemikiran tentu lebih kondusif bagi percepatan dinamika intelektual mahasiswa. Dengan ketegasan konsep dan kelogisan berpikir kondisi psikologis mahasiswa menjadi lebih mantap. Hal itu juga dapat menjadi spirit bagi terwujudnya dinamika kehidupan mahasiswa.

2. Kontribusi

Beberapa doktrin yang telah dikemukakan di atas, seperti: a.) Tradisi dialogis dan rasional; b). Kebebasan berbuat; c). Keadilan Tuhan; dan d). *Al-Wa'd wa al-Wa'id* (Janji dan ancaman) tampaknya berpotensi melahirkan berbagai pemikiran yang dipandang mempunyai kontribusi penting bagi dinamika mahasiswa.

Tradisi dialog, dapat menumbuhkembangkan spirit keilmuan dan pengayaan intelektual yang dalam konteks kehidupan sosial masyarakat modern mutlak diperlukan. Pemikiran rasional adalah kata kunci kehidupan modern. Penghargaan terhadap kebebasan berpikir dan berbuat berdampak positif bagi lahirnya kreativitas, inovasi dan produktivitas. Kesadaran terhadap tingginya nilai-nilai kemanusiaan seperti itu menjadi bagian dari kontribusi Ilmu Kalam bagi dinamika mahasiswa. Kebebasan berpikir dan berbuat juga dapat mendatangkan optimisme yang kuat di dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki mahasiswa, seperti ekonomi, politik, budaya, sains dan teknologi. Kemajuan peradaban Islam pada masa klasik, disekitar berkembangnya Ilmu Kalam, seperti pada masa dinasti Abbasiyah dapat diproyeksikan bagi pengembangan dinamika mahasiswa. Ketika itu terdapat hubungan erat antara perkembangan pemikiran teologi dengan perkembangan sains dan teknologi. Berbagai penemuan ilmiah dan lahirnya para filosof muslim adalah contoh yang sangat jelas bagi hubungan tradisi dialogis Ilmu Kalam dengan pengayaan intelektual muslim di masa itu. Tentu demikian pula di dalam kehidupan umat Islam sekarang. Tradisi dialogis dalam teologi tak dapat tidak telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat. Berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat, diketahui bahwa pola berpikir rasional seperti yang dibangun dalam Ilmu Kalam lebih dipandang representatif bagi upaya pengayaan intelektual mahasiswa. Oleh karena itu, pemikiran rasional sebagaimana telah dikembangkan dalam tradisi dialogis Ilmu Kalam patut dijadikan pola bagi upaya pengembangan dan pengayaan intelektual mahasiswa UIN SU Medan ke depan.

Demikian halnya dengan dinamika kehidupan mahasiswa, dalam ekonomi, politik, budaya, sains dan teknologi. Pola berpikir rasional mampu mengarahkan

mahasiswa untuk percaya diri dan mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga tercipta dinamika dalam pribadi maupun masyarakat kampus. Berbagai contoh dapat ditunjukkan betapa Ilmu Kalam sebagai telah diuraikan dalam pembahasan di atas mempunyai hubungan simbiotik dengan dinamika sosial umat Islam. Ajaran yang mengetengahkan kebebasan manusia, keadilan Tuhan dan ketepatan janji dan ancaman Allah dapat menjadi pendorong bagi meningkatnya dinamika sosial umat Islam. Fenomena yang dikemukakan dalam kaitan ini di antaranya adalah berkembangnya tradisi ilmiah dan kreativitas di kalangan terpelajar dan profesional muslim.

Ilmu Kalam sebagaimana telah disinggung terdahulu membahas berbagai ajaran Islam yang dapat digunakan di dalam merespon berbagai persoalan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹³ Sebagaimana pada umumnya sains Islam klasik, Ilmu Kalam selama ini diposisikan di dalam kelompok العلم النظري atau ilmu teoretis. Pembahasannya di samping yang telah dikemukakan terdahulu adalah juga meliputi masalah (1) المرتكب الكبائر (2) الايمان والكفر (3) التوحيد (4) الشواب والعقاب (5) المنزلة بين المنزلتين (6) رئية الله (7) الهداية (8) العدالة (9) الوعد والوعيد (10) لطف الاله (11) الصلاح والاصح (12) حرية الانسان (13) بعثة الرسول (14) صفات الله (15) افعال العباد (16) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (17) الخير والشر (18) الاستطاعة والكسب (19) التوبة (20) سنة الله (21) كلام الله (22) التقدير dan (23) التوبة. Pembahasan terhadap masalah-masalah ini bertujuan untuk menghasilkan formulasi dasar-dasar keyakinan di dalam mengantisipasi pengaruh ide-ide luar yang dapat merusak akidah umat Islam.¹⁴

Sejak awal terbentuknya sejarah peradaban sampai sekarang, teologi memang sudah menjadi bagian penting di dalam kehidupan manusia. Mulai dari masalah sederhana seperti cara bercocok tanam pada masyarakat primitif sampai pada gagasan-gagasan besar pada masyarakat modern tidak bisa lepas dari teologi.¹⁵ Respon teologis pertama manusia terhadap lingkungannya muncul dalam bentuk supernaturalisme. Dalam konteks inilah lahirnya berbagai paham seperti dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme.

¹³ Ilhamuddin, "Ukhwah Islamiyah dalam Perspektif Teologi Islam," dalam *Beriga*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam, Juli-September 2004, h. 43; Ilhamuddin, "Kontribusi Teologi dalam Kehidupan Sosial Umat Islam," dalam *Madani, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, UMSU Medan, Vol. IV, No. 3, Oktober 2003, h. 317-331; Ilhamuddin, "Reorientasi Relasi Teologi Islam dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar," dalam *Miqot, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. XXVIII, No.2. Juli 2004, h. 245-260.

¹⁴ Ilhamuddin, *Pemikiran Kalam al-Baqillani: Studi Tentang Persamaan dan Perbedaannya dengan al-Asy'ari* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 3.

¹⁵ Ilhamuddin, "Persepsi Calon Mahasiswa Baru Terhadap IAIN Sumatera Utara," dalam *Intizar Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat*, Pusat Penelitian IAIN Raden Patah Palembang, Palembang, 2006, h. 43-56.

Agama-agama besar menempatkan teologi pada posisi paling sentral dalam ajarannya karena teologi dapat menjadi relasi paling kuat antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesama manusia serta alam sekitar. Oleh karena itu sangat beralasan jika umat beragama banyak mengaitkan berbagai persoalan dalam dinamika kehidupannya dengan pendekatan teologis.

Teologi secara normatif diajarkan di dalam kitab suci masing-masing agama. Setiap pemeluk agama yang taat sangat berhati-hati di dalam masalah ini sehingga berbagai hal yang terjadi dalam kehidupannya selalu dilihat dari kaca mata teologi. Dominasi teologis seperti itu melahirkan teocentrisme. Segala sesuatunya diukur dari sudut ketuhanan. Dalam konteks ini ketaatan berhubungan erat dengan konsistensi seseorang di dalam teologinya. Kecenderungan teocentris seperti ini berpotensi untuk dapat melahirkan satu bentuk relasi agama dengan berbagai aspek penting di dalam kehidupan seseorang. Jika kecenderungan tersebut dipelihara secara cerdas dan terampil diprediksi kuat dapat berkontribusi positif terutama untuk penguatan dimensi keimanan dan kehidupan sosial.

Tetapi apabila kecenderungan tersebut tidak terpelihara dengan baik, semisal, disusupi oleh pemahaman yang keliru terhadap kandungan nash tentu berpotensi untuk dapat menimbulkan resistensi terhadap berbagai hal. Umpamanya, resistensi terhadap keberadaan agama dan penganut agama lain atau resistensi terhadap aspek-aspek penting dalam kehidupan, seperti sains dan teknologi. Jika ini yang terjadi justru berkontribusi negatif bagi penganut agama. Hal seperti ini pernah terjadi di kalangan umat beragama pada abad pertengahan di Eropa, sebagaimana telah disinggung terdahulu.

Secara umum di kalangan umat beragama terdapat dua kelompok teologis yang berseberangan. *Pertama*, kelompok tradisional, konservatif, ortodoks, irrasional dan tekstual. Dalam kelompok inilah biasanya berkembangnya teocentrisme. *Kedua*, kelompok modernis, rasional dan kontekstual. Dalam kelompok ini berkembang antropocentrisme.¹⁶ Kedua kelompok ini kontradiktif di dalam menyikapi berbagai hal, misalnya dalam hal relasi antar penganut agama. Demikian juga dengan relasi agama terhadap sains dan teknologi.

Ilmu Kalam berkontribusi penting dalam hal relasi antar penganut beragama. Peranan penting dimaksud di antaranya adalah dalam rangka meletakkan dasar-dasar pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Islam dan agama di luar Islam, muslim dan non muslim, dan isu yang paling sensitif adalah masalah jihad dan perang. Pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan itu dapat menimbulkan kekeliruan bahkan berakibat fatal.

¹⁶ Ilhamuddin, "Anthropocentrisme dan Theocentrisme," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Fakultas Ushuluddin IAIN SU Medan, Januari-Pebruari-Maret, 1994, h. 54.

Di antara pemahaman yang keliru boleh jadi bersumber dari penerjemahan yang salah terhadap teks-teks nash, seperti penerjemahan harfiah terhadap ayat sangat berpotensi menimbulkan kekeliruan yang berujung pada penyesatan pemahaman dan pendangkalan akidah. Umpamanya kata الرحمن dan الرحيم yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Fatihah/1: 1 secara harfiah artinya "Pemurah" dan "Penyayang". Kalau berhenti pada makna harfiah seperti ini saja tentu akan menimbulkan kekeliruan sebab dengan makna seperti ini berarti Allah pemurah dan penyayang kepada semua makhluk tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan antara mukmin dan kafir. Ini berpotensi bagi berkembangnya pluralisme agama.

Sementara pada ayat lain kata الرحمن hanya ditujukan kepada mukmin saja sebagaimana terdapat pada kata وعباد الرحمن dalam Al-Qur'an surat al-Furqan/25: 63-67. Ayat ini sangat membantu di dalam menerjemahkan kata الرحمن. Oleh karena itu pemahaman yang tepat dalam rangka menghindari pendangkalan akidah umat Islam adalah kata "Pemurah" diperoleh dengan cara menghubungkannya dengan ayat lain seperti ayat 63-67 surat al-Furqan yang mengisyaratkan bahwa الرحمن hanya berlaku untuk orang mukmin.

Berbeda halnya dengan 34 kali kata الرحيم terulang dalam Al-Qur'an umumnya ditujukan terhadap semua makhluk Allah kecuali 1 ayat yang dikhususkan bagi orang-orang mukmin sebagai pengutamaan, yaitu وماكان بالمؤمنين رحيما (Allah maha Penyayang kepada orang-orang mukmin, QS. al-Ahzab: 63-67). Dalam konteks ini keimanan menjadi sangat penting untuk mendapatkan الرحمن dan الرحيم dari Allah. Jika makhluk lain hanya memperoleh satu saja, yaitu الرحيم atau sayangNya Allah saja, setiap mukmin pasti memperoleh dua, yakni الرحمن (Pemurah atau Pengasih)Nya dan الرحيم (Penyayang)Nya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mempersamakan mukmin dan non mukmin dalam akidah Islam. Penyamaan agama seperti yang terdapat di dalam pluralisme agama tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terjemahan tafsiriyah jauh lebih dapat memudahkan umat Islam untuk memahami makna dan maksud sesungguhnya dari terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipandang sensitif dapat menimbulkan kesalahpahaman, radikalisme ataupun terorisme. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada satupun di antara sekian banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung ajaran negatif. Namun kesalahan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an sebagaimana diuraikan di atas jelas berpotensi negatif. Dengan menggunakan terjemahan tafsiriyah tampaknya hal-hal yang dapat merusak relasi agama dapat terhindarkan. Penjelasan ini bertujuan agar tidak terjadi pemahaman yang salah dan pendangkalan akidah di kalangan umat Islam dalam konteks membangun relasi antar umat beragama.

Relasi antar umat beragama dalam perspektif Islam, dapat dilakukan dengan memahami secara benar petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Isu-isu sensitif di sekitar relasi umat beragama di antaranya adalah radikalisme dan terorisme. Belakangan ini, terutama setelah runtuhnya World Trade Centre (WTC) di Amerika, sebagian mata dunia tertuju kepada umat Islam. Ditambah lagi dengan berbagai insiden yang terjadi termasuk di Indonesia, seperti peristiwa bom Bali dan rentetan berbagai insiden lainnya seperti pemboman kedutaan Australia. Pelaku dalam insiden itu semuanya adalah umat Islam dengan indikasi mempunyai pemahaman yang keliru terhadap teks-teks nash, khususnya yang ada kaitannya dengan jihad dan perang. Oleh karena itu, perlu ditegaskan Al-Qur'an tidak mengajarkan hal-hal negatif seperti terorisme, tetapi pemahaman yang kelirulah yang berpotensi menggiring seseorang menjadi teroris.

C. Penutup

Peralihan IAIN SU Medan menjadi UIN SU Medan merupakan momen sangat berharga bagi perguruan tinggi Islam negeri ini untuk berkembang lebih baik. Konsekuensi peralihan status ini di antaranya adalah perubahan penyelenggaraan pendidikan yang selama ini hanya berbasis keilmuan Islam saja kepada penyelenggaraan pendidikan yang lebih luas. Dengan kata lain, di samping lima fakultas ilmu-ilmu keislaman yang telah ada ketika masih berstatus IAIN SU, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Fakultas Syariah (FS), Fakultas Ushuluddin (FU) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terbuka peluang untuk melakukan pengembangan boleh berupa pengembangan terhadap fakultas yang telah ada dan boleh juga berupa penambahan fakultas dengan berbagai disiplin keilmuan yang relevan dengan visi dan misinya. Dalam konteks ini spirit dan pola pengembangan keilmuan yang diusung dapat berbentuk ekspansi atau integrasi dan atau kedua-duanya sekaligus.

Jika pola ekspansi yang ditempuh maka prospek dan potensi kontribusinya dapat berupa penambahan bagi tersedianya berbagai fakultas, jurusan dan program studi yang belum pernah ada selama ini ketika masih berstatus IAIN. Umpamanya, fakultas-fakultas berbasis keilmuan umum, seperti fakultas kedokteran, teknik, fisika, kimia, seni, humaniora dengan berbagai jurusan dan program studinya. Namun, ada kekhawatiran jika hanya fokus pada pola ekspansi semata pada gilirannya berpotensi mematikan lima fakultas yang ada sebelumnya karena sepi peminat.

Dalam pada itu, jika pola integrasi yang ditempuh maka prospek dan potensi kontribusinya diperkirakan dapat mengembangkan dan membesarkan

berbagai fakultas keilmuan Islam yang telah ada. Dalam konteks ini, kekhawatiran matinya lima fakultas yang ada sebelumnya karena sepi peminat besar kemungkinan dapat teratasi. Namun demikian dapat diprediksi jika semata-mata pola integrasi saja yang dilaksanakan perkembangan yang diperoleh dari peralihan IAIN SU menjadi UIN SU Medan manfaatnya tidak terlalu maksimal karena integrasi yang dapat dilakukan hanya berkisar pada pemberian label “Islam” pada cabang-cabang ilmu, jurusan, program studi dan fakultas yang tadinya umum saja. Sebagai contoh label “Islam” yang diletakkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga menjadi FEBI sesungguhnya belum dapat dikategorikan sebagai integrasi, tepatnya baru dalam bentuk labelisasi saja.

Terkait dengan penjelasan di atas tampaknya harus dibedakan antara integrasi ilmu dan integrasi keilmuan. Tidak semua cabang ilmu dapat diintegrasikan karena perbedaan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Oleh karena itu, integrasi ilmu itu dapat dilakukan hanya pada cabang-cabang ilmu yang mempunyai kedekatan atau persamaan ontologi, epistemologi dan aksiologi saja, seperti Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan Islam dan Ilmu Keguruan, Ilmu Syariah dan Hukum. Integrasi keilmuan lebih dimungkinkan karena meskipun berbeda ontologi, epistemologi dan aksiologi tetap saja ada peluang untuk menemukan hubungan antar berbagai keilmuan yang ada, termasuk antara keilmuan Islam dan keilmuan umum. Atau dengan model integrasi dengan cara memberi muatan ilmu-ilmu keislaman pada kurikulum di fakultas-fakultas umum. Bertitik tolak dari paradigma yang demikian, maka pola ekspansi dan integrasi tampaknya harus sama-sama digunakan di dalam pengembangan UIN SU Medan ke depan.

Beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Utara di luar IAIN SU sudah lama mengelola berbagai fakultas keilmuan umum. Sehubungan dengan itu, jika hanya pola ekspansi saja yang ditempuh tentu kontribusinya lebih pada hanya penambahan fasilitas fakultas sehingga dapat dikatakan kehadiran UIN SU Medan tidak membawa nuansa baru dan penting bagi peningkatan dan pengayaan keilmuan Islam di Sumatera Utara. Bahkan berpotensi mematikan fakultas-fakultas berbasis keilmuan Islam yang telah dulu ada karena sepi peminat dan kalah daya tarik. Demikian pula, jika UIN SU Medan hanya menggunakan pola integrasi keilmuan saja diprediksi akan banyak menemukan kesulitan dalam pengembangannya karena keilmuan berbasis keagamaan pada dasarnya cenderung bersifat teoretis-dogmatis sehingga cenderung lemah dalam hal persaingan lapangan kerja bagi para alumninya.

Dengan demikian kedua pola pengembangan keilmuan, yaitu ekspansi dan integrasi keilmuan tampaknya patut digunakan secara bersama-sama

secara baik pada UIN SU mendatang karena di samping sebagai bentuk nyata Islamisasi ilmu adalah juga dapat melahirkan wajah baru bagi masa depan keilmuan Islam secara konprehensif.

Terkait dengan itu, maka salah satu tawaran yang berhubungan dengan penerapan kedua model dimaksud di atas adalah menjadikan ilmu-ilmu keislaman, seperti Ilmu Kalam, menjadi mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa UIN SU Medan di semua fakultas, jurusan dan program studi karena Ilmu Kalam tercatat sebagai ilmu yang berkontribusi penting dalam pengayaan intelektual muslim sejak zaman klasik sampai modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA: Menuju Pusat Peradaban Dunia Islam

Amroeni Drajat

Profesor Filsafat Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Apabila menilik dari perjalanan sejarah peradaban Islam, akan dijumpai bahwa pusat-pusat peradaban tersebar di mana-mana. Islam dengan peradabannya mengalami siklus kesejarahan yang kurang lebih sama dengan peradaban-peradaban lain di dunia. Diawali dengan proses pemunculan, pertumbuhan, perkembangan, kejayaan, kemunduran dan kehancuran. Para ahli sejarah berbeda-beda dalam menetapkan siklus periodisasi peradaban Islam. Di antara ilmuwan membagi fase historis peradaban Islam ke dalam periodisasi yang sederhana yaitu *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin*, *salaf* dan *khalaf*. Lalu sementara ilmuwan lain yang memiliki kecenderungan politis, membagi kesejarahan peradaban Islam mengikuti kronologi pemerintahan yang berkuasa, sehingga kajian peradaban Islam dimulai sejak periode Nabi, periode *al-khulafa' al-rasyidin*, periode Bani Umayyah, periode Bani Abbasyiah, periode tiga kerajaan besar, periode modern dan periode kontemporer. Lain halnya dengan yang dipetakan oleh Hasan Hanafi¹ misalnya yang menganalogikan perkembangan peradaban Islam dengan pola gelombang pasang surut seperti sebuah tali yang dihentak dan menyerupai gelombang sebagai metaforanya. Kemudian pada analisis selanjutnya Hanafi menyandingkan perjalanan peradaban Islam dengan perjalanan peradaban Barat, yang dalam teori yang dibangunnya dapat disimpulkan bahwa antara peradaban Islam dan peradaban Barat terjadi dialog yang intensif, di mana gelombang pasang kedua peradaban itu tidak pernah sama, melainkan sebuah dialog peradaban yang berkelanjutan. Hanafi

¹ Hasan Hanafi, *Muqaddimah fi Ilmi al-Istighrab*, cet. kedua (Beirut: Muassasah al-Jamiah al-Dirasat wa al-Nasyr al-Tauzi', 2000), h. 501.

menggambarkan bahwa ketika peradaban Barat mengalami penurunan, peradaban Islam berada pada masa menaik, dan sebaliknya, manakala peradaban Islam sedang menurun, peradaban Barat mengalami kemajuan yang luar biasa. Jadi, meskipun tampak adanya penyederhanaan dalam penggambarannya, namun paling tidak bisa dijadikan acuan dalam menganalisis perkembangan selanjutnya.

Memang jika menilik dari fase Islam sebagai sebuah pejalana peradaban maka dapat dianalogikan sebagai sebuah gelombang yang menunjukkan adanya naik turun perkembangan peradaban yang menyerupai sebuah dialog antara dua jenis peradaban yang saling bergantian. Hanafi membagi gelombang peradaban itu ke dalam dua jenis peradaban besar. Ia mempertentangkan antara peradaban Islam di satu sisi dan peradaban non-Muslim di sisi yang lain. Dalam hal ini Hanafi menyandingkan dialog antara peradaban Islam dan peradaban Barat. Dalam menyandingkan perkembangan perjalanan peradaban itu Hanafi menggambarkan sebuah dialog antara dua peradaban utama. Memang dengan mensejajarkan peradaban dunia ke dalam dua peradaban ini terkesan sangat menyederhanakan dengan mereduksi perkembangan peradaban lain yang juga memiliki proses perjalanan sejarah peradabannya semisal peradaban Persia, peradaban China dan peradaban India.

Dengan menggunakan penyederhanaan aliran besar peradaban dunia ke dalam dua jenis menjadi peradaban Islam dan peradaban Barat itulah, tulisan ini akan meneropong peranan dari setiap unsur dari bagian umat ini menempatkan posisi dan peranannya dalam membangun peradaban Islam. Pemilihan periodisasi dengan mengikut pola Hanafi itulah yang terkesan lebih mudah untuk dipahami, sehingga kita dapat memprediksi apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana peran yang diharapkan oleh setiap orang yang memikirkannya. Kesimpulan yang diperoleh sementara ini adalah bahwa umat Islam sekarang ini merupakan masa persiapan menuju kebangkitan kedua dalam rangkaian sejarah panjang peradabannya. Dengan mengikut siklus tujuh abad perjalanan peradaban dunia yang diyakininya sebagai tonggak pergantian dan pasang surut kemajuan dan kemunduran peradaban dunia.

Hemat saya rasanya akan sangat tepat sekali dalam rangka peresmian perubahan lembaga pendidikan Islam IAIN SU menjadi UIN Medan segera menempatkan posisinya dalam kaitan pembangunan kembali peradaban dunia Islam. Momen ini juga merupakan momen bersejarah dan sangat penting untuk dikemukakan sebab peristiwa ini bukan peristiwa biasa, melainkan peristiwa luar biasa. Perubahan status lembaga pendidikan Tinggi seperti UIN ini menjadi sangat bernilai historis. Sebab itu, perlunya reposisi peran dan fungsi dari lembaga ini. Apa yang dapat disumbangkan oleh lembaga pendidikan sekelas UIN Medan ke depan dalam rangka membangun fondasi peradaban Islam yang maju dan jaya. Apa peran yang harus dimainkan dalam

persiapan kebangkitan peradaban umat ini? Hal ini barangkali yang perlu sekali untuk dikaji dan dianalisis untuk mendapatkan posisi dan peranan yang memungkinkan akan dimainkan pada masa mendatang.

B. Modal Skriptural dan Historis

Ditinjau dari sisi konstruk bangunan ontologis, peradaban Islam memiliki landasan pijak yang kokoh dan kuat, di mana peradaban Islam dibangun dan didasari oleh fondasi skriptural yang memiliki kualitas kebenaran mutlak sebab melandaskan kesumberan dari Yang Maha Tahu, yang tertuang dalam Al-Qur'an. Sebab itu dalam berbagai pemikiran dan usahanya, para pemikir Muslim selalu mengembalikan apa yang digeluti dengan bingkai inspirasi dari sumber yang paling utama itu. Meskipun para filsuf mendalami pemikiran filsafat Yunani misalnya, namun pada ujungnya, hasil rekonstruksi pemikiran mereka terbingkai dalam semangat ajaran tauhid. Pengislaman peradaban sejak semula sudah dilaksanakan oleh para pendahulu umat ini meskipun dengan berbagai macam variasi yang menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan pemikir itu sendiri. Paling tidak kita ingin menyatakan bahwa para pemikir selalu menyandarkan pada ajaran dasar Islam itu sendiri. Dengan menyandarkan kepada ajaran Islam itu, maka dimensi yang bertentangan dengan akidah Islam telah teratasi oleh kepaiawaian para pemikir Muslim sepanjang sejarahnya.

Sementara dari sisi historis, Peradaban Islam merupakan bentuk dari kesinambungan peradaban dunia. Islam memegang peranan menentukan sebagai salah satu mata rantai dari keberlangsungan peradaban universal. Sejak munculnya Islam di kawasan Jazirah Arab pada abad keenam dan ketujuh. Di mana pada masa itu peradaban Barat sudah mulai terlebih dahulu ada dan sudah mapan di kawasan di mana Islam lahir. Peradaban Islam dalam pengertian pergerakan keilmuan dan pemikiran baru mendapatkan posisinya yang sangat penting justru ketika munculnya persentuhan Islam dengan peradaban Yunani atau peradaban Barat yang sudah mapan.

Persentuhan peradaban Yunani dan Islam pada masa Nabi belum tampak, mengingat umat Islam tidak merasa penting untuk mengambil petunjuk dan pemikiran dari luar terutama terkait dengan masalah keyakinan atau keimanan. Lain halnya terhadap apa yang dikenal sekarang sebagai cikal bakal peradaban. Isyarat-isyarat keterbukaan dari Nabi pada adanya peradaban luar Islam sangat terasa. Misalnya ketika Nabi menyuruh Zaid bin Tsabit untuk mempelajari bahasa Suryani, Persia dan Rumawi.² Sepintas suruhan ini sangat sederhana,

² Ragib as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 48.

namun pada sisi lain perintah tersebut mengandung isyarat keilmuan yang amat besar. Dari suruhan itu paling tidak kita dapat memahami filosofi dari perintah Nabi terhadap Zaid Bin Tsabit. Bahasa asing sebagai bahasa peradaban yang diperintahkan oleh Nabi, tidak lain karena adanya pengakuan Nabi akan adanya peradaban lain pastinya sangat berguna namun tak diketahui karena faktor bahasa. Pemahaman lain adalah bahwa keterbukaan Nabi terhadap peradaban lain dapat dimengerti karena khazanah peradaban selain Islam terkandung dan tersimpan pada literatur-literatur dalam bahasa penyimpanannya adalah bahasa Suryani, Persia dan Bahasa Rumawi. Dari sini dapat dimaklumi bahwa bahasa asing sebagai sarana untuk mengambil ilmu pengetahuan dari peradaban lain yang lebih unggul menjadi isyarat penting dan sangat urgen untuk diperhatikan.

Isyarat-isyarat keterbukaan Nabi terhadap peradaban lain muncul dari perintah Nabi terhadap Saad bin Abi Waqqash yang suatu ketika menderita sakit lalu melapor kepada Nabi dan setelah itu Nabi malah menyuruh Saad bin Abi Waqqash untuk berobat kepada salah seorang dokter yang belum beriman bernama Harist bin Kaladah al-Tsaqafi.³ Hal ini menjadi isyarat bahwa Nabi menganjurkan kepada sahabatnya itu untuk memanfaatkan kepandaian dan keahlian pihak lain sementara dari pihak sendiri belum memiliki keahlian yang diperlukan. Perintah ini tampak sederhana namun di sisi lain sebenarnya memiliki pengaruh dan dampak yang sangat positif dan bersifat futuristik. Mempelajari hal-hal yang tidak dimiliki kepada orang lain.

Isyarat yang lain juga adalah apa yang terjadi ketika Nabi mengirim utusan ke Yaman kepada Muaz bin Jabal yang diutusanya, ketika terjadi dialog yang menjadi pijakan pemikir untuk berijtihad dengan kemampuan daya nalarnya.

Kasus-kasus ini sebenarnya sebagai isyarat dan syarat dengan makna yang dapat disimpulkan bahwa umat ini diperintahkan untuk mengambil ilmu pengetahuan dari mana saja adanya. Sebagai tambahan lagi bahwa Nabi juga pernah menyuruh umatnya untuk belajar apa saja meskipun ilmu itu adanya di negri Cina. Inti dari perintah ini barangkalai hampir sama. Memiliki semangat yang sama yaitu bahwa peradaban itu dapat digali dan diimport dari mana saja asalnya. Senada dengan semangat pencarian kebenaran, maka Al-Farabi pernah berujar bahwa dalam pemikiran hanya ada satu aliran filsafat yaitu filsafat kebenaran, artinya filsafat yang tujuan utamanya adalah mencari dan menggali kebenaran atau *al-haqq*.

Pada masa sahabat setelah meninggalnya Rasul juga isyarat akan peradaban

³ Abu Dawud Sulaiman bin Hayyan al-Andalusi (Ibn Juljul), *Thabaqat al-Athibba' wa al-Hukama'* (Kairo: Mathba'ah al-Mahadi al-Ilmiy al-Faransiy li al-Atsar al-Syarqiyah, 1955), h. 54.

itu mewujudkan dalam bentuk sahabat yang menggantikannya. Kebijakan Abu Bakar, kejeniusan Umar bin Khattab, kedermawanan Ustman dan kecerdasan Ali bin Abi Thalib adalah isyarat-isyarat untuk membangun peradaban Islam agar lebih maju dan lebih mapan. Pada masa sahabat yang empat memang perkembangan peradaban lebih dominan pada penggalian ajaran dan sumber Islam yang telah diwariskan oleh Nabi bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, namun juga perlu ditambah dengan israyat-isyarat yang sudah diberikan Nabi. Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai pintu gerbang ilmu Nabi dan juga ilmu-ilmu lain. memang pada masa sahabat, meskipun Nabi memberikan isyarat kuat akan pengambilan peradaban dari pihak luar, namun pada sisi lain, sahabat Umar bin Khattab juga pernah dikatakan bahwa untuk mengambil peradaban yang berakar dari peradaban luar terlihat ambiguitasnya. Pernah dikatakan bahwa ketika Umar bin Khattab menundukkan Persia dan ketika wilayah perluasan itu dikuasai dan pada kota tersebut terdapat perpustakaan namun berisikan literatur-literatur dari peradaban Yunani dan Persia maka Umar pada saat itu menyuruh untuk membakarnya. Dengan alasan bahwa apa yang ditinggalkan Nabi berupa dua kanzah itu sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman umatnya.⁴ Namun pada sisi lain Umar bin Khattab sebenarnya juga adalah cikal bakal semangat pemikiran yang sangat rasional. Memang terhadap kisah dan laporan bahwa Umar pernah menyuruh pasukannya untuk membakar perpustakaan di wilayah perluasannya dapat dipahami sebab dia ingin menjaga keutuhan keimanan umatnya dari bercampurnya dengan pemikiran dari luar Islam.

Isyarat akan perkembangan peradaban dan respon setelah masa *al-kulafa' al-rasyidun* itu kemudian dilanjutkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Di mana pada masa dinasti bani umayyah memang fokus utama pada perluasan wilayah dan peluasan dominasi politik. Namun demikian juga perluasan yang masif dilakukan oleh Bani Umayyah itu pada gilirannya menghasilkan pasukan yang memerlukan penjagaan kesehatan dan kebugaran pasukannya. Akibat dari perluasan demi perluasan adalah menghasilkan banyaknya pasukan yang terluka akibat peperangan demi peperangan. Hal itu juga memaksa sang khalifah untuk mencari solusi untuk mengantisipasi pasinya. Barangkali karena alasan itulah kemudian salah satu khalifah Bani Umayyah yang bernama Khalid bin Yazid (w. 759) lalu memerintahkan para ilmuwannya untuk mengalihbahasakan buku-buku yang terkait dengan kebutuhan dan keperluan kesehatan pasukannya. Pada saat itu, khalifah kemudian memerintahkan untuk menerjemahkan buku-buku yang terkait dengan kesehatan, kedokteran dan juga tentang kimia.

⁴ Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat, Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 207-208.

Perintah tersebut mengindikasikan adanya alih peradaban dari dunia luar Islam. Adanya kesadaran akan alih peradaban inilah yang barangkali menjadi cikal bakal gerakan alih peradaban pada masa berikutnya, terutama pada masa Bani Abbasiyah. Khalifah Khalid bin Yazid inilah yang dikatakan oleh para ahli sejarah sebagai satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang memiliki kepedulian terhadap alih peradaban melalui penerjemahan dari literatur luar. Meskipun dapat diperkirakan bahwa perintah untuk menerjemahkan itu lebih cenderung kepada masalah pertahanan politik yang kental daripada untuk perkembangan peradaban dalam arti lebih luas lagi yang terkait dengan filsafat dan gerakan olah pikir lainnya.⁵

Perkembangan alih peradaban memang baru tampak lebih serius dan lebih giat lagi ketika pemerintahan beralih ke dinasti Bani Abbasiyah. Satu hal yang menarik adalah bahwa posisi oposisi dari keluarga Bani Abbasiyah terhadap kekuasaan Bani Umayyah justru menjadi salah satu faktor penyebab percepatan alih peradaban dari luar Islam ke dalam Islam. Tradisi keilmuan di kalangan bani Abbasiyah memiliki akar yang sangat kuat, yakni bersumber dari tradisi khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebab jika menarik ke belakang dari akar kesejarahan Bani Abbasiyah maka akan berjumpa pada silsilah Ali bin Abi Thalib sebagai patron intelektualitas penguasa ini. Begitu juga tidak mengherankan jika afiliasi kesyiahhan juga menjadi daya dorong tersendiri pada kegiatan olah pikir pada masa Bani Abbasiyah.

Sebagaimana dapat diketahui melalui perkembangan sejarah maka peradaban Islam pada masa klasik dicapai pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah terutama dengan dibukanya lembaga penerjemah yang disebut Bayt al-Hikmah. Bayt al-Hikmah inilah yang menjadi pusat peradaban kemajuan Islam pada masa klasik. Sebab itu, peranan-peranan inilah yang barangkali ke depannya dapat dijadikan pola dalam mengembangkan peradaban Islam. Bayt al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan kajian Islam yang didanai dan ditopang dengan sangat kuat oleh pemerintah pada masa itu. Nah, sinergi semacam inilah yang barangkali masih relevan untuk dikembangkan pada masa sekarang ini. Hubungan harmonis antara para pendidik dan para penguasa yang saling membesarkan inilah yang menjadi cikal bakal kemajuan peradaban Islam.

Sebenarnya kolaborasi antara ilmuwan dan penguasa yang menjadi penyebab kemajuan peradaban suatu negara bukan saja monopoli peradaban Islam. Peradaban mana saja akan maju manakala antara para pemikir dan penguasa saling berkerja sama dan saling mengandalkan. Sebab itu pada

⁵ Lihat Majid Fakhry, *A Short Introduction to Islamic Philosophy, Theology and Mysticism* (Oxford: Oneworld, 1997), h. 7.

masa awal mula kemunculan peradaban Islam tidak mengherankan banyaknya buku-buku filsafat yang dikarang dan ditulis hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan penguasa yang gemar ilmu pengetahuan namun masih memiliki keterbatasan dalam memahami sumber peradaban itu sendiri. Misalnya buku yang ditulis oleh Al-Kindi adalah buku yang dipersembahkan kepada khalifah yang meminta uraian dan penjelasan dari pemikiran filsafat Aristoteles yang sulit dipahami dan ditangkap inti sarinya. Dalam sejarah peradaban Islam sangat sering dijumpai kolaborasi penguasa dan cendekiawan dalam memajukan peradaban.

Peradaban besar dibangun dengan kolaborasi penguasa dan ilmuwan dalam bidangnya dan juga sivitas akademika. Dalam sejarahnya, hubungan antara penguasa dengan ilmuwan sangat menentukan maju mundurnya sebuah peradaban bangsa. Dalam sejarah peradaban Yunani misalnya, ketika para filsuf terusir dari tempat tinggalnya oleh para penguasa atau raja, maka pada gilirannya adalah kemandegan dalam perkembangan peradaban itu sendiri. Sebaliknya jika para penguasa menyadari akan perlunya sokongan terhadap para filsuf maka pada gilirannya adalah kemajuan peradaban menghampiri negaranya. Kasus para filsuf yang terusir dari kerajaan Rumawi lalu berhijrah ke kawasan Persia dan diterima baik oleh Raja Kisra Anusirwan maka pada gilirannya adalah perkembangan peradaban yang lebih cepat mengalami kemajuan di negaranya.

Penguasa sebagai aktor penyokong kegiatan ilmiah dan ilmuwan menggeluti literatur-literatur yang didatangkan dari luar. Dalam sejarah peradaban Islam, sokongan Al-Makmun terhadap perkembangan keilmuan melalui alihbahasa peradaban luar ke dalam peradaban Islam sangat terasa dengan kuat. Sampai-sampai Al-Makmun dengan menggunakan kekuasaan dan diplomasi politiknya digunakan untuk menopang alih peradaban itu sendiri. Dikisahkan bahwa Al-Makmun dianggap sebagai tokoh yang gemar berburu literatur dari peradaban luar dengan menggelontorkan banyak biaya untuk itu.⁶ Untuk masa sekarang ini barangkali tidak akan menjadi masalah dengan bahan-bahan yang akan dialihperadabkan dan tidak sesulit pada masa Al-Makmun. Pada masa sekarang ini justru yang tertantang adalah pelaku-pelaku langsung itu sendiri yang masih jarang dan belum tampak. Dalam kasus negara ini barangkali masih perlu kegiatan alihperadaban secara massif, sebab yang muncul pada masa sekarang ini adalah gerakan yang bersifat sporadis dan bersifat individual. Begitu juga dengan bidang yang digeluti dan dialihperadabkan masih terbatas pada bidang kajian yang belum menunjukkan keuniversalan bidang. Jika becermin dari kegiatan yang dilakukan pada masa lalu adalah

⁶ George N. Atiyeh, *Al-Kindi, Tokoh Filosof Muslim* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), h. 2.

alihperadaban dilakukan dengan menerjemahkan bidang kajian yang memiliki dimensi keuniversalan, dan bersifat filosofis. Gerakan ini lebih dominan meskipun pada tataran yang bersifat implementatif juga dapat dilacak keberadaannya. Dengan adanya gerakan alihperadaban yang bersifat universal itu maka akan berkembang lebih cepat dan lebih menyeluruh. Pada masa lalu tidak dikenal adanya pemisahan antara ilmu-ilmu profan dan ilmu-ilmu sakral. Semua ilmu adalah penting dan semuanya adalah satu, semuanya berasal dari Yang Maha Satu. Tidak mengenal dikotomi keilmuan seperti yang ditemui pada masa sekarang ini yang melepaskan ilmu-ilmu materialistik dari ilmu-ilmu spiritualistik. Sebab itu tidak mengherankan jika dijumpai tokoh-tokoh ilmuwan yang bersifat universal dan sangat cair. Munculnya tokoh-tokoh universal yang menguasai astronomi, matematika, hukum, fikih, politik, pertanian dalam satu tarikan yang tak terpisahkan dari tokoh-tokoh universal masa lalu.

Muhammad Ali Pasya⁷ dari Mesir misalnya mengirim para pemudanya untuk menimba pengetahuan dari luar. Lalu ditempatkan dengan fasilitas yang memadai dalam sebuah lembaga yang bertujuan untuk menerjemahkan literatur-literatur Eropa. Tujuannya adalah dalam rangka mengikuti dan mengambil alih peradaban Barat ke dalam pemerintahannya sendiri. Meskipun tujuannya adalah untuk kepentingan politiknya, tetapi sebagai suatu contoh bahwa alihperadaban dapat dilakukan melalui penerjemahan. Peradaban Islam juga dibangun dengan gerakan penerjemahan lalu melaju sebagai gerakan ilmiah yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan teknologi.

Perpindahan peradaban Islam ke Eropa juga diawali dan dimulai prosesnya melalui penerjemahan dari peradaban Islam. Menurut istilah yang digunakan Prof. Mulyadhi pada masa ini umat Islam dihadapkan pada fase perkembangan gelombang peradaban ketiga ini masih sangat relevan dengan menggunakan pola alihperadaban melalui alih ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan pada masa sekarang juga masih dirasakan sangat perlu. Yang terjadi sekarang malahan adalah fenomena tantangan yang sangat menantang para pelakunya.

C. Indonesia dan Malaysia: Pemegang Mandat Estafet Pusat Peradaban Dunia Islam

Beberapa pemikir Islam di antaranya adalah Fazlur Rahman yang memprediksikan bahwa pemegang kendali laju peradaban Islam masa mendatang adalah Indonesia dan Malaysia. Jadi setelah negara Madinah pada masa

⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 40.

Rasulullah dan *al-khulafa' al-rasyidun*, lalu Syria, Damaskus pada masa daulah Bani Umayyah, lalu dilanjutkan dengan Bani Abbasyiah dengan Bagdad sebagai porosnya, lalu Turki Usmani di Turki, kemudian Penguasa tiga kerajaan besar Persia, Mesir dan India, pada gilirannya adalah seperti apa yang diprediksikan oleh Fazlur Rahman adalah Indonesia dan Malaysia. Harapan Rahman tentu bukan tanpa alasan, paling tidak karena alasan sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Barangkali harapan itu tidak berlebihan mengingat potensi itu ada pada kawasan ini. Jika memang harapan itu begitu besar, lalu apa yang perlu dipersiapkan untuk menerima estafet pemegang peran sebagai pusat peradaban Islam dunia. Tidak lain adalah berbenah dan mempersiapkan diri.

D. Karakter Calon Pemikir Ideal

Dengan merujuk kepada beragam ayat yang menggambarkan sosok yang perlu dihasilkan adalah sosok sempurna. Berbagai istilah untuk menggambarkan sosok pemikir, cendekiawan, ulama yang sempurna menurut Al-Qur'an di antaranya adalah *ulu al-albab*, *ulu al-abshar*, dan *ulu al-nuha*. Barangkali sosok pemikir, ulama, cendekiawan dengan karakter seperti itulah yang seharusnya dipersiapkan oleh setiap lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi peradaban Islam yang akan datang. Generasi cendekiawan yang *rabbani*, ilmuwan yang qur'ani, ulama yang membumi. Itulah cita-cita generasi yang diimpikan sosok sempurna, baik dari sisi kemampuan intelektual maupun spiritual. Tantangan besar yang dihadapi pada masa sekarang ini adalah peradaban yang telah melepaskan dari dimensi spiritualitasnya, yaitu peradaban materialistik. Cendekiawan yang paripurna bukan sekedar ilmuwan murni. Untuk mempersiapkan cendekiawan dan ilmuwan yang berkompeten inilah yang perlu dibangun sistem pendidikan yang benar-benar mengantarkan generasi yang kuat untuk menyambut alih peradaban dunia membawa peradaban Islam yang lebih unggul. Tantangan yang lebih mendasar adalah membangun sistem pendidikan yang bagus, dengan kurikulum yang benar-benar diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Meskipun masih bersifat utopia, namun mimpi-mimpi seperti itu perlu ditumbuhkembangkan di kalangan mahasiswa sebagai generasi masa depan. Memang kita memimpikan muncul cendekiawan yang memiliki karakter seperti karakter yang dimiliki oleh Al-Biruni terhadap ilmunya. Tangannya hampir tak pernah lepas dari buku, atau matanya tidak pernah berhenti mengamati dan jiwanya tiada berhenti merenung kecuali pada dua waktu (hari-hari libur Persia), Norwuz dan Mihragan.⁸ Karakter yang muncul seperti Ibn Sina yang

⁸ Jonathan Lyons, *The Great Bait al-Hikmah* (Jakarta: Noura Books, 2013), h. 129.

pada usia sepuluh tahun sudah hapal Al-Qur'an dan pada usia 16 tahun sudah menguasai ilmu kedokteran, dan pada beberapa tahun kemudian dia menguasai filsafat dengan cara menghafalnya dengan serius; yang begitu menghadapi persoalan filsafat yang tak terpecahkan lalu mengambil air wudhu untuk mendirikan salat sunnah meminta petunjuk dari Yang Maha Tahu. Yaitu sosok-sosok yang paling takut kepada Allah swt. karena kelimpahan ilmunya.

E. Becermin dari Zaman Kejayaan Peradaban Islam

Apabila kejayaan Islam pada masa lalu dijadikan pijakan untuk mengulang kembali kejayaan itu, barangkali tidak ada salahnya jika kita juga becermin ke belakang. Menoleh untuk membandingkan hal-hal yang barangkali perlu untuk ditiru dan dicoba kembali. Misalnya tentang sistem pendidikan atau atmosfir akademik yang melingkunginya pada masa lalu. Memang kita menyadari bahwa kembali kepada masa lalu adalah hal yang mustahil. Bisa juga akan ditanggapi orang sebagai orang yang memiliki keinginan yang berbau romantisme sejarah. Namun demikian becermin ke masa lalu ibarat seorang pengemudi yang memperhatikan kondisi di belakang melalui kaca spion untuk bersiap-siap melangkah maju ke depan. Kita tidak ingin terjebak pada masa lalu secara berlebihan. Paling tidak melihat sejarah untuk dijadikan *'ibrah* bagi perbaikan yang akan datang. Beberapa hal yang menurut hemat penulis masih bisa dikaji kembali. Pertama sistem pendidikan yang digunakan pada masa lalu. Kedua, atmosfir akademik keilmuan yang begitu bersifat universal dan kebebasan akademik yang sangat luas. Ketiga, kurikulum yang dipelajari dan jenis ilmu yang diperdalam. Keempat, lembaga-lembaga pendidikan yang menopang keberhasilan pendidikan. Kelima, kegiatan-kegiatan ilmiah yang berjalan pada masa lalu.

Pertama, sistem pendidikan pada masa lalu, jika kita menilik pada sistem pendidikan yang dilalui oleh para tokoh yang berhasil selalu diawali dengan proses pendidikan dasar-dasar agama yang kuat. Pengajaran Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar yang paling vital pada masa awal para tokoh besar menapaki kehidupan pendidikan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu-ilmu alat seperti ilmu bahasa terutama bahasa Arab. Hal ini diperlukan untuk menguasai ilmu-ilmu fikih atau ilmu syariat. Lalu dilanjutkan dengan mempelajari berbagai ilmu yang pada masa sekarang ini dianggap sebagai "ilmu-ilmu umum". Jika menilik pada tahapan jenis ilmu yang dikuasai adalah dimulai dari ilmu fisika, kemudian ilmu matematika dan diakhiri dengan metafisika atau filsafat. Begitu juga jika kita meneliti dari pembagian jenis ilmu yang dipelajari selalu saja dimulai dari hal-hal yang bersifat realitas nyata, semi nyata dan immaterial, lalu diakhiri dengan ilmu yang bersifat immaterial. Hierarki keilmuan seperti ini tergambar pada karya-karya para filsuf semisal Ibn Sina ketika menyusun

karya monumentalnya *al-Syifa'*. Secara bahasa berarti penyembuhan. Karya tersebut terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama apa yang sebutnya sebagai *al-thabi`iyyat*, yaitu Fisika. Lalu dilanjutkan dengan bagian *al-mantiq* yang berarti logika, atau termasuk juga ke dalam bahasan karya itu adalah *al-riyadhiyyat* atau matematika, lalu pada bagian akhir disebut dengan *Ma ba`da al-Thabi`ah* atau metafisika, atau filsafat.⁹

Kedua, atmosfer akademik. Melalui informasi dari sejarah, kita juga dapat memberikan banyak contoh tentang betapa kebebasan mimbar begitu kental. Majelis-majelis kajian yang terkadang penuh dengan perdebatan seringkali terdengar. Sebagai contoh apa yang biasa dilakukan oleh Malik al-Zahir yang gemar mengadakan kajian keilmuan. Baik ilmu-ilmu yang terkait dengan keimanan, ketasawufan atau kefilosofan. Begitu juga dengan para penguasa yang meminta penjelasan dari para tokoh yang menguasai suatu bidang kajian, misalnya filsafat dengan meminta bantuan kepada para ahli untuk mengupasnya. Contohnya adalah Al-Kindi yang diminta oleh khalifah untuk menuliskan keterangan tentang *Filsafat Pertama* karya Aristoteles yang sudah dipahaminya. Begitu juga dengan kasus Ibn Bajjah yang memperkenalkan Ibn Rusyd kepada khalifah pada masanya, juga merupakan gambaran dari adanya atmosfer akademik atau nuansa ilmiah yang kental.

Ketiga adalah kurikulum. Untuk tingkatan pendidikan tinggi, hampir semua cendekiawan setelah menguasai ilmu agama lalu mereka memperdalam peradaban Yunani yaitu filsafat dan cabang-cabang ilmu lainnya. Mereka menganggap bahwa filsafat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tradisi intelektual mereka. Jadi memasukkan kurikulum filsafat menjadi hal yang sudah selayaknya. Bukan sekedar sebagai pelengkap, melainkan memperdalam filsafat dalam arti yang sebenarnya. Sebab bagi mereka semua cabang ilmu lain, keluar dan muncul dari kajian filsafat itu sendiri. Filsafat Yunani yang mereka perdalam kemudian diberi ruh sesuai dengan ajaran dan akidah Islam, lalu mereka mempelajari, menjinakkan, mengembangkan dan memajukan peradaban sendiri. Peradaban Islam mengalami kemajuan dimulai dari mempelajari filsafat Yunani dan kemudian mengembangkan sendiri filsafat Islam dan menjadi salah satu sumbangan peradaban tersendiri.

Keempat, lembaga-lembaga yang dapat menopang keberhasilan para tokoh

⁹ Namun satu hal yang perlu juga disebutkan adalah pengalaman di kelas, ketika judul karya Ibn Sina, *al-Syifa'* itu ditanyakan, mereka seringkali menjawab dengan indikator ketidakpahaman dengan maksud dari penulisan buku tersebut. Pada umumnya mereka menyangka bahwa buku tersebut buku yang berbicara tentang kedokteran atau pengobatan, atau penyembuhan disebabkan karena memang judul tersebut bermakna penyembuhan. Padahal karya tersebut adalah karya filsafat yang menunjukkan keruntutan pembahasan dari yang rendah, sedang dan sulit.

masa lalu. Dari bacaan literatur yang pernah ditulis juga oleh para intelektual Islam, kita mendapati bahwa beragam nama lembaga pada masa lalu yang dapat dijadikan sebagai *supporting system* bagi keberhasilan mereka. Terdapat lembaga pendidikan yang disebut dengan *kuttab*, madrasah, masjid sebagai pusat kajian, lembaga-lembaga yang ditopang oleh negara, atau lembaga-lembaga atas swadaya masyarakat. Misalnya kita mendapati perpustakaan besar, lembaga penerjemahan, lembaga kajian, observatorium, laboratorium, *khanqah*, rumah sakit, semuanya dijadikan sebagai sarana pendidikan.

Kelima, kegiatan-kegiatan ilmiah. Berbagai kegiatan yang menggambarkan betapa nuansa ilmiah sangat dirasakan pada masa pembentukan kejayaan peradaban Islam pada masa lalu. Misalnya apa yang dilakukan oleh Khalifah al-Makmun dengan berburu manuskrip. Khalifah menyediakan biaya besar untuk memperoleh manuskrip yang mengandung informasi-informasi berharga untuk membangun peradaban pada masanya. Kegiatan ilmiah selanjutnya adalah penerjemahan. Jadi manuskrip yang sudah didapat kemudian diterjemahkan oleh para ahli penerjemah. Para penerjemah diberi jaminan kesejahteraan yang memadai sehingga dapat menjadikan mereka benar-benar spesialis dalam hal penerjemahan. Setelah kegiatan penerjemahan, kegiatan ilmiah lainnya adalah menulis komentar, atau *syarh* atas apa yang telah diterjemahkan. Jika komentar bertujuan untuk memberikan penjelasan yang dirasa masih samar-samar, maka kegiatan ilmiah lainnya adalah membuat ringkasan dari buku yang terlalu banyak penjelasannya. Kegiatan ilmiah lain adalah menulis sendiri karya orisinal mereka. Kegiatan ilmiah lainnya terwujud dalam bentuk menyalin buku, atau mengkopi buku yang sudah ada yang dianggap penting untuk disebar luaskan. Begitu juga dalam kegiatan ilmiah itu di antaranya adalah mengadakan perjalanan atau lawatan ke berbagai penjuru dunia, baik dibingkai dalam bentuk *muhibbah*, musafir atau kunjungan-kunjungan atau malah belajar di berbagai tempat. Tradisi kritik juga berkembang pada masa lalu, dan juga berbagai eksperimen dilakukan oleh para pemikir klasik.

F. Kajian Filsafat sebagai Titik Pangkal Peradaban Islam Mendatang

Peradaban intinya ada pada pemikiran, hasil dari olah pikir, olah rasa dan olah renung. Mungkinkah mengharapkan lahirnya pemikir tanpa dibekali dengan sejarah olah pikir, sejarah kegiatan berfilsafat, sejarah filsafat, substansi filsafat, perdebatan filosofis, bahasan-bahasan filsafat, tokoh-tokoh filsafat. Jika jargon tidak ada dikotomi dalam keilmuan benar-benar dipahami, maka harus diawali dengan pengenalan terhadap objek kajian filsafat secara umum dan filsafat Islam secara khusus. Munculnya tokoh-tokoh universal semisal Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Ibn Sina, Al-Gazali, Ibn

Rusdy, diawali dengan perbincangan dan pengkajian tentang materi-materi filsafat secara intensif. Para tokoh universal tersebut sangat serius mengkaji dan mendalami filsafat Yunani sebagai sarana latih olah pikir. Barangkali yang menjadi hambatan dari adanya upaya memunculkan tokoh universal adalah adanya spesialisasi pada zaman sekarang sebenarnya mengungkung kebebasan dalam berpikir universal yang bersifat filosofis. Selanjutnya, jargon bahwa mempelajari filsafat sebagai kegiatan yang menyesatkan sehingga filsafat perlu dijauhi dan ditinggalkan merupakan jargon yang menyesatkan. Selama kita masih dibayangi jargon tersebut sulit membayangkan munculnya tokoh-tokoh universal kontemporer. Lewat jargon tersebut, sesungguhnya akar dari modal ketokohan itu sendiri sudah dipasung dan diamputasi oleh umat Islam sendiri. Hal inilah juga yang perlu mendapat perhatian bahwa bagaimanapun jika ingin melahirkan pemikir filosofis, generasi muslim harus dibekali dengan pemikiran-pemikiran filsafati yang pernah dikembangkan dalam sejarah kefilosofannya sendiri. Tujuannya bukan sekedar untuk mengulang kaji dan mengunyah apa yang pernah dibahas, melainkan juga perlu sebagai cermin dan sebagai proses pembelajaran untuk berfilsafat sesuai dengan zamannya. Sehingga dengan cara mempelajari dan memahami cara kerja filsafat, maka akan melahirkan pemikir yang pada masa depan diharapkan akan menjadi tokoh-tokoh pembangun peradaban. Sebagai bandingan dari apa yang pernah penulis teliti tidak adanya muatan kurikulum pemikiran Islam yang ada di IAIN SU dapat disimpulkan bahwa IAIN SU akan sulit menelorkan sosok yang sekarang ini menjadi keinginan banyak pihak yaitu sosok tokoh universal.¹⁰

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan mengapa UIN SU layak sebagai *locus* transfer peradaban Islam. Pertama letak geografis yang sangat strategis. Sumatera Utara memiliki letak geografis yang sangat strategis pada tataran internasional, regional, nasional serta lokal. Kedua, modal historis sumber lahirnya para intelektual. Ketiga, sifat metropolis dari Sumatera Utara dengan ibu kota Medan sebagai salah satu kota besar Nusantara ini menjadi catatan tersendiri. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, pengkajian dan pengembangan, UIN SU sejajar dengan lembaga pendidikan Islam lain yang ada di negara ini yang juga akan segera menjadi pusat jaringan intelektual Islam dunia internasional. Semoga saja.

G. Penutup

Dengan perubahan satus dari IAIN SU menjadi UIN Sumatera Utara, saya meyakini bahwa lembaga ini akan turut memainkan peranan penting

¹⁰ Amroeni, dkk., *Laporan Penelitian Prospek Pengembangan Pemikiran Islam di IAIN SU Medan* (Medan: IAIN SU, 2008).

dalam pembangunan peradaban dunia Islam. Dalam memainkan perannya di kancah pembangunan UIN dapat saja bercermin dari tradisi-tradisi yang pernah berjalan pada masa kejayaan Islam pada masa lalu, tentunya dengan berbagai penyesuaian di sana-sini. Begitu juga dengan mengambil pelajaran-pelajaran dari universitas-universitas lain yang memiliki visi dan tujuan yang dapat dikatakan sama. Sebagai orang yang bergelut di bidang Filsafat Islam, tentunya tidak berlebihan mengharapkan kajian Filsafat Islam mendapatkan perhatian yang serius. Sebab peradaban—apapun peradabannya—diasali dengan kegiatan kajian filosofis.

Senafas dengan alur perubahan lembaga ini, maka tulisan ini akan saya tutup dengan sebuah ilustrasi bahwa perubahan itu sesuatu yang pasti. Namun manusia dalam menyikapi perubahan ini yang menentukan kualitasnya. Ibarat orang yang menunggu kereta api di stasiun. Begitu kereta api datang, dia menghindar dan menjauhi kereta api itu sehingga ketika kereta api mulai bergerak dan berlari kencang dia tertinggal jauh di belakang; sementara yang lain, begitu kereta api datang dia tetap saja berdiri tegak dan kukuh dengan pendiriannya di samping kereta api dan tak juga sudi masuk ke dalamnya, dan diapun mengalami nasib yang sama dengan yang pertama; sedangkan orang yang ketiga, begitu melihat kereta api datang, dia dengan susah payah berusaha masuk ke dalamnya, dan dia tergoncang keras di dalam kereta api yang mulai bergerak, namun dia ikut bersama kereta api perubahan itu dengan segala risikonya. Dalam kaitan dengan perubahan inilah saya ingin menjadi orang ketiga, semoga saja akan sampai di tujuan meski dengan berbagai risiko perjuangan. Barangkali mimpi-mimpi yang dituangkan ini tidak dapat diwujudkan oleh generasi sekarang, namun demikian juga bukan berarti mimpi-mimpi ini mustahil akan terwujud dan diwujudkan oleh generasi mendatang yang lebih cerdas dan lebih maju lagi.

UNIVERSITAS ISLAM SEBAGAI PUSAT PEMBAHARUAN

Syahrin Harahap

Profesor Perkembangan Modern dalam Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara

Di saat dunia Islam abad ke-7 berada dalam zaman keemasannya, Eropa masih dalam abad kegelapan, sehingga tidak mengherankan jika orang-orang Eropa banyak yang datang ke dunia Islam, terutama dari Andalusia dan Sisilia, dua wilayah yang kelak menjadi konsentrasi dan fokus perpaduan antara kebudayaan Arab-Islam yang cemerlang dan otak Eropa yang inovatif. Kebetulan kedua wilayah tersebut merupakan perbatasan antara Arab-Islam dan Eropa. Di sinilah mahasiswa Eropa yang cemerlang secara giat mempelajari dan menekuni ilmu pengetahuan yang selama ini didominasi umat Islam.

Kegiatan orang-orang Eropa yang sebagian besar mendapat stimulasinya dari adanya berbagai bentuk kontak dengan umat Islam itu, ternyata melicinkan jalan bagi kebangkitan kembali (*renaissance*) mereka (abad ke-16-17) dan selanjutnya mengantarkan Eropa Barat (dan dunia) kepada periode sejarah umat manusia yang sama sekali baru, yaitu abad modern.

Modernitas, dengan demikian, secara tak terelakkan menghadapkan umat Islam kepada dua pilihan: mengadaptasi diri dan agamanya dengan melakukan penafsiran ulang atas Islam secara fleksibel hingga mereka menjadi bagian dari modernitas, atau melawannya atas dasar pertimbangan bahwa kemodernan dunia itu tersembul di bagian dunia dengan perangai manusianya yang tidak bersemi sebagai makhluk Tuhan. Dua pilihan tersebut tentu saja dihadapi juga oleh semua umat beragama lainnya.

Krisis yang dihadapi umat beragama berhadapan kemodernan dunia tersebut dianalisis Joseph L. Blau sebagai berikut:

Sesungguhnya seluruh agama besar telah menghadapi krisis sejak lahirnya peradaban baru. Setiap agama telah mengarahkan segenap kemampuannya untuk memecahkan krisis dan menghadapi kehidupan modern dengan sekularisme yang menempel padanya. Abad ke-19 dan 20 telah menyaksikan

babak baru di dalam agama-agama tersebut. Masalah yang dihadapi umat beragama adalah kondisinya yang harus memilih. Sejalan dengan zaman modern atau mati.¹

Meskipun dengan cara penerimaan yang berbeda ternyata umat Islam lebih cenderung pada kesediaan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap Islam hingga tidak hanya berkecimpung dalam keasyikan beragama yang formal, populer dan elementer, tetapi menggali nilai-nilai universal yang diajarkannya, sebagaimana terdapat dalam modernitas tersebut, sehingga umat Islam dapat mengembangkan institusi sosial, pendidikan, politik, dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan modern.

Tekad umat Islam untuk menjadikan diri mereka sebagai bagian dari modernitas didasarkan pada kenyataan bahwa modernitas dengan nilai-nilai fundamental yang terdapat di dalamnya sebenarnya adalah konsep universal yang dipengaruhi oleh waktu, bukan oleh Barat semata.² Sebab modernitas tersebut adalah maha karya anak manusia secara kolektif, termasuk umat Islam yang memiliki kontribusi yang tak terperikan di dalamnya.

A. Memelopori Kemodernan Umat

Kalau kemodernan dunia merupakan kenyataan dan nilai-nilai fundamental modernitas pada hakekatnya adalah nilai yang diperjuangkan oleh Islam maka mengadaptasi umat agar dapat berperan dan menjadi komunitas paling banyak mengambil manfaat dari kemodernan dunia itu merupakan suatu keniscayaan. Pada saat yang sama karena kajian Islam—dalam kaitannya dengan modernitas—yang dimiliki umat Islam paling *advance* adalah di universitas Islam, maka selayaknyalah universitas Islam menjadi pusat pembaharuan dalam Islam.

Ungkapan *modern* (abad modern), *modernity* atau modernitas (kemodernan), *modernism* (paham kemodernan), *modernization* atau modernisasi (proses modernisasi) dalam Islam sebetulnya diserap dari istilah Barat. Istilah-istilah itu masuk ke dunia Islam bersamaan dengan masuknya kebudayaan Barat ke dunia Timur,³ terutama setelah dipopulerkan oleh para orientalis. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk melukiskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek sikap, lembaga-lembaga sosial, adat istiadat,

¹ Joseph L. Blau, *Modern Varieties of Judaism* (London: Columbia Press, 1966), h. 26.

² Louis J. Cantory, "Modernism and Development," dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 73.

³ Harun Nasution, "Sekitar Masalah Modernisme atau Pembaharuan Dalam Islam," dalam *Studia Islamika*, no. 5 tahun 1977, h. 3.

dan sebagainya yang membawa pada keadaan baru di dunia Islam. Kata *modern* mengandung sesuatu yang baru (*new*) sebagai lawan dari yang lama (*ancient*).⁴

Dalam bahasa Indonesia padanan kata modernisasi adalah ‘pembaharuan’, berasal dari kata ‘baru’ atau ‘baharu’ yang bermakna sesuatu yang tidak pernah ada, tidak pernah terlihat, tidak pernah diketahui atau didengar. Bentuk kata kerja baru atau baharu adalah ‘pembaharuan’, yang berarti proses menjadi ‘baru’, ‘mengulangi sekali lagi’, atau ‘memulai lagi’ dan ‘mengganti dengan yang baru’.⁵ Di dalam tradisi ilmu tauhid, ilmu primer Islam, ‘baharu’ dikenal sebagai salah satu ungkapan untuk menyebut sifat alam atau makhluk yang senantiasa berubah-ubah, lawan dari sifat Allah, *qadim* dan *baqa*. Jadi secara semantik kata ‘baharu’ sebetulnya sangat erat kaitannya dengan kondisi yang selalu berubah.

Jauh sebelum istilah modernisasi (pembaharuan) dipopulerkan oleh para orietalis, di dunia Islam sudah ada istilah *tajdid* (تجدید - يجدد - اجدد) = *jaddada*, *yujaddidu*, *tajdidan*) yang memiliki arti lebih kurang sama dengan modernisasi atau pembaharuan.

Kata-kata tersebut ditemukan dalam beberapa ayat dan hadis Rasulullah saw. Di antaranya:

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفْنًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, benarkah akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru? (QS. al-Isra’/17: 49).

Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya). Maukah kamu kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru? (QS. al-Saba’/34: 7).

Dan mereka berkata: Apakah bila kami telah lenyap (hancur) dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan menemui Tuhannya. (QS. al-Sajadah/32: 10).

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. (QS. Qaf/50: 15).

⁴ Lihat Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion* (London: Grolier MacMillan Publisher, 1987), h. 18. Lihat pula AS. Hornby, *Advanced Learners Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1973), h. 630.

⁵ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 93.

Meskipun ayat-ayat itu telah menyinggung kalimat baru (*jadid*) namun belum tampak mengisyaratkan perlunya upaya pembaharuan. Ungkapan yang lebih operasional dan lebih mengacu pada aktivitas pembaharuan ditemukan pada hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya:

Sesungguhnya iman itu (bisa) usang di dalam hati salah seorang diantara kamu sebagaimana usangnya sebuah baju. Maka mintalah kepada Allah untuk mempebaharui iman yang ada dalam hatimu. (H.R. Thabrani).

*Rasullullah mengatakan, perbaharuilah imanmu. Dikatakan, ya Rasullullah, bagaimana caranya memperbaharui iman kami? Rasullullah menjawab, perbanyaklah mengucapkan **la ilaha illallah**.* (H.R. Ahmad bin Hanbal).⁶

Isyarat yang lebih jelas mengenai pentingnya pembaharuan dan bangkitnya para pembaharu dalam Islam dapat dilihat pada hadis Rasulullah berikut ini:

ان الله يبعث الى هذه الامة على كل رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.

Sesungguhnya Allah senantiasa akan membangkitkan untuk umat ini pada akhir setiap seratus tahun (satu abad) orang yang akan memperbaharui Din-nya (agamanya). (H.R. Abu Dawud dan al-Hakim).⁷

Selain istilah *tajdid* dalam referensi-referensi pemikiran Islam dipopulerkan pula berbagai istilah yang memiliki makna yang kurang lebih sama dengan penekanan yang berbeda; istilah *rasionalisasi* (proses penegasan kembali bahwa seluruh ajaran Islam itu rasional, dapat diterima akal), *aktualisasi* (proses upaya untuk membuktikan bahwa ajaran Islam itu bersifat aktual, tidak hanya ideal). Selain itu juga dipopulerkan istilah *ishlah* yang dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan agar Islam itu—sebagaimana sejatinya—sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, *reformasi*, upaya membentuk kembali atau mengadakan pembaharuan kepada yang lebih baik, *resurgence* (kebangkitan), *rethinking*, upaya pemikiran ulang terhadap ajaran-ajaran Islam agar disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Hal ini antara lain dipopulerkan oleh Muhammad Arkoun dalam bukunya *Rethinking Islam*.⁸

⁶ Imam Ahmad b. Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz II, h. 359.

⁷ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Mulaqim, IV, h. 109. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, juga oleh Hakim dalam *al-Mustadrak*, dan oleh al-Bayhaqy, dalam *Ma'rifat*, semuanya dari Abi Hurairah ra. Lihat, Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum fi Tajdid al-Din* (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1984), h. 13.

⁸ Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam* (Boulder: Westview Press, 1994).

Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata *jaddada* diartikan dalam konteks *jaddada al-syai'*, menjadikan sesuatu menjadi baru. *Jadid* adalah lawan kata *khalaq* (usang) dan *jaddah* adalah kata dasar dari *jadid* yang merupakan lawan kata *bila* (usang).

Dari berbagai pengertian tersebut maka modernisasi atau *tajdid* secara etimologis dapat dipahami sebagai gagasan yang mengandung tiga makna yang berkesinambungan, tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Ketiga makna tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, sesuatu yang diperbaharui itu sebelumnya sudah ada, jelas eksistensinya, dan diketahui oleh manusia. *Kedua*, sesuatu itu telah dimakan zaman sehingga menjadi kuno, tidak *up to date*, tertinggal, dan kehilangan elan vitalnya. *Ketiga*, sesuatu itu kemudian dikembalikan kepada keadaannya semula, yang *up to date*, aktual dan relevan.⁹

Pada masyarakat Barat, modernisasi atau modernisme mengandung arti pemikiran, gerakan, atau usaha-usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pemikiran ini timbul pada periode yang disebut *Age of Reason* (abad penalaran/ akal), atau *Enlightenment* (masa pencerahan, 1650-1800M).

Namun perlu diketahui bahwa dari sekian banyak istilah yang digunakan untuk menyebut pembaharuan, istilah yang paling tepat untuk digunakan adalah modernisasi dan pembaharuan atau *tajdid*. Istilah-istilah lain, di samping adanya distorsi yang mengitarinya, juga bisa jadi telah *bias* (berat sebelah), dengan catatan bahwa modernisasi di samping merupakan istilah pinjaman dari Barat, dalam sejarahnya telah menimbulkan perpisahan yang begitu jauh antara agama dan ilmu pengetahuan (sekularisasi), yang menyebabkan istilah tersebut senantiasa tak terpisahkan dari kesan negatifnya. Sementara istilah *tajdid* atau pembaharuan tidak pernah menimbulkan perpecahan antara agama dengan ilmu pengetahuan, bahkan sebaliknya dalam Islam ditengah suasana pembaharuanlah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang karena pembaharuan merupakan bagian dari ajaran Islam.

Dengan demikian pembaharuan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai pemikiran, gagasan, gerakan, dan usaha untuk merubah paham-paham, tradisi-tradisi, dan institusi-institusi lama,¹⁰ untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁹ Bandingkan Sa'id, *Ma'fhum fi Tajdid al-Din*, h. 14.

¹⁰ Paham-paham, tradisi-tradisi, dan institusi-institusi lama tersebut adalah produk *ijtihad* ulama terhadap ayat Al-Qur'an dan al-Hadis yang bersifat *zhanniy al-dalalah*, dan diyakini sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam.

Pembaharuan dalam Islam sangat terasa signifikasinya, apalagi bila dihubungkan dengan fungsi Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia disegala zaman dan tempat, untuk mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat.

Urgensi pembaharuan juga semakin dirasakan bila dihubungkan dengan kondisi umat Islam mulai abad ke-13 sampai dengan abad ke-19 yang demikian mundur. Selaku manusia terbaik (*khairu ummah*) umat Islam berada dalam keadaan tak berdaya ketika berhadapan dengan dunia Barat yang memasuki pencerahaannya sejak abad ke-16. Umat Islam ketika itu telah bertindak sebagai pelaku yang menutupi kesempurnaan dan kebaikan Islam (*al-islam mahjubun bi al-muslimin*). Sebab mereka kehilangan inovasi dan 'tertawan' oleh kepengikutannya, *taken for granted*, tanpa pertanyaan (*bila kayfa*) terhadap pemikiran para pendahulunya (*logo sentris*).

Dengan demikian secara garis besar, signifikansi modernisasi dalam Islam terlihat pada tiga hal. *Pertama*, untuk membuktikan keutamaan Al-Qur'an yang diyakini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat, seperti disyaratkan pada surat Al-An'am/6: 38.

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab. (QS. al-An'am/6: 38).

Berdasarkan ayat ini, banyak umat Islam yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan manusia berkaitan dengan kehidupannya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Namun dalam kenyataannya Al-Qur'an itu lebih banyak mengandung soal-soal agama secara umum. Keumuman isi Al-Qur'an itu dapat diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw., tentang otoritas yang diberikan kepada manusia untuk dapat memecahkan masalah-masalah keduniannya. (*Antum a'lamu bi-umuri dunya-kum* = Kamulah yang lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu).

Demikianlah, kalau teks-teks Al-Qur'an itu lebih banyak bersifat umum dan manusia diberi wewenang untuk memecahkan masalah-masalah keduniannya, maka upaya-upaya pembaharuan—yang ditempuh dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat lain—merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam.

Kedua, modernisasi atau pembaharuan menjadi niscaya pula apabila dilihat dari jurusan sarannya sebagai pengkajian ulang terhadap ijtihad atau tafsiran para ulama masa lampau terhadap teks-teks agama. Sebab ijtihad yang dilakukan para ulama pada waktu tertentu tidak akan terlepas dari pengaruh keadaan zaman dan masyarakatnya. Selain itu hasil ijtihad juga pada dasarnya tidak mengandung kebenaran absolut akan tetapi merupakan kebenaran relatif. Oleh karena itu ijtihad pada waktu tertentu di zaman yang lampau

seringkali tidak relevan dan tidak dapat menjawab tantangan zaman modern. Maka untuk mempertahankan keadaan dan kesempurnaan Islam modernisasi atau pembaharuan merupakan keharusan.

Ketiga, modernisasi atau pembaharuan dalam Islam itu bukanlah kepentingan baru, sebab urgensinya telah diisyaratkan Rasulullah melalui hadis-hadis beliau sebagaimana dicantumkan dimuka.

Hadis tersebut mengisyaratkan keharusan adanya upaya modernisasi atau pembaharuan dan sekaligus memberi patokan bahwa Al-Qur'an dan Hadis merupakan darah dan daging setiap langkah modernisasi atau pembaharuan.

Dalam konteks kehidupan kontemporer relevansi modernisasi atau pembaharuan pemikiran Islam itu terlihat jelas dalam lima hal.

Pertama, tawarannya menyangkut pentingnya pemahaman agama yang lebih rasional, tidak mengikuti tanpa tanya (*unquestioning and uncritical adoption*) terhadap para pendahulu dalam hal pemahaman agama, sebab kepengikutan semacam itu akan berimplikasi pada (1) tidak adanya keberanian untuk melakukan ijtihad dalam menjawab kebutuhan zamannya, (2) semakin menebalnya ajaran-ajaran agama yang mengikat setiap gerak umat beragama. Kedua implikasi ini akan bermuara pada kondisi umat Islam yang jumud, tidak berkembang, dan tidak mandiri.

Kedua, modernisasi atau pembaharuan dalam Islam menawarkan kesadaran pluralistik (keberagaman pendapat, pemahaman, etnis, dan agama) secara tulus. Seperti terlihat jelas dalam beberapa gagasan para pemikir modern; Muhammad Abduh dan murid-muridnya di Mesir, Sayyed Ahmad Khan dan Abul Kalam Azad di India, Hasan Hanafi di Mesir, Seyyed Hussein Nasr di Persia, hingga Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid serta murid-murid mereka di Indonesia, yang sangat serius mencari titik temu antaragama. Bagi bangsa Indonesia gagasan seperti itu akan dan telah terbukti menumbuhkan, bukan hanya *ukhuwah islamiyah*, tetapi juga *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariyah*.

Ketiga, modernisasi atau pembaharuan dalam Islam menekankan dengan kuat sekali dinamika manusia agar mereka tidak selalu menyerah pada nasib (*taqdir*)-nya karena manusia memiliki peran besar dalam kehidupan dan menentukan masa depannya. Gagasan semacam ini tentu memiliki signifikansi yang jelas bagi upaya pembangunan berkelanjutan serta kerja keras manusia di dalamnya. Sebab manusia yang menyadari akan pentingnya usaha yang sungguh-sungguh bagi perubahan nasibnyalah yang dapat mengentaskan keterbelakangannya secara sadar.

Keempat, modernisasi atau pembaharuan dalam Islam menekankan dengan kuat sekali penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan

menganjurkan pengambilan kembali secara efektif (*selective retaking*) atau peminjaman prestasi-prestasi keilmuan dari berbagai bangsa di dunia tanpa dibatasi oleh ras, agama, dan negara karena disadari bahwa penguasaan ilmu dan teknologi merupakan awal dari supremasi suatu bangsa, sebagaimana telah terbukti pada bangsa manapun di dunia ini.

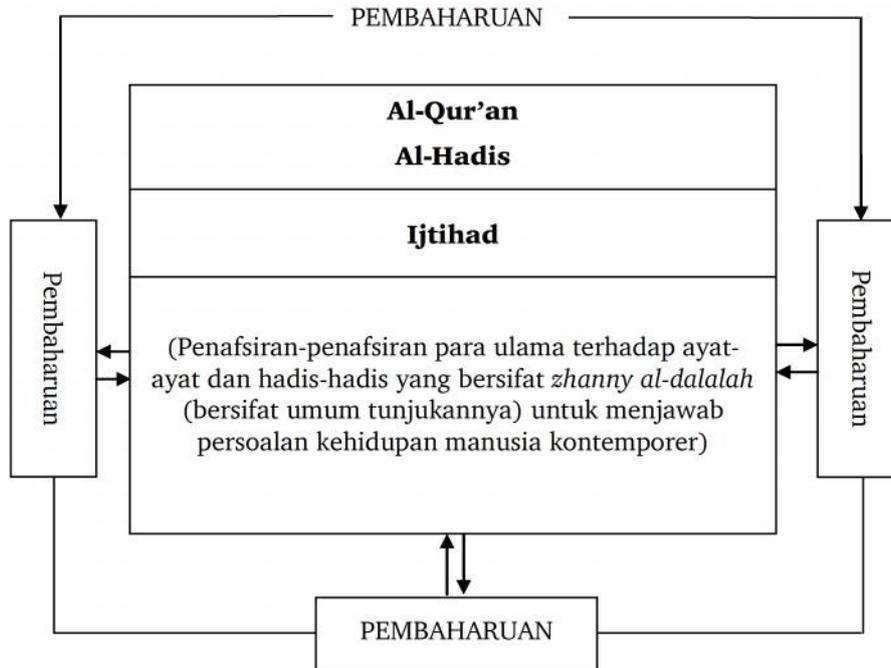
Kelima, apa yang dilakukan para modernis/pembaharu dengan ‘perampingan’ taqlid, pemahaman rasional, dan kesadaran pluralistik, adalah upaya untuk meraih kemajuan bersama Al-Qur’an dan Hadis, karena kedua sumber utama ajaran Islam itu mengajarkannya secara mengesankan. Dengan demikian gagasan pembaharuan pemikiran Islam memiliki akar teologis yang kuat pada ajaran agama ini.

B. Objek Pembaharuan dalam Islam

Bagi umat Islam, agama mereka adalah agama yang paling sempurna yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. untuk menjadi pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama ini dipahami dan diyakini sebagai agama yang sangat tinggi dan sempurna. Kesempurnaan agama ini terlihat/dibuktikan oleh kitab suci yang lengkap dan sempurna, tidak ada satupun masalah yang terlupakan di dalamnya. (QS. al-An‘am/6: 34).

Pemahaman ini berimplikasi pada munculnya resistansi yang sangat tinggi terhadap setiap sikap kritis terhadap teks, interpretasi, dan berbagai inovasi terhadap ajaran Islam yang demikian sempurna yang tidak mungkin diubah, diperbaharui, dan dimodifikasi.

Namun para pemikir muslim ternyata memiliki visi tersendiri terhadap Islam. Islam bagi mereka—meskipun merupakan agama samawi (wahyu) yang lengkap dan sempurna—tidak terlepas dari pentingnya ijtihad, hasil pemikiran secara sungguh-sungguh oleh para ulama, bahkan Islam memberi peluang seluas-luasnya untuk keterlibatan umatnya dalam menafsirkan pesan-pesan agama ke dalam kehidupan yang riil yang memungkinkan agama tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan. Dilihat secara demikian, maka ajaran Islam itu dapat diskemakan dalam diagram berikut:



Dengan demikian sebenarnya dalam Islam terdapat dua kelompok ajaran. *Pertama*, ajaran dasar yang bersifat absolut, mutlak benar, tidak berubah dan tidak dapat diubah yang jumlahnya sedikit sekali seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. *Kedua*, ajaran bukan dasar, bersifat relatif, tidak mutlak benar, tidak kekal, dapat berubah-ubah dan diubah, yang jumlahnya sangat banyak seperti yang terdapat dalam tafsir, teologi Islam, fikih, tasawuf, dan sebagainya.¹¹

Ajaran Islam yang bersifat relatif dan berubah-ubah tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama yang di dalam perjalanan sejarah oleh sebagian umat diyakini sebagai suatu yang bersifat absolut dan mutlak benar harus dilaksanakan. Hal itu menimbulkan dogmatisme ketat, pandangan sempit, dan ketidakterbukaan terhadap hal-hal baru. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sering dicap sebagai bid'ah, tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Pemahaman seperti itulah yang terdapat pada abad pertengahan, dan boleh jadi juga di abad ini dan masa yang akan datang.

Suatu pernyataan yang tepat untuk melukiskan keadaan umat Islam, terutama pada paroh abad pertengahan Masehi adalah 'ketidakberanian intelektual'.¹²

¹¹ Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1978), h. 9.

¹² Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Terhadap Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1993), h. 36.

Pada masa itu situasi umat Islam baik dari segi intelektual maupun moral semakin memburuk. Hal itu disebabkan oleh rasa puas terhadap apa yang telah dicapai oleh para ulama sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakberanian intelektual kaum muslimin untuk melakukan ijtihad.

Di samping itu pertentangan antara gerakan rasional (teologi Mu'tazilah) dengan kalangan tradisional (kalangan Sunni) mengenai hakekat Al-Qur'an; apakah makhluk atau bukan¹³ yang mencapai puncaknya dengan diadakannya *mihnah* atau *inquisition*¹⁴ turut berperan dalam membuat Islam semakin mundur.

Implikasi *mihnah* telah menyebabkan mundurnya teologi rasional Mu'tazilah, dan kalangan Sunni juga memandang bahwa gerakan rasional sebagai sumber perpecahan di kalangan umat Islam. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh kaum Sunni dengan menggunakan kekuatan syariat dan struktur sistem hukumnya. Sementara itu pengaruh sufisme yang semakin meluas telah mengaburkan visi umat Islam dan menghantar mereka kepada taqlid. Sebagai pamungkas dari kesemuanya itu adalah jatuhnya Bagdad ke tangan Hulagu Khan pada tahun 1258.

Untuk menghindari agar umat Islam tidak semakin hancur, maka para fuqaha Sunni kemudian memusatkan perhatian mereka pada penyeragaman (uniformitas) kehidupan sosial umat Islam dengan melarang segala jenis pembaharuan yang substansial, khususnya dalam bidang hukum Islam.¹⁵

¹³ Kelompok rasional yang diwakili oleh Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Qur'an itu diciptakan. Karena ucapan yang terdiri dari huruf dan suara disampaikan oleh pembicara melalui suara. Jadi ia merupakan kata Tuhan. Pendapat serupa juga dianut oleh kaum Khawarij dan sebahagian penganut Syi'ah. Lihat Abu Hasan al-Asy'ary, *Maqalat al-Islamiyyin wa-Ikhtilaf al-Mushallin* (Mesir: Maktabah al-Daulah), h. 245; Abdul Karim Al-Syahrastani, *Nihayat Iqdam fi 'ilm al-Islam* (Bagdad: Maktabat al-Mu'annah, 1964), h. 268-340. Pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak diciptakan (*qadim*) karena huruf dan suara hanya alat dan tanda-tanda. Dibalik perkataan terdapat makna yang ada di dalam pikiran. Pendapat ini diwakili oleh kaum sunni termasuk kaum Asy'ary dan Imam Hambali. Lihat al-Asy'ary, *Al-Ibanah an Usul al-Diyanah* (Madinah: Markaz Syu'un al-Da'wah, t.t.), h. 21-29. Lihat pula Abdul al-Qahir al-Bagdadi, *Al-Farq bayn al-Firq* (Kairo: Maktabat Muhammad Shabih, t.t.), h. 334-338.

¹⁴ *Mihnah* artinya suatu cobaan (*trial*) atau penganiayaan. Hal ini dihubungkan dengan penderitaan atau tantangan yang diterima oleh para ulama fiqih maupun hadis (termasuk Imam Ahmad bin Hanbal), karena mempertahankan pendapat mereka bahwa Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. *Mihnah* berlangsung dari tahun 833 s/d 849 Masehi. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca Harry Aystin, *The Philosophy of the Kalam* (London: Harvard University, 1976), h. 31; H.A.R. Gibb dan J.H.L.M. Kraemers, (ed.), *The Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1961), h. 337; Musthafa Hilmi, *Manhaj Ulama' al-Hadis wa al-Sunnah fi Ushul al-Din*, (Kairo: Dar al-Kalam, 1982), h. 177.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *The Reconstructions of Religious Thought in Islam* (Lahore: Institute of Islamic Culture), h. 149-151.

Munculnya Ibnu Taimiyah (1263-1328) merupakan salah satu tonggak pengembalian kreativitas pemikiran Muslim dan mengembalikan hukum Islam kepada sifatnya yang dinamis dan kreatif. Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa ijtihad mutlak diperlukan bagi umat Islam serta menghimbau umat Islam agar kembali kepada akar spiritual mereka yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Himbauan Ibnu Taimiyah itu baru mendapat tanggapan pada penghujung abad ke-18, dengan munculnya gerakan furifikasi Wahabi di Saudi Arabia yang menghantam praktik-praktik bid'ah, takhyul, dan khurafat di kalangan umat Islam.

Kemudian pada priode modern Islam seruan Ibnu Taimiyah tersebut kembali mendapat tanggapan positif dari kalangan pembaharu muslim sebagai kelanjutan dari gerakan pembaharuan abad ke-18. Hal itu disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan sosial yang berlangsung secara drastis sebagai akibat infiltrasi kebudayaan Barat yang dibarengi dengan kolonialismenya, hampir di seluruh negeri-negeri muslim.

Muncullah sejumlah pembaharu yang *concern* terhadap upaya-upaya merelevansikan agamanya dengan dunia modern, mulai dari Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849) di Mesir, Kemal Ataturk di Turki (1881), sampai kepada Muhammad Iqbal (1876) di anak benua Indo-Pakistan.¹⁶ Semua mereka memandang bahwa intitusi-institusi umat Islam yang tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang dan berubah.

Pertanyaan yang dapat dikedepankan adalah, apakah ajaran Islam khususnya yang merupakan hasil ijtihad itu masih aktual bila berhadapan dengan masyarakat modern dan bahkan post modern?

Paham modern (modernisme) adalah pandangan yang didasarkan pada keyakinan bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan budaya-budaya kontemporer, mengharuskan penganutnya untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran agama yang dianggap ortodok, dengan menggunakan standar pemahaman filsafat dan metode ilmiah yang aktual.¹⁷

Makna modernisme seperti itu didasarkan pada asumsi dasar bahwa perkembangan pemikiran atau paham keagamaan ortodok yang dipengaruhi

¹⁶ Untuk studi lebih lanjut dapat dibaca Williem L. Cleveland, *A History of the Modern Middle East* (San Francisco: Wetsview Press, 1994), h. 60-70; Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), h. 108; Charles C. Adam, *Islam and Modernism in Egypt* (New York: Russel, 1968), h. 4; H.A.R. Gibb, *Studies in the Civilization in Islam* (USA: Beacon Press, 1966), h. 252; Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

¹⁷ Sa'id, *Mafhum fi Tajdid al-Din*, h. 223.

oleh kondisi zaman yang aktual pada masanya tidak sejalan lagi dengan kondisi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Apabila pemikiran atau paham keagamaan tersebut akan diterapkan pada zaman sekarang, haruslah diadakan penyesuaian terlebih dahulu dengan kondisi saat ini.¹⁸

Yang menjadi objek pembaharuan dalam Islam adalah ajaran Islam kelompok kedua, yang merupakan ajaran yang bukan dasar. Untuk terlaksanakannya pembaharuan tersebut maka objeknya mencakup setiap masalah yang berkaitan dengan ajaran Islam.

C. Metode dan Pendekatan Pembaharuan Pemikiran Islam

Salah satu yang cukup penting untuk dibicarakan dalam konteks modernisasi atau pembaharuan dalam Islam adalah persoalan metodologi yang digunakan para pembaharu. Sebab sebagai modifikasi atau koreksi atas pemahaman, pemikiran, dan kondisi umat sebelumnya, pembaharuan ditantang untuk memiliki akurasi metodologis. Bahkan lebih jauh lagi pembaharuan sering mendapat sorotan dari para kritisi muslim sebagai tidak dapat menawarkan metodologi bagi pembumian gagasan-gagasan mereka.

Kalau diperhatikan cara-cara para pembaharu dalam mengedepankan gagasan-gagasan mereka, maka ada tiga metode yang mereka gunakan yaitu *pertama*, metode komparatif, membandingkan antara keadaan masyarakat umat Islam dengan masyarakat yang lebih maju terutama masyarakat Barat. *Kedua*, metode analisis-kritis, menganalisis keterbelakangan umat Islam dan mendiagnosis berbagai faktor yang menyebabkan keterbelakangan itu. *Ketiga*, metode rekonstruksi, mengajukan pemikiran, ide, dan gagasan untuk mencari solusi keterbelakangan itu dan mengedepankan solusi untuk memajukan umat Islam.

Metode tersebut dilaksanakan dalam empat langkah. Langkah *pertama*, berangkat dari keprihatinan terhadap keterbelakangan umat Islam dibandingkan dengan masyarakat lain, terutama masyarakat modern Barat dan—dalam konteks sekarang—dapat pula dibandingkan dengan kasus mutakhir masyarakat China. Selanjutnya mengadakan diagnosis terhadap keterbelakangan itu. Pada tahap ini para pembaharu memang sangat kritis terhadap keadaan umat Islam, bahkan sangat evaluatif terhadap sikap umat dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran tertentu dalam Islam, termasuk ijtihad para ulama yang dipandang sangat mengikat. Seakan para pemikir itu ‘meronta’ ingin melepaskan umat dari keterbelakangannya.

¹⁸ *Ibid.*, h. 224.

Langkah *Kedua*, melakukan diagnosis terhadap pendapat ulama terdahulu dengan memahami metodologi yang digunakan seraya mengadakan perenungan yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan al-Hadis. Kemudian para pembaharu (secara eksplisit atau implisit) membagi ajaran Islam kepada dua: (1) ajaran dasar, yang absolut (tidak bisa diubah dan di perbaharui). (2) ajaran Islam yang bukan dasar, nisbi dan bisa, bahkan harus diperbaharui.¹⁹ Yang disebut terakhir menjadi pusat perhatian utama (*stressing point*) para pembaharu. Sebab ditemukan benang merah yang menghubungkan pemahaman para pembaharu bahwa nash-nash yang bersifat *zhanni* tersebut—tanpa dipungkiri—memerlukan penafsiran agar dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam.²⁰

Langkah *Ketiga*, atas diagnosisnya terhadap beberapa faktor yang menyebabkan keterbelakangan umat itu, para pembaharu mendendangkan kesadaran dan usaha agar umat tidak terpenjara dengan kepengikutan (*taqlid*) mereka terhadap para pendahulu, dan menegaskan bahwa ijihad para ulama terdahulu itu merupakan ajaran agama yang bukan dasar, sifatnya nisbi, bisa berubah, jika bukannya mesti diubah.

Langkah *Keempat*, selanjutnya para pembaharu mengedepankan gagasan-gagasannya untuk membawa umat Islam kepada kemajuan. Bagaimana membawa umat Islam kepada kemajuan? Disinilah para pembaharu menggunakan 'Pendekatan Transdisipliner', melakukan analisis dan pembahasan yang melampaui tapal batas dua atau lebih disiplin ilmu untuk mencari solusi bagi problema keterbelakangan umat. Dengan demikian mereka memunculkan sejumlah alternatif atau pilihan (*option*) yang dapat ditempuh untuk memajukan umat Islam, baik yang dilakukan secara metodologis maupun yang bersifat gagasan dan himbauan agar umat Islam dapat meraih kemajuan tanpa menawarkan metodologi pencapaian kemajuan itu secara sistematis dan eksplisit.

Dalam hal ini para pembaharu muslim kerap kali menggagaskan agar umat Islam mengadopsi peradaban Barat atau meminjam peradaban Barat tersebut. Bahkan mereka banyak yang menegaskan bahwa peradaban Barat itu sebagai sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an.

Dalam penggunaan metode ini para pembaharu sering dikritik sebagai terlalu meniru Barat (*westernis*) secara tidak selektif.²¹ Meskipun tanggapan

¹⁹ Lihat Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

²⁰ Muhammad Hasan al-Amin, "Ishlah al-Fikr al-Islami" dalam 'Abd al-Jabbar al-Rifa'iy, *Manahij al-Tajdid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 93.

²¹ Telah muncul sejumlah tanggapan yang bersifat menyerang pembaharuan Islam karena dipandang terlalu ingin meniru Barat seperti kritik Maryam Jameelah. Lihat bukunya *Islam dan Modernism*. Muhammad Sa'id dalam bukunya *Mafhum Tajdid al-Din*, dan banyak lagi buku yang sengaja ditulis untuk mengkritisi, jika bukannya menghakimi gagasan pembaharuan, yang tidak mungkin dibebaskan semuanya di sini.

itu sebetulnya lebih banyak yang terlalu emosional dan terlalu didramatisir serta sering tidak didasarkan pada analisis yang fair dan ilmiah.

Namun sepanjang yang penulis pelajari, para pembaharu tampaknya tidak pernah mengedepankan gagasan-gagasan mereka secara sembarangan. Melainkan didahului oleh pengkajian dan perenungan yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi serta problema yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Sebab rata-rata pembaharu memiliki pemahaman yang *advances* (mendalam) terhadap kitab sucinya. Demikian pula melakukan analisis yang mendalam mengenai ajaran Islam yang berkembang dan dipahami didunia Islam. Atas dasar itu mereka menganjurkan ijtihad kembali langsung pada Al-Qur'an. Namun harus diakui bahwa banyak diantara mereka yang tidak menjelaskan metode ijtihad yang dimaksudkannya. Akan tetapi sangat jelas terlihat ketangkasan mereka dalam melakukan pemahaman baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan melakukan berbagai analisis terhadap ajaran Islam.

Dalam mengedepankan gagasan mereka untuk memajukan umat Islam itu terdapat perbedaan antar pemikir muslim. Untuk melihat perbedaan itu tampaknya cukup berarti kalau dibuat pengklasifikasian sederhana.

Fazlur Rahman misalnya membagi dialektika perkembangan pembaharuan yang muncul di dunia Islam ke dalam empat gerakan.

Pertama, gerakan revivalisme pra modernis yang muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia, India, dan Afrika. Gerakan ini tidak terkena sentuhan Barat. Ia dilatarbelakangi oleh persoalan internal umat Islam seperti degradasi moral, menjamurnya takhyul, khufarat, dan paham predeterministik yang membelenggu.

Kedua, modernisme klasik yang muncul pada pertengahan abad 19 dan abad ke-20. Tipe modernisme klasik ini terkena sentuhan Barat, dan ini terlihat pada perluasan isi ijtihad dan peranan akal serta kaitannya dengan wahyu.

Ketiga, neo revivalisme pasca modernisme yang lebih jauh melangkah dalam pengembangan metodologi. Gerakan ini juga terkena sentuhan Barat.

Keempat, neo modernism yang mulai mengembangkan sikap kritis terhadap Barat, serta terhadap warisan-warisan sejarahnya sendiri.²²

Kalaupun pengklasifikasian Rahman di atas dapat diterima, maka ia memperlihatkan bahwa pembaharuan klasik (modernisme klasik) sebagai pembaharuan yang terkena sentuhan Barat dan mengajak pada peniruan Barat secara sangat

²² Klasifikasi ini sangat mewarnai hampir semua pembicaraan Rahman mengenai modernisasi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam karyanya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1984).

kentara. Sementara para pemikir kontemporer telah banyak yang menumbuhkan sikap kritis terhadap Barat dan mengedepankan tawaran metodologi yang lebih jelas.

Selain menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh pembaharu dalam mengedepankan gagasan-gagasan pembaharuan mereka, kiranya perlu pula dijelaskan disini pola-pola pemikiran yang mereka gunakan.

Secara umum ada dua pola yang digunakan dalam pemikiran Islam, pola tekstualis dan pola kontekstualis. Pola tekstualis adalah pemikiran yang selalu berangkat dari bunyi teks dan pemahaman yang dimilikinya sebagaimana makna teks itu secara lahiriyah. Sedangkan pola pemikiran kontekstualis adalah pemikiran yang tidak hanya mengacu pada wujud bunyi teks semata melainkan pada esensi dan substansi makna terdalam, esoterik-filosofis, tujuan atau pesan moral yang terkandung dalam teks. Dengan demikian dalam aplikasinya senantiasa mempertimbangkan konteks ruang dan waktu, kondisi sosio-kultural serta historisitasnya. Dilihat dari pola pemikiran ini maka pola yang digunakan para pembaharu muslim pada umumnya adalah pola kontekstual.

Dalam menganalisis metode para pembaharu muslim kiranya perlu pula dijelaskan bahwa landasan pemikiran Islam meliputi: *Al-Wahdaniyah* (keyakinan akan penciptaan, kesatuan pencipta, kekuasaan dan tujuan penciptaan, *Khilafah* (penjagaan, perbaikan, dan pemakmuran), dan tanggung jawab moral (usaha-usaha menuju kebenaran, keadilan, kebajikan, kebaikan, dan kemakmuran).²³

Para pembaharu muslim tampaknya telah menjadikan landasan ini sebagai titik tolak dalam mengedepankan pemikiran dan gagasan mereka untuk memajukan Islam dan membangkitkan umatnya dari keterbelakangan. Dengan landasan itu para pembaharu muslim menggunakan metode '*aqli* (rasional), metode yang lebih banyak didasarkan pada rasio (akal) dalam memahami, menginterpretasi, dan mencari solusi bagi persoalan umat dan upaya memajukannya.

Dalam hal ini para pembaharu muslim pada umumnya cenderung pada pemikiran rasional Islam, yaitu pemahaman, interpretasi, dan pengertian segala objek lebih banyak didasarkan pada rasio (akal). Problematika kehidupan yang ada dan pengambilan keputusan diperhitungkan dengan akal sebagai tolok ukurnya.

Rasionalitas itu setidaknya terlihat pada. *Pertama*, pemahaman mereka terhadap Islam tidak mengacu pada bunyi teks semata-mata tetapi lebih pada

²³ Abdul Hamid Ahmad Abu Sulaiman, *Azmatu 'Aql al-Muslim* (Riyadh: Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islami, 1996).

esensi, makna terdalam, esoterik-filosofis, tujuan atau pesan moral dari teks yang ada. Dengan demikian dalam aplikasinya senantiasa mementingkan konteks ruang dan waktu, kondisi sosio-kultural, serta historisitasnya.

Kedua, senantiasa merelasikan pikirannya dengan kondisi zamannya, aktif mempertanyakan—secara kritis—semua sistem dan kondisi masyarakatnya. Islam sebagai sistem nilai yang integral-universal ditransformasikan ke dalam sendi-sendi kehidupan secara dialogis-dialektis sehingga gerakan-gerakan keagamaan yang muncul selalu progressif dinamis-kreatif dan aktual. Dengan demikian para pembaharu melakukan semacam *dirasah tathbiqiyah*, kajian penerapan Islam di dunia modern.

Ketiga, dalam menyikapi perbuatan manusia dan kehendak mutlak Tuhan para pembaharu muslim lebih banyak mengambil posisi indeterminis, *free-will* dan dengan demikian percaya kepada *sunnatullah*.

Keempat, religiositas masyarakat ditelaah melalui berbagai pendekatan keilmuan keagamaan yang bersifat interdisipliner/transdisipliner, historis, filosofis, dan sosiologis.

Kelima, dalam bidang politik selalu mendorong tumbuhnya sistem dan mekanisme yang lebih demokratis, aspiratif, dan emansipatoris.

Keenam, dalam menyikapi kejumudan, kelemahan, dan keterbelakangan umat Islam para pembaharu lebih suka mengambil pola *tajdid al-fahm* (pembaharuan pemahaman Islam) karena kelemahan itu menurut mereka terjadi disebabkan kebanyakan umat terpaku pada patokan-patokan historis dan ketentuan-ketentuan fikih yang *rigid (logosentris)*. Juga dipengaruhi oleh pemikiran kalam klasik-skolastik-tradisional. Di samping itu juga karena terjadinya sakralisasi pemikiran (*taqdis al-afkar al-dini*) di kalangan kaum muslimin.

D. Pembaharuan Pemikiran Islam dan Ilmu-ilmu Keislaman Lainnya

Ilmu-ilmu Islam khususnya dalam pendekatan ilmu-ilmu Islam Indonesia secara garis besar telah melalui dua tahap. *Tahap pertama*, epistemologi awal ilmu-ilmu Islam yang lahir dari kesadaran modern di Indonesia. Pada tahap ini ilmu-ilmu Islam dikelompokkan pada delapan bidang, yaitu:

1. Al-Qur'an dan Hadis, 'Ulum Al-Qur'an dan 'Ulum al-Hadis
2. Pemikiran dalam Islam (Ilmu Kalam, Falsafat, Tasawuf, dan Ushul Fikih)
3. Pranata sosial Islam (Ilmu Hukum Islam/Fikih, Ilmu Tata Negara, Fikih al-Siyasah, Ilmu Ekonomi, dsb)
4. Sejarah dan Kebudayaan Islam
5. Bahasa dan Sastra Arab

6. Pendidikan Islam (*al-Tarbiyah, al-Islamiyyah*)
7. Dakwah Islam
8. Perkembangan modern di dunia Islam.²⁴

Tahap *pertama* ini lebih menekankan hirarki ilmu-ilmu Islam dan perbedaan pendekatan antara satu dengan lainnya. Namun kecenderungan tersebut mengakibatkan interkoneksi ilmu (transdisipliner) keilmuan Islam tidak ditemukan secara eksplisit.

Tahap kedua, kesadaran epistemologis ilmu-ilmu Islam yang lebih mempertimbangkan konkritisasinya dalam kehidupan umat (*Dirasah tathbiqiyah*). Perumusan hirarki ilmu dalam Islam didasarkan pada enam rumpun ilmu, yaitu:

1. Ilmu Agama
2. Ilmu Humaniora
3. Ilmu Sosial
4. Ilmu Alam
5. Ilmu Formal
6. Ilmu Terapan

Berdasarkan kategorisasi rumpun ilmu tersebut maka ilmu-ilmu keislaman mencakup ilmu-ilmu Islam dan dalam kajiannya mengkoneksikan semua bidang ilmu secara keseluruhan (transdisipliner).

Perkembangan modern di dunia Islam adalah bidang ilmu yang membicarakan pembaharuan dalam Islam, dan dalam bentuknya yang terakhir di Indonesia diberi nama Perkembangan Modern dalam Islam (PMDI). Pemberian label ini dilakukan karena tidak ditemukannya batasan yang atomistis antara modern dengan sesudahnya (*post modern*) atau istilah-istilah lain yang mungkin digunakan.

Antara delapan bidang ilmu pengetahuan Islam itu, atau antara bidang dalam kategorisasi sesudahnya mempunyai hubungan yang sistematis, simbiotik, dan sinergik, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya sehingga pendekatannya pun harus bersifat transdisipliner.

Perkembangan Modern Dalam Islam (PMDI) tidak dapat terlepas dari Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai darah dan jantung pergerakan Islam, meskipun ilmu ini menggagaskan interpretasi terhadapnya, khususnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang *zhanni al-dalalah*.

²⁴ Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1982 Tentang Pembidangan Ilmu Agama Islam.

Perkembangan Modern Dalam Islam juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pemikiran Dalam Islam, sebab pemikiran tersebut merupakan referensi mengenai keragaman interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadis, bahkan keragaman pendekatan terhadap Tuhan (*Khaliq*).

Hubungannya dengan pranata sosial Islam demikian jelas, sebab pranata ini merupakan eksprimen yang dilakukan umat Islam untuk menjawab berbagai problema yang dihadapinya.

Ilmu-ilmu keislaman tersebut berkembang dan dikembangkan di sentra-sentra peradaban Islam, sementara sentra peradaban Islam itu dapat dikategorikan kepada 'dua plus satu'. *Pertama*, lingkungan budaya yang berbahasa Arab (*Arabic Cultural Sphere*), kawasan yang kini secara politik tergantung dalam Liga Arab. *Kedua*, budaya yang berbahasa atau dipengaruhi oleh bahasa Persia (*Persian Cultural Sphere*), seluruh kawasan Islam Asia bukan Arab, sejak dari Turki sampai Bangladesh. *Ketiga*, kawasan yang berbudaya Melayu (*Malay Cultural Sphere*), daerah Islam Asia Tenggara. Pada sisi lain perlu dicatat adanya kesungguhan Barat sejak abad ke-8 hingga saat ini untuk mengalihkan ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam khususnya di zaman keemasan (*golden age*) ke dunia Barat, seperti dengan baik sekali dilukiskan Mustafa al-Siba'iy:

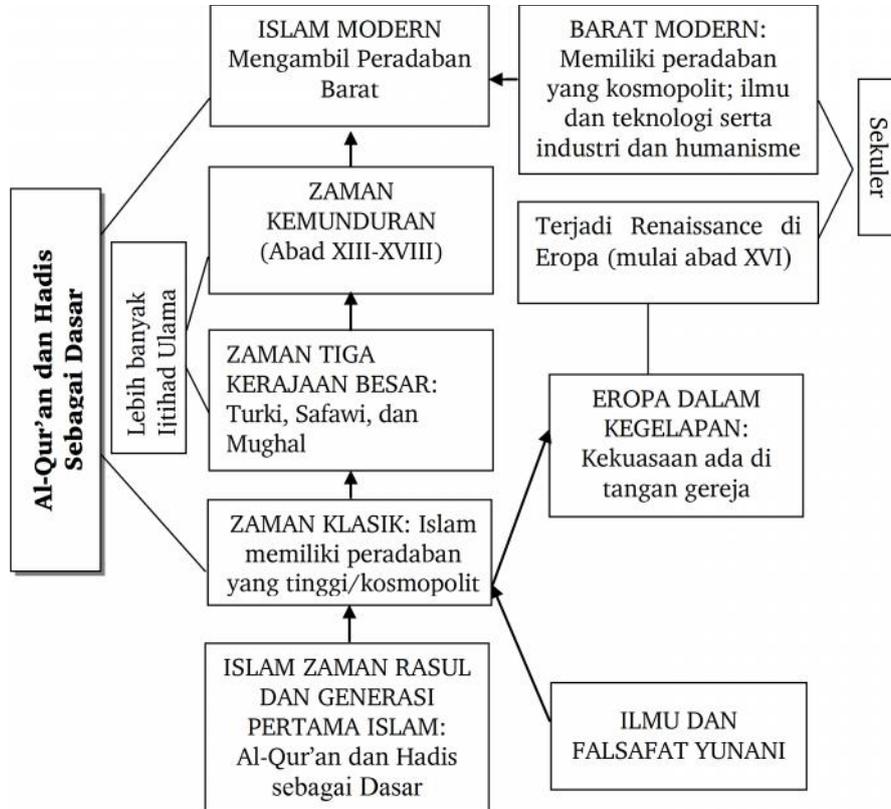
Mahasiswa-mahasiswa Barat yang cemerlang melukiskan filsafat Yunani dari bahasa Arab dan lewat buku-bukunya. Mereka tekun mempelajarinya meskipun pada awalnya mereka selalu diburu oleh gereja.²⁵

Begitulah, di samping ilmu-ilmu keislaman itu berkembang di kawasan yang berbahasa Arab, Persi, dan dunia Melayu juga berkembang secara pesat di kawasan yang berbahasa Inggris. Untuk itulah umat Islam banyak yang belajar ke dunia Barat. Untuk yang disebut terakhir sebetulnya umat Islam tidak perlu merasa malu apalagi merasa berdosa sebab perkembangannya dalam bahasa Inggris adalah hasil berbagai dialog dan persentuhan dengan dunia Islam,²⁶ jika bukannya hasil pengajaran Islam. Pengalaman Islam dan Barat dalam hal alih peradaban dan ilmu pengetahuan dapat dilihat dalam diagram berikut: ²⁷

²⁵ Lihat Mustafa al-Siba'iy, *Min Rawai'i Hadharatina* (Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1997), h. 5.

²⁶ Persentuhan dan dialog Islam dengan Barat diuraikan secara luas dalam Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

²⁷ *Ibid.*, h. 77.



Hubungan antara bidang ilmu seperti terlihat dalam kategori mutakhir juga sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena hubungan antara ilmu-ilmu sumber, ilmu-ilmu rasional, humaniora, dan ilmu alat sangat erat dalam rangka menunjukkan kebenaran Islam sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan.

E. Antara Pembaharuan dan Pemurnian

Selain upaya pembaharuan, dikalangan umat Islam juga muncul sejumlah upaya pemurnian ajaran Islam, sebab salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam itu adalah terjadinya bid'ah dan khurafat. Akan tetapi pembaharuan tidak sama dengan pemurnian. Pemurnian dalam bahasa Inggris dikenal dengan *purification* dan dalam bahasa Arab disebut *tanqih*. Kata pemurnian dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata murni. Kata ini dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti: (1) tidak bercampur dengan unsur lain; (2) belum mendapat pengaruh luar; (3) tulus, suci, sejati; (4) belum

terpengaruh oleh dunia luar, asli; (5) belum ternoda, dalam keadaan yang masih suci (perawan); dan kata pemurnian berarti proses, tindakan memurnikan”.²⁸

Pemurnian dalam Islam berarti memurnikan ajaran Islam dari hal-hal yang menodainya, yakni pencampuradukan hal-hal yang berasal dari Allah swt., dan Rasul-Nya dengan tradisi atau budaya manusia, terutama yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah. Jadi pemurnian adalah suatu usaha untuk mengembalikan praktik aqidah dan ibadah yang menyimpang kemudian dirujuk kepada sumber ajarannya yakni Al-Qur’an dan Sunnah. Salah seorang pemurni sejati di dunia Islam adalah Muhammad bin Abdul Wahhab (1115-1201/1703-1787).

Latar belakang lahirnya ide-ide pemurnian atau purifikasi Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pengamatannya terhadap pengamalan umat Islam berkenaan dengan aqidah dan ibadah yang telah banyak menyimpang atau tidak murni lagi. Ia secara keras menolak seluruh jenis ajaran *esoteris* (bathiniyyah) atau ajaran mistisisme dan menolak gagasan tentang orang suci (wali), termasuk juga praktik mengunjungi makamnya atau kunjungan terhadap makam siapapun, kecuali kunjungan penghormatan kepada makam Nabi Muhammad saw., yang telah menjadi kebutuhan dan kebiasaan universal.²⁹

Perhatian Muhammad bin Abdul Wahab terpusat pada prinsip tauhid (ketetapan akan keesaan Allah swt). Untuk itulah ia berpandangan bahwa hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai tauhid yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan, sehingga berdasarkan pengamatan yang dilihatnya maka ia membuat inventaris persoalan-persoalan bid’ah dan khurafat dalam Islam yang disebutnya sebagai ‘prilaku jahiliyah’ yang menyimpang dari Al-Qur’an dan Hadis Rasul saw. Persoalan tersebut menurutnya hingga mencapai 129 perkara.³⁰

Berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran murni Islam pada masa Muhammad bin Abdul Wahhab, L. Stoddard dalam bukunya *The New World of Islam* mengemukakan:

Ketauhidan yang diajarkan oleh Muhammad saw., telah diselubungi khurafat dan paham kesufian. Masjid-masjid ditinggalkan oleh golongan besar yang awam. Mereka menghias diri dengan azimat, penangkal penyakit dan tasbih. Mereka belajar pada fakir dan darwisi dan menziarahi kuburan “orang-orang keramat”, mereka memuja orang itu sebagai orang yang

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 601.

²⁹ Muhammad Ibn Abdul Wahhab, *Majmu’at al-Tauhid* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, t.t.).

³⁰ *Ibid.*, h. 236-244.

suci, dan perantara dengan Allah swt., karena menganggap dia begitu jauh selaku manusia biasa untuk mengabdikan langsung. Orang sudah awam akan akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'an atau tidak menghiraukannya, namun arak dan menghisap candu menjadi umum. Pelacuran menjalar, akhlak merosot dan rusaklah kehormatan diri, semua berlangsung tanpa ada rasa takut dan malu.³¹

Persoalan keyakinan atau tauhid merupakan ajaran yang paling mendasar dalam Islam. Maka tidak mengherankan bila Muhammad bin Abdul Wahhab memusatkan perhatiannya kepada persoalan tersebut. Di antara pandangannya yang berkenaan dengan tauhid adalah:

1. Yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah, dan orang yang menyembah selain Allah telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh.
2. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi dari Allah, tetapi dari syekh atau wali dan dari kekuatan gaib. Orang Islam yang demikian telah menjadi musyrik.
3. Menyebut nama Nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam do'a juga merupakan syirik.
4. Meminta syafaat selain kepada Allah adalah juga syirik.
5. Bernazar kepada selain dari Allah juga syirik.
6. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Qur'an, Hadis Rasul saw., dan *qiyas* (analogi) merupakan kekufuran.
7. Tidak percaya kepada qada dan kadar Allah juga merupakan kekufuran.
8. Demikian pula penafsiran Al-Qur'an dengan *ta'wil* (interpretasi bebas) adalah kufur.³²

Berdasarkan pendapat di atas ia berpandangan bahwa semua perilaku yang disebut dianggap merupakan perbuatan bid'ah, dan bid'ah merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Untuk itulah dalam rangka melepaskan umat Islam dari kesesatan tersebut ia berpendapat bahwa umat Islam harus kembali kepada Islam asli atau Islam yang murni. Adapun Islam yang murni atau asli menurut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Islam sebagai yang dianut dan dipraktikkan di zaman Rasul saw., para sahabat serta tabi'in.³³

³¹ L. Stoddard, *Dunia Baru Islam* (Jakarta: 1996), h. 29.

³² Ibn Abdul Wahhab, *Majmu'at al-Tauhid*.

³³ *Ibid.*, h. 25.

F. Nilai-nilai Fundamental Modernitas

Terdapat sejumlah formulasi mengenai nilai-nilai fundamental modernitas. Salah satu di antaranya dirumuskan oleh Alex Inkeles sebagai berikut:

Kecenderungan menerima gagasan baru, kesediaan buat menyatakan pendapat, kepekaan pada waktu dan lebih mementingkan waktu kini dan mendatang ketimbang waktu yang telah lampau, rasa ketepatan waktu yang lebih baik, keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi, kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bisa dihitung, menghargai kekuatan ilmu teknologi, dan keyakinan pada keadilan yang bisa diratakan.³⁴

Talcott Parsons dengan teori *Pattern Variables* mengemukakan paling tidak ada tiga lagi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melengkapi pendapat Inkeles di atas, yaitu sikap meninggalkan kesenangan jangka pendek untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, meninggalkan sikap partikularisme menuju sikap universalisme. Jadi sangat menjunjung tinggi bakat dan kemampuan dan memberikan penghargaan atas dasar prestasi (*achievement*), bukan prestise.³⁵

Dengan demikian nilai-nilai fundamental modernitas itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menempatkan akal pada posisi yang terhormat.
2. Memiliki tanggung jawab pribadi dan sikap jujur.
3. Menunda kesenangan sesaat demi kesenangan yang abadi.
4. Komitmen pada pemanfaatan waktu dan etos kerja.
5. Keyakinan bahwa keadilan dapat diratakan.
6. Penghargaan yang tinggi pada ilmu pengetahuan.
7. Memiliki visi dan perencanaan yang tepat tentang masa depannya.
8. Sangat menjunjung tinggi bakat dan kemampuan.
9. Keniscayaan penegakan moral.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan sebagian umat beragama terdapat resistensi yang tinggi terhadap modernitas. Hal ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal. *Pertama*, adanya sisa limpahan (*carry over*) dari modernitas tersebut berupa sikap westernis, sekularis, dan kecenderungan liberalis, yang didemonstrasikan sebagian ahli dan pemerhati masalah-masalah keagamaan, yang kemudian dipandang sebagai modifikasi terhadap agama. Sementara agama

³⁴ Myron Weiner, *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980), h. xii.

³⁵ Guy Wocher, *Talcott Parsons and American Sociology* (New York: 1975), h. 38-39.

dianggap telah final dan tidak dapat dimodifikasi. *Ketiga*, adanya kecenderungan sebagian pemikir muslim yang dianggap ‘meringan-ringankan’ agama.

Maka persoalan lebih lanjut adalah, dapatkah seorang muslim menjadi manusia modern sekaligus menjadi manusia yang berpegang teguh pada agama?

Kalau modernitas dilihat dari sudut nilai-nilai fundamental yang ditawarkannya maka sesungguhnya seorang manusia modern dapat sekaligus menjadi manusia yang agamis.

Meskipun agak klise, dapat dikatakan bahwa manusia beriman akan dapat menjadi umat terbaik di zaman modern, karena mereka akan mengembangkan potensi kemanusiaannya ke arah tegaknya nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi modernitas.

Kemodernan dapat dijadikan sebagai bagian dari cakupan dan aktualisasi ajaran Islam karena Allah adalah yang mengawali dan mengakhiri (*huwa al-awalu wa al-akhir*). Bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah mengisyaratkan kecintaannya kepada orang yang menjadi bagian dari modernitas:

Allah menyayangi orang yang memelihara lidahnya, dan mengenal perkembangan zamannya, dan ia tetap dalam jalan hidupnya. (H.R. Ad-Dailami).

Dalam hal ini amat menarik pendapat Mahathir Muhammad:

Suatu bangsa akan maju bila bangsa tersebut bersifat progresif. Bangsa atau negara yang konservatif yang tidak suka perubahan tidak mungkin maju menjadi progresif. Ketika yang konservatif ingin kekal dengan cara lama, maka masyarakat yang progresif akan mengejar sesuatu yang baru dan canggih.³⁶

Nilai-nilai fundamental modernitas bukanlah sesuatu yang terdapat dan lahir diluar Islam. Sebab di samping setiap perubahan merupakan maha karya Allah maka nilai-nilai fundamental modernitas adalah sesuatu yang inhern dalam diri umat Islam.

1. Menempatkan Akal Pada Posisi yang Terhormat

Salah satu nilai fundamental modernitas adalah sikap rasional, menempatkan akal (rasio) pada posisi terhormat. Penempatan akal atau rasio tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kekuatan rasio telah menyebabkan manusia dapat melakukan perubahan, percepatan, dan bahkan lompatan dalam transformasi kehidupan.

³⁶ Pidato Ilmiah Penerimaan Doktor Honoris Causa dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tanggal 3 Mei 2007.

Akal telah menyebabkan manusia dapat merumuskan formula dan aksioma untuk melakukan percobaan dan penerapannya hingga melahirkan teknologi yang telah merubah taraf hidup manusia kepada keadaan yang lebih baik dan ber peradaban.

Peradaban umat manusia tersembul di Yunani karena dorongan penggunaan akal. Peradaban klasik kemudian mengalami perkembangannya yang luar biasa di dunia Islam adalah juga berkat dorongan penggunaan akal (rasionalitas). Pada masa selanjutnya peradaban modern tersembul di Barat adalah juga atas dorongan akal. Oleh karenanya salah satu nilai fundamental modernitas adalah penggunaan akal (rasionalitas) yang maksimal.

Jika dunia Islam ingin menjadi tempat tersembulnya peradaban masa depan, maka komunitas muslim haruslah menempatkan akal pada posisi terhormat dalam beragama.

Penempatan akal pada posisi terhormat tersebut sebetulnya merupakan ajaran Islam karena kitab suci Al-Qur'an menyerukan penggunaan akal, seperti terdapat pada kalimat '*afala tatafakkarun*' (apakah kamu tidak menggunakan daya pikirmu), '*afala ta`qilun*' (apakah kamu tidak memfungsikan akalmu?), dan lain-lain.

Sebagai aplikasi dari petunjuk itu maka para ulama mempersyaratkan kemampuan menggunakan akal pada setiap beban dan kewajiban (taklif) seorang manusia. Dengan demikian Islam adalah agama akal dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan akal (*al-din huwa al-'aqlu la dina liman la'aqla lahu*).

Akan tetapi penggunaan akal secara terhormat sebagai salah satu nilai fundamental modernitas tidak berarti mengecilkkan posisi wahyu. Sebab wahyu adalah petunjuk Tuhan yang menempatkan akal pada posisi yang tinggi dan akal adalah salah satu ayat Tuhan pada diri manusia yang dapat digunakan untuk memahami wahyu dan mengolah alam yang diciptakan Allah untuk dipimpin umat ke tujuan yang lebih baik sebagai tugas *isti'mar*.

2. Memiliki Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Jujur

Jika salah satu nilai fundamental modernitas itu adalah memiliki tanggung jawab pribadi yang besar, maka Al-Qur'an sejak awal telah mengajarkan secara mengesankan tanggung jawab pribadi itu. Hal ini dengan mudah dapat dipahami dari firman Allah:

Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah Kitab yang dijumpainya terbuka: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Barang

siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. (QS. al-Isra'/ 17: 13-15).

Tanggung jawab pribadi sangat erat kaitannya dengan kejujuran dan usaha paling bermakna ke arah itu adalah kesediaan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani. Sungguh, kata *wa yanhauna 'an al-munkar* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran/ 3 ayat 110 lebih tepat diartikan sebagai mencegah dari perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani. Atau lebih dalam lagi sesuatu yang telah tertulis pada kitab (*kitabak*) yang telah tertulis di dalam dada manusia.

Dalam terminologi kefilosofatan terdapat dua visi mengenai perbuatan baik. *Pertama* visi objektif, yang berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Suatu tindakan disebut baik bukan karena seseorang senang melakukannya atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata-mata pertimbangan rasionalitas universal yang mendesaknya untuk berbuat baik.³⁷ *Kedua*, visi subjektif, yakni bahwa perbuatan baik itu didorong oleh motif-motif subjektif, bisa karena orang lain, tujuan atau maksud tertentu.

Islam, khususnya dalam rangka tanggung jawab pribadi dan kejujuran ini kelihatannya mengajak manusia ke arah pemenuhan kata hati nurani, jadi bersifat objektif. Oleh karena itulah dalam Islam ditemukan prinsip bahwa suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hati nurani dapat pula dipertanggung jawabkan di hadapan manusia, dan di hadapan Tuhan.

3. Menunda Kesenangan Sesaat demi Kesenangan Abadi

Salah satu nilai fundamental modernitas itu adalah meninggalkan sikap bertindak karena kehendak untuk mendapatkan kesenangan segera ke sikap bertindak dengan kesediaan menunda kesenangan jangka pendek demi tujuan jangka panjang yang sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari industrialisasi. Jadi disini terbentuk modal yang diperlukan karena kesediaan menabung dan investasi.

Islam dengan kuat sekali menekankan sikap menunda kesenangan jangka

³⁷ George F. Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press), h. 25

pendek demi kesenangan jangka panjang. Banyak kutipan ayat-ayat suci yang dapat dikedepankan dalam hal ini, misalnya:

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. (QS. Ali Imran/3: 142).³⁸

Sedemikian pentingnya penundaan kesenangan sementara demi kesenangan yang abadi itu hingga Allah menjelaskan secara eksplisit kesenangan keabadian itu dalam firman-Nya:

Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa saja yang mereka kerjakan. (QS. al-Sajdah/32: 17).

4. Komitmen pada Pemanfaatan Waktu dan Etos Kerja

Salah satu dari ciri manusia modern adalah penghargaan terhadap waktu dan etos kerja yang tinggi. Kalau dibuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, ternyata kitab suci ini memandang sikap-sikap tersebut sebagai sikap orang beriman yang cemerlang.

Al-Qur'an menempatkan usaha pemanfaatan waktu pada posisi yang amat penting sehubungan dengan pembangunan sebuah peradaban, bahkan mensinyalir kerugian yang amat besar bagi mereka yang menyalahgunakan waktu tersebut. Firman Allah:

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran. (QS. al-Ashar/103: 1-3)

Patut dimengerti pula bahwa waktu (*al-ashar*) yang disebut dalam ayat pertama di atas, pada ayat berikutnya dihubungkan dengan kerugian. Jadi berkonotasi dagang. Artinya penggunaan waktu itu harus produktif, seperti yang ada ungkapan Barat terkenal dengan *time is money* dan pada ungkapan Arab dikenal dengan *الوقت كالسيف* (waktu itu seperti pedang). Dengan demikian, penggunaan waktunya untuk hal-hal yang produktif adalah salah satu ciri muslim ideal.³⁹

³⁸ Jihad bisa berarti (1) berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam, (2) memerangi hawa nafsu, (3) mendermakan harta benda untuk kebaikan orang Islam, (4) memberantas yang batil dan menegakkan yang benar. Lihat Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran*, komentar 232.

³⁹ Rasulullah dalam salah satu sabdanya menyebutkan: *Salah satu ciri dari orang*

Selain penggunaan waktu secara cermat nilai fundamental modernitas itu adalah memiliki etos kerja yang tinggi. Secara harfiah perkataan ‘etos’ berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak atau karakter. Dengan demikian etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan dan seterusnya, yang bersifat khusus tentang seorang individu atau kelompok, termasuk suatu bangsa.⁴⁰

Dalam Islam terdapat suatu nuktah yang amat fundamental menyangkut etos kerja itu, yaitu bahwa kerja, amal atau *praxis* adalah bentuk keberadaan (*mode of existence*) manusia. Artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan. Dalam hal ini amat menarik apa yang ditulis oleh Nurcholish Madjid.

Jika filsuf Perancis Rene Descartes terkenal dengan ucapannya ‘Aku berpikir maka ada’ (*Cogito ergo sum*), karena berpikir baginya adalah bentuk wujud manusia, maka sesungguhnya dalam ajaran Islam ungkapan itu seharusnya berbunyi “Aku berbuat maka aku ada”.⁴¹

Al-Qur’an memandang etos kerja itu sebagai suatu yang sangat sentral dalam kaitannya dengan keberadaan manusia, sebagaimana terlihat dalam rangkaian ayat-ayat berikut:

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah tujuan penghabisan. (QS. al-Najm/53: 36-42).

Apabila engkau bebas (berwaktu luang) maka bekerja keraslah. Dan kepada Tuhanmu berusaha mendekat. (QS. al-Insyiriyah/94: 7-8).

Bahkan jaminan rezeki yang diberikan Tuhan bagi setiap makhluk seperti yang tertera dalam QS. Hud/11: 6 hanya diberikan kepada mereka yang aktif dalam pekerjaannya. Hal itu dapat dipahami dari kata *dabbah*, yang berarti

muslim yang baik adalah ia selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lihat Muhammad al-Zarqani, Syarh al-Zarqani al-Muwaththa’ al-Imam Malik, Juz IV, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), h. 252-253.

⁴⁰ Webster’s New World Dictionary of the American Language, (1980), entri ‘ethos’, ‘ethical’ dan ‘ethics’.

⁴¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1993), h. 418.

bergerak dan yang giat, sebab konsep Islam untuk mengatasi keterbelakangan adalah dengan bekerja kerjas. Dalam sebuah hadis yang otentik (*shahih*) Rasulullah pernah menuturkan:

Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah, meskipun pada kedua-duanya ada kebaikan. Perhatikanlah hal-hal yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika sesuatu musibah menimpamu, maka janganlah berkata: 'Andaikan aku lakukan sesuatu maka hasilnya akan begitu dan begitu'. Sebaliknya berkatalah: 'Ketentuan Allah dan apapun yang dikehendaknya tentu dilaksanakannya'. Sebab sesungguhnya perkataan 'andaikan' itu membuka perbuatan setan.⁴²

Berangkat dari kenyataan adanya perintah agama agar manusia bekerja secara aktif dalam hidupnya, Robert N. Bellah dengan menggunakan istilah sosiologi modern menggambarkan bahwa etos yang dominan dalam Islam ialah menggarap kehidupan dunia ini secara giat dengan mengerahkannya kepada yang lebih baik (*ishlah*). Lebih lanjut ia mengatakan:

Etos yang dominan pada komunitas (umat) ini ialah (giat) di dunia, aktivis, bersifat sosial dan politik. Dalam hal ini lebih dekat kepada Israel kuno (zaman para Nabi sejak Musa dan seterusnya) daripada kepada agama Kristen mula-mula (sebelum munculnya reformasi di zaman modern) dan juga secara relatif dapat menerima etos yang dominan abad ke-20.⁴³

5. Keyakinan Bahwa Keadilan Dapat Diratakan

Salah satu nilai fundamental modernitas itu adalah keyakinannya yang demikian kuat bahwa keadilan adalah sesuatu yang dapat diratakan. Memang, penyalahgunaan terburuk dari sebuah kekuasaan adalah berupa ketidakadilan, tindakan sewenang-wenang, perampasan hak dan kebebasan, ketidakjujuran, yang menyebabkan mandegnya sebuah perkembangan masyarakat.

Meskipun penegakan keadilan ini merupakan salah satu nilai fundamental modernitas, namun dalam tataran pelaksanaannya di dunia modern seringkali sangat memprihatinkan. Di sinilah sebenarnya pentingnya suatu pandangan yang lebih mengakar pada nilai-nilai ketuhanan.

Sejalan dengan keinginan melihat konsep keadilan dan pengakuannya yang lebih berorientasi keilahian, maka berikut ini akan dijelaskan bagaimana

⁴² Lihat *Shahih Muslim bin Syarh al-Nawawi* (Beirut: Dar al-Turas al-'Arabi, 1984), Jilid V, h. 215.

⁴³ Robert N. Bellah, *Beyond Belief* (New York: Harper & Row Publisher, 1976), h. 422.

Al-Qur'an menganjurkan ditegakkannya keadilan oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu pentingnya keadilan hingga Al-Qur'an menyebut kata itu sebanyak 28 kali sesuai dengan konteksnya,⁴⁴ dan prinsip keadilan itu telah menjadi tema pokok dari usaha perbaikan (*ishlah*) masyarakat oleh para Nabi sepanjang sejarah.⁴⁵

Bila diamati penggunaan kata keadilan, adil (*al-'adl*) dalam Al-Qur'an, maka kata itu mempunyai pengertian yang sangat luas. Adil biasanya berarti perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Bisa juga berarti persamaan (*musawah, egalite*) dan tiadanya sikap diskriminasi dalam bentuk apapun. Bisa juga berarti pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak.⁴⁶

Rasa keadilan dalam Al-Qur'an terkait erat dengan *ihsan* yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia secara murni dan setulus-tulusnya karena manusia itu bertindak di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi bagi-Nya, yang dihadapan-Nya adalah segala kenyataan, perbuatan dan detak hati nurani tidak akan pernah dapat dirahasiakan. Firman Allah:

Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan (al-'adl) dan kebaikan (ihsan) serta memperhatikan para kerabat, dan Dia melarang dari segala yang keji (al-fakhsya') serta yang bertentangan dengan hati nurani (al-munkar). Juga dari kedengkian (al-baghy). Dia memberi pengajaran kepadamu, kiranya kamu akan ingat selalu. (QS. al-Nahl/16: 90).

Keadilan juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsep *amanah* (titipan suci dari Tuhan) kepada umat manusia untuk sesamanya, khususnya amanat berkenaan dengan kekuasaan pemerintah.⁴⁷ Firman Allah:

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada mereka (orang banyak, rakyat) yang berhak, dan bila kamu menjalankan pemerintahan atas manusia, maka jalankanlah dengan keadilan. Sesungguhnya alangkah baiknya apa yang diajarkan Allah kepadamu itu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisa'/4: 58).

⁴⁴ Lihat QS. al-Baqarah/2: 48, 123, 282; al-Nisa'/4: 3, 58, 129, 135; al-Maidah/5: 8, 95, 106; al-An'am/6: 1, 70, 115, 150, 152; al-A'raf/7: 159, 181; al-Nahl/16: 76, 90; al-Naml/27: 60; al-Syu'ara/40: 15; al-Hujurat/49: 9; al-Thalaq/65: 2; al-Infithar/82: 7.

⁴⁵ Selain perkataan *al-'adl* untuk makna keadilan, Al-Qur'an juga menggunakan kata *wasath* (pertengahan).

⁴⁶ Murtadha Muthahhari, *Al-Adl al-Ilahi*, terj. Muhammad Abd al-Mun'im al-Khaqani (Qum, Iran: Mataba'ah al-Khayyan, 1981), h. 70-71.

⁴⁷ Madjid, *Doktrin*, h. 116.

Kekuasaan pemerintah adalah sesuatu kemestian jika manusia ingin memperjuangkan ketertiban dalam kehidupannya. Sementara sendi setiap bentuk kekuasaan adalah kepatuhan dari orang banyak kepada para penguasa (*ulu al-amr*). Kekuasaan dan ketaatan adalah dua segi dari satu kenyataan. Namun kekuasaan yang patut dan harus ditaati hanyalah yang berasal dari orang banyak dan mencerminkan rasa keadilan karena menjalankan amanat Tuhan.⁴⁸

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (Bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. (QS. al-Syura/42: 38-43).

6. Penghargaan yang Tinggi pada Ilmu Pengetahuan

Salah satu nilai fundamental modernitas adalah penghargaan yang tinggi pada ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu itu hingga Allah memerintahkan Nabi-Nya berdo'a agar memperoleh lebih banyak ilmu pengetahuan.

... dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. (QS. Thaha/20: 114).

Mungkin pengetahuan bisa diperoleh dari sumber-sumber horizontal semisal guru, buku, informasi dari internet, dari alam dan lain-lain. Akan tetapi ilmu sumbernya dari Allah, sehingga perolehannya sangat terkait dengan restu dan perkenan Tuhan.

Pada ayat lain Allah berfirman:

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang yang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Fathir/35: 28).

⁴⁸ *Ibid.*

Demikianlah bahwa salah satu keutamaan terbesar agama Islam adalah bahwa agama ini membuka pintu seluas-luasnya bagi kaum muslimin untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ia mendorong penganutnya untuk mendalaminya, meraih kemajuannya, menerima perkembangan baru ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ia juga selalu memperbaharui cara-cara untuk memperoleh penemuan-penemuan baru dan sarana-prasarana.⁴⁹

Karena kedudukan ilmu yang sangat strategis dalam perkembangan peradaban manusia, maka Allah menempatkan mereka yang mempunyai dan menguasai ilmu itu pada posisi yang lebih tinggi.

Katakanlah (hai Muhammad) adakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (QS. al-Mujadalah/58: 11).

Sejalan dengan kedudukan umat Islam sebagai *khaira ummah*, maka Rasulullah menyuruh umat Islam agar iri hati (*hasad*) dalam arti berambisi untuk memperolehnya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, sebagaimana sabdanya:

Tidak boleh iri hati kecuali terhadap dua orang yang diberi Allah harta dan ia tertarik mempergunakan harta itu menurut yang semestinya, dan orang yang diberi Allah pengetahuannya dan dia memanfaatkan dan mengajarkannya. (H.R. Bukhari).⁵⁰

Begitu sentralnya kedudukan ilmu dalam pembangunan sebuah peradaban maka setiap umat yang hendak membangun sebuah peradaban harus mengusahakan secara maksimal alih ilmu pengetahuan dari bangsa yang sedang menguasainya meskipun dari bangsa yang bukan muslim. Demikian pula pencarian ilmu itu tidak hanya terbatas pada ilmu hukum Islam saja tetapi juga termasuk ilmu-ilmu sekuler yang bermanfaat, sebab kedua ilmu itu sama cepatnya mengantar manusia ke kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

7. Memiliki Visi dan Perencanaan yang Tepat Mengenai Masa Depan

Nilai fundamental lain modernitas adalah adanya perencanaan yang tepat mengenai masa depan. Masa depan menurut perspektif modern adalah sesuatu yang dapat diprediksi, diperhitungkan, dan dipersiapkan antisipasi

⁴⁹ Lihat Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Al-Insan fi Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Islam, 1973), h. 16.

⁵⁰ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar al-Muthbi' al-Sa'ab), Juz I, h. 28.

untuk memasukinya. Antisipasi yang tepat mengenai masa depan akan membuat suatu komunitas tetap survive dan bahkan dapat mengantisipasi dan memimpinya.

Al-Qur'an menyampaikan sejumlah ajakan kepada manusia untuk dapat mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Di antaranya:

Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk menyongsong masa depan. Bertaqwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Ra'd/13: 11).

Begitu pentingnya persiapan masa depan itu hingga di dalam Islam terdapat prinsip 'jika keadaanmu hari ini lebih baik dari hari kemarin maka kamu adalah orang yang beruntung, jika keadaanmu hari ini sama dengan kemarin maka kamu adalah orang yang merugi, jika keadaanmu hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka kamu adalah orang yang celaka'.

Pada saat yang sama karena pentingnya persoalan masa depan itu maka hampir semua ibadah dalam Islam memiliki pesan masa depan. Shalat dengan menghadap ke depan berarti menyimbolkan masa depan. Kata-kata tunjukilah kami ke jalan yang lurus, *اهدنا الصراط المستقيم* mengisyaratkan masa depan. Ibadah puasa juga berorientasi masa depan karena adanya harapan agar seseorang menjadi manusia yang *muttaqi* mengindikasikan masa depan. Demikian juga adanya dua kegembiraan masa depan yang akan diperoleh seorang yang berpuasa; saat berbuka dan saat menghadap Tuhannya, juga berorientasi masa depan.

Dalam semangat yang kurang lebih sama dalam ibadah haji juga terdapat orientasi masa depan, sebab capaian puncak (*ultimate goal*) dari ibadah ini adalah kemabruran, yaitu kapasitas yang semakin bermanfaat di masa depan.

8. Menjunjung Tinggi Bakat dan Kemampuan

Modernitas sangat menghargai bakat dan kemampuan karena keberhasilan suatu rencana atau pekerjaan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang menangani dan melaksanakannya. Oleh karenanya penghargaan terhadap seseorang diberikan berdasarkan prestasinya bukan atas prestise atau pertimbangan-pertimbangan di luarnya. Jalan pikiran modern ini, dengan demikian sangat menghargai profesionalisme dan mendevaluasi praktik kolusi dan nepotisme.

Nilai fundamental modernitas tersebut relevan atau bahkan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai ajaran Islam karena Islam sangat menekankan profesionalisme.

9. Keniscayaan Penegakan Moral

Salah satu efek samping dari modernitas adalah terjadinya kehidupan yang sekularistik. Sekularisasi kehidupan yang tidak ditundukkan ke langit akan menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap nilai spritual dan dengan demikian pengabaian moral.

Akan tetapi modernitas menawarkan rasionalitas, sementara rasionalitas akan dapat menemukan akal pada posisi yang tinggi. Akal yang mendapat posisi yang tinggi dalam rasionalitas dan modernitas adalah akal yang bebas dari gangguan hawa nafsu, faktor millieu, dan faktor subjektifitas lainnya. Itulah akal *mustafad* (*al-'aql al-mustafad*), akal yang sangat dekat dengan Tuhan hingga dapat mengetahui keharusan berbuat baik dan mencegah dari yang munkar (*amar ma'ruf nahi munkar*).

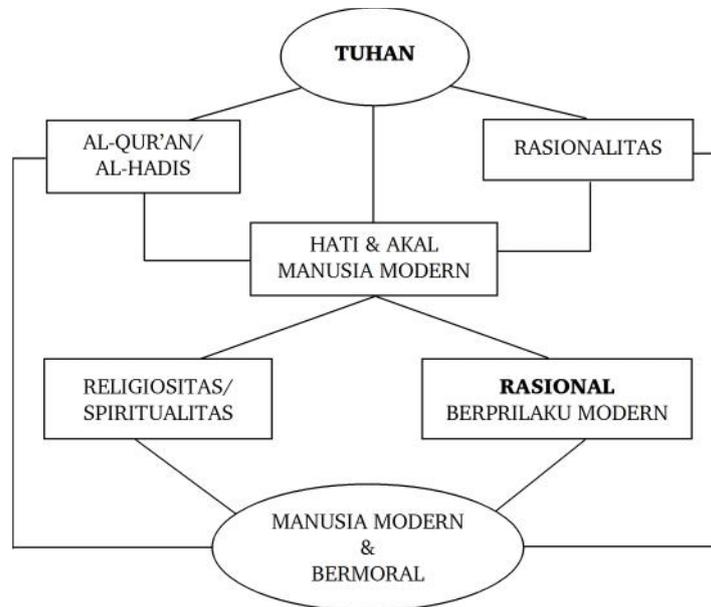
Kesadaran akan keniscayaan penegakan moral dalam kehidupan modern tergambar dalam pengakuan para ilmuwan dunia yang dicap atheis dan sekularistik ternyata mereka mempercayai adanya Tuhan dan kekuasaannya.

Einstein misalnya menyebutkan bahwa Tuhan merupakan kecerdasan tertinggi yang menampakkan dirinya dalam harmoni dan keindahan alam.⁵¹ Lebih jauh Einstein menyebutkan bahwa *religion whithout science is blind, science whithout religion is lame*. Agustinus meyakini bahwa alam adalah *Vestigio Dei*—bekas kaki Allah.

Dari kesadaran dua tokoh ilmuwan modern itu terlihat bahwa sedianya penegakan moral adalah merupakan keniscayaan di zaman modern. Dengan demikian maka salah satu nilai fundamental modernitas adalah keniscayaan penegakan moral. Jika jalan pikiran ini dapat diterima maka dekadensi moral, apapun bentuknya, adalah sesuatu yang merupakan cacat-cacat modernitas dan merupakan sikap tidak modern.

Keniscayaan penegakan moral tersebut adalah salah satu pesan universal Islam karena penegakan moral merupakan misi utama diutusny para Rasul. Nabi Muhammad saw., sendiri menegaskan tugas penting ini sebagai tugas utama risalah beliau. Keniscayaan penegakan moral sebagai salah satu tugas manusia modern dapat dilihat pada diagram berikut:

⁵¹ Kesadaran akan ketuhanan ini muncul atas keterpengaruhannya pada karya Spinoza yang berjudul *Atheis*.



G. Ke Arah Konkretisasi Ilmu

Dalam upaya menjadikan Universitas Islam sebagai pusat pembaharuan, maka kesan eksklusifisme dan normativitas ilmu selama ini perlu harus diakhiri. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sendiri selanjutnya mengarahkan setiap pengembangan ilmu, tidak hanya bersifat teoretis tetapi sampai pada konkretisasi ilmu tersebut dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga halnya dengan ilmu pemikiran Islam termasuk Perkembangan Modern dalam Islam.

Dalam hal ini pengkajian Islam di Universitas Islam tidak lagi berkuat pada kajian ilmu-ilmu Islam dalam arti tradisional seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, sejarah pemikiran Islam, sejarah dakwah Islam, dan lain-lain, meskipun itu penting, tetapi yang perlu dikerjakan adalah mengkaji dan melatih peserta didik bagaimana penerapan Islam itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, dan berperilaku secara personal. Semacam *Dirasah Tathbiqiyah* atau *al-Fikr al-Waqi' al-Mu'ashirah* ('Penerapan atau konkretisasi ajaran Islam dalam kehidupan kontemporer').

Sejalan dengan pendekatan tersebut maka penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian-penelitian lainnya perlu diorientasikan pada *Dirasah Tathbiqiyah*, studi penerapan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat kontemporer agar umat Islam menjadi manusia modern yang tidak tercerabut dari akar keimanannya.

Memang salah satu persoalan yang sering mengemuka ketika IAIN ditransformasikan menjadi Universitas Islam adalah kekhawatiran sebagian

orang akan hilangnya ciri keislaman di Universitas ini kelak karena akan didominasi oleh fakultas-fakultas dan departemen umum.

Dalam hal ini amat menarik analisis Prof. Johan Hendrik Meuleman, salah seorang Profesor pada Universitas Islam Eropa di Rotterdam ketika ia mengatakan:

“Saya tahu bahwa saat IAIN Sumatera Utara bertransformasi menjadi Universitas Islam anda akan berpikir keras untuk memposisikan Islam sebagai sesuatu yang lebih kuat di Universitas. Akan tetapi bagi kami di sini, demikian Meuleman, persoalan ini menjadi menantang karena yang kami lakukan adalah mengembangkan penggalan nilai-nilai universal yang terkandung Islam untuk memberi kontribusi bagi negara sekuler”.

Lebih jauh Meuleman menyebutkan:

“Tugas kami bukan untuk berapologi, membangga-banggakan kejayaan Islam masa lalu di zaman *al-khulafa' al-rasyidun*, dan kekuasaan Abbasiyah di Timur dan di Barat, tetapi berupaya menampilkan Islam yang dapat menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat muslim dan non muslim. Kami diilhami oleh beberapa contoh yang baik bukan saja untuk muslim tapi juga untuk non muslim. Kami juga harus menyediakan gagasan yang penting untuk kami dan untuk bangsa kami”. Demikian Meuleman.

Kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila dipahami, disosialisasikan, serta dikonkretkan bahwa semua ilmu yang dikembangkan di Universitas Islam adalah konkretisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Dengan demikian semuanya menjadi qur'ani

Persoalan konkretisasi ilmu-ilmu Islam tersebut bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara sejatinya bukan hal baru karena para *The Founding Fathers* (para pendiri) IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973 merancang IAIN sebagai perguruan tinggi yang mendalami ilmu agama yang dapat memberi kontribusi bagi kemajuan Sumatera Utara, baik muslim maupun non muslim, dan ternyata IAIN Sumatera Utara telah menjalankan misi itu selama empat dasawarsa.

Berangkat dari latar belakang sejarah itu maka Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara saat ini juga dirancang untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kemajuan Sumatera Utara baik muslim maupun non muslim dengan tantangan, pendekatan, dan metodologi yang berbeda, dan untuk itu UIN Sumatera Utara menerapkan pendekatan transdisipliner. Hal tersebut secara tak terelakkan memerlukan revolusi mental dan revolusi pemahaman dalam memandang Islam sebagai agama yang lebih kontributif bagi perkembangan masyarakat, kemanusiaan, dan peradaban.

H. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa modernitas adalah merupakan hasil perkembangan sejarah peradaban umat manusia dimana umat Islam memiliki kontribusi yang penting di dalamnya dan oleh karenanya umat Islam harus menjadi komunitas paling banyak mengambil manfaat dari kemodernan dunia. Dalam upaya untuk mendorong umat agar dapat mengambil manfaat terbesar dari kemodernan dunia itu IAIN Sumatera Utara ditransformasikan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pada saat yang sama karena kajian Islam dan modernitas paling *advance* yang dimiliki umat Islam terdapat di universitas Islam, maka lembaga ini sepatutnyalah menjadi pusat pembaharuan dalam Islam. *Wa Allahu A'lamu bi al-Shawab.*

UMMATAN WAHIDAH DALAM PRESPEKTIF DAKWAH

A. Ya' kub Matondang

Profesor Ilmu Tafsir
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Pembicaraan tentang *ummatan wahidah* (umat yang satu) biasanya selalu berkaitan dengan persatuan dan perpaduan, baik dalam konteks kehidupan beragama, berbangsa, bernegara ataupun dalam konteks kehidupan manusia secara global. Oleh karena beragamnya pendekatan dan sudut pandang yang digunakan, maka pemahaman terhadap *ummatun wahidah* juga mengalami keragaman. Dari sudut pandang agama, pada hakikatnya seluruh agama yang dibawa oleh para Nabi dan rasul memiliki esensi yang sama yaitu iman dan amal saleh. Sehingga dikalangan agamawan populer istilah *Din Allah Wahid* (agama Allah adalah satu), sesuai ayat Al-Qur'an: "*Sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam.*"¹ Sekalipun agama disisi adalah satu, namun tidak dipungkiri adanya beragam agama yang dianut oleh umat manusia, ini ditandai dengan keragaman syari'at dari masing-masing agama yang bersangkutan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, *ummatan wahidah* ditekankan pada keutuhan suatu bangsa yang berdaulat, sekalipun masyarakatnya terdiri atas beragam suku bangsa yang memiliki tradisi dan budaya masing-masing. Demikian juga dalam kehidupan global, sekalipun umat manusia yang mendiami bumi ini memiliki keberagaman bangsa, bahasa dan keturunan, namun mereka tetap dipandang sebagai umat yang satu, sesuai firman Allah: "*Manusia adalah umat yang satu.*"²

Secara spesifik, *ummatan wahidah* di dalam makalah ini akan ditinjau dari prespektif dakwah. Dimaksudkan bahwa dalam berbagai aktivitas dakwah

¹ QS. Ali 'Imran/3: 19.

² QS. Al-Baqarah/2: 213.

yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan institusi dakwah, masing-masing perlu memiliki kesadaran yang sama dalam memaknai dan menyahuti tuntutan *ummatan wahidah*. Dengan kata lain, sekalipun terdapat sejumlah organisasi dakwah dengan berbagai atribut dan program yang bervariasi, hendaknya masing-masing tetap memiliki landasan gerakan orientasi dakwah yang sama untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini tentunya diperlukan kerjasama, *silaturrahim*, saling menghargai serta sikap toleran dan persaudaraan di kalangan para da'i dan institusi yang bergerak di bidang dakwah.

B. *Ummatan Wahidah* Dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, gabungan dua kata *Ummatan Wahidah* (أمة واحدة) terdapat pada sembilan surah yaitu Yunus/10: 19, Hud/11: 118, an-Nahl/16: 93, al-Anbiya'/21: 92, al-Mukminun/23: 52, as-Syura/42: 8, az-Zukhruf/43: 33, al-Baqarah/2: 213, dan al-Maidah/5: 48. Tujuh yang pertama turun pada periode Makkah (ayat *Makkiyah*) dan dua yang terakhir turun pada periode Madinah (ayat *Madaniyah*). Turunnya ayat-ayat tersebut dalam dua periode yaitu periode Makkah dan periode Madinah, menunjukkan betapa pentingnya tuntunan wahyu yang berkaitan dengan *Ummatan Wahidah*.

Lengkapnya kesembilan surah yang memuat *Ummatan Wahidah* adalah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا^٣ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya: "Manusia adalah umat yang satu, kemudian mereka berselisih. Kalaulah bukan karena adanya ketetapan terlebih dahulu dari Tuhanmu, pastilah diberi keputusan terhadap mereka tentang apa yang mereka perselisihkan."³

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً^٤ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٩﴾ إِلَّا مَنْ

رَحِمَ رَبُّكَ^٤ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ^٤ ﴿١١٩﴾

Artinya: "Kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya Ia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali orang - orang yang mendapat rahmat dari Tuhanmu dan untuk itulah Ia menciptakan mereka."⁴

³ QS. Yunus/10: 19.

⁴ QS. Hud/11:118-119.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ^٥
وَلْتَسْئَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Kalau Allah menghendaki, niscaya Ia menjadikan kamu umat yang satu, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya, dan kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan.”⁵

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya ini adalah umatmu umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”⁶

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya ini adalah umatmu umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertaqwalah kepadaKu.”⁷

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا هُمْ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Kalau Allah menghendaki, niscaya Ia menjadikan mereka umat yang satu. Tetapi Ia memasukkan orang-orang yang dihendakiNya ke dalam rahmatNya, sedangkan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan tidak juga penolong.”⁸

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Kalaulah bukan untuk menghindari bahwa manusia adalah umat yang satu, niscaya Kami jadikan buat orang-orang yang ingkar terhadap Yang Maha Pengasih rumah-rumah mereka memiliki loteng-loteng perak dan juga tangga-tangga yang mereka naiki.”⁹

⁵ QS. An-Nahl/16: 93.

⁶ QS. Al-Anbiya/21: 92.

⁷ QS. Al-Mukminun/23: 52.

⁸ QS. As-Syura/42: 8.

⁹ QS. Az-Zukhruf/43: 33.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴿٢١٣﴾

Artinya: “Manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan....”¹⁰

..... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا

الْخَيْرَاتِ ﴿٤٨﴾

Artinya: “... Kalau Allah menghendaki, niscaya Ia menjadikan kamu umat yang satu, tetapi Ia hendak menguji kamu terhadap apa yang telah Ia berikan kepadamu, maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan....”¹¹

Ayat-ayat di atas menjelaskan dua aspek yang berbeda, disatu sisi memberi petunjuk bahwa manusia adalah umat yang satu, dan disisi lain menggambarkan ketidak mungkinan (*imtina' al-wuqu'*) terjadinya umat yang satu dalam kehidupan umat manusia. Ini bukan berarti adanya sesuatu yang paradoks di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi masing-masing ayat memiliki makna sesuai konteks masing-masing. Di dalam *-Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibnu 'Asyur¹² menjelaskan bahwa yang *dikhitab* di dalam ayat-ayat yang menunjukkan manusia sebagai umat yang satu adalah para Rasul yang diutus oleh Allah swt. dengan maksud agar para Rasul menyampaikan pesan Ilahi kepada masing-masing umatnya agar mereka mengetahui bahwa agama disisi Allah adalah satu. Berarti “*ummatan wahidah*” dalam konteks ini dimaksudkan adalah “agama yang satu” yaitu agama tauhid yang dibawa oleh para Rasul yang esensinya adalah iman dan amal saleh. Di samping itu, Sayyid Qutub di dalam *Fi Zilal al-Qur'an*¹³ menjelaskan bahwa manusia sebagai umat yang satu adalah ditinjau dari sudut asal keturunan yang satu yaitu keluarga adam dan hawa. Ditambahkannya bahwa sekalipun manusia berasal dari asal yang satu, namun tabiat manusia beragam dan keragaman itu sudah merupakan salah satu dari dasar penciptaan manusia.

Manusia memiliki keragaman keyakinan, pandangan, sikap dan tingkah laku. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang adil dan ada yang zalim, ada yang jujur dan ada yang khianat, ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat jahat dan sebagainya. Dalam konteks ini pulalah Al-Qur'an berbicara tentang ketidakmungkinan wujudnya *ummatun wahidah*,

¹⁰ QS. Al-Baqarah/2: 213.

¹¹ QS. Al-Maidah/5: 48.

¹² Muhammad at-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, t.t.), jilid XVII, h. 140.

¹³ Sayyid Quthub, *Fi Zilal al-Qur'an* (Beirut: Dar as-Syuruq, 1982), jilid I, h. 215.

dengan pengertian bahwa manusia sekalipun diciptakan dari asal yang sama dan prinsip keyakinan yang sama, namun sudah merupakan tabiat manusia diciptakan memiliki keragaman. Suatu hal yang perlu dipahami bahwa keragaman itu jangan sampai menimbulkan kedengkian, kebencian, pertentangan dan permusuhan. Apalagi dalam rangka tugas besar untuk melaksanakan fungsi sebagai *khalifah* di muka bumi, manusia perlu memiliki kesadaran sebagai umat yang satu yang sama-sama diciptakan untuk beribadah dan bertaqwa kepada Allah.

C. Kesatuan Dalam Prinsip Dakwah

Dakwah menempati posisi strategis dalam mengantisipasi serta memberi arah terhadap proses perubahan yang terus terjadi di tengah masyarakat. Ia merupakan suatu gerakan yang mengajak dan mendorong manusia untuk menjadikan Islam dapat berfungsi secara aktual di dalam kehidupan. Tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, setiap individu muslim, sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya, berkewajiban untuk ambil bagian dalam kegiatan dakwah yang sifatnya multi dimensional. Kehadiran para da'i baik personal maupun institusional, harus mampu menggerakkan lingkungan dan masyarakat kearah yang lebih baik. Pepatah Arab mengatakan bahwa "lima sendok gula dalam secangkir teh, tidak otomatis membuat teh terasa manis sepanjang gula itu tidak di gerakkan" (ان خمس ملاعق سكر فى كوب شاي لن تجعله حلوا ما لم تحرك السكر).

Umat Islam sebagai subjek dan objek dakwah baik individu, kelompok ataupun masyarakat adalah merupakan umat yang satu yang sama-sama tunduk di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap orang ataupun institusi dan organisasi yang bergerak di bidang dakwah, sekalipun mereka memiliki corak dan latar belakang yang beragam, namun terdapat beberapa titik temu yang mempersatukan mereka sebagai *ummatan wahidah*. Di dalam *Fiqh al-Da'wah Ila Allah*, Ali Abdul Halim Mahmud¹⁴ mengemukakan adanya empat titik temu bagi setiap pelaku dakwah yang disebutnya sebagai *ma'alim ad-da'wah* yaitu: (a) *nuqthah irtikaz* (titik pusat) adalah iman, (b) *nuqthah inthilaq* (titik tolak) adalah Islam, (c) *nuqthah tawjih* (titik arah) adalah keadilan dan kebaikan, (d) *nuqthah tawfiq* (titik pandu) adalah tawakkal kepada Allah setelah mengikuti proses sebab-akibat. Kesadaran atas beberapa titik temu ini, diharapkan dapat menghilangkan kebencian, menyingkirkan kedengkian, serta meredam konflik yang mungkin dapat terjadi. Apabila seluruh pelaku dakwah baik personal maupun institusional dapat menempatkan iman sebagai titik pusat, Islam

¹⁴ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh al-Da'wah Ila Allah* (Mesir: Dar al-Wafa', 1990), h. 8.

sebagai titik tolak, keadilan dan kebaikan sebagai titik arah dan tawakkal sebagai titik pandu, maka akan terwujud kesamaan acuan dasar serta *platform* yang sama dalam melaksanakan gerakan dakwah di tengah masyarakat.

Bertemunya seluruh pelaku dakwah dalam menempatkan iman sebagai titik pusat, akan melahirkan keikhlasan dan komitmen yang kokoh untuk menegakkan kalimat Allah dimuka bumi. Islam sebagai titik tolak memberi motivasi untuk melakukan gerakan keilmuan dan gerakan amal dalam rangka menjunjung tinggi nilai keisalaman. Keadilan dan kebaikan sebagai titik arah akan melahirkan kreativitas dan aktivitas sosial untuk mewujudkan masyarakat Islam dalam arti yang sesungguhnya. Tawakkal sebagai titik pandu, akan menempa kesabaran, keuletan dan ketangguhan dalam perjuangan.

Rasulullah saw. membangun dakwah di atas empat dasar yang disebut oleh Syaikh Ali Mahfuz¹⁵ sebagai *ushul al-da'wah* yaitu *al-hujaj al-balighah* (argumentasi yang handal), *al-asalib al-hakimah* (metodologi yang tepat), *al-adab al-samiyah* (akhlak mulia), dan *al-siyasah al-hakimah* (politik yang bijak). Keempat dasar dakwah ini juga merupakan prinsip yang seharusnya sama-sama dipedomani oleh setiap gerakan dakwah, sehingga dapat meningkatkan kualitas, efektivitas dan keberhasilan dakwah. Memang di dalam implementasi dan rincian pelaksanaan dakwah di lapangan, dapat saja terjadi keragaman metode ataupun pendekatan dan kebijakan dakwah, namun masing-masing tetap memiliki jati diri yang berorientasi pada prinsip-prinsip dakwah yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. Persyarikatan Muhammadiyah umpamanya, sebagai gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, memiliki prinsip-prinsip kebijakan program yang terdiri atas prinsip dakwah, prinsip istiqamah, prinsip kemaslahatan, prinsip strategis, prinsip kontinuitas, prinsip sistematis, prinsip fleksibilitas, prinsip efisiensi dan efektivitas serta prinsip *tabsyir* dan *taisir*. Prinsip kebijakan program bagi masing-masing organisasi dan institusi dakwah tentu mengalami keragaman dan perbedaan, namun keseluruhannya bermuara pada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.

Dari paparan di atas, dapat dirumuskan bahwa kesatuan dakwah berpusat kepada kesamaan prinsip yang dianut dalam pengelolaan dakwah, baik pada tataran konsep maupun penjabaran secara aktual. Sedangkan kajian-kajian dakwah yang sifatnya *ijtihadiah* tentunya akan mengalami perubahan, keragaman, dan perbedaan sesuai perkembangan yang terjadi. Oleh karenanya, kehadiran berbagai organisasi dakwah dengan variasi program yang ditawarkan, adalah merupakan tuntutan perkembangan sosial yang perlu disyukuri. Bahkan keragaman organisasi, strategi, program dan pendekatan dakwah akan lebih

¹⁵ Syaikh 'Ali Mahfuz, *Hidayat al-Mursyidin Ila Thuruq al-Wa'z wa al-Khitabah* (Kairo: Maktabah al-Mahmudiyah at-Tijariyah, t.t.), h. 26-33.

meyemarakkan aktivitas dakwah, selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Keragaman organisasi jangan sampai diartikan memecah belah jamaah, karena masing-masing merupakan mitra bagi lainnya dan keseluruhannya tetap berada di dalam satu jamaah besar yang disebut dengan *jama'ah al-muslimin*.

D. Upaya Memperkokoh *Ummatan Wahidah*

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa umat Islam merupakan satu umat yang berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Secara konseptual munculnya keragaman organisasi dan institusi dakwah, merupakan suatu rahmat yang memberi peluang untuk lebih efektifnya penanganan dan pengelolaan dakwah di tengah masyarakat. Namun dalam tataran operasional, tidak jarang dijumpai adanya aktivitas dakwah yang berdampak pada retaknya *ummatan wahidah*, bahkan menimbulkan konflik, kedengkian, perpecahan dan pertentangan. Padahal Rasulullah saw. telah memberi pedoman yang amat jelas dalam sabda beliau:

لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا (رواه مسلم)

Artinya: “Kamu jangan saling membenci, mendengki dan bertentangan, tetapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Muslim).

Disadari bahwa seluruh aktivitas dakwah, baik melalui ucapan (*al-qawl*), tulisan (*al-kitabah*), amal usaha (*al-'amal*) ataupun keteladanan (*al-qudwah*), keseluruhannya bertujuan untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Tentunya, dakwah harus dilakukan secara cermat (*ala bashirah*) dan penuh kebijakan (*bi al-hikmah*), sesuai firman Allah :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ
﴿١٦﴾

Artinya: “Katakanlah, ini adalah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah secara cerdas.”¹⁶

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ
﴿١٧﴾

Artinya: “Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.”¹⁷

¹⁶ QS. Yusuf/12: 108.

¹⁷ QS. An-Nahl/16: 125.

Dalam rangka memperkuat *ummatan wahidah*, diperlukan kecermatan dan kebijakan dakwah mulai dari penelitian dan perencanaan sampai aksi dakwah, termasuk media (*washilah*), gaya (*uslub*) dan metode (*manhaj*) yang digunakan. Kurangnya kecermatan dan kebijakan dalam menjalankan dakwah, merupakan salah satu penyebab timbulnya gesekan-gesekan yang berdampak negatif terhadap proses dakwah. Sebagai ilustrasi, alkisah seseorang yang baru saja mengikuti kursus dakwah, suatu hari mendengar ceramah yang penuh kebohongan yang disampaikan seorang tua berjenggot panjang. Dengan penuh keberanian ia berdiri dan memprotes keras dengan suara lantang bahwa apa yang disampaikan penceramah adalah bohong. Mendengar protes ini, si penceramah dengan suara tinggi mengumumkan dari mimbar bahwa yang protes itu adalah kafir yang berhak mendapat siksaan. Serta merta jamaah yang hadir menghakimi si pemrotes dengan pukulan bertubi-tubi sampai ia lari menyelamatkan diri. Peristiwa ini diberi tahu kepada guru yang memberi kursus dakwah. Suatu hari, guru dan si pemrotes pergi bersama mendengar ceramah di tempat yang sama, oleh orang yang sama, dan materi yang sama (penuh kebohongan). Sesuai ceramah, si guru mengambil kesempatan memberi sedikit arahan bahwa si penceramah yang memiliki jenggot panjang adalah model ahli surga, dan siapa yang mendapatkan satu helai saja dari jenggotnya ia berhak masuk surga. Sepontan para jamaah berkerumun dan masing-masing berusaha mendapatkan sehelai jenggot. Dalam waktu yang singkat, seluruh jenggot telah habis disentak secara paksa. Selanjutnya si guru berbisik ke telinga si penceramah yang merintih kesakitan, sekarang anda boleh pilih, berhenti membuat kebohongan atau akan mendapatkan perlakuan yang lebih keras. Akhirnya si penceramah menyadari kesalahan dan memilih untuk menghentikan kebohongan.

Selanjutnya untuk memperkuat *ummatan wahidah*, diperlukan jaringan dakwah yang kokoh, kerjasama yang baik, silaturahmi, saling menghargai dan bersikap toleran serta membangun persaudaraan di kalangan para pelaku dakwah. Suasana, keakraban tidak hanya pada level elit pimpinan, tetapi juga pada seluruh anggota dan warga masyarakat. Perbedaan interpretasi ataupun hasil ijtihad dalam mengambil kebijakan dakwah, harus ditanggapi secara positif dan tidak emosional. Setiap pelaku dakwah dapat bergerak sesuai ijtihad dan kebijakan masing-masing dalam suasana kekeluargaan dan kedamaian. Keragaman *washilah*, *uslub* dan *manhaj* dakwah memberi peluang bagi pelaku dakwah untuk berkompetisi mewujudkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat.

Dalam hal itu, diperlukan pengaturan dan koordinasi gerakan dakwah bersama (*al-tanzim al-haraki al-jama'i li al-da'wah*), dengan agenda serta prioritas dakwah yang disepakati bersama. Suatu hal yang perlu disadari bahwa program yang ditawarkan merupakan pelayanan terhadap umat (*khidmah*

al-ummah), bukan hanya untuk kepentingan dan kemajuan organisasi tertentu. Apabila masing-masing kelompok membatasi kegiatan hanya untuk kemaslahatan kelompoknya, maka ia akan kehilangan peran dan makna keberadaannya di tengah masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, pengaturan gerakan dakwah bersama merupakan suatu kemestian, bahkan dipandang sebagai salah satu prinsip dan unsur pokok dalam membangun *khiththah* dakwah.¹⁹ Apalagi dalam menghadapi tantangan dakwah yang semakin berat, maka aksi kolektif dalam bentuk gerakan dakwah bersama sangat urgen terutama dalam upaya menegakkan nilai-nilai Islam baik dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial.

E. Kesimpulan

Ummatan wahidah ditinjau dari perspektif dakwah memberikan kesadaran adanya titik temu yang mempersatukan seluruh pelaku dakwah baik personal maupun institutional. Titik temu ini merupakan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *ma'alim ad-da'wah* dan *ushul ad-da'wah* yang semestinya sama-sama dijadikan sebagai acuan dasar. Kesadaran adanya titik temu di kalangan para da'i, akan mewujudkan *platform* yang sama baik pada tataran konsep maupun aplikasi dakwah serta menghilangkan sikap fanatik atau *ta'assub* di tengah masyarakat.

Keragaman organisasi dakwah dengan berbagi atribut serta program yang ditawarkan, bukan berarti mengingkari eksistensi *ummatan wahidah*, sepanjang masing-masing tetap konsisten mempedomi Al-Qur'an dan Sunnah. Terdapatnya sejumlah organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pada hakikatnya masing-masing merupakan mitra bagi lainnya dalam melakukan kegiatan dakwah. Keseluruhannya dipandang sebagai satu keluarga besar yang sama-sama memiliki visi yang sama dalam rangka menegakkan kalimat Allah.

Keutuhan *ummatan wahidah* menuntut adanya kecerdasan dan kebijakan dakwah serta jaringan dan kerjasama dakwah yang dibangun di atas nilai-nilai akhlak mulia. Pengaturan dan koordinasi gerakan dakwah bersama, dimana masing-masing pelaku dakwah memberi kontribusi secara aktif-kreatif, merupakan upaya yang sangat berarti dalam membangun visi *ummatan wahidah*.

¹⁸ Hisyam At-Thalib, *Dalil al-Tanmiyah al-Basyariyah* (Washington: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1994), h. 18.

¹⁹ Abd. An-Na'im Muhammad Hasanain, *Al-Da'wah Ila Allah 'ala Bashirah* (Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 1984), h. 293.

ARAH PENGEMBANGAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA

Abdullah

Profesor Filsafat Dakwah
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Konversi Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2014. Konversi ini patut disambut dengan rasa syukur yang mendalam oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UIN SU serta masyarakat Sumatera Utara. Selain rasa syukur bagi pimpinan UIN SU tentu harus dibarengi dengan tekad untuk mengelola lembaga ini secara profesional, dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Sebab konversi tersebut tidak hanya sekedar perubahan nama, akan tetapi diikuti oleh perubahan organisasi dan tata kerja (Ortaker).

Namun yang lebih penting adalah perubahan *mindset* warga sivitas akademika dan tenaga kependidikan dan cara kerja untuk mengelola universitas ini berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan fokus pada Standar Nasional Pendidikan dan menumbuhkembangkan budaya mutu dan budaya akademik. Dengan cara ini memungkinkan UIN SU mampu berjalan sejajar dengan UIN pendahulunya¹ dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Konversi tersebut harus pula diiringi dengan perubahan visi, misi dan tujuan dan perlu mempertimbangkan untuk menyatakan diri sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menuju *World Class University* (WCU).

¹ Terdapat delapan IAIN sebelumnya yang berubah menjadi UIN, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2004), UIN Sunan Gunung Jati Bandung (2005), UIN Alauddin Makassar (2005), UIN Sulthan Syarif Kasim Riau (2005), UIN Sunan Ampel Semarang (2013) dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2013). Sementara IAIN Sumatera Utara berubah menjadi UIN bersama dua IAIN lainnya yaitu IAIN Walisongo Semarang dan IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2014.

Pada era globalisasi dan pasar bebas saat ini, perguruan tinggi mengalami banyak tantangan yang ditandai dengan perubahan lingkungan yang semakin intens. Sementara pada sisi lain terbukanya peluang yang lebih besar untuk akses pendidikan yang lebih kompetitif, khususnya akibat dari kesepakatan ASEAN *Community* 2015² dan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.³ Konsekuensi logis dari dua hal itu dengan sendirinya menuntut kemampuan pengelolaan Perguruan Tinggi dan khususnya fakultas secara profesional, mandiri, otonom dan akuntabel, sehingga mampu bersaing pada tingkat nasional dan global dalam memberikan pendidikan yang bermutu. Internasionalisasi Pendidikan Tinggi dapat dipandang sebagai sebuah peluang dan pada sisi lain merupakan tantangan yang perlu kesiapan matang menghadapinya.

Sementara pada tataran nasional, masih banyak persoalan kebangsaan sejak era reformasi hingga dewasa ini yang belum terselesaikan, antaranya masalah diintegrasikan bangsa, keterbelakangan, kesenjangan, kemiskinan, lapangan kerja, lingkungan hidup, ketidaktaatan pada hukum dan aturan, hingga masalah korupsi. Dari waktu ke waktu selama satu dasawarsa terakhir hal itu sangat mengganggu kehidupan berbangsa. Dalam lingkaran masalah tersebut perlu dipertanyakan peran Perguruan Tinggi untuk memberi kontribusi dan solusi. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dunia pendidikan atau perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Secara khusus kondisi global dan nasional yang sedang mendera menuntut Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara untuk ikut merespon dan mengantisipasi melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter bangsa yang agamis serta menjadikan agama sebagai pengawal pembangunan dan moral bangsa. Hal itu sejalan dan sangat relevan dengan tugas Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menghasilkan sarjana⁴ profesional sebagai *agen of change*,

² Kesepakatan ASEAN *Community* 2015 meliputi tiga bidang kerjasama, yaitu keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya mencakup 12 aspek yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, kepemudaan, wanita, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan dan Yayasan ASEAN.

³ Pada Bab VI Pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Hingga wisuda tanggal 8 Desember 2014 telah menghasilkan alumni sebanyak 2675 orang. Mereka secara umum bekerja dan mengabdikan diri dalam lima segmen atau bidang yaitu sebagai PNS (guru, dosen dan non guru), TNI dan POLRI, Partai Politik dan legislatif, media massa dan wiraswasta.

tentu harus mengambil peran lebih besar untuk ikut memikirkan dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun secara internal Fakultas Dakwah dan Komunikasi masih memerlukan berbagai perbaikan, peningkatan kualitas akademis, sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu, sehingga mampu berperan secara eksternal secara tepat.

B. Potret Fakultas Dakwah dan Komunikasi Saat Ini

Pada saat Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU), merayakan Diesnatalis ke-41 (19 Nopember 2014), dan sejak 16 Oktober 2014 telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara- sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014, Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah merayakan diesnatalis yang ke-31 (1983-2014). Sejak tahun 2013, nama fakultas ini mengalami perubahan menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang sebelumnya disebut Fakultas Dakwah saja. Meskipun fakultas ini termasuk fakultas yang masih berusia muda di lingkungan UIN SU, selain FEBI, namun telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan.

Bila mengacu kepada analisis SWOT, maka Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah memiliki beberapa kekuatan dan keunggulan yang memungkinkan untuk dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan pada masa kini dan masa depan. Kekuatan tersebut antara lain, memiliki dosen tetap sebanyak 60 orang, tenaga administrasi 14 orang dengan jumlah mahasiswa 920 orang. Hal yang sangat membanggakan adalah 13 orang dari tenaga dosen berpendidikan doktor (S3) dan 7 orang di antaranya menduduki jabatan Guru Besar atau Profesor.⁵ Selain itu, minat studi lanjut di kalangan para dosen sangat menggembirakan dan saat ini 36 orang dosen sedang menempuh pendidikan S3 baik di dalam maupun luar negeri. Diperkirakan empat tahun ke depan jumlah dosen yang berpendidikan S3 mencapai 25 orang. Selain itu para dosen umumnya masih berusia muda dan energik serta potensial memberikan peran yang lebih maksimal.

Dari sisi regulasi, telah tersedia berbagai perangkat aturan dalam pelaksanaan administrasi maupun dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta praktikum. Selain itu, sejumlah *Standard Operating Procedure* (SOP) telah tersedia, baik yang dihasilkan pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan/program studi. Ketersediaan perangkat tersebut ikut mendukung dan memungkinkan pelayanan administrasi dan proses pembelajaran dan praktikum berjalan lebih baik.

⁵ Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Prof. Dr. Asmuni, M.Ag., Prof. Dr. Syukur Kholil, MA, Prof. Dr. H. Lamuddin Lubis, M.Ed., Prof. Dr. H. Ilhamuddin, MA dan Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si.

Pengalaman panjang dalam pengelolaan fakultas yaitu selama 31 tahun lebih, dengan delapan orang pimpinan fakultas atau dekan⁶ dan masing-masing memiliki kelebihan dapat dijadikan perbandingan untuk menata Fakultas Dakwah dan Komunikasi patut dijadikan *ibrah* dalam pengelolaan yang lebih baik ke depan. Kemudian pada sisi lain tradisi akademik yang mengakar di kalangan civitas akademika dapat pula dijadikan semangat dan dorongan untuk peningkatan mutu dalam berbagai aspek, yaitu *input*, proses dan *output* secara berkelanjutan.

Sebaliknya berbagai kelemahan masih dirasakan saat ini dan perlu upaya-upaya strategis dalam mengatasinya ke depan. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud antara lain:

1. Proses belajar mengajar belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian mutakhir.
2. Produktivitas, mutu dan relevansi penelitian serta pelayanan pada masyarakat belum sepenuhnya mendukung menjadi fakultas yang unggul.
3. Kualitas lulusan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan pangsa pasar.
4. Jaringan kerjasama belum terlaksana dalam bentuk yang lebih konkret dan optimal.
5. Kesehatan organisasi yang dapat mendukung produktivitas kerja antar berbagai unit belum terlaksana secara optimal dalam upaya memberikan pelayanan terbaik.
6. Kesiapan fakultas dalam menghadapi globalisasi pendidikan dan pasar bebas belum seperti yang diharapkan.
7. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen fakultas masih perlu ditingkatkan.
8. Pendanaan masih dititikberatkan pada sumbangan pendidikan dari mahasiswa dan dalam jumlah yang terbatas.
9. Bantuan dari pemerintah dan penyediaan beasiswa masih belum memadai.

Berbagai kelemahan tersebut, di samping kelemahan-kelemahan lainnya harus terus diidentifikasi dan diupayakan mengatasinya. Untuk mengatasi hal itu memerlukan sinergitas antara pihak rektorat dan dekanat.

⁶Pada awal berdiri Fakultas Dakwah belum memiliki Dekan definitif melainkan sebagai Pejabat Dekan. Delapan orang Pejabat Dekan (Pj.) dan Dekan Definitif adalah sebagai berikut: tahun 1983-1986 (Pj.) Drs. H. Hasbi AR, 1986-1987 (Pj.) Drs. H. Harun Harahap, 1987-1988 (Pj.) Drs. H. Nazri Adlani, tahun 1988-1991 Prof. Dr. H. Mohd Hatta, 1991-1997, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, 1997-2005, Prof. Dr. Asmuni, M.Ag, 2005-2011, Prof. Dr. H. Ilhamuddin, MA dan Periode 2011-2015 Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si.

C. Upaya Pengembangan ke Depan

Perguruan tinggi akan eksis dan mampu berkompetisi di era global, jika secara terus menerus berupaya mengembangkan diri, dengan melakukan inovasi-inovasi dan perencanaan strategis. Perubahan lingkungan baik yang bersifat regional, nasional maupun internasional, harus dijadikan *input* dalam perencanaan dan pengembangannya.

Hal lain yang perlu diupayakan ke depan adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlu kebijakan otonomi yang lebih besar kepada fakultas dan jurusan, sehingga mempunyai fleksibilitas dalam tata kelola akademik, manajemen, keuangan dan hal-hal lainnya. *Kedua*, perlu mereviu ulang kurikulumnya secara periodik untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja (pasar) dan memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk mengambil jurusan atau studi major dan minor. Dalam hal peninjauan kurikulum perlu mempertimbangkan pemikiran meminimalkan mata kuliah dan menambah bobot sks-nya. *Ketiga*, perlu mereviu program studi,⁷ masa studi, dan pilihan keahliannya. *Keempat*, perlu meningkatkan jalinan kemitraan (*engagement*) dan kerjasama⁸ dengan masyarakat, pemerintah, dan swasta serta lembaga *funding*. Sejalan dengan upaya tersebut maka Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengusung visi 2020: Menjadi pusat keunggulan pengkajian, pendidikan dan penerapan Ilmu Dakwah dan Komunikasi untuk menghasilkan sarjana yang berkarakter dan profesional.

1. Rencana Strategis

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dituntut secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu akademik dan sarana dan prasarana meliputi hal-hal berikut: *Pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang berilmu, cakap, kreatif, inovatif dan memiliki kepemimpinan yang unggul. *Kedua*, meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam penerapan ilmu. *Ketiga*, menumbuhkan budaya masyarakat Madani dengan menumbuhkembangkan sikap toleran dan saling menghormati, dan semangat kebangsaan. *Keempat*, meningkat disiplin diri di kalangan sivitas akademika dan masyarakat untuk mendukung ketaatan kepada agama dan keutuhan bangsa dan negara.

⁷ Saat ini memiliki empat program studi *existing* yaitu: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Manajemen Dakwah (MD), Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Sementara Program Studi baru yaitu Manajemen Haji dan Umroh sudah diajukan kepada Kementerian Agama RI.

⁸ Telah terjalin kerjasama saat ini dengan Pemerintahan Labuhan Batu Utara, PT. Indosat Regional Sumatera, Kementerian Agama Kota Medan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang, Direktur Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (LKM) Sumatera Utara, Iradio Medan dan dengan Kepala Desa Masjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Selain itu perlu mengembangkan pengelolaan fakultas yang mandiri dan produktif untuk menghasilkan keunggulan akademik dan menghasilkan pengelolaan fakultas yang bertanggungjawab. Menyediakan layanan yang mendukung mutu fakultas sesuai dengan visi dan misi. Mengembangkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi menjadi unggul pada peringkat nasional dengan dukungan civitas akademika, alumni, pemerintah, masyarakat dan *stakeholder*.

2. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Untuk dapat mencapai hal-hal yang telah disebut pada perencanaan strategis, maka faktor-faktor pendukung keberhasilannya perlu mewujudkan hal-hal berikut. *Pertama*, menumbuhkan semangat kerjasama antara rektorat dengan dekanat. *Kedua*, keberadaan dosen dan karyawan yang dapat diandalkan. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keunggulan akademik. *Keempat*, kebanggaan dan rasa memiliki almamater di kalangan alumni dan sivitas akademika. *Kelima*, tim yang kompak untuk menghasilkan produktivitas dan etos kerja.

Secara lebih kongkrit untuk mendukung hal di atas, mulai tahun 2014 Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah mencanangkan Trifokus. *Pertama*, peningkatan kedisiplinan, pelayanan dan ketertiban. *Kedua*, peningkatan etos kerja dan produktivitas. *Ketiga*, peningkatan mutu dan budaya akademik. Untuk tahun 2015 akan diadakan evaluasi terhadap Trifokus tersebut dan menetapkan Trifokus lainnya guna percepatan pencapaian visi dan misi fakultas dan program studi.

Selain itu, untuk merealisasi hal tersebut maka perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan hal-hal berikut. *Pertama*, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) dalam penyelenggaraan fakultas. *Kedua*, keterpaduan penyelenggaraan administrasi di unit-unit kerja fakultas. *Ketiga*, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya insani dan sarana. *Keempat*, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan serta membuka unit-unit usaha fakultas sejalan dengan konsep Badan Layanan Umum (BLU). *Kelima*, menumbuhkan etos kerja yang tinggi untuk pelayanan yang bermutu.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran

Kualitas pendidikan dan pengajaran banyak ditentukan oleh keberadaan dosen. Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis

tersebut, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara memerlukan dosen yang profesional. Dosen dianggap sebagai komponen terpenting pendidikan tinggi, yang dianggap sebagai jalan yang tepat membantu para kaum muda untuk dapat menjadi insan yang sempurna, yang memiliki ciri cerdas dan kompetitif.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki motivasi berkarya, memiliki kemampuan *academic writing skills*, memiliki kemampuan memasukkan artikelnya ke dalam jurnal ilmiah dan tahu cara melakukan hal itu, dan bisa memberi contoh yang baik bagaimana seharusnya seorang bekerja dengan baik. Pada sisi lain, dosen adalah juga sebagai pendidik profesional, yang harus memiliki seperangkat kompetensi, antara lain, akademik, pedagogis, profesional, sosial, dan institusional. Pada kompetensi sebagai disebut terakhir ini dosen memiliki jaringan kerjasama dan mampu menjalin hubungan kerjasama dengan instansi manapun untuk mengembangkan konsep pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis pada kompetensi keilmuannya.

Dosen dituntut tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk melahirkan alumni yang kompetensinya sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu akademis, perlu adanya kesadaran baru bahwa *output* yang dihasilkan harus mampu memasuki dunia kerja, sehingga keberadaan perguruan tinggi tidak menciptakan sarjana penganggur. Optimalisasi Program Pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan dengan cara:

- a. Terselenggaranya pembelajaran berbasis kurikulum yang diperbaharui.
- b. Terselenggaranya program-program studi sesuai dengan standar nasional.
- c. Terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas dengan metode yang variatif dengan penggunaan multi media.
- d. Terselenggaranya praktikum berdasarkan kompetensi masing-masing program studi.
- e. Terselenggaranya sistem penjurangan bakat bagi mahasiswa baru.⁹

Peningkatan mutu proses pembelajaran merupakan suatu keniscayaan, karena kualitas atau mutu pembelajaran akan berkorelasi positif terhadap

⁹ Dalam upaya pengembangan bakat dan minat telah terbentuk beberapa komunitas mahasiswa, yaitu komunitas *interpreunership*, komunitas jurnalis, komunitas *public speaking* dan komunitas seni suara.

kualitas lulusan (*output*). Selanjutnya lulusan yang berkualitas akan lebih besar peluang untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan keahliannya. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap minat masyarakat untuk memilih Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai tempat studi. Oleh karena itu perlu terus menerus dilakukan peningkatan mutu dan proses pembelajaran secara berkelanjutan dengan indikator di bawah:

- a. Terselenggaranya sistem penjaminan mutu fakultas dan program studi
- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
- c. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi akademik.
- d. Terselenggaranya sistem evaluasi berkala terhadap program studi, perkuliahan, dan praktikum.
- e. Terselenggaranya pertemuan ilmiah jurusan, fakultas, baik tingkat nasional maupun internasional.

Keberadaan lulusan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak boleh terputus dengan fakultas. Kemajuan fakultas sangat dipengaruhi oleh kemajuan dan kesuksesan alumni di dunia kerja. Tegasnya salah satu indikator keberhasilan fakultas adalah dengan melihat berapa banyak alumni atau lulusan menduduki jabatan dan peranan penting di pemerintahan dan masyarakat. Oleh sebab itu fakultas perlu melakukan hal berikut. *Pertama*, dapat terselenggaranya program pendampingan para lulusan. *Kedua*, terselenggaranya program pengembangan mahasiswa berbakat. *Ketiga*, terselenggaranya pelayanan pusat informasi kerja untuk membantu para alumni mendapat pekerjaan yang tepat.

Selain itu penciptaan dan pengembangan iklim akademik yang kondusif bagi proses belajar mengajar. Hal itu dengan indikator sebagai berikut:

- a. Terciptanya iklim akademik yang kondusif dalam proses pembelajaran pada semua program studi.
- b. Tersedianya kesempatan kerja paroh waktu bagi mahasiswa.
- c. Tersedianya beasiswa prestasi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- d. Terselenggaranya program kemahasiswaan dalam peningkatan akademik, pembinaan sikap mental cendekiawan muslim, serta pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan.

4. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Secara jujur harus diakui bahwa kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat selama ini belum seperti yang diharapkan. Hal itu disebabkan terbatasnya jumlah anggaran maupun rendahnya minat civitas akademika,

khususnya dosen untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk masa depan diperlukan upaya peningkatan mutu dan relevansi penelitian. Untuk mendukung rencana tersebut dengan melakukan hal-hal berikut. *Pertama*, berkembangnya penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya insani. *Kedua*, meningkatnya mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program unggulan fakultas. *Ketiga*, tergalangnya pemupukan dana penelitian dari berbagai sumber. *Keempat*, semakin meningkatnya jumlah kemampuan dosen dalam memperoleh hibah penelitian.

Sedangkan dalam bidang pengabdian masyarakat diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan keahlian yang dimiliki, kegiatan pengabdian dengan harapan terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis kompetensi masing-masing program studi. Kemudian terselenggaranya pelayanan masyarakat yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat madani (*civil society*).

Secara konkret, pengabdian masyarakat diarahkan untuk menumbuhkan karakteristik masyarakat madani dengan ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, terimplementasi nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan pribadi dan komunitas. *Kedua*, terwujudnya keadaban dan kesopanan dalam melaksanakan interaksi sosial.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang standard bagi fakultas merupakan keniscayaan. Karena proses pembelajaran dan terutama praktikum sangat tergantung ketersediaan sarana dan prasarana selain buku panduan dan tenaga laboran dan dosen. Dalam merealisasi sarana dan prasarana hal itu selama ini menjadi tanggung jawab tingkat universitas. Ke depan diharapkan pihak universitas melakukan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas. Hal yang diharapkan adalah:

- a. Tersedia kantor administarsi, ruang kuliah dan aula fakultas yang memenuhi standar.
- b. Tersedia laboratorium masing-masing jurusan/program studi yang lengkap dan modern.
- c. Tersedia ruangan dosen, bimbingan dan konseling yang standar.

6. Jaringan Kerjasama

Terselenggaranya kerjasama dengan para alumni dalam upaya memberi *input* dari pengalaman kerja mereka. Bagi alumni yang telah sukses dapat memberikan bimbingan memasuki dunia kerja bagi alumni yang baru menyelesaikan studinya. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota

dan instansi yang relevan serta dengan organisasi kemasyarakatan. Selain itu meningkat kerjasama internasional baik tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau program studi.

D. Agenda Penting ke Depan

Konversi IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara harus diawali dengan konsolidasi. Artinya semua warga kampus—sivitas akademika dan tenaga kependidikan—dan *stakeholder* harus diajak bersama untuk membawa UIN SU menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menjadi tumpuan harapan semua pihak. Konsolidasi harus dimulai dengan sosialisasi UIN kepada warga kampus sehingga tumbuh *sense of belonging*.

Hal ini penting sebab untuk menuju kepada perubahan memerlukan dukungan yang optimal dari warga kampus dan *stakeholder* dengan melakukan *social movement* dalam bentuk dukungan. Menumbuhkan kebanggaan terhadap kampus dan almamater bagi para alumni merupakan suatu keniscayaan. Dari rasa bangga dan tumbuhnya konsep diri yang positif dari konversi IAIN menjadi UIN memungkinkan setiap orang memberikan kontribusi untuk kemajuan bersama. Setiap warga kampus diharapkan memiliki peluang dan harapan untuk mengembangkan diri dan rasa optimis mencapai cita-cita bersama.

Selain konsolidasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan “pemasaran” terhadap lulusan dengan cara meningkatkan audiensi dengan pihak-pihak memerlukan *output* masing-masing program studi UIN Sumatera Utara. Melalui kegiatan audiensi diharapkan dapat memperkenalkan kompetensi lulusan dan pihak *stakeholder* dapat mempertimbangkan untuk menerima mereka sebagai tenaga kerja. Selama ini ada pihak yang menolak alumni IAIN-SU karena ketidakpahaman mereka tentang kompetensi yang dimilikinya atau salah paham tentang program studi.

E. Penutup

Potret diri atau evaluasi diri dan upaya pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ke depan secara berkala harus terus-menerus dilakukan, dengan mengikutsertakan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dan masukan dari stakeholder. Berbagai studi banding, *visiting* profesor, pelatihan di dalam dan luar negeri yang dilakukan akhir-akhir ini—atás biaya yang bersumber dari *Islamic Development Bank*—serta diskusi dosen yang dilakukan setiap minggu telah ikut menciptakan atmosfir akademik yang semakin kondusif. Selain itu, semangat dan komitmen dalam melaksanakan tugas serta aspek kepemimpinan ikut menentukan kemajuan universitas dan fakultas.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN:
REFLEKSI & KONTEKSTUALISASI
KESEJARAHAAN**

DINAMIKA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA (Dari Sekolah Tinggi ke Universitas)

Haidar Putra Daulay

Profesor Sejarah Pendidikan Islam
pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Politik Etis Belanda di bidang pendidikan pada awal abad kedua puluh melahirkan sekolah-sekolah yang dapat dimasuki oleh bumi putera. Lahirlah sekolah kelas satu yang ditujukan buat anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta. Selain dari itu, dibangun pula sekolah kelas dua untuk anak bumi putra secara umum. Maka, pada tahun 1903 terdapat 14 buah sekolah kelas satu di ibu kota Kresdenan dan 29 buah di ibu kota Afdeling. Pada tahun yang sama di Jawa dan Madura terdapat 245 buah sekolah kelas dua negeri, 326 sekolah partikelir, di antaranya 65 dari zending. Pada tahun 1902 ada 623 orang anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropa. Selain dari itu dibuka pula sekolah pamong praja di Bandung, Magelang dan Probolinggo. Ada 3 sekolah guru di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo, satu sekolah dokter pribumi di Jakarta, dan pada tahun 1902 dibuka sekolah pertanian di Bogor.¹

Dan untuk keperluan anak-anak dari kelas atasan didirikan pula HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), setelah belajar tujuh tahun murid yang pintar dan orangtuanya yang cukup mampu dapat melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebred Lager Onderwijs*), dan dari sini bisa terus ke AMS (*Algemeene Middlbare School*), dan dari situ bisa ke perguruan tinggi, mula-mula tentu harus ke Eropa, tetapi setelah tahun 1920an beberapa kemungkinan telah dibuka pula di “Hindia” ini.²

¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nograho Notosusanto, *Sejarah Indonesia V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 43.

² *Ibid.*, h. 123.

Dengan dibukanya sekolah-sekolah tersebut di atas, maka peluang untuk membuka perguruan tinggi terbuka. Muncullah perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Tahun 1924 Sekolah Teknik yang berada di Bandung didirikan tahun 1920, dijadikan *Tekhnische Hogeschool*. Pada tahun yang sama murid-murid yang pintar tamatan *Regeschool* atau sekolah hakim di Betawi dapat memasuki sekolah hakim tinggi atau *Rechtskundige Hogeschool*. Tahun 1927 STOVIA secara berangsur mulai ditransformasikan menjadi sekolah tinggi kedokteran atau *Geneeskundige Hogeschool*. Pada tahun 1930 an dibuka akademi pemerintahan atau *Bestuurs Akademie*, yang menerima murid tamat AMS program pembelajaran tiga tahun.³

Selain berstudi di dalam negeri orang-orang Indonesia yang terutama yang memiliki kemampuan belajar ke luar negeri yakni ke negeri Belanda, misalnya Dr. Abdul Rivai dan Dr. Sutomo. Selain ke negeri Belanda tujuan pelajar mahasiswa Indonesia juga, khusus yang beragama Islam ke Al Azhar. Diperkirakan tahun 1930 an ada sekitar 350 mahasiswa “Jawah” yang belajar di Makkah dan Kairo. “Jawah” adalah kelompok pendatang yang berasal dari Indonesia dan Semenanjung Melayu.⁴ Demikianlah, kesadaran tentang memasuki perguruan tinggi bagi masyarakat Indonesia telah muncul pada tahun 1920an, dan secara berangsur-angsur semakin membesar sehingga pada tahun 1939/1940 jumlah mahasiswa di Indonesia telah mencapai 3.242, terdiri atas Pribumi 1.489 orang, Eropa 1.012 orang, dan Cina 741 orang.

Banyak pendorong munculnya kesadaran masyarakat Indonesia di awal abad kedua puluh dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, baik yang bersumber dai faktor intern dan ekstern. Di awal abad ke-duapuluh situasi dunia telah banyak terjadi perubahan-perubahan. Kesadaran berpolitik, berorganisasi dan berpendidikan telah muncul di kalangan masyarakat Indonesia walaupun masih dalam lingkungan yang terbatas. Di era inilah timbulnya Budi Utomo, sebuah organisasi yang terkait dengan kebangkitan nasional. Begitu juga timbulnya hari sumpah pemuda dan lain-lain. Sedangkan di kalangan umat Islam munculnya sederetan organisasi sosial Islam di samping pula muncul organisasi politik, seperti Jami‘at Khair, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdatul Ulama, sedang di bidang politik lahir Sarikat Islam, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), Partai Islam Indonesia (PII). Khusus dalam bidang pendidikan bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang menyahuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu lah kita tidak heran jika di awal abad kedua puluh ini telah mulai banyak masyarakat Indonesia yang memasuki perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, walaupun

³ *Ibid.*, h. 132.

⁴ *Ibid.*, 137.

dalam yang jumlah yang masih terbatas bila dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia.

Seirama dengan kesadaran masyarakat Indonesia akan makna dan arti pendidikan yang sesungguhnya, maka di kalangan umat Islam pun muncul pula kesadaran untuk mendirikan perguruan tinggi. Hasrat umat Islam untuk mendirikan pendidikan tinggi sudah dirintis sejak zaman kolonial Belanda. M. Natsir menulis dalam *Capita Selecta* bahwa keinginan untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam itu telah muncul di hati umat Islam. M. Natsir, menyebutkan bahwa Dr. Satiman telah menulis artikel dalam *PM (Pedoman Masyarakat)* Nomor 15 membentangkan cita-cita beliau yang mulia akan mendirikan satu sekolah tinggi Islam itu akan terpusat di tiga tempat, yakni di Jakarta, Solo dan Surabaya. Di Jakarta akan diadakan sekolah tinggi sebagai bagian atas Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS) yang bersifat *Westerch* (kebaratan). Di Solo akan diadakan sekolah tinggi untuk mendidik *muballighin*. Di Surabaya akan diadakan sekolah tinggi yang akan menerima orang-orang pesantren.⁵

Kendati pun yang diungkapkan ini masih dalam bentuk ide, belum menjadi kenyataan, akan tetapi semangat untuk mendirikan perguruan tinggi Islam itu telah muncul pada tahun 1930 an.

Mahmud Yunus, mengemukakan pula bahwa di Padang Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri perguruan tinggi Islam yang dipelopori oleh Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI). Menurut Mahmud Yunus perguruan tinggi ini yang pertama di Sumatera Barat bahkan di Indonesia. Tetapi ketika Jepang masuk ke Sumatera Barat pada tahun 1941, pendidikan tinggi ini ditutup sebab Jepang hanya mengizinkan dibuka tingkat dasar dan menengah. Pendidikan ini dibuka dari dua fakultas: a) Fakultas Syari'at (Agama); dan b) Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab.⁶

Semangat untuk mendirikan pendidikan tinggi ini juga tercantum dalam hasil Kongres II MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang diadakan di Solo pada tanggal 2-7 Mei 1939, dihadiri oleh 25 organisasi Islam yang menjadi anggota MIAI. Di dalam laporan kongres itu salah satu agenda pembahasannya adalah perguruan tinggi Islam, kongres mendukung untuk dibentuknya perguruan tinggi Islam. Setelah kongres selesai didirikanlah PTI di Solo yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama IMS (*Islamische Midilbare School*). Akan tetapi lembaga pendidikan pada tahun 1941 ditutup karena pecah Perang Dunia II.

⁵ M. Natsir, *Capita Selecta* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 90.

⁶ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), h. 121.

Usaha untuk mendirikan PTI terus menggelora di kalangan umat Islam. Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) merupakan gabungan dari organisasi-organisasi Islam, memelopori untuk mendirikan PTI. Untuk itu pada bulan April 1945 diadakanlah rapat di Jakarta yang dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi-organisasi Islam yang menjadi anggota Masyumi. Dalam rapat itu hadirlah sejumlah tokoh-tokoh Islam, dari berbagai organisasi Islam (NU, Muhammadiyah, POI) PUII, Shumubu, dan yang mewakili cendekiawan. Dapat dikatakan semua yang mewakili tokoh-tokoh umat Islam Indonesia telah hadir dalam pertemuan tersebut.

Sidang itu memutuskan membentuk panitia perencana STI yang dipimpin oleh Moh. Hatta dan sekretarisnya M. Natsir. Akhirnya atas bantuan pemerintah Jepang STI dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Peresmianya diselenggarakan di gedung kantor Imigrasi Pusat Gondangdia di Jakarta.⁷ Kurikulum yang dipakai adalah mencontoh Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berbarengan dengan itu tokoh-tokoh pendiri STI terlibat langsung pula dalam kancah perjuangan kemerdekaan RI. Dan sekaitan pula dengan munculnya agresi Belanda ke Indonesia untuk mengembalikan Indonesia bagian dari negeri jajahan mereka, maka ibukota Negeri RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan pindahnya pemerintah RI ke Yogyakarta maka STI pun ikut pindah pula.

Pada tanggal 10 April 1946 STI dibuka kembali di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam acara tersebut Moh. Hatta menyampaikan pidato yang berjudul “Sifat Sekolah Tinggi Islam”. Sedangkan KH. Hadjid menyampaikan pidato (kuliah umum) tentang Ilmu Tauhid.⁸

Sekolah Tinggi Islam ini lah menjadi cikal bakal berdirinya lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam hingga hari ini. STI yang pada mulanya hanya berbentuk Sekolah Tinggi saja, maka pada tahun 1948, berubah menjadi universitas dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII) dengan empat Fakultas yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Agama. Fakultas Agamanya kemudian dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun 1950. Kemudian di Jakarta untuk kepentingan pengadaan guru dan imam tentara dibuka sebuah akademi yang bernama Akademi Dinas Ilmu Agama, pada tahun 1957. Kedua lembaga pendidikan tinggi ini pada tahun 1960 digabung menjadi Institut

⁷ Team Penyunting, *Setengah Abad UII* (Yogyakarta: UII Press, 1994), h. 25-26.

⁸ *Ibid.*

Agama Islam Negeri (IAIN). Karena fakultas-fakultas di IAIN telah berkembang di daerah-daerah yang terpisah dari kota tempat rektornya, maka Fakultas-Fakultas IAIN yang di daerah itu diotonomkan berdiri sendiri dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) pada tahun 1997. Selanjutnya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan untuk mengintegrasikan ilmu di lembaga pendidikan tinggi, integrasi antara ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari upaya perolehan manusia, maka sebagai IAIN berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), dimulai tahun 2002, di saat mana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. Orientasi Keilmuan: dari Sekolah Tinggi ke Universitas

Pembahasan ini diawali dengan membedakan antara sekolah tinggi, institut dan universitas. Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 1999, bahwa Institut adalah menyelenggarakan program akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis. Sedangkan Sekolah Tinggi adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu Universitas adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup sejumlah disiplin ilmu (Bab II pasal 6 ayat 4 dan 5).

1. STI, PTAIN, ADIA dan STAIN

Di pandang dari sudut keilmuan keempat jenis lembaga pendidikan ini yang pernah ada dan satunya masih eksis yaitu STAIN, adalah diprogram satu disiplin ilmu tertentu, dengan demikian dikelompokkan kepada sekolah tinggi. STI dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Peresmianya diselenggarakan di gedung kantor Imigrasi Pusat Gondangdia di Jakarta.⁹ Kurikulum yang dipakai adalah mencontoh Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian tahun 1946 karena tuntutan revolusi STI pindah ke Yogyakarta, dan pada tahun 1948 berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Agama yang kemudian dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), pada tahun 1950. PTAIN ini mempunyai jurusan Tarbiyah, Qadha dan Dakwah dengan lama belajar 4 tahun pada tingkat *bacaloreat* dan doktoral. Mata pelajaran agama didampingi mata pelajaran umum terutama yang berkenaan dengan jurusan. Mahasiswa

⁹ *Ibid.*

jurusan Tarbiyah diperlukan pengetahuan umum mengenai ilmu pendidikan, dan begitu juga jurusan lainnya diberikan pula pengetahuan umum yang sesuai dengan jurusannya. Calon mahasiswa berasal dari Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, seperti SGHA, SMA Negeri atau yang dipersamakan Sekolah Kejuruan Sejarah SGA, STM, serta Madrasah Menengah Tinggi dengan terlebih dahulu dilaksanakan testing.¹⁰

Di Jakarta, pada tahun 1957 didirikan pula Akademi Dinas Ilmu Agama. Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1951 No.K/651 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) dan No.143/K tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), maka pendidikan agama dengan resmi dimasukkan ke sekolah-sekolah negeri dan swasta. Berkenaan dengan itu dan sekaitan pula dengan peraturan-peraturan sebelumnya, maka Departemen Agama (sekarang bernama Kementerian Agama) yang bertugas untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru agama untuk kesuksesan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Untuk merealisasikan salah satu tugas tersebut pemerintah mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang bertujuan "... mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi dan akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum maupun kejuruan dan agama".¹¹ Lama belajar di ADIA ini adalah 5 (lima) tahun yang dibagi kepada dua tingkatan, tingkat semi akademik lama belajar 3 tahun, sedangkan tingkat akademik lama belajarnya 2 tahun. Masing-masing tingkat terdiri dari dua jurusan, yakni jurusan Pendidikan Agama dan jurusan Sastra Arab.¹²

Pada tahun 1997 berdirilah STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). STAIN berawal dari fakultas-fakultas yang didirikan di daerah oleh IAIN masing-masing. Berdasarkan kebutuhan di berbagai daerah membuka cabang-cabang di luar IAIN induknya sehingga IAIN menjadi berkembang di berbagai daerah, dalam perkembangan itu tidak dapat dihindarkan munculnya duplikasi fakultas. Misalnya ada Fakultas Tarbiyah di IAIN induknya dan ada juga Fakultas Tarbiyah di cabangnya, dan ini bisa terjadi tidak hanya satu fakultas tetapi terdapat beberapa fakultas. Contoh berikutnya begini, misalnya IAIN Alauddin Ujung Pandang (Makassar) mempunyai fakultas Tarbiyah di IAIN induk yang berpusat di Makasar, dan selain itu IAIN Alauddin memiliki juga beberapa Fakultas Tarbiyah yang berada di luar kota Makasar, misalnya fakultas Tarbiyah di

¹⁰ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014).

¹¹ IAIN Sunan Kalijaga, *Buku Tahunan, 1960-1962*, h. 13.

¹² Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978) h. 93.

Ambon, Ternate, dan lain-lain. Demikian juga dengan fakultas-fakultas lain. Keadaan yang seperti ini ditemukan juga pada IAIN-IAIN lain.

Untuk menyahuti jiwa dan peraturan yang berlaku yakni untuk menghindari duplikasi fakultas, serta untuk menjadikan fakultas-fakultas daerah itu mandiri, dan lebih dapat mengembangkan dirinya tidak terikat dengan berbagai peraturan yang agak mengekang oleh IAIN induknya, maka fakultas-fakultas daerah itu dipisahkan dari IAIN induknya. Setelah dipisahkan lembaga tersebut dinamai STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Misalnya, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, berubah menjadi STAIN Malang; atau Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Padangsidempuan, kemudian berubah menjadi STAIN Padangsidempuan, demikian seterusnya.

2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Cakupan keilmuan yang dikembangkan di institut, lebih luas daripada di sekolah tinggi. Bila di sekolah tinggi ilmu yang dikembangkan satu disiplin ilmu, maka di institut ilmu yang dikembangkan adalah sekelompok ilmu. Maka di IAIN dikembangkan sekelompok ilmu-ilmu agama: Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah, dan Ushuluddin.

Setelah PTAIN berusia lebih kurang 9 tahun, maka lembaga pendidikan tinggi dimaksud telah mengalami perkembangan. Dengan perkembangan tersebut dirasakan bahwa tidak mampu menampung keluasan cakupan ilmu-ilmu keislaman tersebut kalau hanya berada di bawah satuan payung PTAIN saja. Pimpinan PTAIN Prof. Mukhtar Yahya dan Sekretaris fakultas Mr. Wasil Aziz dan sejumlah dosen-dosen PTAIN telah merasakan hal tersebut. Berkenaan dengan itu timbullah ide-ide, gagasan-gagasan untuk mengembangkan cakupan PTAIN kepada yang lebih luas.

Situasi ekstern (di luar IAIN) juga sangat kondusif untuk mengembangkan PTAIN. Kondisi yang kondusif yang dimaksudkan itu adalah kondisi kehidupan keberagaman bangsa dan negara. Kondisi keberagaman itu berkenaan dengan Dekrit Presiden/Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali UUD 1945, dan mengatakan pula bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1959 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Piagam Jakarta yang bersejarah itu amat spesifik kedudukannya di mata umat Islam sebab di dalamnya ada tujuh kata yang bersejarah yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Kata-kata ini tidak lagi dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena akan merusak persatuan kesatuan bangsa. Umat Islam demi persatuan bangsa tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 rela mencabut

kata-kata itu sehingga tidak lagi muncul dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Dengan disebutkannya pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, ini bermakna bahwa semangat kehidupan beragama bertambah mendapat kedudukan penting di negara Republik Indonesia.

Dengan kembalinya ke UUD 1945 bermakna bahwa pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 perlu direalisasi dalam kehidupan nyata. Realisasi itu berwujud memfungsikan agama menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama merealisasikan pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Jiwa kembali kepada UUD 1945 mendorong benar-benar untuk lebih menggiatkan mengisi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan ini maka peranan perguruan tinggi agama khususnya PTAIN semakin dirasakan sebagai salah satu institusi pendalaman ajaran-ajaran Islam, dengan demikian maka peranan PTAIN dapat lebih diperluas cakupannya.

Dalam suasana semangat kembali ke UUD 1945, maka menjelang ulang tahun (Dies Natalis ke IX PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) pada tanggal 26 September 1959 berdasarkan Ketetapan Menteri Muda Agama Nomor 41 Tahun 1959 dibentuklah suatu panitia dengan nama “Panitia Perbaikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri” yang diketuai oleh Prof. Mr. RHA. Soenarjo.

Setelah mengadakan sidang beberapa kali, maka disepakatilah bahwa PTAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dengan ADIA yang berkedudukan di Jakarta digabungkan menjadi satu dengan nama Institut Agama Islam Negeri “Al-Jami`ah al-Islamiyah al-Hukumiyah”. Keputusan panitia tersebut disetujui oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1960 (Lembaran Negara No. 61 Tahun 1960).

Pada konsenderan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan untuk mengadakan Institut Agama Islam Negeri ini adalah untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.¹⁴

¹³ Daulay, *Sejarah Pertumbuhan*, h. 129-130.

¹⁴ IAIN Suanan Kalijaga, *Buku Tahun 1960-1962*, h. 14.

Dalam pasal 1 Peraturan Presiden tersebut ditegaskan bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama di Jakarta digabungkan menjadi Institut Agama Islam Negeri Al-Jamiah al-Islamiah al-Hukumiyah yang berkedudukan di Yogyakarta yang intinya PTAIN, sedang ADIA di Jakarta dijadikan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab.

Setelah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tersebut diundangkan dan mulai berlaku, yakni pada tanggal 9 Mei 1960, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan tersebut, maka Menteri Agama mengeluarkan sebuah Ketetapan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1960. dengan penetapan tersebut terbentuklah sebuah panitia baru dengan nama: Panitia Persiapan Penyelenggaraan Al-Jamiah". Panitia ini diketuai oleh Prof. Mr.R.H.A. Soenarjo dengan jumlah anggota 21 orang yang terbagi atas 3 seksi, yakni seksi teknis, seksi formasi personalia dan seksi administrasi/perengkapan.

Atas kerja keras panitia, maka pada tanggal 13 Juni 1960 panitia melapor ke Menteri Agama tentang hasil kerja panitia, meliputi anggaran keuangan, personalia rencana pelajaran dan tempat kedudukan masing-masing fakultas.

Berdasarkan laporan itu maka penggabungan dua lembaga yang pada mulanya berdiri masing-masing PTAIN dan ADIA perlu segera dilaksanakan. Berkenaan dengan itu maka berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tersebut Menteri Agama mengeluarkan sebuah Ketetapan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1960 tentang penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri dan sebagai pelaksanaannya dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1961 tentang pelaksanaan penyelenggaraan IAIN.¹⁵

Beberapa pasal dari Ketetapan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1961 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Institut Agama Islam Negeri "Al-Jamiah" pada awal berdirinya ini terdiri dari:

- a. Fakultas Ushuluddin yang mempunyai 4 jurusan;
- b. Fakultas Syari'ah mempunyai 3 jurusan;
- b. Fakultas Tarbiyah mempunyai 8 jurusan;
- c. Fakultas Adab mempunyai 4 jurusan.

Dalam perkembangan berikutnya, berdiri pula Fakultas Dakwah, sebagai pengembangan dari Fakultas Ushuluddin. Terakhir di berbagai IAIN telah dibuka pula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas ini adalah pengembangan dari Fakultas Syari'ah sebagai realisasi ide IAIN dengan mandat yang diperluas

¹⁵ *Ibid.*, 15.

(*wider mandate*) yang mengemuka pada dekade 1990an hingga 2000an. Ide ini tujuannya agar ilmu-ilmu yang dikembangkan lebih meluas.

3. UIN (Universitas Islam Negeri)

Fenomena lahirnya Universitas Islam Negeri (UIN) dalam beberapa dekade belakangan ini adalah fase perkembangan penting kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang dapat di tinjau dari beberapa segi.

1) Konversi IAIN ke UIN dilihat dari sudut Keilmuan

Konversi IAIN ke UIN adalah terkait dengan pengembangan keilmuan, bila di institut dikembangkan sekelompok ilmu sejenis, maka di universitas dikembangkan sejumlah disiplin ilmu: *natural sciences*, *social sciences*, humaniora maupun ilmu-ilmu agama. Cakupan ilmunya semakin meluas dan lebih menampung perkembangan keilmuan dan kebutuhan zaman. Karena kebutuhan akan pengembangan ilmu yang sedemikian maka sekitar tahun 1990 an telah muncul pemikiran untuk melahirkan UIN. Apalagi jika dihubungkan dengan perkembangan universitas Islam Internasional yang dibangun di berbagai negara mayoritas Muslim, pada ada tahun 1980an, maka keinginan untuk mendirikan UIN itu semakin bergelora di dalam pikiran pemikir-pemikir Islam Indonesia ketika itu.

2) Konsep Keilmuan dalam Islam

a) Perkembangan keilmuan dalam Islam

Perkembangan keilmuan dalam Islam berkembang pesat setelah terjadinya kontak antar peradaban Arab dengan peradaban di luar jazirah Arab pada saat setelah terjadi ekspansi Islam baik ke utara, barat dan timur. Dari kontak peradaban tersebut mulai diterjemahkan kitab yang berbahasa asing ke dalam bahasa Arab dalam berbagai bidang sains terutama filsafat Yunani. Sejak itu berkembanglah ilmu pengetahuan sains di dunia Islam. Era penerjemahan inilah yang merupakan cikal bakal pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam Bahasa Arab pun dimulai. Orang-orang dikirim ke Kerajaan Romawi di Eropa untuk membeli *manuscripts*. Mula-mula yang dipentingkan ialah buku-buku mengenai kedokteran tetapi kemudian juga mengenai ilmu pengetahuan lain dan filsafat.¹⁶

¹⁶ Harun Nasution, *Falsafat & Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 11.

Sejak itu mulai berkembang ilmu pengetahuan sains di dunia Islam, maka muncullah dua rumpun ilmu yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) serta ilmu yang bersumber dari akal manusia. Perkembangan keilmuan dalam Islam pada zaman klasik terlihat dengan jelas bahwa ilmu-ilmu yang dikembangkan bersumber dari kedua ilmu tersebut di atas. Nakosteen berkomentar:

“Bukan suatu hal yang luar biasa menemukan pelajaran-pelajaran matematika (aljabar, trigonometri dan geometri); sains (kimia, fisika, dan astronomi); ilmu kedokteran (anatomi, pembedahan, farmasi, dan cabang-cabang ilmu kedokteran khusus); filsafat (logika, etika, dan metafisika); kesusasteraan (filologi, tata bahasa, puisi dan ilmu persajakan); ilmu-ilmu sosial, sejarah, geografi, disiplin-disiplin yang berhubungan dengan politik, hukum sosiologi, psikologi, dan yurisprudensi (fikih), teologi (perbandingan agama, sejarah agama-agama, studi Al-Qur'an, tradisi religius (hadis) dan topik-topik religius lainnya.”¹⁷

Bayard Dodge dalam bukunya *Muslim Education in Medieval Times* mengemukakan:

*The Medieval Curriculum: (a) The revealed science and of the Arabic language (grammar, rethoric, literature, reading (Qur'anic), exegesis (commentary), traditions (of the prophet), law, sources of principle the law, theology. (b) The rational science: mathematics, devition of inheritance, logic, many individual scholars studied philosophy, astrology, astronomy, geometry, medicine, pharmacy, and certain aspect of the natural science, as well as alchemy, but these subject were as rule taught by private teacher in their homes or else in hospitals. The basic curriculum of medieval time did not include secular subjects, but was devoted to studies explaining the revelations of the Qur'an and their application to everyday life.*¹⁸

Ketika umat Islam memasuki zaman kemunduran yang gejalanya telah muncul pada abad ke-13 M, ilmu yang dikembangkan tidak lagi seperti pada zaman kemajuan, tetapi telah menciut bahwa ilmu yang dikembangkan hanyalah ilmu-ilmu naqliyah saja. Fazlur Rahman juga mengomentari tentang dikotomi ilmu pengetahuan:

“Dengan menyempitnya lapangan ilmu pengetahuan umum melalui

¹⁷ Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat*, terj. Joko S. Kahar dan Supriyanto Abdullah (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), h. 71.

¹⁸ Bayard Dodge, *Muslim Education in Medieval Times* (Washington: The Middle East Institute, 1962), h. 29-30.

tiadanya pemikiran umum dan sains-sains kealaman, maka kurikulum dengan sendirinya menjadi terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan murni dengan gramatika dan kesusasteraan sebagai alat-alat yang memang diperlukan. Mata pelajaran keagamaan yang murni ada empat: Hadis atau Tradisi, Fikih atau Hukum (termasuk Usul Fikih atau prinsip hukum, kalam atau teologi, dan tafsir Al-Qur'an. Di banyak madrasah milik golongan Ahl Hadis, bahkan teologi dicurigai, dan dengan sendirinya mata pelajaran hanya ada tiga buah. Di sekolah-sekolah khusus tertentu buku-buku tentang sufi ditambahkan, jumlah total buku-buku yang dipelajari biasanya sangat sedikit."¹⁹

Sejak itu timbullah era dikotomi keilmuan yang menyebabkan kaum muslimin tertinggal dalam bidang sains, hingga saat timbulnya kesadaran masyarakat muslim terhadap ketertinggalan tersebut pada abad ke-19. Muhammad Ali Pasha mempelopori pembangunan pendidikan di Mesir, dengan mendirikan sekolah-sekolah umum: Sekolah Militer (tahun 1815), Sekolah Teknik (tahun 1816), Sekolah Kedokteran (tahun 1827), Sekolah Obat-Obatan (apoteker) di tahun 1829, Sekolah Pertambangan di tahun 1834, Sekolah Pertanian tahun 1836. Guru-gurunya didatangkan dari Barat dan siswa dikirim untuk belajar ke Eropa. Menurut catatan antara tahun 1813 sampai dengan 1849 ia mengirim 311 pelajar ke berbagai negara di Eropa, seperti Italia, Prancis, Inggris dan Austria. Penerjemahan buku-buku berjalan dengan lancar setelah sekolah penerjemah didirikan (tahun 1836).²⁰

Di Turki demikian juga di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud II dibangunlah berbagai lembaga pendidikan umum seperti Sekolah Militer, Sekolah Teknik, Kedokteran Pembedahan. Pada tahun 1838 Sekolah Kedokteran digabung dengan Sekolah Pembedahan dengan nama *Dar-ul Ulum-u Hikemiye ve Mekteb-i Tibbiye-i Sahane*. Lebih jauh Harun Nasution menjelaskan peranan Sultan Mahmud II (1807-1839 M), dalam bidang pendidikan yakni beliau melakukan perubahan penting mempunyai pengaruh besar pada perkembangan pembaharuan di kerajaan Usmani.²¹

Di India, muncul Said Ahmad Khan, yang pada tahun 1878 mendirikan Mohammedan Anglo Oriental College (M.A.O.C.) di Aligarh yang merupakan karyanya yang bersejarah dan berpengaruh dalam cita-citanya untuk memajukan umat Islam India. Seterusnya di tahun 1920 berdirilah Universitas Aligarh

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Salman, 2000), h. 275.

²⁰ Haidar Putra Daulay & Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 164.

²¹ *Ibid.*, h. 167.

(Aligarh Muslim University). Universitas ini mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan baik agama maupun sains.²²

Di Indonesia, muncul Abdullah Ahmad yang membangun Madrasah Adabaiyah pada tahun 1909 sebagai cikal bakal bagi tumbuhnya semangat pembaruan pendidikan di Indonesia. Kemudian muncullah berbagai madrasah di Indonesia baik di Sumatera maupun di Jawa yang membawa ide pembaruan dalam kurikulum dan sistem pembelajaran.

Dengan demikian sejak abad ke-19 sampai abad ke-20 dunia Islam telah mengalami pembaruan berpikir dalam bidang pendidikan, sehingga konsep ilmu yang pada era kemunduran berkembang paham dikotomis, tetapi setelah berkembangnya ide pembaruan, maka dunia Islam telah mengembangkan semangat integrasi keilmuan.

Gaung dan ide integrasi keilmuan itu semakin menggema setelah diadakan konferensi Islam tentang pendidikan sedunia di Makkah pada tahun 1977. Konferensi itu menyimpulkan bahwa konsep ilmu terbagi dua *perennial knowledge* (ilmu yang bersumber dari wahyu) dan *acquired knowledge* (ilmu yang bersumber dari upaya manusia). Era ini mulai dibangun semangat integrasi keilmuan dan menghilangkan dikotomi ilmu. Realisasi dari itu dibangunlah beberapa Universitas Islam Internasional sebagai perwujudan dari konsep ilmu yang terintegrasi tersebut, salah satunya berada di Kuala Lumpur (Malaysia) dengan nama Universitas Islam Internasional atau IIU (Islamic International University.) Di Universitas ini dikembangkanlah kedua rumpun keilmuan tadi, *perennial knowledge* dan *acquired knowledge*.

b) Integrasi keilmuan

Semangat integrasi ilmu telah lahir sejak awal pembaharuan pemikiran pendidikan Islam, hal tersebutlah yang digagas oleh Muhammad Ali Pasha, Sultan Mahmud II, Sayyid Ahmad Khan, Abdullah Ahmad, Kondisi itu terus berkembang sehingga semakin banyak pendukung dan semakin banyak dirasakan urgensinya dalam menopang kemajuan umat Islam. Ketika Konferensi Dunia tentang Pendidikan Islam dilaksanakan, maka salah satu tema pokoknya adalah tentang integrasi ilmu.

Di antara konsep besar yang muncul pada saat Konferensi Dunia tentang Pendidikan Islam itu adalah persoalan Islamisasi Ilmu. Sebetulnya upaya Islamisasi ilmu pengetahuan telah dirintis oleh Al-Faruqi. Usaha ini merupakan usaha yang sangat besar, memerlukan pemikiran-pemikiran besar. Untuk itu telah didirikan Akademi Islam Cambridge, diantara programnya adalah

²² *Ibid.*, h. 168.

saran komunikasi sarjana-sarjana Muslim di seluruh dunia dalam bidang pemikiran Islam, untuk membangun suatu aliran pemikiran Islam dalam semua cabang ilmu pengetahuan, ini ditempuh dengan merumuskan konsep-konsep Islam untuk semua cabang ilmu pengetahuan sebagai pengganti konsep sekuler.²³

Gaung Islamisasi ilmu ini juga merupakan semangat yang lahir dalam konferensi dunia tentang Pendidikan Islam, yang tokoh-tokohnya adalah Ismail Raji al-Faruqi, H.H. Bilgrami, Sayed Ali Ashraf dan lain-lain. Beberapa pemikiran berkembang seputar Islamisasi ilmu, ada yang setuju dan ada yang tidak.

Namun yang jelas di dunia Islam telah berkembang konsep integrasi ilmu dalam arti menyatukan antara *perennial knowledge* dengan *acquired knowledge*. Hampir seluruh universitas Islam di dunia Islam telah mengembangkan konsep tersebut, bahkan Universitas Al Azhar yang selama ini dikenal sebagai universitas ilmu-ilmu keagamaan sekarang telah berkembang menjadi universitas yang mengembangkan multi disiplin ilmu. Di Indonesia sepuluh tahun terakhir ini sejak berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2002 dan kemudian diikuti berdirinya UIN- UIN lain yang konsep dasar utamanya adalah integrasi ilmu semangat integrasi ilmu tersebut semakin menguat dengan lahirnya sejumlah Universitas Islam Negeri.

Aplikasi kurikulum telah disusun dalam konferensi pendidikan Islam internasional tersebut, dengan bertitik tolak kepada pembagian ilmu kepada dua klasifikasi yang diungkapkan terdahulu, susunannya seperti di bawah ini:²⁴

1. Perennial Knowledge

- a. Al-Qur'an
 - i. Qira'ah, hafalan, dan tafsir
 - ii. Sunnah
- b. *Sirah* (sejarah hidup Nabi Muhammad saw., para sahabat dan pengikutnya)
- c. Tawhid
- d. Ushul Fikih/Fikih
- e. Bahasa Arab

Mata kuliah tambahan:

- f. Metafisika Islam
- g. Perbandingan Agama
- h. Peradaban Islam

²³ Syed Ali Ashraf, *New Horizons in Muslim Education* (Cambridge: Hodder and Stoughton, The Islamic Academy, 1985), h. 100.

²⁴ *First World Conference on Muslim Education*, t.t.: 4.

2. Acquired Knowledge

- a. Imajinatif, seni Islam, arsitektur, bahasa, sastra
- b. *Science* intelektual, sosial, filsafat, pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, peradaban
- c. Ilmu-ilmu kealaman, matematika, statistik, politik, ekonomi
- d. *Science* terapan
- e. Ilmu-ilmu praktis, perdagangan, ilmu administrasi, ruang angkasa, dan lain-lain.

Di dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam, kedua jenis ilmu di atas mesti tercakup dalam semua jenis, jalur dan tingkatan pendidikan.

Epistemologi dari kedua jenis ilmu itu berbeda, kelompok ilmu *perennial knowledge*, prosedur keilmuannya dimulai dari wahyu yang diterima oleh Rasul, Rasul menyampaikan wahyu tersebut kepada sahabat, selanjutnya para sahabat dan generasi sesudahnya menginterpretasikan wahyu tersebut sesuai dengan kemampuan akal manusia (*ijtihad*). Lalu, dari interpretasi lahirlah berbagai ilmu seperti: ilmu tauhid, fikih, tafsir, hadis, ushul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, tasawuf.

Adapun ilmu *acquired knowledge* bersumber dari pemikiran deduktif dan induktif atau gabungan diantara rasio dan empiris. Dimulai dari adanya permasalahan, perumusan masalah, landasan teoretis, hipotesis, uji hipotesis, kesimpulan (apabila hipotesis diterima) maka melahirkan khazanah ilmu pengetahuan. Kendatipun kedua ilmu itu berbeda prosedur keilmuannya, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, kelompok pertama mengemukakan kebenaran wahyu dan kelompok kedua kebenaran ilmiah. Masing- masing memiliki bidang lapangan sendiri-sendiri yang tidak akan ada paradoks di antara keduanya apabila diletakkan pada proporsi yang sebenarnya.

c) Universitas Islam Negeri dan Integrasi Keilmuan

Semangat integrasi keilmuan itu telah muncul di dunia Islam lebih dari satu abad yang lampau, karena itulah pada tahun 1990 an pada masa Menteri Agama Tarmizi Taher dan Prof. Dr. Harun Nasution, sebagai Dekan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, telah mulai tumbuh pemikiran untuk melahirkan Universitas Islam Negeri. Akhirnya pada tahun 2002 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian mengikut beberapa IAIN dan satu STAIN, kemudian berkembang lagi beberapa IAIN yang berubah menjadi UIN, sehingga pada tahun 2014 jumlahnya sudah mencapai 11 UIN, yaitu: UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Ar Raniry Banda Aceh, UIN Wali Songo Semarang, UIN Raden Fatah Palembang, dan UIN Sumatera Utara Medan. Kesemua UIN ini akan mengembangkan sejumlah ilmu yang tergolong ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*), ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), humaniora, dan ilmu-ilmu agama.

Konsep ideal dari integrasi ilmu itu tidak hanya sampai ke tahap mencampurkan antara ilmu-ilmu kewahyuan (*perennial knowledge*) dengan ilmu-ilmu perolehan manusia (*acquired knowledge*) dalam kurikulum, akan tetapi perlu memberikan bobot keislaman (*Islamic value*) ke dalam ilmu-ilmu sains. Untuk itu harus dilakukan kajian terus menerus untuk menemukan model integrasi keilmuan dimaksud, sehingga memang ditemukan perbedaan yang mendasar antara UIN dengan universitas umum lainnya dari segi konsep keilmuan yang dikembangkan.

C. Ciri Khas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sebagai sebuah UIN yang baru, maka UIN Sumatera Utara harus menampilkan ciri khasnya, yang dibangun sedini mungkin, meliputi:

- a. Integrasi Ilmu
Di UIN Sumatera Utara mestilah diprogramkan empat rumpun ilmu pokok, yaitu *natural sciences* (ilmu-ilmu kealaman), *social sciences* (ilmu-ilmu sosial), humaniora, dan ilmu-ilmu agama. Pengembangan ini tentu akan berdampak besar bagi pengadaan dosen, fasilitas, manajemen, keuangan dan lain-lain. Diprogramkanlah ilmu yang berwawasan Islam baik dari segi ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan aksiologinya.
- b. Mengedepankan akhlak; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, harus mengedepankan akhlak. Pemberdayaan pendidikan akhlak serta praktiknya dalam kehidupan sehari-hari harus tercermin dan menjadi ciri khas utama pada seluruh civitas akademika.
- c. Menampilkan suasana Islami, berpakaian, bergaul, beribadah, dan lain-lainnya.
- d. Menampilkan UIN Sumatera Utara sebagai lembaga ilmiah, dengan mentradisikan iklim akademik dan ilmiah.
- e. Membangun sifat dan perilaku kecendekiaan bagi seluruh warga kampus, sehingga keberadaan UIN dirasakan oleh masyarakat luas.

D. Penutup

Selama hampir tujuh puluh tahun sejak tahun 1945 sampai tahun 2015, telah terjadi dinamika perguruan tinggi Islam di Indonesia, dinamika keilmuan itu dapat dibagi kepada tiga fase perkembangan kelompok keilmuan, yaitu: *Pertama*, berbentuk sekolah tinggi, termasuk di dalamnya jenis pendidikan tinggi: Sekolah Tinggi Islam (STI), Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) dan terakhir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Pada fase ini ilmu yang dikembangkan terbatas pada satu disiplin ilmu keislaman. *Kelompok kedua*, adalah terbentuknya institut, di sini pengembangan keilmuannya lebih meluas dari kelompok pertama, lembaga inilah yang bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang mengembangkan sekelompok ilmu sejenis yang dalam hal ini ilmu-ilmu keagamaan Islam. *Ketiga*, adalah berbentuk universitas, pada lembaga ini akan dikembangkan sejumlah disiplin ilmu yang mencakup: *natural sciences* (ilmu-ilmu kealaman), *social sciences* (ilmu-ilmu sosial), humaniora, dan ilmu-ilmu keagamaan.

Kehadiran UIN menjawab tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. Di dunia Islam pada awal abad kedua puluh telah timbul, ide melahirkan universitas Islam, seperti universitas Muslim Alighar di India dan berbagai universitas lainnya, yang muatan kurikulumnya mencakup ilmu –ilmu agama (*perennial knowledge*) dengan ilmu-ilmu umum (*acquired knowledge*). Kemudian lebih menggema lagi hasil konferensi pendidikan Islam sedunia, yang mem-programkan integrasi keilmuan tersebut. Dan tindak lanjut dari konferensi tersebut dilahirkannya Universitas Islam Internasional di berbagai negara mayoritas Muslim, salah satunya terdapat di Kuala Lumpur Malaysia. Akumulasi dari semangat pemikiran yang sedemikian itulah menginspirasi lahirnya Universitas Islam Negeri di Indonesia, yang sampai saat sekarang sudah berjumlah 11 buah.

Kehadiran universitas ini akan bisa memberikan kontribusinya bagi pembentukan sumber daya manusia yang cekatan yang dapat dapat berkiprah di era global, dimana salah satu ciri era global itu adalah kompetitif. Inti kompetitif adalah keunggulan, yang unggul yang akan menang. Karena itu UIN Sumatera Utara diharapkan menjadi lembaga pendidikan yang memproduksi manusia yang cerdas dan unggul. sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai sebuah universitas yang baru, maka perlu dari awalnya saat sekarang di rumuskan tentang ciri khas dari lembaga ini, yang meliputi: Integrasi ilmu antara ilmu kewahyuan dan ilmu yang bersumber dari manusia, mengedepankan akhlak, menampilkan suasana Islami dalam kehidupan kampus sehingga betul-betul tercermin kampus yang Islami. Menampilkan UIN Sumatera Utara sebagai lembaga ilmiah, dengan mentradisikan iklim kehidupan ilmiah. Membangun sifat dan perilaku kecendekiaan bagi seluruh warga kampus.

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Refleksi Historis Menyambut UIN SU

Hasan Asari

Profesor Sejarah Pendidikan Islam
pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara

A. Pengantar

Doktrin agama Islam menekankan pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan dalam Islam tercermin sangat jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabawi.¹ Di bawah arahan dan bimbingan Muhammad saw. doktrin sentral tersebut dilaksanakan secara sangat sungguh-sungguh. Contoh (*sunnah*) Nabi Muhammad saw. itu kemudian dilanjutkan oleh generasi muslim berikutnya dengan tingkat antusiasme yang luar biasa pula. Aktivitas pendidikan tersebut kemudian menjadi landasan bagi perkembangan peradaban Islam yang gemilang, kerap disebut dalam buku-buku sejarah sebagai masa keemasan Islam (*al-'ashr al-zahabi li al-Islam* atau *the golden age of Islam*).² Kecepatan perkembangan peradaban Islam, termasuk pada bidang intelektual, sulit dicariandingannya dalam sejarah kemanusiaan. Tidak keliru menyatakan bahwa agama Islam telah membawa revolusi intelektual ke tengah bangsa Arab abad ke-7, yang pada era sebelumnya tidak mempunyai capaian istimewa dalam hal keilmuan.³ Lalu dari tanah Hijaz, semangat dan praktik pendidikan Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Nusantara.

¹ Sekedar permulaan, dapat dirujuk Asnil Aidah dan Irwan (ed.) *Tafsir Tarbawi* (Bandung: Citapustaka Media, 2013); Ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilm wa-Fadlih wama Yanbaghi fi Riwayatih wa-Hamlah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.); Hasan Asari (ed.) *Hadis-Hadis Pendidikan: Sebuah Ikhtiar Penelusuran Akar-Akar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).

² Masalah ini dibahas secara umum dalam, misalnya, Maurice Lombard, *The Golden Age of Islam*, terjemahan Joan Spencer (Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1975). Tentang masa keemasan Islam yang spesifik berkaitan dengan pendidikan dapat dirujuk karya Hasan Abd al-'Al, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qarn al-Rabi' al-Hijri* (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.).

³ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam: Bahts 'an al-Hayat al-Aqliyyah fi Shadr al-Islam ila Akhir al-Dawlah al-Amawiyah* (Mesir: Dar al-Kutub, 1975), h. 50.

Dalam episode-episode awal sejarahnya, aktivitas pendidikan Islam dilaksanakan dengan dukungan kelembagaan yang sangat sederhana. Di masa Nabi Muhammad saw. dan beberapa waktu sesudahnya umat Islam belum memiliki kemewahan material untuk mendukung struktur pendidikan yang canggih dan megah. Pada masa awal tersebut, yang terlihat adalah keseriusan dan keuletan tingkat tinggi untuk mengelola pendidikan, meskipun hanya didukung oleh sarana prasarana pendidikan yang sangat-sangat terbatas. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban Islam secara umum dan penguatan kekuasaan ekonomi umat Islam, aktivitas pendidikan pun dengan sendirinya mendapatkan dukungan yang dibutuhkannya. Semakin maju peradaban Islam, semakin canggih lembaga pendidikan yang dikembangkan untuk menaungi dan memfasilitasinya. Begitupun, ketika peradaban Islam mengalami masa stagnasi, maka lembaga pendidikan umat Islam pun dengan sendirinya mengalami berbagai persoalan pelik.

Hanya saja, sejarah mencatat bahwa ikhtiar umat Islam untuk megembangkan model lembaga pendidikan yang tepat bagi zamannya tidaklah pernah terhenti. Berbagai macam perkembangan telah dilalui lembaga pendidikan Islam dalam sejarahnya yang telah melebihi 14 abad. Berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) di berbagai kota Indonesia dalam dua dekade belakangan adalah sebuah fenomena tersendiri dalam kaitan kelembagaan pendidikan Islam Indonesia kontemporer. Dari satu sudut pandang fenomena UIN ini adalah kelanjutan belaka dari sebuah proses panjang sejarah pendidikan Islam mulai dari zaman klasik hingga sekarang, khususnya dalam kaitan perkembangan-perkembangan yang khas di Indonesia. Tampaknya, dikotomi pendidikan sebagai warisan dari masa kolonialisme yang kemudian memarginalkan pendidikan Islam di Indonesia adalah faktor yang paling dominan yang telah memicu lahirnya gagasan dan pengupayaan UIN. Dengan sebelas UIN telah berdiri, sebuah era dalam sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah dimulai. Ada sangat banyak faktor yang harus mendapat perhatian jika visi misi UIN hendak dicapai di masa depan yang tak terlalu jauh.

B. Lembaga Pendidikan Islam: Sketsa Sejarah

Bagian ini mereviu sejarah perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dalam sejarah pendidikan Islam, mulai dari masa yang paling awal hingga pada masa kejayaan pendidikan Islam. Pembahasan di sini tidak akan bersifat mendetil, tetapi sekedar memberikan gambaran kasar sebagai latarbelakang bagi pembicaraan mengenai Universitas Islam Negeri. Beberapa peneliti telah melakukan pengkajian yang relatif mendalam dan mendetil berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejumlah buku dengan beragam kualitas telah pula dipublikasikan dalam kaitan ini. Di antara yang terbaik, barangkali,

dapat direkomendasikan karya Aydin Mehmed Sayilli,⁴ George Makdisi,⁵ Hisham Nashabe,⁶ atau kontribusi sederhana dari penulis sendiri.⁷

Pada masa yang paling awal dari kerasulan Muhammad saw., ia memulai aktivitas pendidikan dengan mengajarkan apa yang diterimanya sebagai wahyu Allah swt. kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya secara terbatas. Aktivitas pendidikan yang sangat sederhana bentuknya itu jelas belum terlembaga secara jelas. Pendidikan tersebut berlangsung di rumah-rumah hunian para muslim pertama (*al-sabiqun al-awwalun*); rumah Al-Arqam bin Abi al-Arqam tampaknya menjadi yang paling sering disebut.⁸ Kesederhanaan praktik pendidikan yang ada di zaman awal tersebut sesuai dengan kemungkinan yang diberikan oleh lingkungan Muhammad saw. dan para pendukungnya. Meskipun demikian periode ini sangat penting adanya, setidaknya karena dua hal. *Pertama*, periode tersebut membuktikan bahwa Islam menempatkan pendidikan sebagai prioritas yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh betapapun keadaannya.⁹ *Kedua*, keseriusan generasi awal dalam melaksanakan pendidikan dalam serba keterbatasan itu meletakkan satu fondasi yang kokoh bagi generasi muslim selanjutnya.

Umat Islam generasi awal menunjukkan sikap keterbukaan yang tinggi dalam aktivitas pendidikan. Dalam konteks kelembagaan ini ditunjukkan pertama kali melalui kesediaan mereka mengadopsi lembaga pendidikan *kuttab*. Lembaga *kuttab* ini sudah dikenal di kalangan bangsa Arab bahkan sebelum era Islam. Pada dasarnya lembaga *kuttab* berfungsi sebagai lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak-anak untuk mempersiapkan mereka mendapatkan pendidikan lanjutan. Dalam kenyataannya, Nabi Muhammad saw. kemudian memanfaatkan keberadaan lembaga ini dan kemudian menjadi salah satu lembaga pendidikan dasar umat Islam, dikhususkan untuk mengajarkan keterampilan menulis dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁰

⁴ Aydin Mehmed Sayili, "The Institutions of Learning in the Moslem World." (Disertasi, Harvard University, 1941).

⁵ George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981).

⁶ Hisham Nashabe, *Muslim Educational Institutions* (Beirut: Librairie du Liban, 1989).

⁷ Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian Atas Lembaga-Lembaga Pendidikan*, edisi revisi (Bandung: Citapustaka Media, 2013).

⁸ Shafi al-Rahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum* (Madinah: Dar al-Wafa, 2004), h. 97.

⁹ Hasan Asari, *Esai-Esai Sejarah, Pendidikan dan Kehidupan* (Bandung: Citapustaka Media, 2009), lihat bagian "Pendidikan Sebagai Pesan Pertama Al-Qur'an"

¹⁰ Asari, *Menyingkap Zaman*, h. 24-30.

Lembaga pendidikan Islam berikutnya adalah masjid. Sebagai rumah ibadah, pendidikan jelas bukan merupakan satu-satunya fungsi yang diperankan oleh masjid. Sesungguhnya, pada masa-masa yang lebih awal, masjid dapat dikatakan merupakan satu-satunya lembaga yang dimiliki umat Islam; dan karenanya masjid memerankan hampir semua fungsi: keagamaan, sosial, pemerintahan, hukum, militer, pendidikan umat Islam.¹¹ Jadi, pada prinsipnya, masjid merupakan lembaga multi fungsi yang pemanfaatannya tergantung pada kebutuhan dan kemungkinan. Pendidikan yang berlangsung di masjid, karenanya, juga sangat variatif baik dari segi jenjang, substansi, maupun bentuknya. Sepanjang masa klasik peradaban Islam, praktik yang lebih umum adalah bahwa masjid melaksanakan pendidikan lanjutan dan tinggi. Meskipun fokus utama pendidikan di masjid berkisar pada ilmu-ilmu keagamaan (*‘ulum al-syar‘iyyah*) dalam kasus-kasus tertentu dijumpai juga contoh dimana sains diajarkan di masjid.¹²

Perkembangan yang sangat luar biasa dalam hal lembaga pendidikan dalam Islam terjadi pada abad ke-5/11, ketika lembaga bernama madrasah diperkenalkan. Lembaga ini menjadi sebuah kebutuhan sejarah (*historical necessity*) karena pertumbuhan dan perkembangan pendidikan yang sangat cepat pada abad-abad sebelumnya. Kuttab dan masjid tak mampu lagi menampung secara baik aktivitas pendidikan umat Islam. Kuttab jelas membutuhkan lembaga lanjutan. Masjid semakin tidak dapat mengakomodasi aktivitas pendidikan yang semakin variatif tanpa kekhawatiran akan gangguan terhadap fungsi utamanya sebagai rumah ibadah. Madrasah adalah respon inovatif terhadap keadaan tersebut. Madrasah, sesuai makna literalnya, secara khusus dirancang untuk menjadi lembaga pendidikan. Dalam kenyataannya, madrasah kemudian menjadi lembaga pendidikan *par excellence* peradaban Islam klasik.¹³ Dalam konteks yang lebih luas, George Makdisi mengusung pendapat bahwa universitas-universitas generasi awal di Eropa terinspirasi pertumbuhannya oleh lembaga madrasah.¹⁴

Berbarengan dengan perkembangan madrasah secara sangat massif, dari rahim peradaban intelektual Islam juga berkembang beberapa lembaga pendidikan lain yang cenderung melayani satu bidang peminatan secara agak khusus. Ada Dar Al-Qur’an yang terutama menjadi wadah pengembangan ilmu-ilmu sekitar Al-Qur’an. Ada Dar al-Hadis yang mengutamakan pelayanan

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996).

¹² Asari, *Menyingkap Zaman*, h. 44-54.

¹³ *Ibid.*, h. 70-125.

¹⁴ George Makdisi, “On the Origin and Development of the College in Islam and the Medieval West,” dalam Khalil E. Semaan (ed.), *Islam and the Medieval West* (Albany: SUNY Press, 1980), h. 26-49.

terhadap pendidikan sekitar ilmu-ilmu hadis. Ada pula *khanqah*, *zawiyah* dan *ribath* yang terutama memberi wadah bagi pengkajian dan pengamalan ilmu tasawuf dan tarekat. Keseluruhan lembaga tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari fenomena berkembangnya lembaga pendidikan Islam pada masa kejayaannya.¹⁵

Manakala lembaga-lembaga pendidikan yang telah disebut di atas semuanya terfokus pada pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu keagamaan, umat Islam klasik juga tak lupa mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang dirancang menjadi wadah pendidikan dan pengembangan sains dan teknologi. Perjumpaan umat Islam klasik dengan khazanah peradaban kuno, khususnya Yunani dan Persia, menjadi faktor pemicu utama pengkajian dan pengembangan sains dalam Islam. Warisan ilmu pengetahuan klasik tersebut (dalam buku sejarah biasa disebut sebagai *'ulum al-qudama'*, *'ulum al-'ajam*) segera saja melahirkan aktivitas penerjemahan, pengkajian, pengembangan sains dan teknologi di kalangan umat Islam. Bayt al-Hikmah,¹⁶ berdiri atas inisiatif Khalifah Harun al-Rasyid yang sangat terkenal itu, menjadi lembaga pertama yang menjadi rumah bagi para penekun ilmu-ilmu kuna tersebut. Koleksi perpustakaan yang sangat istimewa berpadu dengan aktivitas penerjemahan besar-besaran secara cepat membuka akses bagi lebih banyak umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan sains.

Tak dibutuhkan waktu terlalu lama sebelum umat Islam merasakan pentingnya lembaga-lembaga pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Semangat mengembangkan sains dan teknologi menuntut adanya lembaga yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Maka sejarah peradaban Islam pun menyaksikan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan sains dan teknologi dalam jumlah yang massif pula. Untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang terkait dengan perbintangan dan antariksa, umat Islam mengembangkan berbagai observatorium. Untuk menyangga perkembangan ilmu kedokteran umat Islam menginisiasi pendirian berbagai rumah sakit dengan program pendidikan sebagai bagian yang terintegrasi—mendahului apa yang belakangan kita kenal sebagai *teaching hospital*. Para ilmuwan bergiat dalam mengembangkan sains melalui berbagai percobaan dan inovasi yang menghasilkan banyak terobosan di zamannya. Semua ini masih terekam rapi dalam buku-buku sejarah sains.¹⁷

¹⁵ Asari, *Menyingkap Zaman*, h. 138-144 dan 156-180.

¹⁶ Tentang lembaga ini dapat dibaca Jonathan Lyons, *The Great Bait Al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat*, terjemahan Maufur (Jakarta: Noubre Books, 2013).

¹⁷ Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1987); Muhammad Abd al-Rahman Marhaba, *Al-Jami' fi Tarikh al-'ulum 'ind al-'Arab* (Beirut: Mansyurah 'Awidah, 1988); Ehsan Masood, *Science and Islam: A History* (London: Icon Books Inc., 2009).

Pada level yang lebih makro, pengaruh dari sains dan teknologi yang dikembangkan umat Islam di masa lalu tak mungkin diremehkan. Sebuah bab khusus dalam perkembangan sains dan teknologi—suka atau tidak suka—telah ditulis dengan sangat baik oleh umat Islam klasik.¹⁸

Sketsa sejarah perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut memberitahukan kepada kita beberapa hal mendasar. *Pertama*, bahwa umat Islam generasi awal telah mencurahkan pikiran dan upaya yang sangat sungguh-sungguh untuk mengembangkan pendidikan. *Kedua*, pendidikan dalam sejarah Islam mengambil inspirasi utama dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Lalu dalam perjalanan selanjutnya dorongan doktrinal tersebut mendapatkan tambahan signifikan dari proses interaksi historis umat Islam dengan khazanah ilmu pengetahuan dari Yunani dan Persia. Dorongan tambahan tersebut menjadi variabel sangat penting pertumbuhan sains dan teknologi dalam Islam. *Ketiga*, seiring dengan perkembangan aktivitas pendidikan telah tumbuh beragam lembaga untuk mewadahnya. Lembaga-lembaga mengalami perkembangan dan variasi sejalan dengan peningkatan level pendidikan yang dilaksanakan di satu sisi dan sejalan dengan diversifikasi bidang ilmu yang dikembangkan di sisi lainnya.

C. Hierarki dan Keutuhan Ilmu Pengetahuan

Perhatian dan upaya serius umat Islam klasik menjadi landasan perkembangan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, yang kemudian meniscayakan tumbuh dan berkembangnya bermacam-macam lembaga pendidikan untuk mewadahnya. Dengan cara yang sangat sederhana, berbagai cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam biasa dikategorikan ke dalam dua kategori besar: ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum al-syar'iyah*) dan ilmu-ilmu bukan keagamaan (*al-'ulum ghayr syar'iyah*), dengan meminjam terminologi Al-Ghazali.¹⁹ Kelompok ilmu pertama terutama dikembangkan dari kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., sementara kelompok kedua terutama bersumber pada warisan Yunani dan Persia. Akan tetapi, pengelompokan ini haruslah dilihat sebagai sebuah penjelasan prosedural semata. Sebab kitab suci Al-Qur'an

¹⁸ Beberapa karya berikut dapat menjadi permulaan penelusuran tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia: William Montgomery Watt, *The Influence of Islam on Medieval Europe* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987); Tim Wallace-Murphy, *What Islam Did for Us: Understanding Islam's Contribution to Western Civilization* (London: Watkins Publishing, 2006); George Saliba, *Islamic Science and the Making of the European Renaissance* (Cambridge: The MIT Press, 2007).

¹⁹ Hasan Asari, *Nukilan Pemikiran Islam Klasik: Gagasan Pendidikan Al-Ghazali*, edisi revisi (Medan: IAIN Press, 2012), h. 89-113.

dengan tegas menunjukkan keberpihakan pada pengembangan daya nalar manusia serta mendorong penyelidikan terhadap seluruh komponen alam.

Namun demikian, sejak masa klasik Islam, telah muncul pertanyaan tentang bagaimana meletakkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam satu keterpaduan filosofis maupun dalam sistem pendidikan. Ada saja yang mempertanyakan bagaimana semestinya umat Islam harus menyikapi arus besar masuknya ilmu pengetahuan warisan Yunani dan Persia. Meskipun ada pihak yang sangat skeptis terhadap proses tersebut, pendapat yang paling umum (*mainstream*) adalah menggunakan pendekatan pragmatis sembari menggunakan prinsip tawhid sebagai kriteria pokok. Artinya, semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat diterima secara sangat terbuka, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang berlawanan dengan prinsip ketuhanan Islam. Itu sebabnya, umat Islam dengan sangat antusias mengadopsi ilmu kedokteran, farmasi, matematika, kimia, optik, atau astronomi dari khazanah Yunani dan Persia. Itu sebabnya para intelektual Islam berbeda pendapat sangat tajam tentang bagaimana harus menyikapi filsafat Yunani. Itu juga sebabnya tak ditemukan sama sekali upaya umat Islam klasik menerjemahkan karya sastra Yunani, karena dipandang bertentangan secara diametral dengan prinsip tawhid Islam.

Pertanyaan mendasar tentang *positioning* cabang-cabang ilmu pengetahuan mendapat perhatian sejumlah ilmuwan muslim, baik yang terutama menekuni ilmu-ilmu keagamaan maupun dari mereka yang lebih menekuni ilmu-ilmu bukan keagamaan. Sebagian dari mereka mendasarkan analisis dan pandangannya pada argumentasi epistemologis, sementara yang lainnya lebih pada pertimbangan-pertimbangan praktis. Demikian juga, sebagian dari mereka lebih mengedepankan argumentasi rasional, sementara yang lainnya lebih mengacu pada dalil-dalil teologis-doktrinal ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.²⁰ Pada pokoknya teori yang dikemukakan para ilmuwan muslim klasik bertumpu pada konsep 'hierarki'. Pengkajian ilmu pengetahuan sudah pasti akan melahirkan diversifikasi,

²⁰ Sudah barang tentu, artikel ini bukan tempat yang tepat menurunkan argumentasi berkenaan secara terperinci. Mereka yang tertarik dapat memulai dengan beberapa karya berikut: Abu Nashr al-Farabi (w. 339/950), *Ihsha' al-'Ulum* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1931), h. 1-77; Ikhwan al-Shafa', *Rasa'il Ikhwan al-Shafa wa-Khillan al-Wafa'*, ed. Khayr al-Din al-Zarkali (Mesir: Al-Mathba'ah al-Arabiyyah, 1928), volume I; Abu 'Ali al-Husayn ibn Sina, *Risalat Aqşam al-'Ulum al-'Aqliyyah*, dalam *Majmu'at al-Rasa'il*, ed. Muhyi al-Din al-Kurdi (Mesir: Kurdistan al-'ilmiyyah, 1910), h. 226-243; Abu Muhammad 'Ali ibn Hazm al-Andalusi (w. 456/1064), *Risalat Maratib al-'Ulum*, dalam *Rasa'il Ibn Hazm al-Andalusi*, ed. Ihsan 'Abbas (Beirut: Al-Mu'assasah al-'Arabiyah lil-Dirasat wal-Nasyr, 1987), h. 61-90; Abu Zakariyya al-Nawawi (w. 676/1277), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Damaskus: Al-Muniriyyah, t.t.), I, h. 24-27; Abd al-Rahman ibn Khaldun (w. 808/1406), *Al-Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.).

pencabangan, pemerincian, dan seterusnya. Akan tetapi perkembangan dan pencabangan tersebut tetap terpelihara keutuhannya melalui konsep hierarki. Setiap cabang ilmu pengetahuan dapat dilihat dalam satu posisi hierarkis terhadap yang lainnya. Adapun kriteria dasar pemeringkatan dalam hierarki tersebut adalah paduan antara argumentasi filosofis, teologis, hingga argumentasi sufistik, yang kesemuanya memang mendapat legitimasi dalam sistem Islam. Para ilmuwan yang ingin menawarkan perpaduan dapat saja mengambil proporsi yang berbeda-beda dari ketiga tipe argumentasi tersebut dalam meracik teorinya.²¹

Hal di atas tidak dimaksudkan untuk mengabaikan adanya kritik yang terkadang sangat tajam di antara para pendukung tiga tipe argumentasi tersebut. Kritik Al-Ghazali terhadap filsafat tetaplah merupakan contoh klasik dalam konteks ini. Hanya saja, gaung dari kritiknya seringkali jauh lebih besar dari fakta dan substansi kritik itu sendiri. Al-Ghazali sendiri, dalam *Tahafut al-Falasifah*-nya sangat berhati-hati; dan bersikap sangat tegas hanya dalam tiga kesimpulan filosofis saja, yang menurutnya dapat mengakibatkan konsekuensi teologis fatal bagi seorang muslim. Selebihnya, Al-Ghazali sendiri adalah seorang yang sangat menguasai filsafat dan menerapkannya secara sangat baik dalam aktivitas intelektualnya, sebuah fakta yang diteguhkan oleh sangat banyak buku sejarah filsafat Islam. Tampaknya, motifnya dalam mengemukakan kritik terhadap filsafat semata-mata untuk melindungi masyarakat dari apa yang dilihatnya sebagai potensi eksekusi negatif filsafat. Karenanya, pernyataan yang menegaskan Al-Ghazali sebagai gagal pembubuh filsafat dalam tradisi intelektual Islam adalah sebuah klaim yang berlebihan dan tidak sepenuhnya mengacu pada realitas historis.²²

D. Kemandegan Peradaban, Kolonialisme, dan Pendidikan Dikotomis

Setelah abad-abad keemasan yang luar biasa, peradaban Islam memasuki periode kemandegan—banyak juga yang menyebutnya kemunduran. Kemandegan tersebut menimpa semua aspek kehidupan: politik, militer, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan juga kegiatan pendidikan. Dalam masa kemandegan ini, progresivisme akademik perlahan berganti dengan konservatisme, daya kreatif menurun digantikan oleh selera imitatif, karya-karya orisinal menyusut digantikan oleh karya-karya interpretatif yang cenderung mengulang-ulang.

²¹ Sebuah studi menarik tentang tema ini telah dilakukan oleh Osman Bakar, *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb al-Din al-Syirazi*, terjemahan Purwanto (Bandung: Mizan, 1997).

²² Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), h. 126.

Pendidikan menjelma menjadi proses pewarisan ajaran baku yang harus diterima dan dipelihara, sementara unsur dinamika, penciptaan, dan kritik menjadi sangat terbatas.²³ Mesin peradaban Islam kehilangan daya dorong dan umat Islam seakan membiarkan dirinya dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Artikel ini tidak akan menjelaskan fenomena kemandegan tersebut, tetapi hanya melihatnya sebagai konteks persemaian benih-benih dikotomi dalam pendidikan Islam: mulai dari level filosofis hingga level praktisnya.

Berjalan paralel dengan kemandegan aktivitas intelektual Islam, transfer ilmu pengetahuan dari kalangan umat Islam kepada bangsa-bangsa Barat terjadi melalui kegiatan penerjemahan khazanah ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa muslim ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Melalui arus balik penerjemahan tersebut perlahan bangsa-bangsa Eropa mengambil alih warisan Yunani-Persia kuna plus ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan oleh umat Islam di atasnya.²⁴ Dampak peradaban yang dihasilkan pun hampir identik. Jika pada gelombang sebelumnya warisan Yunani-Persia menjadi variabel sangat penting dalam kemajuan peradaban Islam, maka dalam episode selanjutnya warisan tersebut—yang telah mengalami pengayaan luar biasa dalam peradaban Islam—menjadi variabel sangat penting dalam kemajuan peradaban Eropa.²⁵

Sebagai imbasnya, maka setidaknya sejak abad ke-10/16 sebuah pergeseran kekuatan peradaban berlangsung sangat serius. Perlahan tapi sangat pasti bangsa-bangsa Eropa mengejar dan kemudian melampaui capaian bangsa-bangsa muslim. Pendulum kejayaan berpindah dari bangsa-bangsa muslim ke arah bangsa-bangsa Eropa. Episode paling tragis dan kelam dari proses ini tak lain adalah jatuhnya negeri-negeri muslim ke dalam jurang penjajahan bangsa-bangsa Barat. Episode kolonialisme tersebut—yang lamanya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain—melahirkan sejumlah efek buruk yang bersifat jangka panjang. Perampokan sumber daya alam, penghinaan kultural, perongrongan kepribadian, dan perbudakan politik adalah beberapa saja dari daftar yang jauh lebih panjang. Begitupun, dampak paling mengerikan dari kolonialisme adalah pada bidang ilmu dan pendidikan. Secara umum, penjajahan telah merusak sistem pendidikan lokal dan karenanya menghambat perkembangan kecerdasan bangsa terjajah.

Persoalan pendidikan dalam konteks kolonialisme memiliki banyak aspek dan dapat dipandang dari berbagai perspektif pula. Akan tetapi yang menjadi fokus utama di sini adalah bagaimana kolonialisme tersebut menjadi

²³ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1977), vol. II, h. 438-439.

²⁴ Hasan Asari, *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah: Rsialah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*, edisi revisi (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h. 249-267.

²⁵ Saliba, *Islamic Science*.

penyebab pendidikan dikotomis di negeri-negeri muslim. Bangsa-bangsa penjajah pada umumnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan menginisiasi sebuah sistem pendidikan baru di negeri jajahan masing-masing. Di sisi lain, sistem pendidikan asli milik penduduk pribumi secara sistematis dimusuhi dan dilemahkan, atau setidaknya diabaikan sama sekali. Kebijakan belah bambu tersebut pada gilirannya melahirkan sikap saling mencurigai dan kemudian saling memusuhi. Dengan bergulirnya waktu, sistem pendidikan yang didukung oleh bangsa penjajah mengalami kemajuan pesat. Sebaliknya, sistem pendidikan Islam semakin terjepit dan tertinggal. Jurang antara dua sistem terus semakin menganga dalam. Di tengah masyarakat kemudian muncul stigma bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang tertinggal dan anti kemajuan; sementara itu pendidikan ala Barat adalah pendidikan yang maju, modern, dan menjanjikan. Maka perpecahan dan pertentangan tidak hanya menimpa sistem pendidikan, tetapi lebih serius lagi membelah masyarakat bangsa terjajah sampai ke dalam cara berpikirkannya.²⁶

Inilah yang terjadi sepanjang berabad-abad penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Ketika akhirnya memperoleh kemerdekaan pada 1945, bangsa Indonesia mewarisi sebuah realitas pendidikan yang terbelah. Di satu sisi ada pendidikan Islam Indonesia yang berada dalam keadaan menyedihkan karena telah ditelantarkan (bahkan dalam banyak kasus, secara sistematis dimusuhi) untuk waktu yang begitu panjang. Sistem ini terutama diwakili oleh sedemikian banyak lembaga pendidikan pesantren, dayah, atau surau. Di sisi lain ada sistem pendidikan Belanda yang jauh lebih baik keadaannya karena memang mendapat dukungan penuh dari pemerintah penjajah. Sistem ini diwakili oleh serangkaian HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), MULO (*Meer Uitgebred Lager Onderwijs*) AMS (*Algemeene Middlbare School*), dan disusul sejumlah perguruan tinggi.

Pemerintah Indonesia yang baru merdeka memilih mengadopsi sistem pendidikan yang diwariskan Belanda, tampaknya didorong terutama oleh pertimbangan pragmatisme. Pada kenyataannya, sistem pendidikan modern Belanda memang lebih siap sebagai landasan bagi sistem pendidikan Indonesia ketimbang sistem pendidikan Islam berbasis pesantren. Fokus pada pendidikan ‘nasionalisasi’ sistem pendidikan yang ditinggalkan penjajah, sistem pendidikan tradisional umat Islam tidak mendapat perhatian yang sewajarnya diperoleh sebagai sistem pendidikan asli milik pribumi. Dalam kenyataannya, setelah Indonesia merdeka pun pendidikan Islam terus saja mengalami marginalisasi—tak jauh berbeda keadaannya dengan keadaan pada zaman penjajahan. Sistem

²⁶ Khurshid Ahmad, “The Nature of the Islamic Resurgence,” dalam John L. Esposito (ed.) *Voices of Resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1983), h. 218-219.

pendidikan Islam tidak memperoleh secara memadai pengakuan negara, dukungan politik, dukungan pembiayaan, atau apresiasi terhadap lulusan. Ringkas kata, sistem pendidikan Islam tetap ada, tetapi keberadaannya tidak dianggap, tidak diapresiasi secara patut. Sebuah penyia-nyiaan yang nyata terhadap aset historis sosial bangsa Indonesia.

Sebagai respon terhadap keadaan tersebut, sejarah pendidikan Islam pada periode awal kemerdekaan Indonesia pun tak jauh dari tema perjuangan eksistensial, yakni pergumulan mendapatkan pengakuan yang pantas sebagai sebuah sistem yang telah eksis di negeri ini sejak era kejayaan kerajaan Islam. Pengakuan dalam konteks ini mencakup dua aras: aras legal formal dari pemerintah Indonesia di satu sisi dan aras masyarakat pada sisi lainnya. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975 kerap kali dianggap sebagai sebuah tonggak keberhasilan besar perjuangan pendidikan Islam di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan. Meskipun ini mungkin benar adanya, akan tetapi SKB tersebut sama sekali tidak menandakan perjuangan telah berakhir. Pengakuan *de jure* tersebut tampaknya belum diikuti dengan pengakuan *de facto* secara memadai. Beberapa perbaikan lebih lanjut telah terjadi, misalnya melalui berbagai perkembangan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (yang terakhir adalah No. 20 Tahun 2003). Begitupun, dalam berbagai perspektif, pendidikan Islam tetaplah marginal di negeri ini.²⁷

Hal yang sama terjadi pada level pendidikan tinggi. Meskipun inisiatif awal pendirian perguruan tinggi Islam sudah ada pada masa sebelum kemerdekaan, tetapi perkembangan yang signifikan barulah terjadi pada era 1960an dan seterusnya. Dari sudut pandang tertentu, perkembangan awal perguruan tinggi Islam turut didorong oleh tersumbatnya akses lulusan sekolah menengah Islam kepada perguruan tinggi negeri warisan Belanda yang telah dinasionalisasikan. Dengan demikian, perguruan tinggi Islam pada prinsipnya berkembang sebagai sebuah ‘sempalan’ dalam sistem pendidikan nasional. Itulah yang terjadi, setidaknya pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.²⁸ Pada masa-masa selanjutnya, khususnya pasca 1975, madrasah dan pesantren secara bertahap mendapatkan ‘pengakuan’ yang lebih baik dari negara maupun masyarakat. Ini kemudian semakin mengokohkan eksistensi dan menjadi landasan perkembangan lebih lanjut perguruan tinggi Islam. Perkembangan jumlah lulusan madrasah dan pesantren dengan sendirinya memperbesar kebutuhan akan perguruan tinggi Islam. Akan tetapi *positioning* pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan

²⁷ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Prenada, 2006).

²⁸ Hasan Asari, “Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia,” dalam *Academica Islamica*, vol. I, no. 1 (January 2001).

negara dan relasinya dengan sistem pendidikan yang dikembangkan di atas warisan kolonial tetaplah merupakan persoalan yang belum selesai hingga kini.

Maka tidak mengherankan bahwa salah satu tema terkait pendidikan Islam yang banyak dibicarakan adalah bagaimana posisi dan hubungannya dengan Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana jelas dari judul buku Profesor Haidar Putra Daulay, salah seorang begawan sejarah pendidikan Islam Indonesia.²⁹ Di Pascasarjana UIN Sumatera Utara bahkan ada mata kuliah khusus untuk membahas tema tersebut yang bernama ‘Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional’.³⁰ Kenyataan ini semakin meneguhkan adanya ‘persoalan’ serius sistem pendidikan Islam di tengah kebijakan pendidikan nasional Indonesia dan juga dalam persepsi masyarakat Indonesia tentang pendidikan. Ringkasnya, dikotomi pendidikan Indonesia yang ditanam pada masa penjajahan Belanda belum terselesaikan dan tampaknya belum akan terselesaikan dalam jangka pendek.

Dalam perwujudan mutakhirnya, dikotomi pendidikan Indonesia dapat dilihat pada berbagai aras realitas: epistemologi atau filsafat ilmu; penataan kelembagaan, penataan dan pembinaan sumber daya manusia, kesempatan kerja lulusan; hingga persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Artinya, dikotomi telah mengoyak pendidikan Indonesia mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari aras yang paling filosofis-teoretis hingga yang paling teknis-praktis.

Secara umum, dunia pendidikan Indonesia menganut epistemologi yang memperlakukan ilmu pengetahuan dan agama sebagai dua entitas yang berdiri sendiri terpisah satu sama lain. Agama dipandang memiliki dunianya sendiri dan ilmu pengetahuan memiliki dunianya sendiri pula. Keduanya tak terjembatani karena memiliki tujuan, metode dan fungsinya sendiri-sendiri. Filosofi yang demikian itu kemudian membentuk sejarah pendidikan Indonesia pada tataran penataan lembaganya. Maka negara Indonesia kemudian mengelola sejumlah besar perguruan tinggi negeri (PTN) pada satu sisi; tetapi juga mengelola sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Kelompok pertama dikelola melalui kementerian pendidikan dan kelompok kedua melalui kementerian agama. Kedua-duanya mengelola dan mengembangkan segala unsur pembentuk perguruan tinggi, masing-masing, sendiri-sendiri, dan dengan tingkat interaksi yang cenderung formalistis-minimalis. Interaksi yang terjadi tampaknya terbatas pada konteks legal formal dan prosedural. Interaksi belum terjadi secara substantif, yakni sebagai tuntutan filosofis atau pengembangan ilmu pengetahuan. Setidaknya inilah yang terjadi hingga awal dekade 1980an.

²⁹ Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*.

³⁰ *Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara*, Tahun 2012.

Setelahnya, ada perkembangan-perkembangan yang menarik dalam kaitan ini. PTKIN mulai diberi kesempatan memperluas skop kegiatannya dengan mengelola beberapa program studi, yang sebelumnya dianggap berada di luar mandatnya. Pada dekade 1980an Fakultas Tarbiyah di beberapa PTKIN mulai membuka program studi Tadris Matematika, Tadris Fisika, Tadris Biologi, dan Tadris Bahasa Inggris. Kata 'tadris' (yang artinya adalah 'pengajaran') dengan sengaja digunakan untuk menghindari argumen yang populer saat itu: bahwa jurusan 'pendidikan' adalah milik eksklusif PTN (khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Argumentasi linguistik semacam ini tentu saja tidak substantif sama sekali. Belakangan PTKIN menggunakan istilah yang berbeda: ada yang meneruskan penggunaan 'tadris' ada pula yang menggunakan kata 'pendidikan' untuk bidang-bidang tersebut. Pada 1990an dan sesudahnya, beberapa PTN juga membuka program studi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah eksklusif PTKIN, seperti Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam, Ekonomi Islam, atau Kajian Timur Tengah. Singkat kata, awal abad ke-21 ini ditandai dengan terjadinya semacam *rapproachment* antara dua jalur perguruan tinggi dalam intensitas yang belum pernah disaksikan sebelumnya.

Tentu saja, ini sama sekali tidak berarti bahwa kecenderungan dikotomis telah berakhir sepenuhnya. Ada banyak kalangan yang berpendirian bahwa *rapproachment* yang terjadi tidak perlu sama sekali, dan tidak akan membawa hasil positif apa pun. Keadaan tersebut dapat dipahami sepenuhnya, mengingat sudah sedemikian kuatnya pengaruh epistemologi Barat sekuler dalam pengembangan keilmuan di seantero dunia. Betapapun juga, apa yang sedang terjadi sekarang jelas merupakan sebuah fenomena historis yang menarik untuk dinanti hasil akhirnya.

E. UIN: Menghapus Dikotomi Pendidikan

Dekade 1990an ditandai oleh lahirnya wacana akademik yang semakin lantang tentang perlunya mendirikan Universitas Islam Negeri. Wacana ini kemudian menjadi landasan bagi upaya-upaya riil meningkatkan status kelembagaan beberapa IAIN menjadi UIN, dimulai oleh IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Yang pertama berhasil menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002 dan yang belakangan menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2004.³¹

³¹ Belakangan beberapa yang lain menyusul: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (2005), UIN Alauddin Makassar (2005), UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2005), UIN Sunan Ampel Surabaya (2013), UIN Ar Raniry Banda Aceh (2013), UIN Wali Songo Semarang (2014), UIN Raden Fatah Palembang (2014), dan UIN Sumatera Utara (2014). Dengan demikian total ada sebelas IAIN yang telah beralih status menjadi UIN.

Secara sederhana apa yang dilakukan di UIN melibatkan dua tataran. Tataran *pertama* bersifat filosofis-teoretis yakni membangun sebuah epistemologi dan kerangka berpikir baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tataran *kedua* adalah menyediakan lingkungan dan dukungan untuk mempraktikkan epistemologi dan kerangka berpikir tersebut dalam satu sistem operasi perguruan tinggi. Tujuan yang diinginkan adalah berakhirnya dikotomi ilmu pengetahuan, berganti dengan integrasi ilmu pengetahuan. Pada akhirnya model pengembangan ilmu pengetahuan yang integratif tadi diproyeksikan akan memberi dampak mendasar bagi pembentukan masyarakat yang menghargai nilai-nilai akademik ilmiah sekaligus berkarakter saleh-religius.

Di UIN-UIN berlangsung pencarian dan perumusan model filsafat ilmu yang tidak lagi dikotomis, tetapi memadukan antara rumpun ilmu-ilmu keagamaan dan rumpun ilmu-ilmu kealaman, sosial, dan humaniora. Meskipun pada dasarnya semua menuju pada satu titik yang sama, dalam praktiknya masing-masing mempopulerkan nomenklatur yang berbeda untuk merumuskan 'model' epistemologinya. Misalnya, UIN Sunan Kalijaga mempopulerkan istilah 'Integratif-Interkonektif', UIN Malang memilih istilah 'Pohon Ilmu Pengetahuan', UIN Surabaya memperkenalkan 'Menara Kembar', dan UIN Sumatera Utara mengangkat tema integrasi 'Transdisipliner'. Perbedaan dalam pilihan nomenklatur tersebut tampaknya hanyalah soal nuansa dan pilihan kata belaka. Sesungguhnya, di sana tidak terdapat perbedaan yang sangat substantif.³² Oleh karena itu, substansi dari perbedaan nomenklatur itu tidak menjadi perhatian yang sangat penting dalam konteks pembahasan saat ini. Cukuplah dikatakan bahwa saat ini sedang terjadi sebuah upaya bersama dalam skala yang sangat besar dan serius menyusun epistemologi baru yang diproyeksikan akan menghapus epistemologi dikotomis yang selama ini mendominasi dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Pada tataran lainnya di UIN-UIN yang sudah berdiri juga sedang terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Alih status dari insitut menjadi universitas telah memberi peluang luar biasa bagi UIN. Aspek yang paling mudah diamati adalah perkembangan fisik kampus yang rata-rata berkembang sangat pesat seiring dengan peralihan menjadi UIN. Hal ini dapat

³² Sejumlah buku telah ditulis untuk menjelaskan epistemologi baru yang dianut oleh UIN-UIN tersebut. Sekedar untuk menyebutkan beberapa: Akh. Minhaji, & Kamaruzzaman, *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam* (Yogyakarta: Aruzz, 2003); Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Jakarta: Arasy Mizan & UIN Jakarta Press, 2005); Imam Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi: Konsep Pendidikan Tinggi yang Dikembangkan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang* (Malang: UIN Malang, 2005); A.M. Saifuddin, *Islamisasi sains dan Kampus* (Jakarta: PPA Consultants, 2010); Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Rekonstruksi Pend Tinggi Isl: Memberi Makna Kelahiran UIN SU* (Medan: UIN Press, 2014).

disaksikan di semua UIN yang saat ini sudah operasional. Bantuan yang berasal dari Islamic Development Bank (IsDB) merupakan satu faktor yang sangat penting dalam hal ini. Dukungan finansial dari pemerintah Indonesia dengan sendirinya juga mengalami peningkatan seiring dengan perluasan tanggungjawab yang diberikan kepada kampus. Pertumbuhan yang sama juga terjadi dalam aspek sumber daya manusia (SDM) dan mahasiswa. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang alamiah. Pertambahan program studi yang dikelola dengan sendirinya mengundang jumlah mahasiswa yang lebih besar; dan jumlah mahasiswa yang lebih besar menuntut pertambahan jumlah SDM. Di UIN-UIN juga dilakukan perbaikan pada aspek pengelolaan sebagai bagian integral dari tuntutan menjadi kampus yang lebih baik. Serangkaian peningkatan kapasitas SDM dilakukan oleh masing-masing kampus guna memastikan terbangunnya sebuah budaya kerja baru yang lebih berkualitas.³³

Demikianlah, di lingkungan UIN-UIN sedang berlangsung sebuah eksperimen besar-besaran yang melibatkan sebuah visi dan misi mengakhiri dikotomi pendidikan bangsa ini. Sebuah eksperimen sedang dilakukan dalam segala tataran secara simultan: mulai dari tataran filosofis hingga yang paling praktis.

F. UIN SU: Ketika Layar Telah Berkembang...

Tanggal 16 Oktober 2014 menjadi sangat spesial karena pada hari itu diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014. Peraturan Presiden tersebut menetapkan pendirian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) melalui mekanisme alih status dari IAIN SU. Sesungguhnya, IAIN Sumatera Utara Medan telah intens terlibat dalam wacana peralihan status menjadi UIN sejak 1990an melalui relasi-relasi keilmuan antara sejumlah dosen IAIN SU dengan Jakarta dan Yogyakarta. Sebuah kepanitiaan untuk mempersiapkan berbagai hal telah dibentuk pada tahun 2003 atas perintah Rektor saat itu, Prof. Dr. M. Yasir Nasution. Kepanitiaan dibagi ke dalam dua tim dengan dua bidang tugas yang berbeda. Tim *pertama* diketuai oleh Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA (Rektor saat ini, 2015), ditugasi menyusun proposal untuk memperoleh bantuan/hibah dari Islamic Development Bank. Penulis sendiri mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari tim *kedua* yang diamanahi tugas menyusun sejumlah proposal pembukaan program studi baru.

Dengan demikian, pengupayaan alih status menjadi UIN telah berjalan lebih dari satu dekade sebelum akhirnya terealisasi. Ada banyak faktor yang

³³ Pada rentang tahun 2009 hingga tahun 2013, IAIN SU melakukan pengiriman SDM (dosen dan tenaga kependidikan) ke berbagai kegiatan peningkatan kapasitas di berbagai tempat di dalam maupun di luar negeri. Lihat *Laporan Pertanggungjawaban Rektor IAIN Sumatera Utara Periode 2009- 2013*, h. 11-12.

menyebabkan perjuangan menjadi UIN Sumatera Utara memerlukan waktu sedemikian panjang: sejumlah kondisi objektif ditambah pergeseran kebijakan umum Kementerian Agama tentang alih status. Secara objektif, peralihan menjadi universitas dari sebuah institut memang menuntut syarat yang tidak sedikit dan melalui berbagai tahapan proses yang tidak mudah. Berbagai penyesuaian dalam berbagai aspek perlu dilakukan sebelum alih status: epistemologi, kurikulum, sumber daya manusia, berbagai aspek tata kelola, jumlah mahasiswa, dan sebagainya. Di sisi lain, setelah eksperimen alih status gelombang pertama UIN, Kementerian Agama RI menetapkan kebijakan untuk melakukan semacam moratorium sembari melihat dan mengevaluasi perkembangan dari beberapa UIN yang telah ada. Tampaknya, inilah yang terjadi di bawah kepemimpinan Menteri Agama RI Maftuh Basyuni (2004-2009). Apakah untuk lebih baik atau malah sebaliknya, jelas sekali bahwa kebijakan tersebut telah membuat UIN SU harus menunggu lebih lama untuk terealisasi.

Ketika proses alih status telah mencapai episode akhirnya dan UIN Sumatera Utara yang dinanti-nanti telah berdiri, pertanyaan yang segera mengemuka adalah: *what next?* Bagaimana lembaga baru yang sangat besar ini harus diperlakukan untuk memastikannya mempunyai masa depan yang menjanjikan? Bagaimana langkah-langkah pengupayaan yang mesti ditempuh untuk memastikan bahwa lembaga baru ini benar-benar berkontribusi besar bagi perkembangan peradaban dan kemanusiaan?

Menurut hemat saya, yang *pertama* dan paling utama harus dipastikan adalah bahwa seluruh warga UIN Sumatera Utara bersyukur kepada Allah swt. atas tercapainya alih status menjadi universitas. Rasa syukur ini diwujudkan dalam bentuk keinginan dan kesediaan untuk berpartisipasi penuh sesuai kapasitas dalam mengelola universitas secara baik. *Kedua*, perlu dipastikan bahwa semua warga UIN Sumatera Utara dan juga masyarakat memahami secara baik visi dan misi universitas baru ini. Adalah sangat penting untuk membuat semua orang paham bahwa ini bukan sekedar sebuah universitas lain. UIN Sumatera Utara adalah sebuah universitas dengan visi dan misi yang berbeda dari universitas lainnya. *Ketiga*, memastikan bahwa seluruh aspek UIN Sumatera Utara didasarkan sepenuhnya atas filsafat ilmu integratif, di mana ilmu, sains dan seni menyatu padu dengan nilai-nilai keislaman. *Keempat*, pengembangan kapasitas dan penambahan jumlah sumber daya manusia. Peralihan menjadi universitas jelas sebuah lompatan besar yang meniscayakan kebutuhan akan sumber daya manusia yang lebih banyak dengan kapasitas yang lebih baik dan jenis keahlian yang lebih beragam pula. *Kelima*, pembangunan budaya kerja baru yang benar-benar modern dengan daya saing yang tinggi. *Keenam*, peningkatan kampus, prasarana, sarana, dan kelengkapan. Ini adalah sangat penting. UIN Sumatera Utara mestilah mengoptimalkan bantuan yang diberikan Islamic Development Bank untuk pembangunan kampus baru.

Ketujuh, pengembangan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang lebih tinggi. Saat ini, bagi UIN Sumatera Utara semua sivitas akademika dan warganya adalah tidak cukup. Tak cukup jika mengingat visi, misi, tujuan, sasaran, dan perubahan yang direncanakan. Maka satu orang saja sumber daya manusia yang tidak merasa memiliki UIN Sumatera Utara adalah terlalu banyak.

Semua yang disebut pada paragraf di atas tentu saja masih harus diperinci ke dalam langkah-langkah teknis-operasional dan kemudian disosialisasikan di kalangan semua pemangku kepentingan. Lalu UIN Sumatera Utara siap mengembangkan layar sepenuh-penuhnya dan mengarungi hamparan samudera sejarah di hadapannya. Pada akhirnya, sejarah dan waktu pasti akan menyibak takdir sesungguhnya dari perguruan tinggi ini.

G. Penutup

Ide-ide dan pengenalan kelembagaan baru sama sekali tidaklah aneh dalam sejarah pendidikan Islam. Nyatanya, pada setiap zaman kita dapat menyaksikan rekaman sejarah tentang berbagai ijtihad dan upaya umat Islam untuk mengembangkan berbagai lembaga pendidikan yang dipandang paling ideal. Pengenalan lembaga pendidikan jenis atau model baru biasanya didorong oleh berbagai keadaan tertentu dalam bidang pendidikan. Sebagai rangkaian proses pengupayaan ada jenis lembaga pendidikan yang lebih berhasil dalam sejarah jika dibandingkan dengan jenis lembaga pendidikan lainnya.

Sebagai bagian dari rangkaian sejarah, sebelas UIN yang berdiri di Indonesia dalam dua dekade terakhir tidak lebih dari perwakilan sebuah episode baru, melanjutkan episode-episode sebelumnya dari ijtihad di bidang kelembagaan pendidikan. Dikotomi pada semua aras pendidikan nasional Indonesia menjadi latar belakang historis paling dominan bagi munculnya gagasan dan pengupayaan UIN. Dikotomi yang telah mengoyak pendidikan Indonesia lalu direspon dengan gagasan integrasi ilmu pengetahuan. Maka tak mengherankan bahwa integrasi ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi poros eksistensial dari UIN. Dari epistemologi integratif tersebut diproyeksikan akan lahir sebuah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan yang memadukan aktivitas ilmiah dan nilai-nilai dasar Islam. Pada gilirannya, diharapkan akan lahir pula sebuah perubahan sosial yang menggambarkan keterpaduan sains dan kesalehan.

Sebelas UIN telah berdiri sejauh ini. Segunung harapan dibebankan kepada lembaga-lembaga tersebut. Karena itu setiap upaya perlu dilakukan untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut berkembang dalam mengemban misi eksistensinya. Karena itu pula segenap warganya wajib mengambil

peran dan berkontribusi seoptimal mungkin sesuai keahlian dan kapasitasnya. Upaya perbaikan yang dilakukan harus bersifat komprehensif, mencakup aspek teoretis-filosofis hingga teknis-operasional. Sebagai sebuah bentuk ijtihad kependidikan, nilai terpenting terletak pada kesungguhan pengupayaan. Sebagai sebuah eksperimen sejarah, waktu jua lah yang akan menentukan hasil akhirnya.

KONSTRUKSI SISTEM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM PADA MASA DINASTI SALJUQ DAN AKTUALISASINYA DI INDONESIA

Prof. Dr. Abd. Mukti, MA

Profesor Sejarah Pendidikan Islam
pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman Nabi saw., baik pada periode Makkah maupun periode Madinah. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga pendidikan yakni rumah-rumah para sahabat dan masjid. Di lembaga keagamaan ini, pendidikan dan pengajaran diberikan langsung oleh Nabi saw., yang diikuti para sahabat sebagai penuntut ilmu. Materi pelajaran yang disampaikan Nabi saw., pada kedua lembaga pendidikan awal tersebut adalah Al-Qur'an, pendidikan akidah dan akhlak di Makkah, dan dilanjutkan dengan pendidikan ibadah, sosial dan kemasyarakatan di Madinah dengan menggunakan beberapa metode antara lain: metode ceramah, diskusi, tanya jawab, debat, dan demonstrasi. Selanjutnya Nabi saw., membangun *shuffah* di samping masjid sebagai sarana tempat penuntut ilmu tinggal selama belajar kepada beliau. Tujuan pendidikan pada masa Nabi saw., adalah untuk mendidik manusia yang kuat imannya, berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan warga negara yang baik. Hal ini dapat dipahami dari beberapa hadis Rasul saw., dan kemudian dijabarkan oleh para khalifah, pengganti beliau, dan para ulama yang datang kemudian. Inilah sistem pendidikan yang dibangun Nabi saw., untuk pertama kalinya.

Pendidikan Muslim, baik lembaga pendidikannya maupun sistem pendidikannya, tidaklah statis melainkan dinamis mengikuti dinamika masyarakat tempat di mana pendidikan itu berlangsung. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas (132/750-656/1258), dikarenakan pendidikan Muslim ketika itu sudah bersentuhan dengan pendidikan asing lainnya yang lebih tua seperti pendidikan *Hellenis* (Yunani), Persia, India dan Cina. Persentuhan pendidikan

Muslim dengan pendidikan asing tersebut terjadi di daerah-daerah yang diduduki Islam terutama Persia dan Bukhara, yang pada gilirannya melahirkan lembaga-lembaga pendidikan baru seperti: Bayt al-Hikmah, *bimaristan*, *ribath*, *zawiyah*, *khanqah*, *observatorium* dan madrasah. Hal yang sama terjadi juga dalam bidang sistem pendidikan terutama pada faktor kurikulumnya, sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Hal ini berlaku juga bagi umat Muslim.

Islam memerintahkan umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum (*al-‘ulum al-‘aqliyyah; secular sciences*). Untuk melaksanakan anjuran ini, maka dimasukkanlah ilmu pengetahuan tersebut ke dalam kurikulum pendidikan di samping ilmu pengetahuan agama (*al-‘ulum al-naqliyyah; religious sciences*). Hal ini terjadi di masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, kaum Muslimin mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti matematika, filsafat dan kedokteran, dan mereka memasukkannya ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan tinggi Muslim seperti *jami'* dan madrasah di seluruh dunia Muslim untuk dipelajari para penuntut ilmu. Dengan sangat antusias, para penuntut ilmu ketika itu, mempelajari ilmu-ilmu umum tersebut, sehingga pada gilirannya lahirlah sarjana-sarjana Muslim yang handal dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Saljuq (1058-1157).

Tampaknya, sistem pendidikan tinggi Islam yang dikonstruksi oleh Dinasti Saljuq, khususnya sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah (450/1058-813/1410) masih relevan untuk dikaji dewasa ini. Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pembahasannya pada masalah “Konstruksi Sistem Pendidikan Tinggi Islam pada Masa Dinasti Saljuq dan Aktualisasinya di Indonesia”.

B. Tinjauan Historis Sistem Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai sarana kemajuan umat telah dimulai sejak awal kedatangan Islam, baik institusinya maupun sistem pendidikannya. Edukasi (pendidikan) Islam itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Di Makkah muncul Rumah al-Arqam ibn Abdi Manaf (w. 55/675), tempat di mana baginda Rasul mengajar para sahabat dan kaum muslimin. Kurikulumnya terdiri dari Al-Qur'an dan dasar-dasar pengetahuan agama lainnya. Setelah berdirinya negara Madinah, Masjid Nabawi segera berfungsi sebagai lembaga pendidikan penting dalam Islam menggantikan rumah Abu Ayyub al-Anshari (w. 52/672). Sebagai pusat pendidikan, masjid ini dilengkapi dengan lembaga *Shuffah* yang berfungsi sebagai asrama tempat tinggal para penuntut ilmu yang datang dari jauh untuk belajar kepada Nabi saw. Tampaknya, kurikulum pendidikan yang dilaksanakan Nabi saw., itu berorientasi pada kebutuhan kaum Muslimin ketika itu. Sebagian penduduk

Madinah diketahui bergerak pada bidang perdagangan, yang sangat membutuhkan pengetahuan membaca dan menulis, dan untuk itu Nabi saw., memerintahkan para tawanan Badar yang non Muslim untuk mengajarkan anak-anak Muslim Madinah pengetahuan membaca dan menulis tersebut sebagai tebusan mereka. Di samping itu, secara khusus, Nabi menyuruh Sahabat Zaid ibn Tsabit (w. 45/665) mempelajari Bahasa Suryani,¹ sebagaimana Nabi saw., memerintahkan umat Islam belajar ke negeri Cina sekalipun.

Kurikulum pendidikan Islam mengalami penambahan dan perluasan yang sangat signifikan pada periode Khulafa al-Rasyidin (11/632-40/661). Adalah Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab (12/634-23/644), orang pertama, yang memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam pengetahuan berenang, menunggang kuda, memanah dan syair.² Langkah yang ditempuh Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab itu diikuti para khalifah, sultan-sultan dan ulama yang datang sesudahnya, misalnya Imam al-Syafi’i ra. (150/767-204/820). Beliau merekomendasikan pengetahuan matematika dan bahasa³ dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Begitu juga Imam al-Ghazali (450/1058-505/1111) yang datang tiga abad kemudian, menganjurkan pengetahuan filsafat⁴ dan logika⁵ dipelajari para pelajar Muslim agar pengetahuan mereka

¹ (Dari Zaid ibn Tsabit berkata ia: Rasulullah saw. menyuruh aku belajar Bahasa Suryani). Lihat Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah al-Tirmiziy, *al-Jami’ al-Shahih*, Jilid 1 (Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1974), h. 68. Ke dalam bahasa Suryani inilah karya-karya para filosof Yunani terdahulu diterjemahkan sebelum datangnya Islam. Karya-karya tersebut antara lain meliputi: filsafat, matematika dan astronomi. Ini berarti bahwa secara tidak langsung Nabi saw., memerintahkan kepada umat Muslim supaya belajar filsafat Yunani, matematika, astronomi dan ilmu-ilmu umum (*secular sciences*) lainnya.

² قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم بالسباحة والفراسة والرماية والشعر. (Umar r.a. berkata: ajarilah anak-anakmu berenang, menunggang kuda, melempar panah dan syair). Lihat Abu al-‘Abbas Muhammad ibn Yazid al-Mubarrid, *al-Kamil li al-Mubarrid*, Jilid I (ttp: Dar al-Fikr, t.t.), h. 180.

³ قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نيل مقداره ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن لم يرض نفسه لم ينفعه علمه. (Imam al-Syafi’i ra. berkata: Barangsiapa yang mempelajari Al-Qur’an niscaya tinggi kedudukannya, dan barangsiapa yang mempelajari fikih niscaya tinggi kecerdasannya, dan barangsiapa yang mempelajari hadis niscaya kuat argumentasinya, dan barangsiapa yang mempelajari matematika niscaya kuat pendapatnya, dan barangsiapa yang mempelajari bahasa, niscaya halus budinya, dan barangsiapa yang tidak memelihara dirinya niscaya tidak berguna ilmunya baginya. Lihat al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (Surabaya: Bongkol Indah, t.t.), h. 45-46.

⁴ Al-Ghazali merasa bahwa hanya orang yang telah menguasai ilmu (filsafat) sampai taraf tertentu yang dapat bersaing dengan orang yang paling ulung dalam ilmu tersebut. Lihat Madjid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam*, terj. R. Mulyadi Kartanegara (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), h. 309.

⁵ Al-Ghazali mengatakan bahwa pengetahuan seseorang yang tidak pernah belajar

kukuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumbuh ulama sudah sepakat agar setiap lembaga pendidikan Islam apapaun namanya hendaknya mencantumkan pengetahuan agama (*al-»ulum naqliyyah; religious sciences*) dan pengetahuan umum (*al-»ulum al-aqliyyah; secular sciences*) dalam kurikulumnya.

Pendidikan Islam mengalami kemajuan pesat setelah bersentuhan dengan pendidikan asing terdahulu, terutama Yunani,⁶ Persia, India dan Cina.⁷ Hal ini berlangsung sepanjang pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Khalifah al-Makmun (198/813-218/833) mendirikan lembaga pendidikan tinggi yakni Bayt al-Hikmah di Bagdad. Kemudian diikuti oleh Khalifah Fathimiyah yang mendirikan Jami' al-Azhar dan Dar al-Hikmah di Kairo, Mesir. Begitu juga Khalifah Umayyah Andalusia mendirikan Jami' Kordova. Di samping itu muncul pula lembaga pendidikan tinggi lainnya, seperti *bimaristan*, *ribath*, *zawiyah*, *khanqah* dan observatorium. Meskipun Dinasti Abbasiyah mengalami kelemahan sejak wafatnya Khalifah al-Mutawakkil (232/847-247/861), namun pendidikan Islam tetap mengalami kemajuan pesat. Hal ini berlangsung di bawah kekuasaan para Sultan Sunni yang memerintah di sebelah timur kota Bagdad, yakni Bukhara di Transoxiana (*Ma wara' al-nahr*). Di antaranya adalah Dinasti Samaniyah (204/819-395/1005). Pada masa ini muncul madrasah pertama di dunia Islam yang didirikan oleh Amir Ismail ibn Ahmad al-Samani (279/892-295/907), yang dilengkapi dengan perpustakaan besar. Sayang madrasah ini hancur dalam peperangan yang terjadi antara Sultan Mahmud al-Ghaznawi (388/998-421/1030) melawan Amir Samaniyah.

Usaha mendirikan madrasah kemudian diikuti oleh para pemimpin Muslim yang datang sesudahnya seperti Nizham al-Mulk (409/1018-485/1092),

logika adalah tidak bisa diandalkan. Lihat Nurcholish Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 47.

⁶ *He also arranged for the education and training in Macedonian fashion of 30.000 native youth.* (Iskandar Yang Agung juga menyelenggarakan pendidikan dan latihan model Macedonia (Yunani) kepada 30.000 pemuda kota Bactra atau Bactria (sesudah Islam kota ini dikenal dengan nama Balkh) di Persia. Lihat W.W. Tarn, *Alexander the Great* (Cambridge: The University Press, 1951), h. 77. Diperkirakan bahwa sistem pendidikan yang dilaksanakan Alexander The Great itulah yang mengilhami berdirinya sistem madrasah di dunia Islam. Dengan demikian madrasah sebagaimana yang kita kenal sekarang ini bukanlah budaya *Arabo Muslim culture* melainkan budaya *Perso Muslim Culture*.

⁷ Ketika itu bangsa Cina sudah memiliki pengetahuan teknik pembuatan kompas dan jam, pengetahuan teknik industri pembuatan kertas dan teknik kimia pembuatan mesiu. Berarti secara tidak langsung Nabi saw., memerintahkan umat Islam belajar semua pengetahuan bangsa Cina tersebut. Chitab ini dapat dipahami dari hadis Nabi saw., yang berbunyi: *عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلبوا العلم ولو بالصين.* (Nabi saw., bersabda: tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina). Lihat Abubakar Ahmad ibn al-Husayin al-Bayhaqiy, *Syua'ab al-Iman*, Jilid II (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990), h. 234-235.

Perdana Menteri Dinasti Saljuk, di Persia dan Irak, Atabek Nurdin Zinki (541/1146-569/1174) di Syria, Shalah al-Dîn al-Ayyubi (564/1169-589/1193), Sultan Ayyubiyah di Mesir, dan Ya'kub al-Mansur (580/1184-595/1199), Raja Muwahhidun di Marokko. Di Indonesia (tradisional: Nusantara) muncul Sultan Malik al-Shalih (w. 1290), Raja Pasai, dan Abdullah Ahmad (1878-1932), salah seorang tokoh pembaharu pendidikan, dari Sumatera Barat. Dalam pada itu, Nizham al-Mulk, dikenal pemegang rekord sebagai pendiri madrasah terbanyak pertama di dunia Islam, kemudian diikuti oleh Sultan Shalah al-Dîn al-Ayyubi dari Mesir, sebagai pendiri madrasah terbanyak kedua di dunia Islam.

C. Berdirinya Lembaga Pendidikan Tinggi Islam pada Masa Dinasti Saljuq

Untuk merubah idiologi Dinasti Saljuk dari Sunni ke idiologi Mu'tazilah yang dianutnya, maka Al-Kunduri (w. 456/1064), perdana menteri Sultan Thugril Beg (429/1038-455/1063), melakukan penindasan terhadap ulama-ulama Sunni di seluruh propinsi Khurasan. Di antara mereka ada yang diusir seperti Al-Baihaqi (w. 458/1066) dan Al-Juwaini (478//1085). Yang disebut terakhir ini adalah gurunya Al-Ghazali. Kedua ulama besar tersebut pergi ke Hijaz). Sementara Al-Qusyairi (w. 465/1072) dan kawan-kawannya dipenjara di Kandahar, Afganistan. Ketika itu Gubernur Khurasan dipegang oleh Alp Arselan (450/1058-455/1063), dan Nizham al-Mulk sebagai perdana menterinya. Kedua tokoh ini dikenal pembela Mazhab Sunni yang sangat gigih. Maka untuk mengakhiri penindasan yang dilakukan Perdana Menteri Mu'tazili itu serta untuk membela mazhab resmi nagara dan para ulama Sunni tersebut, Nizham al-Mulk di bawah perlindungan Gubernur Alp Arselan, mendirikan sebuah madrasah di Naisabur dan memanggil pulang Al-Juwaini untuk memimpin dan mengajar di madrasah Sunni ini. Selanjutnya Nizham Mulk, juga mendirikan madrasah serupa di seluruh propinsi Khurasan, dan propinsi-propinsi lainnya setelah Alp Arselan memegang jabatan Sultan Saljuk sejak tahun 455/1063 hingga tahun 465/1072. Dengan demikian madrasah yang didirikan Nizham al-Mulk dalam kedua periode tersebut seluruhnya berjumlah 13 unit, yang kemudian dikenal sesuai dengan namanya yakni Madrasah Nizhamiyah. Ketiga belas madrasah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Madsrasah Nizhamiyah Naisabur;
2. Madrasah Nizhamiyah Herah;
3. Madrasah Nizhamiyah Merv;
4. Madrasah Nizhamiyah Balkh;
5. Madrasah Nizhamiyah Bagdad;
6. Madrasah Nizhamiyh Bashrah;

7. Madrasah Nizhamiyah Mosul;
8. Madrasah Nizhamiyah Isfahan;
9. Madrasah Nizhamiyah Jazirah Ibnu Umar;
10. Madrasah Nizhamiyah Aleppo;
11. Madrasah Nizhamiyah Amul Thabaristan;
12. Madrasah Nizhamiyah Khuzistan;
13. Madrasah Nizhamiyah Yaz;

Selain Madrasah Nizhamiyah, Nizham al-Mulk juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya, yaitu *ribath* (sekolah sufi); *bimaristan* (sekolah kedokteran) dan Observatorium (sekolah astronomi). Akan tetapi dari semua lembaga pendidikan tinggi yang didirikan Nizham al-Mulk tersebut yang paling monumental adalah Madrasah Nizhamiyah.

Madrasah Nizhamiyah didirikan pada tahun 450/1058, dan madrasah ini hancur dalam tahun 816/1413, tahun di mana Madrasah Nizhamiyah Bagdad hancur. Karena itu tidak seluruhnya benar asumsi sebagian penulis dan peneliti yang menyatakan bahwa serangan bangsa Mongol ke Bagdad telah menghancurkan semua bangunannya rata dengan tanah. Dengan demikian serangan bangsa Mongol bukan satu-satunya penyebab kemunduran umat Islam. Penyebab lainnya adalah, sebagaimana dikatakan George Makdisi, karena terjadinya pertikaian (*antagonisme*) antar golongan keagamaan dalam bidang politik dan paham keagamaan. Dan ditinggalkannya metode diskusi dan debat dalam pendidikan Islam sebagaimana yang disaksikan Ibnu Khaldun (732/1332-808/1406) di Afrika Utara pada abad ke-XIV. Kedua hal ini menyebabkan sikap kreativitas dan daya kritis para penuntut ilmu menjadi hilang karenanya. Konsekuensinya ijtihad terhenti dan muncullah taqlid di mana-mana yang pada gilirannya membuat umat Islam mengalami kemunduran (*stagnasi*). Menurut Ibnu Rusyd (1126-1192) periode taqlid dimulai menjelang berakhirnya abad klasik (650-1250), dan berlangsung sepanjang abad Pertengahan (1250-1800).

D. Konstruksi Sistem Pendidikan Tinggi Islam pada Masa Dinasti Saljuq

Al-Juwaini dan Abu Ishaq al-Syirazi (w. 476/1083) merupakan dua guru besar yang mendapat giliran pertama untuk mengkonstruksi sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah yang sangat monumental dalam sejarah pendidikan Muslim. Sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah dimaksud yang sangat dinamis dan inovatif itu meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Tujuan.

Tujuan pendidikan pada Madrasah Nizhamiyah adalah untuk mengajarkan keempat madzhab Sunni yang ada. Namun demikian karena madzhab Hanafi dianut oleh para sultan dan keluarganya, sementara madzhab Syafi'i dianut oleh menteri dan petinggi-petinggi negara lainnya, maka secara politis dan teologis kedua madzhab itu tentu saja mendapat perhatian lebih banyak. Di samping itu Madrasah Nizhamiyah juga mempunyai tujuan untuk mengeluarkan tenaga-tenaga guru, pegawai kesultanan, juru dakwah dan kader-kader ulama Sunni, yang menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di antaranya ada yang berkaliber dunia yakni Imam al-Ghazali.

2. Faktor Guru

Untuk mencapai tujuan-tujuan Madrasah Nizhamiyah tersebut di atas, maka pemerintah merekrut staf pengajar atau guru-guru⁸ (*mudarris*) dari kalangan tokoh-tokoh Sunni yang sudah populer di mata masyarakat untuk memberikan pelajaran pada madrasah tersebut yang merangkap sebagai pimpinannya. Untuk kelancaran tugasnya, guru-guru itu didampingi oleh setidak-tidaknya seorang asisten (*mu'īd*) atau lebih, sesuai dengan kebutuhannya dan penasehat akademis (*wa'izh*). Satu hal lagi yang tidak kalah menariknya adalah bahwa Madrasah Nizhamiyah sudah memperkenalkan guru tamu atau guru tidak tetap yang di sebut *muntasib*. Di antaranya adalah Nizham al-Mulk sendiri dan Abu Ishak al-Syirazy. Di antara guru Madrasah Nizhamiyah ada yang ditugasi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas politik seperti dalam kasus Abu Ishaq al-Syirazy. Di lingkungan Madrasah Nizhamiyah sering terjadi perpindahan tempat tugas staf pengajar dari satu madrasah ke madrasah lainnya. Kebijakan ini tentu saja akan membantu proses integritas masyarakat di seluruh wilayah kesultanan Saljuq yang terpecah-pecah sejak akhir periode Abbasiyah pertama.

3. Faktor Murid

Sesuai dengan tujuan pendidikannya, Madrasah Nizhamiyah menerima murid-muridnya yang berasal dari salah satu madzhab yang empat. Kualifikasi calon murid-murid madrasah itu setidak-tidaknya harus lulusan *kuttab*. Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap murid-murid madrasah tersebut dengan menyediakan bea siswa kepada mereka secara reguler dan akomodasi lainnya agar mereka dapat memusatkan perhatiannya pada studi

⁸ Lihat Abd. Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam: Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhamiyah Dinasti Saljuq* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h.206-210.

semata-mata. Dengan begitu Madrasah Nizhamiyah telah banyak menghasilkan alumni⁹ yang ber-predikat ulama, sarjana, politikus, negarawan, sastrawan dan sejarawan. Wawasan keilmuan dan kegiatan studi mereka mencakup semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia Muslim ketika itu. Di tangan alumni-aumni Madrasah Nizhamiyah ini pula kelak terjadinya konsolidasi terakhir madzhab Sunni dan harmonisasi antara syari'at dan tasawuf dan antara ilmu agama dan ilmu umum.

4. Faktor Kurikulum

Sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikannya, Kurikulum Madrasah Nizhamiyah tentu saja meliputi ilmu-ilmu agama (*al-`ulum al-`aqliyyah*) yang sesuai dengan keempat madzhab Sunni yang ada sebagai mata pelajaran pokok (*ijbary*) dan ilmu-ilmu umum (*al-`ulum al-`aqliyyah*) yang mendukung ilmu-ilmu agama tersebut sebagai mata pelajaran tambahan (*ikhtiyariy*). Yang lebih penting lagi ilmu-ilmu umum itu untuk mencerdaskan para penuntut ilmu dalam rangka mengeluarkan sumber daya manusia yang mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi negara, dan sekaligus dalam rangka menjawab tantangan-tantangan zaman. Karena itu posisi ilmu-ilmu umum dalam kurikulum Madrasah Nizhamiyah sudah kuat sekali, tidak lagi sekedar mata pelajaran pendamping. Kondisi pemerintahan Saljuq sangat kondusif bagi pengembangan kurikulum tersebut karena mempunyai tiga unsur progresif yang sangat mendukung yakni: (1) elit militer, (2) birokrasi, (3) dan ulama Sun-ni. Semuanya sangat mencintai ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, dan pelindung-pelindung madzhab Sunni, para ulama dan sarjana. Dengan demikian Madrasah Nizhamiyah tidak anti intelektual termasuk filsafat sebagai rahmat Allah swt., tidak seperti diasumsikan oleh kebanyakan orang. Gambaran kurikulum Madrasah Nizhamiyah seperti itu merupakan buah dari hasil kemajuan sosio-intelektual dan keagamaan yang dicapai sejak abad II Hijriyah/abad VIII Masehi, dan mencapai puncaknya dalam abad IV Hijriyah/abad X Masehi yang melahirkan para ulama, ilmuwan dan filosof Sunni.

Karena itulah Madrasah Nizhamiyah memperoleh apresiasi lebih baik dalam hubungan seimbang antara studi agama dan umum. Jadi tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan umum dalam kurikulum Madrasah Nizhamiyah sebagaimana yang diasumsikan sebagian peneliti dan penulis. Jadi kurikulum Madrasah Nizhamiyah bersifat liberal, akomodatif, adoptif, adaptif, inovatif, elastis dan dinamis. Karena itu, kurikulum Madrasah Nizhamiyah diadopsi oleh dua buah universitas tertua di Eropa yakni Universitas Bologna di Italia dan Universitas Paris di Perancis. Kedua universitas ini didirikan dalam tahun

⁹ *Ibid.*, h. 211-215.

545/1150, satu abad setelah berdirinya Madrasah Nizhamiyah pertama di Naisabur. Pada masa berikutnya, sistem pendidikan kedua universitas tertua di Eropa itu diikuti oleh universitas-universitas lainnya di Eropa.

5. Faktor Metode.

Agar dapat menimbulkan sikap kreativitas dan sikap kritis para muridnya, maka para guru Madrasah Nizhamiyah memakai metode ceramah, diskusi, seminar, observasi dan eksperimen dalam menyampaikan pelajaran kepada murid-murid mereka. Perlu dicatat di sini bahwa pada Madrasah Nizhamiyah Naisabur pernah digelar sebuah seminar akbar yang menghadirkan dua orang nara sumber yaitu: Abu Ishaq al-Syirazi, *mudarris* merangkap rektor Madrasah Nizhamiyah Bagdad, dan Al-Juwainiy, *mudarris* dan sekaligus rektor Madrasah Nizhamiyah Naisabur. Dalam seminar ini dibahas dua topik menarik, yakni: (1) “إجتihad المصلى عن وجه القبلة ثم يخطئ” (Ijtihad orang yang shalat tentang arah qiblat lalu keliru), dan (2) “إجتihad عن نكاح البكر” (Ijtihad tentang hukum pernikahan gadis).

6. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan terdahulu yang mempunyai fungsi ganda, maka Madrasah Nizhamiyah semata-mata difungsikan sebagai lembaga pendidikan. Madrasah Nizhamiyah sudah memiliki kampus sendiri, dan karena itu tidak melaksanakan pendidikan dan pengajaran di masjid atau perpustakaan seperti jami' yang belajar di dalam masjid besar, dan Bayt al-Hikmah yang belajar di dalam perpustakaan. Kompleks madrasah-madrasah Nizhamiyah itu terdiri dari: (1) gedung madrasah tempat belajar; (2) asrama tempat tinggal para penuntut ilmu; (3) perpustakaan, (4) masjid atau musala; dan (5) pasar madrasah.

Dengan melihat sistem pendidikannya, maka Madrasah Nizhamiyah dapat dikatakan sebagai perguruan tinggi formal dan sistematis pertama di dunia, dan dengan demikian menjadi prototipe lembaga pendidikan Sunni penting yang kemudian diikuti para pemimpin Sunni lainnya. Bahkan menjadi model pula bagi dua perguruan tinggi terdahulu di Eropa yakni Universitas Bologna,¹⁰ Italia dan Universitas Paris,¹¹ Perancis, keduanya didirikan sekitar satu abad setelah berdirinya Madrasah Nizhamiyah Naisabur, sebagaimana telah disebut di muka.

¹⁰ Merritt M. Thompson, *The History of Education* (New York: Barnes & Noble. Inc., 1951), h. 148.

¹¹ Thompson, *The History of Education*, 148.

E. Aktualisasi Sistem Pendidikan Madrasah Nizhamiyah di Indonesia

Meskipun Madrasah Nizhamiyah tersebut sudah hancur sejak tahun 816/1413 Masehi, sebagaimana telah disebut di muka. Namun pengaruh sistem pendidikannya itu telah menyebar jauh di luar batas negeri asalnya, Khurasan, melalui kebijakan pendidikan para sultan di berbagai belahan dunia Muslim, yang bermitra dengan para ulama Sunni, sampai ke Indonesia (dahulu: Nusantara) pada paruh kedua abad XIII Masehi. Di kesultanan Pasai, muncul *meunasah*, yang menurut A. Mukti Ali,¹² seorang pakar sejarah Aceh, perkataan *meunasah* itu berasal dari bahasa Arab yakni *madrasah*.

Kemudian dari Kesultanan Pasai (659/1260-917/1511), sistem madrasah itu disebarkan ke daerah-daerah lainnya di Aceh sejak tahun 1512, di bawah patronase Kesultanan Aceh Darussalam (hancur 1331/1912). Pada periode ini munculah empat orang ulama terkenal di kesultanan Aceh ini yakni: Hamzah Fansuri; Syamsuddin al-Sumathraniy; Nuruddin al-Raniri (w. 1068/1658) dan Abdul Rauf al-Singkiliy. Para ulama ini, kecuali Al-Raniri, tentu saja pernah menempuh pendidikan rendahnya di *meunasah*. Murid-murid para ulama besar ini diketahui datang dari berbagai daerah di Indonesia. Tiga orang alumni Aceh yakni Datuk Ribandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Patimang, ketiganya asal Minangkabau, Sumatera Barat, dan murid Syamsuddin al-Sumathraniy, dikirim Sultan Aceh ke Makasar, Sulawesi Selatan, untuk menjadi guru agama di sana atas permintaan raja setempat. Syekh Burhanuddin dari Ulakan asal Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi dari Kerawang, Jawa Barat, keduanya murid Syekh Abdul Rauf al-Singkiliy. Sekembali ke kampung halamannya, keduanya aktif berdakwah dan mengajar tentu saja dengan menggunakan sistem madrasah yang pernah mereka terima dari gurunya itu. Dengan demikian aktualisasi sistem madrasah itu sudah merata di seluruh Indonesia melalui jaringan ulama¹³ dan alumni Aceh atau jaringan guru-murid. Pada lembaga

¹² Lihat A. Mukti Ali, *An Introduction to the Government of Aceh's Sultanate* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), h. 13.

¹³ Salah seorang Walisongo dikenal kelahiran Pasai adalah Syarif Hidayatullah. Ia memulai kariernya sebagai guru agama di istana Sultan Trenggono, raja Demak, sekembalinya dari Makkah. Kemudian karier militernya dimulai ketika ia memimpin sepasukan tentara, yang dikirim oleh Sultan untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa (Jakarta sekarang). Karena sukses mengusir Portugis, maka Syarif Hidayatullah memperoleh gelar *Fatahillah* (*falatehan*: Bahasa Portugis), artinya Sang Penakluk. Kesuksesan ini mengantarkan ia menjadi Sultan Banten, yang wilayahnya meliputi Jakarta dan Cirebon. Sultan Syarif Hidayatullah meninggalkan kegiatan politik setelah berusia tua dan kemudian mengundurkan diri ke Cirebon dan membangun sebuah perguruan agama (madrasah besar) di kaki Gunung Jati tempat ia mengajar dengan menggunakan sistem madrasah yang pernah dikenal di tanah kelahirannya Pasai. Karena itu sebagai ulama ia dipanggil Sunan Gunung Jati. Dengan

pendidikan ini pelajaran agama disampaikan dalam bahasa Melayu dan menggunakan abjad Arab yang dikenal dengan Tulisan Jawi¹⁴ yang sangat membantu integritas bangsa di seluruh Indonesia ketika itu.

Ketika gendeng pembaharuan pendidikan Islam ditabuh di Mesir gaungnya sampai juga ke Indonesia. Abdullah Ahmad (w. 1932) meresponnya dengan mendirikan Madrasah Adabiyah di Sumatera Barat pada tahun 1905. Kemudian langkah tokoh pendidikan ini diikuti oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah di Jawa, Al-Ittihadiyah dan Al-Washliyah di Sumatera Utara dan Aceh. Lebih spesifik lagi respon yang diberikan oleh K.H. Wahid Hasyim (1914-1953) dengan mengadopsi langsung nama Madrasah Nizhamiyah yang sangat terkenal itu ketika memperbaharui sistem pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah mengadopsi sistem pendidikannya, terutama kurikulumnya yang sangat dinamis yang dapat mengeluarkan pelajar-pelajar yang kreatif dan kritis dan karena itu mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang dihadapi bangsa ini.

Perlu dijelaskan di sini bahwa kurikulum pendidikan Islam merupakan faktor pendidikan yang paling banyak menimbulkan prokontra dalam masyarakat Islam di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut tentu saja akan merugikan umat Islam itu sendiri. Meskipun para ulam salaf sebagaimana disebutkan di muka semuanya sepakat merekomendasikan agar ilmu-ilmu aqliah seperti matematika, astronomi dan filsafat dimasukkan

demikian Syarif Hidayatullah bukan saja dikenal seorang ulama melainkan ia juga dikenal seorang militer dan raja. Hal ini menunjukkan bahwa Syarif Hidayatullah itu adalah seorang *mujaddid* (pembaharu) pendidikan terkemuka di Nusantara pada jamannya. Ketika Sultan Agung dari Mataram memperkenalkan kebijakannya yakni sinkritisme, untuk memperkuat kedudukannya, para wali menolaknya. Konsekuensinya masyarakat di wilayah Kesultanan Mataram terbagi kepada tiga golongan yakni kaum Priyayi; Abangan yang mendukung kebijakan sultan, dan kaum santri yang menolak kebijakan sultan. Pada waktu itu pendidikan agama dipusatkan di masjid. Sementara untuk memelihara kemurnian akidahnya, maka kaum santri mendirikan lembaga pendidikannya yang disebut pesantren. Di lembaga ini hanya diajarkan pengetahuan agama. Diperkirakan sejak inilah pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kita kenal sekarang ini muncul. Uraian lengkap mengenai hal ini dapat dibaca dalam HAMKA, *Sejarah Umat Islam*, Jilid IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1981). Lihat juga Tamar Djaya, *Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 126, 129, 142. Lihat juga Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), h. 23.

¹⁴ Diperkirakan istilah Jawi sebagai sebutan untuk Muslim Nusantara populer di Timur Tengah, Turki dan dunia Islam lainnya, sejak munculnya opsir-opsir Aceh asal Jawi di dalam angkatan perang Turki. Salah seorang di antaranya sebagaimana tersebut dalam literatur Turki adalah Kara Ali. Kara dalam bahasa Turki berarti hitam. Jadi Kara Ali artinya Pak Ali Hitam. Memang bila dibandingkan dengan orang Turki, maka kulit orang kita lebih hitam. Lihat HAMKA, *Sejarah Umat Islam*, h. 158, 192, 348.

dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam berdampingan dengan ilmu-ilmu *naqliyah*, dengan alasan ilmu-ilmu tersebut sangat membantu dalam pembahasan ilmu-ilmu *naqliyah*. Misalnya ilmu matematika membantu dalam memahami ilmu faraid. Begitu juga ilmu astronomi membantu dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan serta ilmu ini membantu dalam menentukan arah kiblat.

Dilihat dari segi kurikulum pendidikannya, maka lembaga pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini terbagi kepada dua: (1) lembaga yang hanya memberikan pengetahuan agama saja, seperti Madrasah Diniyah, Pesantren, Meunasah dan Surau. (2) lembaga yang memberikan pengetahuan agama dan umum sekaligus seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah untuk tingkat dasar dan menengah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN), untuk tingkat perguruan tinggi. Tampaknya ketiga sistem lembaga pendidikan tinggi Islam ini, sudah sesuai dengan sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah. Mudah-mudahan dengan mempelajari dan mengetahui sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah tersebut di atas dapat membantu para pembuat kebijakan pendidikan, pengelola pendidikan dan pengawas pendidikan dalam menata kembali dan memperbaiki sistem pendidikan Islam di negeri kita yang tercinta ini. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah dapat mengurangi pro kontra dalam masyarakat Muslim dan selanjutnya dapat menerima dan mendukung setiap usaha para pembaharu pendidikan Islam dengan syarat masih tetap dalam koridor ajaran Islam, tidak sekuler dan westernisasi (pembaratan). Perlu dicatat di sini bahwa dengan melihat kepada sistem pendidikannya, maka disadari atau tidak disadari hanya Universitas Islam Negeri yang melaksanakan kurikulum pendidikan Islam sepenuhnya sebagaimana yang telah dibangun Nabi saw., dan karena itu pula dapat dikatakan sudah mengikuti sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Mustanshiriyah. Pada madrasah yang disebut terakhir ini ternyata sudah diberikan pengetahuan teknologi pembuatan jam (*amal al-sa'at*) yang diajarkan oleh gurunya, Nur al-Din al-Sa`ati (w. 683/1284). Ia juga mengajarkan ilmu pengetahuan astronomi dan fisika di madrasah yang sama. Sebuah Karya jam Gadang, hasil karya guru ini dipasang pada pintu gerbang Madrasah Mustanshiriyah.¹⁵ Madrasah Mustanshiriyah ini hancur dalam tahun 1233/1620.

F. Penutup

Karena hasil rancang bangun para ulama Sunni, maka sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah dapat dijadikan sebagai legitimasi doktriner dalam

¹⁵ Umar Ridha Kahhalah, *Dirasat Ijtima'iyah fi al-'Ushur al-Islamiyyah: al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim* (Damaskus: al-Mathba'ah al-Ta'awuniyyah, 1293/1973), h. 56.

membangun dan memperbaiki sistem pendidikan Islam ke depan serta dapat mengurangi pro-kontra dalam masyarakat terhadap upaya-upaya para pembaharu sistem pendidikan Islam. Di samping itu sistem pendidikannya yang dinamis dan unggul menyebabkan Madrasah Nizhamiyah itu diakui sebagai perguruan tinggi formal dan sistematis pertama di dunia. Oleh karena itu, sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Mustanshiriyah hendaknya disosialisasikan pada masyarakat Indonesia, terutama di kalangan para pembuat kebijakan pendidikan yakni pemerintah, para pengelola pendidikan dan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga dunia Muslim maju dan pelopor kemajuan itu hendaknya Muslim Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- 'Abd al-'Al, Hasan. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qarn al-Rabi' al-Hijri*. Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadis, 1988.
- 'Abd al-Jabbar, Al-Qadhi. *Syarh al-Ushul al-Khamsah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1960.
- Abd. Mukti. *Pembaharuan Lembaga Pendidikan di Mesir: Studi Tentang Sekolah-Sekolah Moderen Muhammad 'Ali Pasya*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Abduh, Muhammad. *Al-Islam wa al-Nashraniyyin ma'a al-Ilm wa al-Madaniyah*. Kairo: Dar al-Manar, t.t.
- Abduh, Muhammad. *Risalah Tauhid*. Mesir: Mushatafa Babi al-Halabi, 1960.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdurrahman, Asmuni. "Memahami Al-Qur'an," dalam *Suara Muhammadiyah*, edisi 15, tahun 1995.
- Abidin, Danial Zaniat. *Quran Sainstifik: Meneroka Kecemerlangan Quran daripada Teropong sains*. Malaysia: PTS Millennia, 2011.
- Abu Dawud Sulaiman bin Hayyan al-Andalusi (Ibn Juljul). *Thabaqat al-Athibba' wa al-Hukama'*. Kairo: Mathba'ah al-Mahadi al-Ilmi al-Faransi li al-Atsar al-Syarqiyyah, 1955.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Abu Sulaiman, Abdul Hamid Ahmad. *Azmatu 'Aql al-Muslim*. Riyadh: Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islami, 1996.
- Adam, Charles C. *Islam and Modernism in Egypt*. New York: Russel, 1968.
- Ahmad, Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad, Khurshid. "The Nature of the Islamic Resurgence," dalam John L. Esposito (ed.) *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press, 1983.

- Ahmed, M. Basheer, Syed Ahsani, and Dilwanaz Siddiqui (eds.) *Muslim Contributions to World Civilizations*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Aidah, Asnil dan Irwan (ed.) *Tafsir Tarbawi*. Bandung: Citapustaka Media, 2013.
- Al-'Aqqad, Abbas Mahmud. *Al-Insan fi al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Islam, 1973.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1959.
- Al-Ahwani, Ahmad Fuad. *Al-Falsafah al-Islamiyyah*. Mesir: Maktabah Qahirah, t.t.
- Al-Ajluni, Ismail bin Muhammad. *Kasyf al-Khafa' wa Muzilu al-Ilbas*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1351H/1930M.
- Al-Amin, Muhammad Hasan. "Ishlah al-Fikr al-Islami" dalam 'Abd al-Jabbar al-Rifa'iy, *Manahij al-Tajdid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *Al-Ibanah an Usul al-Diyannah*. Madinah: Markaz Syu'un al-Da'wah, t.t.
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *Al-Luma' fi Radd 'ala Ahl al-Ziagh wa al-Bida'*. Mesir: Matba'ah Munir, 1955.
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *Maqalat al-Islamiyyah wa al-Ikhtilaf al-Mushallin*. Maktabah al-Daulah, t.t.
- Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. *Aims and Objectives of Islamic Education*. Jeddah: King Abd. Aziz University, 1979.
- Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1983.
- Al-Bagdadi, 'Abdul al-Qahir. *Al-Farq bayn al-Firaq*. Kairo: Maktabah Muhammad Shabih, t.t.
- Al-Baqillani, Al-Qadhi. *Kitab Tamhid al-Awa'il wa Talkhis al-Dala'il*. Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1987.
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayin. *Syu'ab al-Iman*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Farabi, Abu Nashr. *Ihsha' al-'Ulum*. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1931.
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi. *Ulum al-Tafsir*. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1977.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Islamization of Knowledge; General Principles and Workplan*. Washington DC: International Institute of Islamic Thought, 1402H/1982M.

- al-Ghurabi, Ali Mustafa. *Tarikh al-Firqah al-Islamiyah wa Nasy'at 'Ilm al-Kalam 'inda al-Muslimin*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ali, A. Mukti. *An Introduction to the Government of Aceh's Sultanate*. Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *Bunyat al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: Markaz al-Tsaqafi, 1991.
- Al-Jaziri, 'Abd Ar-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.t.
- Al-Kassani, Abd. Razaq. *Ishthilahat al-Shufiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1995.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1975.
- Al-Maliki, al-Syathibi Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1991.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Adab al-Dunya wa al-Dîn*. Surabaya: Bongkol Indah, t.t.
- Al-Mubarakfuri, Shafi al-Rahman. *Al-Rahiqul-Makhtum*. Madinah: Dar al-Wafa, 2004.
- Al-Mubarrid, Abu al-'Abbas Muhammad ibn Yazid. *al-Kamil li al-Mubarrid*. T.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Najjar, Zaghlul. *Pembuktian Sains dalam Sunah*. Bab 1. Terjemahan Zainal Abidin dan Syakirun Ni'am. Jakarta: AMZAH. 2006.
- Al-Najjar, Zaghlul. *Pembuktian Sains dalam Sunah*. Bab 2. Terjemahan M. Lukman. Jakarta: AMZAH. 2006.
- Al-Najjar, Zaghlul. *Pembuktian Sains dalam Sunah*. Bab 3. Terjemahan A. Zidni Ilham Faylasufa. Jakarta: AMZAH. 2007.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Damaskus: Al-Muniriyah, t.t.
- Al-Nawawi, Muiyiddin. *Shahih Muslim bi Syahr an-Nawawi*. Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1990.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Shalihun li Thathbiqi fi Kulli Zaman wa Makan*. Mesir: Mushtafa Babi al-Halaby, 1969.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islamic Awakening: Between Rejection and Extremism*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kayfa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Mesir: Dar al-Wafa', 1994.

- Al-Qardhawiy, Yusuf. *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*. Terjemahan Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Al-Qushairy, Imam. *Istilahat as-Shufiyah*. Kairo: t.p., 1957.
- Al-Saleh, Shubhi. *Ushul al-Hadis wa Mushthalahuh*. Beirut: Dar al-'Ilm, 1977.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Min Rawai' Hadharatina*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1997.
- Al-Sirjani, Raghīb. *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia: Jejak Kejayaan Peradaban Islam di Spanyol*. Terjemahan M. Ihsan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Syahrastani, Abdul Karim. *Nihayat Iqdam fi 'Ilm al-Islam*. Bagdad: Maktabah al-Musannah, 1964.
- Al-Syahrastani. *Al-Milal wa al-Nihal*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- Al-Syaibani, Omar Muhamamd al-Thoumy. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Al-Syawkani, Muhammad bin 'Ali. *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Maktabah Mushthafa al-Halabi, t.t.
- Al-Syuyuthi, Jalal al-Din. *Jami' al-Ahadis*. Mesir: t.p., t.t.
- Al-Thalib, Hisyam. *Dalil at-Tanmiyah al-Basyariyah*. Washington: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1994.
- Al-Thusi, Abu Nashr al-Sarraj. *Al-Luma'*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1980.
- Al-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah. *al-Jami' al-Shahih*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Al-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah. *Sunan at-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Zarqani, Abdul Azhim. *Manahil Al-Qur'an fi 'Ulum Al-Qur'an*. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Al-Zarqani, Muhammad. *Syarh al-Zarqani al-Muwaththa' al-Imam Malik*. Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991.
- Amal, Taufiq Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Terhadap Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1993.

- Amidjaja, Doddy T. and Sapi'ie. *Higher Education in Indonesia: From Random Growth towards a National System*. Jakarta: Mimeographed, 2007.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam: Bahts 'an al-Hayat al-'Aqliyyah fi Shadr al-Islam ila Akhir al-Dawlah al-Amawiyah*. Mesir: Dar al-Kutub, 1975.
- Amin, Mohd Fauzi Mohd., dkk (ed.) *Sunnah: Inspirasi, Inovasi, dan Transformasi*. Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2012.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amiruddin, Hasbi dan Usman Husen. *Integrasi Ilmu dan Agama*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Amroeni, dkk. *Laporan Penelitian Prospek Pengembangan Pemikiran Islam di IAIN SU Medan*. Medan: IAIN SU, 2008.
- Ansari, Muhammad Fazlur Rahman. *Islam dan Kristen dalam Dunia Modern*. Terjemahan Wardana. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Arberry, A. J. *Sufism*. London: Goerge Allen & Unwin Ltd., 1963.
- Arifin, Isep Zainal. *Bimbingan Penyuluhan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arkoun, Muhammad. *Rethinking Islam*. Westview Press, 1994.
- Asari, Hasan (ed.) *Hadis-Hadis Pendidikan: Sebuah Ikhtiar Penelusuran Akar-Akar Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Asari, Hasan. "Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia," dalam *Academica Islamica*, vol. I, no. 1 (January 2001).
- Asari, Hasan. *Esai-Esai Sejarah, Pendidikan dan Kehidupan*. Bandung: Citapustaka Media, 2009.
- Asari, Hasan. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Studi Atas Lembaga-Lembaga Pendidikan*. Edisi Revisi. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Asari, Hasan. *Nukilan Pemikiran Islam Klasik: Gagasan Pendidikan Al-Ghazali*. Medan: IAIN Press, 2012.
- Ashraf, Syed Ali. *New Horizons in Muslim Education*. Cambridge: Hodder and Stoughton, The Islamic Academy, 1985.
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). *Standar Kompetensi*, 2005.
- Atiyeh, George N. *Al-Kindi, Tokoh Filosof Muslim*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.
- Aystin, Harry. *The Philosophy of the Kalam*. London: Harvard University, 1976.
- Azra, Azyumardi. "Kontroversi Kemendikti-Ristek" *Kompas*, 26 February 2014.

- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bakar, Osman, Eric Winkel, and Airulamri Amran (eds.) *Contemporary Higher Education Needs in Muslim Countries: Defining the Role of Islam in 21st Century Higher Education*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia & IKIP International College, 2011.
- Bakar, Osman. *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb al-Din al-Syirazi*. Terjemahan Purwanto. Bandung: Mizan, 1997.
- Balkin, J. M. 'Interdisciplinarity as Colonization', *Washington and Lew Law Review*, 949, 1996.
- Baso, Ahmad. *NU Studies*. Surabaya: Erlangga, 2006.
- Becher, Tony and Trowler, Paul R. *Academic Tribe and Territories*. Buckingham: The Society for Research into Higher Education and Open University Press, 2001.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief*. New York: Harper & Row Publisher, 1976.
- Blau, Joseph L. *Modern Varieties of Judaism*. London: Columbia Press, 1966.
- Blocher, D. H. *Development Counseling*. New York: The Ronald Press, 1974.
- Brew, A. "Disciplinary and Interdisciplinary Affiliations of Experienced Researchers." *Higher Education*, 56: 4 (2008).
- Bridges, David. "The Disciplines and the Discipline of Educational Research", *Journal of Philosophy of Education*, 40: 2 (2006).
- Budiman, Budiman. *Pembunuhan yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah 1960-1962*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1962.
- Cantory, Louis J. "Modernism and Development", dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Castle, E. B. *Ancient Education and Today*. Harmondsworth: Penguin Books, 1969.

- Chapra, M. Umer. *Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform*. London: Islamic Foundation, 2010.
- Cleveland, Williem L. *A History of the Modern Middle East*. San Francisco: Wetsview Press, 1994.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*. Bandung: Mizan, 2003.
- Daulay, Haidar Putra & Nurgaya Pasa. *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Daulay, Haidar Putra. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Denison, E. F. *Trends in American Growth*. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Departemen Penerangan RI. *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984.
- Depdiknas. *Dasar Standarisasi Profesi Konseling*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Dirjen Dikti, 2004.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, 2006.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. *Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Djatnika, Rachmat, dkk. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Djaya, Tamar. *Pusaka Indonesia Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Drajat, Amroeni. *Suhrawardi, Kritik Falsafah Peripatetik*. Yogyakarta: LkiS, 2005.

- Drucker, Peter. *The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society*. New York: Harper and Row, 1969.
- Edwards, David A. dan Stephen Wilcox. *Unity, Disunity and Pluralism in Science*, 1980.
- Eliade, Mircea. *The Encyclopedia of Religion*. London: Crolrier MacMillan Publisher, 1987.
- Fakhry, Majid. *A Short Introduction to Islamic Philosophy, Theology and Mysticism*. Oxford: Oneworld, 1997.
- First World conference on Muslim Education*. Jakarta: International Islamic University Cooperation of Indonesia, t.t.
- Formichi, Chiara. Review of *Cosmopolitans and Heretics: New Muslim Intellectuals and the Study of Islam* by Carol Kersten.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of Prison*. London: Penguin, 1991.
- Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (ed.) *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi, Wacana Tentang Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009.
- Gardner, Howard. *Five Minds for the Future*. Boston: Harvard Business School Press, 2006.
- Gibb, H. A. R. dan J. H. L. M. Kraemers (eds.) *The Encyclopedia of Islam*. Leiden: E. J. Brill, 1961.
- Gibb, H. A. R. *Studies in the Civilization of Islam*. USA: Beacon Press, 1966.
- Gibson, Robert L. & Mitchell Mariane. *Intraduction to Counseling and Guidance*. Saddle River: New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2008.
- Gladding, T. Samuel. *Counseling A Comprehensive Profession*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1996.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Golding, Clinton. *Integrating the Disciplines: Successful Interdisciplinary Subjects*. Melbourne: Centre for the Study of Higher Education, the University of Melbourne, 2009.
- Goodlad, Sinclair. "What is an Academic Discipline?" in Roy Cox (ed.) *Cooperation and Choice in Higher Education*. London: University of London Teaching Methods Unit, 1979.
- Gunawan, Yusuf. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- HAMKA, *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

- Hanafi, Hasan. *Muqaddimah fi 'Ilmi al-Istighrab*. Beirut: Muassasah al-Jamiah al-Dirasat wa al-Nasyr al-Tauzi', 2000.
- Hanafi, Khalili al-Bamar. *Ajaran Tareqat*. Surabaya: Bintang Remaja, 1990.
- Harahap, Syahrin. *Al-Qur'an dan Sekularisasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Hasanain, Abd An-Na'im Muhammad. *Ad-Da'wah Ila Allah 'ala Bashirah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 1984.
- Hasanuddin, Chalidjah. *Al-Jam'iyatul Washliyah: Api Dalam Sekam*. Bandung: Pustaka, 2008.
- Hasib, Kholili. *Integrasi Ilmu dan Kebangkitan Tradisi Keilmuwan Islam*. dalam <http://inpasonline.com>.
- Hawari, Dadang. *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 1997
- Hazairin. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. DR. Hazairin*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1977.
- Hilmi, Musthafa. *Manhaj Ulama' al-Hadis wa al-Sunnah fi Ushul al-Din*. Kairo: Dar al- Kalam, 1982.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: The MacMillan Press, Ltd., 1974.
- Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.
- Hoodbhoy, Pervez. *Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas Antara Sains dan Ortodoksi Islam*. Terjemahan Sari Meutia. Jakarta: Mizan, 1996.
- Hornby, A. S. *Advanced Learners Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1973.
- Hourani, Albert. *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Hourani, George F. *Reason and Tradition in Islamic Ethics*. Cambridge University Press.
- <http://ariwahyudi.web.id/jumlah-penduduk-indonesia>
- <http://candrawiguna.com/presiden-indonesia-harus-seorang-muslim>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia
- <http://infoindonesiakita.com/2012/08/09>
- <http://infoindonesiakita.com/2012/08/09>
- <http://jokowipresiden2014.blogspot.com/2013/04>
- <http://jusufkalla.info/archives/2013/06/18>

<http://staiabogor.ac.id/berita-146-prospek-masa-depan-hukum-islam-di-indonesia.html>

<https://aweygaul.wordpress.com/2012/06/10/hukum-islam>

<https://www.youtube.com/watch?v=rOLFtqngsPQ>

Husein, Syed Sajjad & Syed Ali Ashraf. *Crisis in Muslim Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1987.

IAIN Sunan Kalijaga. *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003.

Ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilm wa-Fadlih wama Yanbaghi fi Riwayatih wa-Hamliah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Ibn 'Asyur, Muhammad at-Thahir. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunis: ad-Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, t.t.

Ibn Abdul Wahhab, Muhammad. *Majmu'at al-Tauhid*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, t.t.

Ibn al-Asir. *Jami' al-Ahadis min Ahadis al-Rasul*. Mesir: t.p., t.t.

Ibn Hazm al-Andalusi, Abu Muhammad 'Ali. *Risalat Maratib al-'Ulum*, dalam *Rasa'il Ibn Hazm al-Andalusi*, ed. Ihsan 'Abbas. Beirut: Al-Mu'assasah al-'Arabiyyah lil-Dirasat wal-Nasyr, 1987.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. *Al-Muqaddiman*. Beirut: Dar al-Jayl, t.t.

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. t.t.

Ibn Sina, Abu 'Ali al-Husayn. *Risalat Aqşam al-'Ulum al-'Aqliyyah*, dalam *Majmu'at al-Rasa'il*, ed. Muhyi al-Din al-Kurdi. Mesir: Kurdistan al-'Ilmiyyah, 1910.

Ikhwan al-Shafa'. *Rasa'il Ikhwan al-Shafa wa-Khillan al-Wafa'*, ed. Khayr al-Din al-Zarkali. Mesir: Al-Mathba'ah al-'Arabiyyah, 1928.

Ilhamuddin. "al-Wa`d waal-Wa`id," dalam *Majalah Beriga*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam, April-Juni 2006.

Ilhamuddin. "Anthropocentrisme dan Theocentrisme," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Fakultas Ushuluddin IAIN SU Medan, Januari-Pebruari-Maret, 1994.

Ilhamuddin. "Kontribusi Teologi Bagi Dinamika Kehidupan Sosial Umat Islam," dalam *Antologi Studi Islam*. Medan: PPS IAIN SU, 2004.

Ilhamuddin. "Kontribusi Teologi dalam Kehidupan Sosial Umat Islam," dalam *Madani, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, UMSU Medan. Vol. IV, No.3, Oktober 2003.

Ilhamuddin. "Persepsi Calon Mahasiswa Baru Terhadap IAIN Sumatera Utara," dalam *Intizar: Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat*. Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang, 2006.

- Ilhamuddin. "Reorientasi Relasi Teologi Islam dengan Amar ma'ruf Nahi Munkar," dalam *Miqot, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. XXVIII, No. 2, Juli 2004.
- Ilhamuddin. "Ukhwah Islamiyah dalam Perspektif Teologi Islam," dalam *Beriga*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam, Juli-September 2004.
- Ilhamuddin. *Pemikiran Kalam al-Baqillani; Studi Tentang Persamaan dan Perbedaannya dengan al-Asy'ari*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Imarah, Muhammad. *Al-Mu'tazilah wa Musykilah al-Hurriyah al-Insaniyah*. Beirut: al-Muassasah al-Arabiyah al-Dirasah wa al-Nasyr, 1972.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstructions of Religious Thought in Islam*. Lahore: Institute of Islamic Culture, 1990.
- Islamicweb.com "Islam, Knowledge, and Science".
- Jabali, Fuad dan Jamhari. *IAIN, Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012.
- Jar Allah, Zuhdi. *Al-Mu'tazilah*. Beirut: al-Ahliyah al-Nasyr wa al-Tauzi, 1974.
- Joesoef, Daoed. "Misi Perguruan Tinggi Kita", dalam *Kompas*, 18 February 2014.
- Kahhalah, 'Umar Ridha. *Dirasat Ijtima'iyah fi al-'Ushur al-Islamiyyah: al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim*. Damaskus: al-Mathba'ah al-Ta'awuniyyah, 1293/1973.
- Karcher, Wolfgang. *Higher Education in Indonesia: Challenges and Perspectives*. Berlin: mimeographed, 2001.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Jakarta: Arasy Mizan & UIN Jakarta Press, 2005.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Reaktulisasi Tradisi Ilmiah Islam*. Jakarta: Baitul Ihsan, 2006.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1982 Tentang Pembidangan Ilmu Agama Islam.
- Kersten, Carol. *Cosmopolitans and Heretics: New Muslim Intellectuals and the Study of Islam*. London: Hurst, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Mesir: Isa Babi al-Halabi, t.t.
- Khon, Abdul Majid. *Pemikiran Modern dalam Sunnah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2011.
- Klein, Julie Thompson. 'A Platform for a Shared Discourse for Interdisciplinary Education.' *Journal of Social Science Education*, 5: 2 (2006).
- Koentjara-ningrat (ed.) *The Social Sciences in Indonesia*. Jakarta: LIPI, 2005.
- Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Yustisa, 2009.

- Kuhn, Thomas S. *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- La Polette, M.C. *Creationisme, Science, and The Law-The Arkansas Case*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983.
- Lahmuddin. Kesan Latihan Pemodelan dan Bimbingan Ibu Bapa Ke Atas Pelajar Lelaki Agresif di Medan-Indonesia. *Tesis*. P. Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2002.
- Langgulong, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Husna, 1987.
- Lebar, Mohd. Salleh. *Bimbingan dan Kaunseling*. Selangor: Darul Ehsan, 1993.
- Lesmana, Jeanette Murad. *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Lintang, Mukhtar. *Hikmat al-Fatihah*. Kuala Lumpur: Pancaran Ilmu, 1978.
- Lombard, Maurice. *The Golden Age of Islam*. Terjemahan Joan Spencer. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1975.
- Lubis, Lahmuddin. *Konsep-konsep Dasar Bimbingan Konseling*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil (ed.) *Introductory Reading Islamic Studies*. Medan: IAIN Press, 1998.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UIN SU*. Medan: IAIN Press, 2014.
- Lyon, A. 'Interdisciplinarity: Giving Up Territory', dalam *College English*, 54 (6), 1992.
- Lyons, Jonathan. *The Great Bait Al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat*. Terjemahan Maufur. Jakarta: Noure Books, 2013.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1973.
- Madjid, Nurcholish (ed.) *Khazanah Intelektual Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1993.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Madkhul al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Qawmiyyah, 1964.
- Mahfuz, Syaikh 'Ali. *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruq al-Wa'z wa al-Khitabah*. Kairo: Maktabah al-Mahmudiyah at-Tijariyah, t.t.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fiqh ad-Da'wah ila Allah*. Mesir: Dar al-Wafa', 1990.
- Makdisi, George. "On the Origin and Development of the College in Islam and the Medieval West," dalam Khalil E. Semaan (ed.) *Islam and the Medieval West*. Albany: SUNY Press, 1980), h. 26-49.

- Makdisi, George. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- Malone, Thomas W., Robert J. Laubacher, & Tammy Johns. "The Big Idea: the Age of Hyperspecialization", dalam *Harvard Business Review*, July-August 2011.
- Marhaba, Muhammad Abd al-Rahman. *Al-Jami' fi Tarikh al-'Ulum 'ind al-Arab*. Beirut: Mansyurah 'Awidah, 1988.
- Masood, Ehsan. *Science and Islam: A History*. London: Icon Books Inc., 2009.
- Minhaji, Akh. & Kamaruzzaman. *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta: Aruzz, 2003.
- Moran, Joe. *Interdisciplinarity: The New Critical Idiom*. London: Routledge, 2002.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Bandung: Syarikat al-Ma'arif li Thab 'i wa al-Nasyr, t.t.
- Muthahhari, Murtadha. *Al-Adl al-Ilahi*, Terjemahan Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Khaqani. Qum, Iran: Mathba'ah al-Khayyan, 1981.
- Nakosteen, Mehdi. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat, Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nakosteen, Mehdi. *Konstrubusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*. Terjemahan Joko S. Kahar dan Supriyanto Abdullah. Jakarta: Rislah Gusti, 1996.
- Nashabe, Hisham. *Muslim Educational Institutions*. Beirut: Librairie du Liban, 1989.
- Nasr, Seyyed Hossein. *History of Islamic Philosophy*. London and New York: Routledge, 1996.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1987.
- Nasution, Harun dan Azyumardi Azra. *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1978.
- Nasution, Harun. "Sekitar Masalah Modernisme atau Pembaharuan Dalam Islam," dalam *Studia Islamika*, no. 5 tahun 1977.
- Nasution, Harun. *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Nasution, Hasan Bakti. *Filsafat Umum*. Bandung: Citapustaka Media, 2005.
- Nasution, Hasan Bakti. *Hikmah Muta'aliyah: Pengantar Filsafat Islam Kontemporer*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars, 1983.
- Natsir, M. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nicolescu, Basarab. *Manifesto of Transdisciplinarity*. New York: State University of New York, 2002.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Nurihsan, Achmad Juntika & Sudianto, Akur. *Manajemen Bimbingan & Konseling di SMP*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- PP. Muhammadiyah. *Tanfiz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 44*. Jakarta, 2000.
- Panji Masyarakat*, No. 682, 1-10 Mei, 1991.
- Patterson, C. H. *Counseling and Psychotherapy, Theory and Practice*. New York: Harper & Row, 1959.
- Patterson, C. H. *Theories of Counseling and Psychotherapy*. New York: Harper & Row Publication, 1966.
- Pidato Ilmiah Penerimaan Doktor Honoris Causa dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tanggal 3 Mei, 2007.
- PL, M. Noor Sulaiman. *Hadis-Hadis Pilihan: Kajian Tekstual dan Kontekstual (d disesuaikan Silabus Perguruan Tinggi Agama Islam)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.
- Prayitno & Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Prayitno. *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2012.
- Prayitno. *Pelayanan Komprehensif Pendidikan Pada Satuan-satuan Pendidikan*. Disampaikan pada sminar Nasional Bimbingan dan Konseling yang

- diselenggarakan oleh PB ABKIN dan PD ABKIN Jawa Tengah, tanggal 13 Maret 2011.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagama Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Purwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Beirut: Dar as-Syuruq, 1982.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformational of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Marifah, 1993.
- Rogers, C. R. *Counseling and Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin, Inc, 1942.
- Rosenthal, Franz. *Etika Kesarjanaan Muslim*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sa'id, Bustami Muhammad. *Mafhum fi Tajdid al-Din*. Kuwait: Dar al-Da'wah, 1984.
- Saifuddin, A.M. *Islamisasi Sains dan Kampus*. Jakarta: PPA Consultants, 2010.
- Saleh, K.H. Qamaruddin, dkk. *Asbab al-Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Saliba, George. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. Cambridge: The MIT Press, 2007.
- Sangaji, Hatib Abd Kadir Olong. "Geliat Dugem Sebagai Ritual Baru Pada Tubuh Kaum Urban (Studi Kasus para Clubbers Di Hugo's Café)" dalam *Jurnal Balairung*, Ed. 40/XX Tahun 2006.
- Saqib, Ghulam Nabi. *Modernization of Muslim Education in Egypt, Pakistan and Turkey: A Comparative Study*. Lahore: Islamic Book Service, 1977.
- Sayili, Aydin Mehmed. "The Institutions of Learning in the Moslem World." Disertasi, Harvard University, 1941.
- Second World Conference on Muslim Education*, Recommendation, 1980.
- Shaffer, Mark, et al. *Hyperspecialization White Paper*. INCPAS Board Task Force, Indiana CPA Society, 2012.
- Shahih Muslim bin Syarh al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Turas al-'Arabi, 1984.
- Sharom Ahmat and Sharon Siddique. *Muslim Society, Higher Education and Development in Southeast Asia*. Singapore; Institute of Southeast Asia Studies, 2002.

- Shertzer, B. & S. C. Stone. *Fundamentals of Counseling*. Boston: Houghton Mifflin, 1974.
- Shihab, M. Quraish. "Reaktualisasi dan Dialog Antar Agama-Agama" dalam *Meretas Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Mawdu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan: Bandung, 1996.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Smith, Keith. "What is Knowledge Economy? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge". *Discussion Papers*. Maastricht: Institute of New Technology, United Nations University, 2002.
- Soedjatmoko. *Manusia dan Pergolakan Dunia: Tantangan Terhadap Universitas*. Jakarta: Kelompok Kompas Gramedia, 2009.
- Sou'yb, Joesoef. *Agama-agama Besar di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.
- Stanton, Carles Michael. *Pendidikan Tinggi dalam Islam*. Terjemahan Affandi dan Hasan Asari. Jakarta: Logos Publishing House, 1994.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1974.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*. Jakarta: 1996.
- Suhendro, Bambang. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005*. Jakarta: Dirjen Dikti, 1996.
- Sumardi, Mulyanto (ed.) *Bunga Rampai Pemikiran Tentang Madrasah dan Pesantren*. Jakarta: Pustaka Biru, 1980.
- Suprayogo, Imam. *Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi: Konsep Pendidikan Tinggi yang Dikembangkan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang*. Malang: UIN Malang, 2005.
- Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli. *Tafsir Sya'rawi*. Terjemahan Safir. Duta Azhar, 2006.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tarn, W. W. *Alexander the Great*. Cambridge: The Cambridge University Press, 1951.
- Team Penyunting. *Setengah Abad Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1994.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara dalam politik ORBA*. Jakarta: Gema Insani Press, 1976.

- Thompson, Merritt M. *The History of Education*. New York: Barnes & Noble. Inc., 1951.
- Tibawi, A.L. *Islamic Education: Its Tradition and Modernization into the Arab National Systems*. London: Luzac, 1979.
- Trimingham, J. Spencer. *The Sufi Orders in Islam*. London: Oxford University Press, 2000.
- Tunq, R. & Von Glinow. "Incorporating International Dimensions in Management Theory Building" dalam *Academy of Management Review*, Vol. 16: 2.
- Turner, Bryan S. "Discipline", dalam *Theory, Culture and Society*, 23 (2006).
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia UUD 1945 dan Amandemennya Dilengkapi Susunan Kabinet Indonesia Bersatu*. Solo: Sendang Ilmu, t.t.
- Wahid, Abdurrahman. "Pribumisasi Islam," dalam Muntaha Ashari, Abd. Mun`im Saleh (ed.), *Islam Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M, 1989.
- Wallace-Murphy, Tim. *What Islam Did for Us: Understanding Islam's Contribution to Western Civilization*. London: Watkins Publishing, 2006.
- Walzer, Richard. *Greek Into Arabic: Essays on Islamic Philosophy*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962.
- Watt, William Montgomery. *The Influence of Islam on Medieval Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987.
- Webster's New World Dictionary of The American Language*, 1980.
- Weiner, Myron. *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980.
- White, Andrew Dickson. *A History of The Warfare of Science With Theology*. Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1978.
- Winkel, W. S. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia, 1974.
- Wocher, Guy. *Talcott Parsons and American Sociology*. New York: 1975.
- Wolf, Dieter. *The Unity of Knowledge: An Interdisciplinary Project* [www.dieterwolf.net/pdf/Unity_of_Knowledge.1.pdf].
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Kaedah-Kaedah Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT Almaarif, 1986.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979.
- Yusuf, Syamsu & Nurihsan, A. Juntika. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

INDEKS

A

Abdurrahman Wahid, 101, 105, 164
Abul Kalam Azad, 164
Aceh, 98, 230, 259, 260
Adlani (Drs. H. A. Nazri), 47, 51
Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA),
218, 220, 231
akal, 105, 111, 161, 171, 172, 179,
180, 181, 190, 225, 229
Aligarh Muslim University, 226, 227
Amerika Serikat, 40, 71, 72, 74, 76,
77, 78, 79, 80, 90
AMS (*Algemeene Middlbare School*),
215, 216, 241
Andalusia, 158, 253
Arab, 10, 20, 37, 70, 94, 112, 113, 123,
146, 153, 158, 162, 168, 171,
173, 175, 176, 183, 198, 217,
220, 224, 225, 228, 232, 234
Aristoteles, 66, 114, 150, 154
ASEAN, 15, 41, 106, 204
Ashhab al-Shuffah, 26
astronomi, 22, 113, 151, 225, 238,
255, 260, 261
at-Tafsir al-Munir (Al-Zuhaili), 31
al-Attas (Muhammad Naquib), 21
Al-Azhar Kairo, 218, 219, 253

B

bahasa: Arab, 70, 94, 112, 123, 153,
162, 175, 224, 228, 259; Indonesia,

29, 160, 176; Inggris, 39, 123,
175, 176; Persia, 175

Bani Umayyah, 144, 148, 149, 253
Bank Muamalat, 49
Barat: dunia, 22, 79, 121, 122, 163, 175;
kebudayaan, 21, 159, 168; peradaban,
144, 145, 146, 151, 170
bayani, 10
Bayt al-Hikmah, 149, 236, 251, 253,
258
Belanda, 117, 215, 216, 217, 218,
241, 242, 243
Bellah (Robert N.), 185
Bidayah al-Mujtahid (Ibn Rusyd), 122
bimaristan, 251, 253
al-Biruni, 152
Budi Utomo, 216
burhani, 10

C

Capita Selecta (Natsir), 217
cendekiawan, 107, 150, 152, 154,
210, 218
Cina, 145, 147, 169, 216, 250, 252,
253

D

Damaskus, 152
Darul Dakwah wal-Irsyad (DDI), 35
*Dar-ul Ulum-u Hikemiye ve Mekteb-i
Tibbiye-i Sahane*, 226

- dayah, 241
 dekan, 48, 51, 52, 206, 229
 demokrasi, 35, 99, 100
 Departemen/Kementerian Agama,
 41, 51, 52, 55, 56, 120, 220,
 243, 247
 Departemen/Kementerian Pendidikan
 dan Kebudayaan, 78, 80, 81, 82,
 120, 243
 Dewan Masjid Indonesia, 100
 dikotomi ilmu, 21, 33, 38, 65, 67,
 69, 70, 151, 155, 225, 226, 227,
 233, 240, 243, 244, 245, 246,
 248, 257
- E**
 eksperimen, 35, 246, 247, 249, 258
 Eropa, 35, 41, 77, 125, 139, 151,
 158, 192, 215, 216, 224, 226,
 235, 240, 258
- F**
 fakultas, *passim*
 al-Farabi (Abu Nasr), 147, 155
fardu ain, 20, 21, 22, 23
fardu kifayah, 20, 21, 22, 23, 32
*Fashl al-Maqal fima Baina al-Syari'ah
 wa al-Hikmah min al-Ittishal* (Ibn
 Rusyd), 122
 fikih, usul fikih, 6, 21, 22, 23, 28,
 29, 33, 60, 61, 63, 68, 113, 122,
 128, 130, 151, 153, 166, 173,
 191, 225, 226, 228, 229
 Filipina, 80
Filsafat Pertama (Al-Kindi), 154
 filsafat, 21, 33, 62, 66, 70, 113, 121,
 128, 146, 147, 149, 150, 153,
 154, 155, 156, 157, 168, 175,
 182, 224, 243, 245, 247, 251,
 252, 257, 260
- Fiqh al-Da'wah Ila Allah* (Abdul Halim
 Mahmud), 198
 fisika, 21, 22, 113, 121, 122, 126,
 141, 153, 154, 225, 244, 261
- G**
 al-Gazali (Abu Hamid), 20, 21, 22,
 23, 155
 Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!),
 53
 globalisasi, 86, 111, 112, 114, 115,
 116, 204, 206
- H**
 Habibie (B. J.), 101
 hadis, *passim*
 haji, 22, 98, 101, 102, 189
 Harun al-Rasyid (Abbasiyah), 121,
 224, 236
 Harun Nasution, 164, 226, 229
 Hasan Hanafi, 13, 144, 164
 Hasbi As-Shiddieqy, 262
 hikmah, 20, 113, 121, 122, 200
HIS (Hollandsch Inlandsche School),
 215, 241
History of the Arabs (Hitti), 113
 Hukum Islam, 60, 91, 92, 93, 97,
 98, 99, 104, 107, 108, 114, 167,
 168, 173, 188, 244
 Hulagu Khan, 167
 humaniora, 43, 44, 113, 120, 126,
 141, 174, 176, 224, 230, 231,
 245
- I**
 IAIN (Institut Agama Islam Negeri),
passim
 Ibn Bajjah, 154
 Ibn Khaldun, 39

- Ibn Miskawaih, 21
 Ibn Rusyd, 21, 122, 154
 Ibn Sina (Abu 'Ali al-Husain, w. 1037M),
 21, 121, 152, 755
 Ibn Thufail, 22
 Ibn Nafis (Alauddin Abul 'Ala, w.
 1288M), 25
 Ibn Taimiyah, 168
 ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim
 Indonesia), 49, 50
Ihya' 'Ulumiddin (Al-Gazali), 21
 ijtihad, 147, 163, 164, 165, 166,
 167, 168, 169, 170, 171, 199,
 201, 229, 248, 249, 255, 258
 IKIM (Institut Kepahaman Islam
 Malaysia), 49
 Ilmu hukum, 128, 173, 188
 ilmu sosial, 22, 43, 44, 48, 70, 120,
 174, 225, 230, 231
 ilmu, ilmu pengetahuan, 20, 21, 22,
 23, 24, 25, 32, 38, 43, 58, 64,
 67, 112, 113, 121, 122, 123,
 129, 131, 135, 147, 150, 151,
 158, 162, 165, 166, 168, 169,
 175, 179, 187, 188, 208, 209,
 219, 224, 225, 227, 229, 236,
 237, 238, 239, 240, 243, 245,
 248, 251, 256, 257, 261
 ilmuwan, 21, 57, 66, 67, 80, 121,
 122, 131, 144, 148, 149, 150,
 151, 152, 190, 209, 236, 238,
 239, 257
 IMS (*Islamische Midilbare School*),
 217
 India, 80, 145, 152, 164, 171, 215,
 226, 231, 250, 253
 Inggris (bahasa),
 integrasi ilmu, 16, 22, 26, 29, 33,
 127, 128, 130, 142, 227, 228,
 229, 230, 231, 245, 248,
 intelektual, 21, 22, 26, 35, 38, 42, 44,
 67, 132, 133, 135, 137, 143, 149,
 152, 154, 155, 156, 166, 167,
 229, 232, 238, 239, 240, 257
 International Islamic University Malaysia
 (IIUM), 48, 49, 50
'irfani, 10
 Al-Irsyad, 216
- J**
 Jakarta, *passim*
 Jamaluddin al-Afghani, 168
 Al-Jam'iyatul Washliyah, 35, 36, 201,
 222, 223
 Jami'at Khair, 216
 Joko Widodo, 99, 101, 102, 103
 jurusan, 49, 81, 82, 85, 126, 141,
 142, 143, 163, 205, 207, 210,
 211, 212, 219, 220, 223, 244
 Jusuf Kalla, 53, 99, 100, 103
- K**
 kalam (ilmu), 22, 61, 63, 68, 113,
 122, 125, 127, 128, 129, 130,
 132, 133, 135, 137, 138, 139,
 143, 173, 226
 kebudayaan, 21, 29, 50, 78, 80, 82,
 118, 121, 158, 159, 168, 173,
 239, 256, 257
 kedokteran, 8, 20, 21, 22, 23, 25,
 48, 63, 66, 121, 126, 129, 141,
 148, 153, 216, 224, 225, 226,
 236, 238, 251, 255
 Kemal Ataturk, 168
 Kementerian/Departemen Agama,
 41, 51, 52, 55, 56, 120, 220,
 243, 247
 Kementerian/Departemen Pendidikan
 dan Kebudayaan, 78, 80, 81, 82,
 120, 243

- khanqah, 155, 236, 251, 253
 al-Khwarizmi, 155
 Ki Hajar Dewantara, 3
 kimia, 22, 113, 126, 141, 148, 225, 238, 253
 al-Kindi, 66, 154, 155
 kolonialisme, 168, 233, 239, 240
 kurikulum, 21, 34, 38, 39, 42, 44, 50, 51, 75, 82, 83, 85, 123, 124, 127, 128, 133, 142, 152, 153, 154, 156, 207, 209, 218, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 247, 251, 252, 253, 257
 kuttab, 155, 234, 235, 256
- L**
 laboratorium, 155, 211
 linguistik, 21, 244
 LIPI (Lembaga Pengetasahuan Indonesia), 36
- M**
 Madinah, 151, 195, 250, 251, 252
 Madrasah al-Mustanshiriyah, 261, 262
 Madrasah Nizhamiyah, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
 madrasah, *passim*
 mahasiswa, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 56, 119, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 143, 152, 158, 175, 205, 206, 207, 209, 210, 216, 219, 220, 246, 247
 Mahathir Muhammad, 180
 Mahmud Yunus, 217
 Makkah, 195, 216, 227, 250, 251
 al-Makmun (khalifah Abbasiyah), 150, 155, 253
 Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT), 36
 Malaysia, 48, 49, 71, 80, 81, 83, 151, 152, 176, 227, 231
 manuskrip, 155
 masjid, 26, 100, 102, 155, 177, 235, 250, 251, 158
 Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), 218
 matematika, 39, 113, 121, 151, 153, 154, 225, 229, 238, 244, 251, 252, 160, 261
 Matla'ul Anwar, 35
 Megawati Sukarnoputri, 101
 Mesir, 121, 151, 152, 164, 168, 226, 253, 254, 260
 meunasah, 259
 MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), 217
mihnah, 167
 misi, 43, 59, 126, 127, 141, 190, 192, 203, 208, 233, 246, 247, 248
 modern, modernitas, modernisme, *passim*
 Mohammed Arkoun, 14
 Mohammedan Anglo Oriental College (M.A.O.C.), 226
 moral, 10, 42, 53, 72, 77, 167, 171, 172, 173, 179, 190, 204
 Muhammad Abduh, 164, 168
 Muhammad Ali Pasya, 151
 Muhammad Iqbal, 13, 168
 Muhammad saw., 16, 17, 23, 24, 25, 30, 33, 61, 62, 66, 79, 95, 111, 112, 136, 163, 165, 177, 190, 228, 232, 233, 234, 237
 Muhammadiyah, 4, 35, 36, 39, 94, 127, 199, 216, 217, 218, 260

- MUI (Majelis Ulama Indonesia), 50
MULO (*Meer Uitgebred Lager Onderwijs*), 215, 241
- N**
Nasr (Seyyed Hussein), 164
Nizham al-Mulk, 253, 254, 255, 256
NU (Nahdlatul Ulama), 6, 92, 94, 103
- O**
Nurcholish Madjid, 6, 105, 164, 184
observasi, 35, 258
observatorium, 155, 236, 251, 253, 255
Orde Baru, 92, 93, 94, 96
Orde Lama, 93, 94
- P**
pakar, 21, 49, 71, 77, 83, 259
Pakistan, 168
Partai Islam Indonesia (PII), 216
pemikir, 47, 66, 68, 79, 93, 146, 147, 149, 151, 152, 155, 156, 164, 165, 169, 171, 172, 186, 224
pendidikan agama, 35, 41, 127, 220, 244
pendidikan akhlak, 123, 230
pendidikan dasar, 81, 153, 234
pendidikan menengah, 78, 81
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 34, 38, 45, 55, 56, 119, 124, 128, 145, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 224, 231, 232, 233, 242, 250, 251, 253, 254, 255, 261
Pendidikan Tinggi, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 55, 56, 116, 119, 124, 128, 145, 154, 204, 209, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 224, 231, 232, 242, 250, 21, 253, 254, 255, 261
- pendidikan umum, 41, 127, 226
pendidikan, *passim*
penelitian, 21, 43, 44, 45, 73, 107, 191, 201, 206, 207, 209, 210, 211
penerjemahan, 140, 149, 151, 155, 224, 226, 236, 240
peradaban Barat, 144, 145, 146, 151, 170
peradaban Islam, 21, 25, 48, 137, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 175, 228, 232, 233, 235, 236, 239, 240
peradaban kuna, 236
peradaban modern, 122, 181
peradaban Persia, 145
peradaban Yunani, 146, 148, 150, 154
perguruan tinggi swasta, 37, 39
perpustakaan, 148, 155, 236, 253, 258
Persatuan Islam (Persis), 35
Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), 216
Persatuan Umat Islam (PUI), 35
Persia, 146, 147, 148, 150, 175, 240, 251, 254
pertanian, 63, 66, 151, 215, 226
pesantren, 3, 4, 9, 35, 36, 217, 241, 242, 260, 261
politik, 38, 63, 64, 66, 68, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 104, 105, 116, 129, 131, 132, 135, 137, 148, 149, 150, 151, 159,

- 173, 175, 185, 199, 215, 216, 225, 229, 239, 240, 242, 255, 256, 257
- program studi, 37, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 77, 120, 124, 126, 141, 142, 143, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 244, 246
- psikologi, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 135, 136, 137, 225
- puasa, 22, 24, 189
- Q**
- al-Qanun fi al-Thibb* (Ibn Sina), 25, 121
- Al-Qur'an, *passim*
- R**
- Rahman (Fazlur), 151, 152, 171, 225
- al-Razi (Abu Bakar Muhammad bin Zakariya), 155
- rektor, 46, 47, 48, 19, 50, 206, 208, 219, 246, 258
- Republika* (harian), 50
- Rethinking Islam* (Arkoun), 161
- revivalisme, 171
- Risalah al-Nafs* (Ibn Sina), 121
- rumah sakit, 77, 81, 155, 236
- S**
- sains, 8, 21, 32, 35, 43, 44, 48, 64, 66, 70, 113, 116, 118, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 137, 138, 139, 224, 225, 226, 227, 230, 235, 236, 237, 247, 248
- Saudi Arabia, 168
- Sayyed Ahmad Khan, 164
- sejarah, *passim*
- sekularisasi, 69, 122, 158, 162, 179, 190
- seni, 43, 119, 209, 229, 247
- Sisilia, 158
- Snouck Hurgronje, 105
- Soeharto, 6, 101
- Soekarno, 101, 218
- sosiologi, 63, 68, 173, 185, 225
- STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), 38, 41, 42, 44, 45, 219, 220, 221, 229, 231, 261
- Sultan Mahmud II, 226, 227
- sunnah, 25, 26, 32, 35, 41, 60, 104, 117, 153, 168, 177, 198, 200, 202, 228, 232, 237, 238
- surau, 241, 261
- Susilo Bambang Yudhoyono, 53, 101
- syariat, 31, 60, 93, 98, 116, 153, 167, 221
- al-Syifa'* (Ibn Sina), 79, 121, 154
- Syria, 152, 254
- T**
- Tafsir al-Manar* (Rasyid Ridha), 31
- tafsir, 7, 23, 31, 32, 59, 60, 68, 130, 166, 191, 228, 229
- Taman Siswa, 3
- tasawuf, 21, 62, 63, 68, 113, 130, 166, 173, 191, 229, 236, 257
- tauhid, 21, 23, 33, 61, 63, 119, 132, 133, 146, 160, 177, 178, 197, 218, 229
- teknologi, 8, 21, 22, 35, 41, 43, 44, 64, 66, 71, 77, 112, 115, 116, 118, 119, 125, 126, 127, 129, 131, 137, 139, 151, 162, 164, 165, 166, 179, 181, 206, 208, 209, 210, 219, 236, 237, 261
- teori, 29, 35, 60, 65, 66, 70, 73,

74, 75, 79, 85, 103, 104, 105,
106, 108, 112, 179, 238, 239
The New World of Islam (Stoddard),
177

Timur Tengah, 120, 244

Turki, 152, 168, 175, 226

U

UIN (Universitas Islam Negeri), *passim*
ukhuwah, 164

ulama, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
25, 26, 32, 33, 35, 94, 103, 104,
107, 113, 126, 131, 152, 163,
165, 167, 160, 170, 181, 187,
250, 252, 253, 254, 256, 257,
259, 261

ulu al-albab, 152

al-'ulum al-'aqliyyah, 251

al-'ulum al-syar'iyah, 251

Umar bin al-Khattab, 105, 148, 252

Umar ibn Abd Aziz (Umayyah), 22

umat Islam, *passim*

Universitas Bologna, 257, 258

Universitas Islam, 5, 6, 15, 39, 46,
56, 119, 159, 191, 192, 193,
203, 205, 218, 219, 224, 227,
228, 229, 230, 231, 233, 244,
246, 261

Universitas Paris, 257, 258

UU Perbankan Syariah, 98

UU Wakaf, 98

UU Zakat dan Haji, 98

UUD 1945, 92, 93, 105, 106, 221,
222

V

visi, 43, 47, 126, 127, 141, 157,
165, 167, 179, 182, 188, 202,
207, 208, 233, 246, 247

W

World Class University, 203

Y

Yunani, 58, 66, 121, 146, 148, 150,
154, 156, 175, 181, 184, 224,
236, 237, 238, 240, 250, 253

Z

zakat, 22, 29, 54, 98

zawiyah, 236, 251, 253

